

Radikalisme Sosial, Terorisme,
dan Konflik Internasional

Dedy Tabrani, Herdi Sahrasad, Al Chaidar

Radikalisme Sosial, Terorisme, dan Konflik Internasional

Jakarta, 2024

Judul buku:

Radikalisme Sosial, Terorisme, dan Konflik Internasional

Penulis:

Dedy Tabrani, Herdi Sahrasad, Al Chaidar

Editor:

Asrori

Disain Sampul dan Layout:

Achya dan Zulfikar Salahuddin

ISBN: 978-1-304-74345-9

Penerbit:

Freedom Foundation dan Unimal Press

Cetakan Pertama, Februari 2024

PENGANTAR

Kami bertiga selaku penulis, bersyukur kepada Gusti Allah SWT bahwa buku ini bisa selesai pada waktunya. Artikel dan esai kami dalam buku sahaja ini sebelumnya berserak di berbagai media online dan koran cetak maupun jurnal, yang kalau tidak dibukukan sangat mungkin lenyap atau terabaikan. Ketika buku ini diedit dan diproses, Al Chaidar masih di Amsterdam dan KITLV Leiden, namun komunikasi-kolaborasi jalan terus.

Terimakasih untuk editor dan tim publisher buku ini, karena ketekunan mereka membantu kami dalam memperbaiki buku ini sehingga bisa terbit dan barangkali bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat yang berminat.

Tulisan-tulisan di buku ini memuat berbagai persoalan social seperti radikalisme dan terorisme, isu politik global dan ekonomi pembangunan, yang mendorong penulis untuk mengkaji dan menelitinya dalam batas kesanggupan yang ada.

Buku sahaja ini merupakan risalah, esai dan artikel kami yang sudah dipublikasikan surat kabar, jurnal dan media online atau dipresentasikan dalam berbagai seminar dan diskusi di dalam dan luar negeri, di perguruan tinggi, LSM dan lembaga semacamnya.

Penulis memberi apresiasi atas kerja keras editor buku ini, yang telah menyelamatkan berbagai tulisan kami yang tercecer dan tak terdokumentasikan dengan baik, sampai akhirnya dapat diterbitkan.

Ijinkanlah kami dedikasikan buku ini kepada kaum underdog dan anak-anak bangsa yang marginal, miskin dan sengsara, kepada merekalah utang budi kami tak terbayarkan.

Karena semangat, kajian, diskusi dan riset bersama kami bertiga, maka buku ini selesai.

Semoga bisa mendorong para akademisi, peneliti, mahasiswa dan peminat studi sosial-humaniora untuk memperdalam kajian mereka yang berkaitan dengan isu sosial, agama, kultur, negara dan masyarakat.

Wassalam

Jakarta, Awal Februari 2023

DAFTAR ISI

PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I ISU DANA, RADIKALISME, DAN TERORISME... 1	
BAB II BEN ANDERSON, PERTAHANAN SOSIAL- KULTURAL DAN PERSOALAN PAPUA	9
Bergerak Cepat	12
Asih-Asah-Asuh	16
BAB III BOM THAMRIN 14 JANUARI 2016.....	21
Perhatian Dunia.....	25
BAB IV ISLAM, DEMOKRASI, KAPITALISME, DAN NEGARA: SEBUAH REFLEKSI.....	27
Pendahuluan	28
Negara Bangsa Modern dan Islam Toleran.....	32
Islamisme.....	38
Islamisme dan Radikalisme	41
Islamisme Radikal vs Kapitalisme Global	47
Islamisme dan Modernisme	48
BAB IV KEPOLISIAN: DILEMA DALAM KONFLIK REMPANG DAN SOAL POLISI RW	61
Tugas dan Fungsi Polisi	62
Dilema Kepolisian.....	64
Soal Polisi RW: Tak Terkait dengan Pemilu 2024?65	
BAB V EKONOMI-POLITIK JOKOWINOMICS DAN KEMUNDURAN DEMOKRASI	69

Tidak Berpihak ke Lapis Bawah	70
Mengecewakan	76
Jokowi, Reformasi Dikorupsi dan Kemunduran Demokrasi	78
Penting Dipahami	81
BAB VII AMERIKA SERIKAT DAN ISU KEBANGKITAN ASIA	85
China-India dan Amerika	89
Asia dan Faktor China	92
Xi Jinping dan Obama	95
Pengaruh Kemunduran Ekonomi AS	99
China-India dan Amerika	104
Berbagai Masalah	106
Surutnya Pamor AS, Naiknya China di Asia	109
Bisnis Senjata di Asia Makin Marak	113
Dinamika China di Asia	116
Gerak Ekonomi China	118
Program Repelita RRC	122
China dan Kepemimpinannya di Asia	126
BAB VI PERGOLAKAN MESIR: DARI REVOLUSI KE TRANSISI DEMOKRASI	131
Dinamika Mesir	135
Ihwal Ikhwanul Muslimin	139
Sumber Pergolakan	141
Transisi dan Pahit Getirnya	145
Kemunduran AS di Timur Tengah	148

	Dilema AS di Timur Tengah Pasca Arab Spring	152
	Kesimpulan	154
BAB VII	RIVALITAS IRAN-SAUDI-TURKI DAN KEKHAWATIRAN IDEOLOGIS KAUM WAHABI INDONESIA TERHADAP KESEPAKATAN NUKLIR IRAN-AS	157
	Ketegangan Politik Saudi dan Iran.....	163
	Implikasi Ideologis.....	176
	Iran dan Turki.....	181
	Penutup.....	185
BAB IX	REVOLUSI MESIR: BERKACA PADA INDONESIA?.....	187
BAB X	PREDIKSI SOAL KEPUNAHAN NEGARA ISRAEL.....	221
	BIBLIOGRAFI.....	247
	BIODATA PENULIS.....	253

BAB I

ISU DANA, RADIKALISME, DAN TERORISME

Meluasnya radikalisme, intoleransi dan terorisme di berbagai belahan dunia, meminjam studi Robert Reilly (*The Closing of the Muslim Mind*, 2010), untuk sebagian besar terjadi karena peradaban Islam mengalami krisis moral dan intelektual pada abad kesembilan hingga kesebelas, ketika membelakangi filsafat/sains dan berlindung pada dogma agama. Ketertutupan pikiran kaum Muslim itu berlangsung sampai hari ini sebagai dampak dari tindakan bunuh diri kultural dan intelektual yang terjadi delapan abad yang lalu.

Secara peradaban, demikian Robert Reilly, kaum Muslim juga mengalami krisis dan marginalisasi akibat globalisme, kolonialisme dan imperialisme modern yang menggunakan sains dan teknologi makin canggih.

Dalam kaitan ini, kekhawatiran pemerintah mengenai meluasnya radikalisme, intoleransi, dan terorisme di Indonesia, tercermin dari alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Jenderal (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama. Hal itu berkaitan dengan radikalisme dan intoleransi yang memerlukan langkah dan kebijakan Kemenag yang betul-betul efektif.

Tentu saja, meluasnya radikalisme, intoleransi dan terorisme itu tidaklah terlepas dari penyebaran paham/ideologi garis keras dan sokongan dana yang ditebarkan oleh pihak-pihak tertentu, yang acapkali tidak bertanggung jawab. Tulisan ini memfokuskan pada isu pendanaan, radikalisme/intoleransi dan terorisme.

Meluasnya radikalisme, intoleransi, dan terorisme itu tidak terlepas dari penyebaran paham/ideologi garis keras dan sokongan dana dari pihak-pihak tertentu. Satu per satu senjata yang akan dibelinya dari Marod, anggota Front Pembebasan Islam Moro (MILF), Filipina, dicoba. Hasil dilaporkan ke Rois alias Iwan Darmawan, terpidana bom Kuningan, Jakarta, 2004 yang kini mendekam di Lapas Nusakambangan.

Dalam pekan kedua Oktober, Densus 88 Antiteror Polri mengungkap jaringan terorisme di sejumlah daerah dan menangkap 40 terduga anggota kelompok teroris. Dari pengecekan itu, Rois menyetujui 18 senjata laras panjang dan 5 senjata laras pendek. Total biaya 30.000 dollar AS (kurs sekarang setara Rp 400 juta), dikirim Rois menggunakan Western Union. Beberapa senjata laras pendek digunakan dalam serangan teror di Thamrin, Jakarta Pusat, Februari 2016.

Serangan itu menewaskan 8 orang, termasuk 4 pelaku teror dan melukai 24 orang lainnya. Dana 30.000 dollar AS itu belum termasuk 25.000 dollar AS (kurs sekarang setara Rp 350 juta). April 2016 dana itu oleh Suryadi dibelikan mobil, 12 senjata M-16, dan bahan peledak ke Isnilon Hapilon. Senjata terakhir untuk pelatihan di Filipina. Sisa biaya untuk akomodasi dan transportasi, termasuk Suryadi dan istri di Filipina. Perjalanan pertama menelan biaya Rp 30 juta. Padahal, Suryadi bolak-balik ke Filipina. Ditambah lagi biaya 8 orang Indonesia yang mengikuti pelatihan.

Dapat dibayangkan berapa total biaya. Semua keterangan terkait dana itu muncul dalam dakwaan Suryadi. Ia akhirnya harus membayar petualangannya itu dengan 10 tahun penjara, vonis dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Februari tahun lalu.

Semakin jelaslah bahwa radikalisme dan terorisme tidak akan tumbuh tanpa sokongan dana. Besar kecilnya dana menentukan dampak teror. Studi Lutfi Awaludin Basori (2017) menyingkapkan, pendanaan radikalisme dan terorisme terbagi atas tiga hal, yaitu sumber dana, perpindahan dana, dan penggunaan dana. Semakin jelaslah bahwa radikalisme dan terorisme tidak akan tumbuh tanpa sokongan dana. Besar kecilnya dana menentukan dampak teror.

Sumber dana radikalisme dan terorisme terbagi lagi menjadi tiga bagian. Pertama berasal dari sumbangan. Ini persis yang dilakukan Saefullah, yang berhasil dibongkar polisi pertengahan 2019. Saefulah diketahui polisi menggunakan dana untuk membeli senjata dan membiayai Muhammad Aulia dan 11 orang lainnya ke Khorasan, Afghanistan. Polri juga berhasil mengungkap aliran dana kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Indonesia.

Otak serangan terorisme di Indonesia hingga Filipina ternyata adalah Saefulah alias Daniel alias Chaniago. Ia mendapat kucuran dana dari luar negeri Rp 413 juta lebih. Aliran dana berasal dari Trinidad-Tobago ada tujuh kali, dari Maladewa satu kali, Venezuela satu kali, Jerman dua kali, dan Malaysia sekali (*Humas Polri*, 23/7/2019). Dana dikirim melalui Western Union Maret 2016 sampai September 2017. Uang digunakan melancarkan teror di Sibolga, Sumatera Utara, hingga Gereja Katolik di Filipina. Kendali pemegang dana Sebelumnya, Densus 88 Antiteror menangkap Novendri alias Abu Jundi sekitar pukul 21.59, Kamis (18/7/2019), lalu di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang,

Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan dipastikan Novendri dikendalikan Saefulah yang menjadi pengatur aliran dana sejumlah penyerangan di Indonesia dan luar negeri. Ia mendapat kucuran dana dari luar negeri Rp 413 juta lebih. Aliran dana berasal dari Trinidad-Tobago ada tujuh kali, dari Maladewa satu kali, Venezuela satu kali, Jerman dua kali, dan Malaysia sekali (*Humas Polri, 23/7/2019*).

Mereka mengumpulkan dana dan selanjutnya disalurkan ke kelompok teror di Indonesia. Sumber dana terorisme kedua berasal dari kegiatan ilegal. Salah satunya adalah hasil perampokan Bank CIMB Medan, Sumut, pada 2010. Sumber dana terorisme ketiga adalah dari kegiatan usaha. Contoh kasus ini adalah Jamaah Islamiyah (JI) pimpinan Para Wijayanto yang ditangkap awal Juli 2019. Tak tanggung-tanggung kelompok ini memiliki perkebunan sawit di Kalimantan dan Sumatera.

Dengan usaha ini Para Wijayanto mampu menggaji anggotanya Rp10-15 juta per bulan. Selanjutnya soal perpindahan dana, ada prinsipnya terkait jumlah dana yang dipindahkan, risiko, kemudahan, biaya, dan kecepatan. Semua diperhitungkan matang. Perpindahan dana ini memiliki beberapa metode, antara lain melalui kurir, layanan jasa pengiriman uang seperti Western Union, bank formal, atau invoice palsu. Sebagian dana yang diterima Suryadi dari Rois dikirim langsung melalui adiknya Adi Jihadi dan Abu Musa. Sebagian lagi diterima Suryadi dengan menggunakan jasa pengiriman uang Western Union. Perpindahan dana ini memiliki beberapa metode, antara lain melalui kurir, layanan jasa pengiriman uang seperti Western Union, bank formal, atau invoice palsu.

Terakhir, penggunaan dana. Sejauh ini, penggunaan dana terorisme dan radikalisme juga tidak hanya berfokus pada pelaksanaan aksi teror tetapi juga untuk hal lain. Di antaranya untuk meluaskan pengaruh mereka, persiapan

aksi seperti untuk latihan perang, dan mendapat dukungan dari jaringan kelompok teror lain. Namun yang terpenting dari penggunaan dana ini adalah mempertahankan eksistensi mereka. Dengan terungkapnya kelompok Saefullah dan lain-lain yang menerima dana dari luar negeri, aparat harus bisa memotong aliran dana ke jantung kelompok teror. Apalagi dana yang berhasil dikumpulkan Saefullah, misalnya, tak sedikit. Dana itu terkumpul selama setahun (2016-2017), dari 12 donatur di 5 negara berbeda. Dengan kondisi seperti ini pemerintah wajib memantau setiap aliran dana yang masuk dan keluar dari Indonesia. Sekaligus mengecek dana-dana di berbagai bentuk usaha, guna menghindari kelompok teror meraup modal dari kegiatan usaha mereka seperti JI. Jika Pemerintah lengah dan dana kembali mengalir ke kelompok teror, bukan tak mungkin mereka akan kembali meneror sekaligus "berpesta" (Lutfi Awaludin Basori, 2017).

. Jika Pemerintah lengah dan dana kembali mengalir ke kelompok teror, bukan tak mungkin mereka akan kembali meneror sekaligus "berpesta" (Lutfi Awaludin Basori, 2017). Jaringan aktif Yang juga perlu digarisbawahi, penangkapan Para Wijayanto pemimpin jaringan teroris Jama'ah Islamiyah (JI) baru awal Juli 2019. Jaringan teroris yang bertanggung jawab atas pemboman Bali tahun 2002 itu ternyata masih ada dan aktif. JI pernah dianggap sudah habis setelah para pemimpinnya seperti Abu Bakar Ba'asyir dan Umar Patek ditangkap, serta pemimpin lain seperti Noordin Top dan Azahari terbunuh. (Sylvia Laksmi, PhD Candidate, Australian National University, 2019) Penangkapan terbaru tersebut mengungkap bahwa JI menggunakan bisnis perkebunan kelapa sawit untuk mencari dana.

Sebelumnya, pendanaan JI sebagian besar berasal dari kegiatan ilegal, seperti perampokan dan cybercrime.

Terkait dinamika pendanaan organisasi teroris, studi Sylvia Laksmi menunjukkan jaringan terorisme menggunakan cara-cara legal dan ilegal untuk mendanai aktivitas mereka dari serangan teror, propaganda, hingga rekrutmen dan pelatihan militer. Menurut undang-undang pendanaan anti-teroris Indonesia, pendanaan teroris mengacu pada aset yang diketahui, atau patut diduga, digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan, organisasi, atau individu yang terkait dengan terorisme dan radikalisme. Aturan tentang tindak pidana pendanaan terorisme selain ada di UU terorisme, juga secara khusus diatur dalam UU Pendanaan Terorisme Nomor 9 Tahun 2013. Pasal 4 UU itu menyebutkan, jika terlibat pendanaan terorisme dapat diganjar hukuman paling lama 15 tahun. Namun demikian, masih banyak pihak yang tidak takut dengan aturan ini.

Terkait program deradikalisasi Kepala BNPT menyatakan pemerintah telah membentuk tim untuk pengawasan secara periodik terkait ideologi radikal sebelum narapidana terorisme memperoleh pembebasan bersyarat. Penangkapan terbaru tersebut mengungkap bahwa JI menggunakan bisnis perkebunan kelapa sawit untuk mencari dana. Sebelumnya, pendanaan JI sebagian besar berasal dari kegiatan ilegal, seperti perampokan dan cybercrime. Oleh karena itu, perlu dicermati faktor-faktor yang memengaruhi teroris dalam memilih metode pendanaan mereka termasuk di antaranya keterampilan apa yang mereka miliki dan situasi yang mereka hadapi-misalnya, tatkala ada pemantauan ketat oleh pemerintah terhadap pemindahan dana lintas negara. Undang-undang pendanaan anti-terorisme dan radikalisme telah meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam mengurangi jaringan teroris dan sindikat radikal Indonesia yang terhubung dengan jaringan lain di Asia Tenggara. Banyaknya penangkapan teroris dan jaringan

radikalismenya dalam lima tahun terakhir adalah buktinya. Mana kala penegakan hukum menjadi lebih kuat, teroris harus mengubah taktik, termasuk penggunaan bisnis legal untuk menutupi gerakan dan menghindari pengawasan.

Baru-baru ini, metode lain telah ditemukan: penggunaan layanan keuangan mikro Baitul Maal. Baitul Maal adalah layanan keuangan mikro Islami berbasis masyarakat informal yang menggunakan pendekatan ekonomi dan sosial-keagamaan dengan menawarkan layanan keuangan kepada orang-orang miskin, termasuk mengumpulkan sumbangan dan pinjaman rendah untuk usaha kecil. (Sylvia Laksmi, 2019) Baru-baru ini, metode lain telah ditemukan: penggunaan layanan keuangan mikro Baitul Maal. Dalam hal ini, pemerintah harus tetap waspada terhadap perubahan metode pendanaan itu. Tidak hanya metode penggalangan dana yang berubah, penggunaan dana juga telah berganti. Dana digunakan tidak hanya untuk mempersiapkan serangan, tetapi juga untuk menghidupi keluarga tahanan, janda, dan anak-anak terpidana teroris.

Salah satu tampilan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai Indeks Persepsi Publik Indonesia Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (IPP APUPPT) Indonesia 2018. IPP APUPPT 2018 secara keseluruhan naik menjadi 5,46 poin. Sedangkan IPP APUPPT pada 2016-2017 tercatat sebesar 5,21 poin dan 5,31 poin. Foto diambil di Jakarta, Selasa (18/12/2018) Pemindahan bisa samar Masalah ini menjadi genting, penting dan berbahaya karena dalam situasi demikian pemindahan dana menjadi semakin samar karena tidak digunakan secara langsung untuk kegiatan teroris. Apalagi studi Sylvia Laksmi (2019) menyingkapkan tabir bahwa orang-orang yang menyumbang dana ternyata tetap setia terhadap kelompoknya serta menciptakan generasi baru jihadis. Yang jelas, pendanaan itu ibarat jantungnya aktivitas terorisme

dan radikalisme. Sebab dana tak hanya digunakan untuk membiayai operasi teror itu sendiri, tetapi juga untuk memperluas pengaruh, jaringan dan mendukung kehidupan sosial jaringan kelompok teror serta menciptakan generasi baru jihadis itu sendiri.

Warga dari berbagai latar belakang keyakinan berdoa bersama dengan menyalakan lilin saat berlangsung Refleksi Peristiwa Iman 13 Mei 2018 di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Surabaya, Senin (13/5/2019). Terakhir penting untuk digarisbawahi, sejauh ini, hanya ada sejumlah program pemerintah yang menyediakan insentif sosial dan ekonomi untuk keluarga jihadis yang sudah bertobat atau menjalani program deradikalisasi, namun mungkin kurang jelas hasilnya, serta kurang dipantau dan dikontrol oleh *civil society* maupun parlemen. Pada hemat saya, sangat diperlukan program penanggulangan yang komprehensif dan lebih mutakhir untuk mengatasi radikalisme dan terorisme dewasa ini sebelum terlambat dan di luar kendali.

BAB II

BEN ANDERSON, PERTAHANAN SOSIAL-KULTURAL DAN PERSOALAN PAPUA

Pertahanan-keamanan sosial-kultural di Indonesia sungguh krusial dalam konteks penguatan integrasi nasional, namun belum digarap/dikembangkan dengan optimal, apalagi sejak desentralisasi dengan otonomi daerah, ada trend kuat bahwa semangat kedaerahan menonjol sekali dan meritokrasi kurang berjalan baik, malah seret dan pengap.

Pertahanan-keamanan secara militer sudah digarap TNI/Polri dengan cara yang relatif ekspansif, terutama dari sisi alat utama sistem senjata (alutsista), tumbuh meningkat, namun secara sosial-kultural pertahanan-keamanan kita relatif lemah. Tulisan ini masih fokus pada isu Papua dalam kaitannya dengan pertahanan keamanan sosial kultural.

Ketika Prof Benedict ROG Anderson mengundang saya (Herdi Sahrasad, *-red.*) ke Cornell University pada Musim Gugur 1994, ia sempat menyampaikan "pandangan/pesan" yang menyentuh haribaan saya: "Kalau negara dan bangsa Indonesia ingin Papua (dan Timor Leste) menjadi bagian integral di dalamnya, maka pemerintah dan masyarakat harus mampu melakukan penyerapan kultural (*cultural absorpsion*) terhadap masyarakat/rakyat Papua (dan Timor Leste) sehingga mereka merasa betah, kerasan, dan nyaman (*at home*) di pangkuan Ibu Pertiwi."

Ben Anderson menuturkan pada kita bahwa pendekatan yang humanis dan penuh harkat-martabat terhadap warga Papua itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang pejabat/birokrat dan penguasa. Mereka yang bisa melakukan praksis humanis itu mestilah sosok-sosok yang penuh welas asih, berakhlak mulia, dan punya rasa tanggung jawab yang tinggi agar warga Papua bisa dipeluk dalam atmosfer kehangatan Ibu Pertiwi.

Agar mereka betah dan merasa *at home* di dalam pangkuan NKRI, maka pendekatan “silih *asih-asah-asuh* dan pembauran” menjadi kunci dalam praksis “penyerapan budaya” terhadap masyarakat Papua tersebut, Menurutnya, salah satu aksi penyerapan budaya warga Papua (dan Timor Leste) yang relatif efektif adalah pola anak asuh, pembauran sosial yang inklusif di tingkat akar rumput, penghilangan segregasi sosial, dan perkawinan silang etnis antara lelaki Papua (dan Timor Leste) dengan perempuan suku lain (Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Minangkabau, Bali, dan seterusnya, tentu terutama Jawa), dimana proses akulturasi secara alamiah bisa dilakukan. Di sini peran masyarakat dan pemerintah sangat menentukan dalam konteks pembauran dan perkawinan silang budaya ini.

Pandangan Ben Anderson itu kami rasa masih relevan dan mengena sampai hari ini. Kegagalan penyerapan budaya atas warga Timor Leste, misalnya, telah mendorong Timor Leste merdeka tahun 1999 di era Presiden BJ Habibie melalui referendum. Kalau sekarang diadakan referendum, maka masyarakat warga Papua pun akan menempuh pilihan yang sama dengan Timor Leste. Mengapa?

Jawabannya adalah, untuk sebagian besar karena kegagalan kita melakukan penyerapan budaya terhadap warga Papua karena Jakarta lebih menekankan pendekatan keamanan dan tindakan represif ala rezim Orde Baru maupun rezim-rezim reformasi yang mendayagunakan

lembaga militer, polisi dan intelijen di Papua, sehingga sangat melukai hati warga Papua dan menumbuhkan krisis kepercayaan warga Papua terhadap pemerintah Pusat (Jakarta).

Presiden Joko Widodo tentu sudah mendapatkan informasi dan saran yang cukup dari "inner circle"-nya di istana untuk mencari solusi atas masalah Papua. Dan terbukti, Jokowi mengambil langkah cepat. Jokowi meningkatkan alokasi dana APBN kepada Papua hingga mencapai Rp62 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 28,34 triliun untuk Provinsi Papua Barat di luar dana Otonomi Khusus (otsus).

Dalam pelaksanaannya, Otsus Papua yang dipacu dengan berbagai perbaikan itu, masih mengandung beberapa masalah krusial yang menyangkut keadilan dan kesejahteraan yaitu:

Pertama, Ketidaksamaan pemahaman dan kesatuan persepsi; ada respon positif dan negative. Respon positif adalah adanya harapan dan arah baru bagi modernisasi di Papua, namun respon negative justru mencuat, seperti permintaan referendum. Juga masih ada perbedaan tafsir antara masyarakat Papua dan Pusat mengenai Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 antara pemerintah Indonesia dan Belanda—tahap internasional perdana yang dianggap oleh orang Papua sebagai pintu masuk Papua bergabung Indonesia pada 1969.

Kedua, saling ketidakpercayaan antara masyarakat Papua dan Pemerintah Pusat. Ini disebabkan masih adanya pelanggaran HAM dan intimidasi pada rakyat Papua, dan telah menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam sehingga mereka memilih alternatif memisahkan diri dari NKRI.

Ketiga, Masalah ketidaksiapan pemerintah daerah, hal ini terlihat dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang

ada. Oleh sebab itu pemerintah perlu mengevaluasi dampak penerapan Otsus yang selama ini masih belum memberikan manfaat bagi mayoritas masyarakat Papua, karena berbagai indikasi terjadinya praktek penyimpangan penggunaan dana Otsus untuk kepentingan segelintir elite penguasa di Papua. Kebijakan Otsus akan memiliki arti bagi masyarakat jika mereka dapat merasakan keadilan, terutama untuk menikmati hasil-hasil sumber daya alamnya sendiri.

Bergerak Cepat

Namun demikian, sambil mengatasi akumulasi masalah krusial di atas, Presiden Jokowi terus bergerak cepat lagi. Di bidang pertambangan, pemerintahan Jokowi mendesak Freeport Indonesia untuk mendivestasikan sahamnya sebesar 51 persen dan berhasil ditandatangani perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport pada 27 Agustus 2017. Dari perjanjian ini, pemerintah daerah Papua mendapatkan saham 10 persen sesuai kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua yang diwakili oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, pada tanggal 12 Januari 2018.

Pemerintahan Jokowi juga berusaha menurunkan angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan, serta meningkatnya harapan hidup di Papua maupun Papua Barat. Pelayanan kesehatan di Papua dan Papua Barat terus ditingkatkan secara tajam. Penerima bantuan iuran (PBI) Kartu Indonesia Sehat di Papua dan Papua Barat kini mencapai 1,22 juta. Di bidang pendidikan, Jokowi juga melakukan pemerataan pendidikan yang mengacu pada 3T yakni “terdepan, terpencil, dan tertinggal”. Pertumbuhan ekonomi kawasan Papua juga dipacu, mencapai 9,21% pada 2016, naik dibandingkan 2014 dan 2015 yang tercatat sebesar 3,65% dan 7,47%. (Yermias Degei, 2019)

PDRB per kapita tanpa sektor tambang dalam juta rupiah meningkat dari Rp 24.60 juta per tahun di tahun 2013 menjadi Rp 37,52 juta per tahun di tahun 2017. Kini ratio menurun dari 0,44 tahun 2013 menjadi 0,398 tahun 2017.

Perhatian yang signifikan tersebut telah berakibat pada penurunan tingkat kemiskinan di Papua dan kualitas hidup rakyat mengalami peningkatan. Tahun 2013 angka kemiskinan 31,13 persen menurun ke 27,62 di tahun 2017”.

BPS mengakui, telah terjadi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari kategori rendah ke kategori sedang. Hampir seluruh provinsi di Indonesia masuk kategori sedang, dan tinggi. Hanya DKI yang masuk ‘sangat tinggi’.

Harus kita akui, Presiden Jokowi selama lima tahun di periode pertama telah melakukan banyak hal di Papua dibandingkan dengan para pendahulunya. Hal ini pun diakui para tokoh adat dan masyarakat di Papua. Bahkan mereka tak segan menyebut Jokowi “Bapak Pembangunan Papua” dan akibatnya, lebih dari 80 persen rakyat Papua masih memilih dia pada Pemilu 2019.

Namun, semua itu tidaklah cukup untuk mengatasi persoalan pembangunan Papua, sebab ada persoalan lain yang laten dan tersembunyi. Yakni isu HAM, marginalisasi dan ketimpangan di segala aspek. Presiden Jokowi sendiri mengakuinya pada Festival Satu Indonesia, (10/3/2019), “Betapa yang namanya perbedaan, ketimpangan di Jawa dan Papua seperti bumi dan langit.”(Laporan CNN Indonesia, Minggu, 10/03/2019)

Sudah terbukti bahwa Presiden Joko Widodo 2014-2019 relatif rajin ke Papua dan berdialog dengan warga Papua, namun di sisi lain ia dinilai membungkam dan memasung public sphere dan ruang demokrasi bagi kebebasan berespresi rakyat Papua dan pemberian akses masuk ke Tanah Papua kepada jurnalis, akademisi, pemerhati

kemanusiaan dan lembaga-lembaga nasional maupun internasional yang hendak mengabdikan bagi Papua.

Jokowi masih meneruskan cara Orde Baru yakni melakukan pengembangan keamanan dengan dengan mengerahkan ribuan tentara tambahan ke Papua. Meski penambahan militer ini ditujukan untuk memperkuat pertahanan nasional, namun acapkali menghambat upaya penegakan HAM di Papua. Laporan terbaru oleh Amnesty International misalnya, menunjukkan bahwa pembunuhan tanpa proses hukum yang melibatkan personil keamanan masih terjadi di Papua.

Akibatnya, Jokowi terus dikritik karena tidak memberikan prioritas pada penegakan hukum dan keadilan dalam rangka perawatan dan penyembuhan luka batin warga Papua yang sudah parah selama 52 tahun menjadi bagian dari Indonesia. Sejauh ini, selama pemerintahan Jokowi tidak ada satu pun kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan Papua yang telah diselesaikan. Ini menumbuhkan rasa tidak percaya orang Papua terhadap pemerintahan pusat.

Menurut Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Idris Kasim, target penyelesaian pelanggaran HAM di Papua sebenarnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Di dalam undang-undang tersebut ada tiga jalan untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua. Namun, hal itu tidak mencapai kemajuan karena sampai sekarang belum ada peraturan daerah di Papua yang mengamanatkan pembentukan komisi tersebut. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan upaya penyelesaian seluruh kasus pelanggaran HAM di Papua pada masa lalu.

Bahkan pemerintah juga dinilai belum ada langkah kongkret untuk menangani persoalan arus migrasi ke Papua. Arus migrasi yang tak terkontrol dan tak terkendali ini dinilai

sebagai ancaman bagi masyarakat lokal Papua di tengah kondisi pendidikan yang buruk. Orang asli Papua sudah dan akan sulit bersaing di segala bidang, baik menjadi anggota legislatif, birokrasi, serta bersaing di sektor bisnis dan bidang lainnya. (Yermias Degei, 2019).

Belakangan, ia tak cuma diubah oleh transmigrasi, melainkan para migran ekonomi yang mencari peruntungan ke Papua. Mereka termasuk orang Makassar, Bugis, Maluku, selain Jawa dan sebagainya. Bahkan sampai ada anekdot: datang ke Papua dengan M-16, pulang dari Papua membawa 16 M. Kondisi ini ditambah dan diperparah lewat kekerasan negara dan gelombang korporasi di wilayah yang paling tertutup dari akses peliputan media maupun pemantauan kejahatan kemanusiaan. Warga Papua melihat sendiri, "mereka mencuri kami punya alam, dan kami saksikan itu setiap kali."

Studi Dr. Jim Elmslie, akademisi University of Sydney, menyingkapkan bahwa warga asli Papua makin marginal. Dia menyebut jumlah penduduk asli Papua makin menurun di wilayah perkotaan. Berdasarkan sensus tahun 2010, terdapat lima kabupaten di Papua yang justru mayoritasnya ialah warga non-Papua, antara lain: Merauke (62,73%), Nabire (52,46%), Mimika (57,49%), Keerom (58,68%), dan Kota Jayapura (65,09%). Ke-23 kabupaten lain di Papua dan Papua Barat masih didominasi oleh orang asli Papua. Meski begitu, ada enam kota lain yang berpotensi "dikuasai" orang non-Papua di masa mendatang. Antara lain, Kab. Jayapura (38,52%), Yapen Waropen (21,91%), Biak Numfor (26,18%), Boven Digoel (33,04%), Sarmi (29,75%), dan Waropen (20,41%). Baca juga: MUI Papua Kutuk Rasisme Aparat & Kelompok Masyarakat di Surabaya Dari data ini, orang non-Papua terkonsentrasi di perkotaan. Di pegunungan, mayoritas adalah orang asli Papua seperti di Lanny Jaya (99,89%), Tolikara (99,04%), Yahukimo (98,57%), Paniai (97,58%), dan Jayawijaya (90,9%). Perubahan konfigurasi

penduduk itu disebabkan program transmigrasi oleh pemerintahan Soeharto.¹

Masalah pendidikan di Papua juga masih menjadi salah satu masalah mendasar, sebab saat ini, 34 sampai 40 persen anak-anak di Papua masih mengalami buta huruf. Angka ini adalah yang tertinggi di Indonesia. Data dari United Nations Children's Fund (Unicef) menunjukkan bahwa 30% siswa Papua tidak menyelesaikan SD dan SMP mereka. Di pedalaman, sekitar 50% siswa SD dan 73% siswa SMP memilih untuk putus sekolah. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 perihal Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, 11 Desember 2017 belum secara signifikan mencapai kemajuan nyata di bidang pendidikan dan kesehatan.

Asih-Asah-Asuh

Dengan setumpuk persoalan akut tersebut, insiden Surabaya dan Malang pekan lalu, yang diwarnai makian bernada "rasisme" dengan yang memuat nama-nama binatang terhadap para mahasiswa di asrama Papua, mudah menjadi pemicu bagi huru-hara massa (chaos) di Papua. Di mata hati warga Papua, hal itu sangat memperlihatkan betapa masih kentalnya kebencian berbasis ras kepada orang Papua yang kaya sumber daya alam. Kondisi ini membuat warga Papua teringat pada pernyataan mantan Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) Ali Moertopo: "Jakarta tidak tertarik kepada orang Papua melainkan wilayahnya."

Dalam konteks situasi semacam ini, pernyataan Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko yang membuka opsi

¹ Jim Elmslie, "The Great Divide: West Papuan Demographics Revisited; Settlers Dominate Coastal Regions but the Highlands Still Overwhelmingly Papuan", *The Asia-Pacific Journal*, Volume 15, Issue 2, Number 1, Jan 15, 2017).

pengusiran terhadap mahasiswa Papua di Malang, menjadi sangat sensitif dan tidak kondusif. Apalagi kampus-kampus yang menampung mahasiswa Papua pun diminta membuat pakta integritas cinta NKRI. Padahal, waktu itu belum jelas duduk perkara yang terjadi di Malang pada 15 Agustus 2019 lalu. Pemerintah pun dinilai warga Papua terkesan membuat kesimpulan mahasiswa Papua biang keladi bentrokan tersebut.

Menurut Aktivis Forum Rakyat Indonesia Untuk West Papua (FRI - West Papua) Surya Anta (18/8/2019), stereotype “biang keladi” itu secara langsung atau tidak, telah membuat mental orang Papua makin rendah sehingga derajat orang Jawa, orang Indonesia, itu lebih tinggi sehingga orang Papua harus tunduk pada orang Indonesia.

Menurut Anggara Suwahju, peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform, kalau pun ada demo dan protes mahasiswa/masyarakat Papua terkait tuntutan hak menentukan nasib sendiri, maka hal itu pun tidak termasuk perbuatan makar. Musababnya, prinsip hukum pidana, kata Anggara, terikat prinsip yang ketat: *lex certa* dan *lex stricta*. "Harus pasti dan tidak bisa diartikan lain. Makar artinya serangan yang sifatnya fisik," demikian kata Anggara.

Namun, aparat keamanan maupun ormas di Indonesia mengabaikan hukum internasional itu, yang telah diadopsi oleh Sidang Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966. Padahal ia terikat dalam kovenan hak-hak sipil dan politik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU 12/2005. Akibatnya siklus rasisme dan pendekatan represif aparat keamanan Indonesia terhadap mahasiswa Papua, dalam catatan *Institute for Criminal Justice Reform*, menunjukkan *trend* (kecenderungan) meningkat sejak 2016.

Rupanya, kebebasan pendapat politik mahasiswa-mahasiswa Papua, yang dilakukan secara damai itu, telah diacuhkan oleh aparat kemananan Indonesia lewat tindakan-

tindakan represif dan rasistis. Padahal TNI dan Polri harusnya menyadari bahwa demo dan tuntutan hak menentukan nasib sendiri tidak termasuk perbuatan makar sehingga tak perlu bertindak represif, melainkan musti bersikap lapang, dialogis dan humanis. Tak mengherankan kalau peristiwa akhir pekan lalu di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, dan Malang mudah menyulut respons sangat keras di Papua.

Dalam kaitan ini, masuk akal kalau Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan bahwa masalah rasisme terhadap masyarakat Papua tidak bisa diselesaikan dengan hanya meminta maaf. Dengan pedih dan luka hati, Gubernur Papua Lukas Enembe bahkan tegas berkata bahwa "kami bukan bangsa monyet, kami manusia."

Ia meminta perlu penanganan yang serius bagi para pelaku rasisme, yang dalam konteks ini adalah oknum-oknum yang meneriaki para mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, dengan panggilan rasis.

Dengan belajar dari insiden Malang dan Surabaya yang akhirnya menyulut bara api kerusuhan di Papua, sikap asih-asah-asuh, saling menghormati dan menghargai serta sikap toleran dari seluruh pemimpin, elite, pejabat, birokrat dan masyarakat Indonesia kepada mahasiswa dan masyarakat Papua, sangat dibutuhkan. Sebab huru-hara warga Papua itu tidak turun dari langit begitu saja dan tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki konteks politik, ekonomi dan kultural yang melekat dengan struktur dan kultur sosial di Indonesia.

Dalam kaitan ini, penting sekali menghikmatikan pesan cendekiawan Soedjatmoko bahwa "hari depan Indonesia (dan Papua) tergantung pada keputusan moral kita hari ini."

Krisis sosial dan politik yang tidak kunjung berakhir di Papua, meskipun sejak 2001 telah dilaksanakan kebijakan Otonomi Khusus di Papua, pada hakikatnya bersumber dari masalah ketidakadilan sosial sekaligus ketidakadilan struktural yang terjadi puluhan tahun ini. Ben Anderson

berpesan pada kita agar tidak sungkan memanfaatkan institusi Cornell University, AS dengan *civitas academica*-nya bagi riset lanjutan untuk menjaga integrasi nasional, *nation and character building* dan *state building* di Indonesia.

Hemat kami, membangun dan mempertahankan integrasi nasional dalam bingkai NKRI merupakan *unfinished agenda* dari bangsa dan negara kita. Semua itu harus dilaksanakan dengan sikap asih-asah-asuh dalam membangun dan menghidupkan komitmen untuk bersatu, membangun jiwa musyawarah dalam kerangka demokrasi, membangun kelembagaan yang menyuburkan persatuan dan kesatuan, merumuskan regulasi dan undang-undang yang konkrit, serta membutuhkan *civil society* yang kuat dan kepemimpinan yang efektif dan arif bijaksana. Ke sanalah arah baru modernisasi Papua sekarang dan mendatang, bukan malah sebaliknya. []

BAB III

BOM THAMRIN 14 JANUARI 2016

*REFLEKSI DARI LAPANGAN

Pasca kematian Osama bin Laden di Abbottabad, Pakistan pada tahun 2011, serangan teror berbasis Islam tidak lantas punah. Wajah baru global jihad muncul dalam bentuk ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di bawah pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi. ISIS memiliki jaringan lebih luas tidak hanya menyasar negara-negara Islam tetapi negara di kawasan Eropa sebagian dari warga negaranya juga terindikasi ikut bergabung dengan ISIS. ISIS menjadi poros utama terorisme berbasis Islam pasca Al-Qaeda.

Esai ini merupakan refleksi saya sebagai aparat negara (Polri) yang terjun langsung di lapangan menghadapi teroris dalam kasus Bom Thamrin pada 14 Januari 2016. Saya tekankan bahwa korban nyawa yang jatuh dan tewas dalam aksi teror tak bisa digantikan dengan uang dalam jumlah berapapun, sehingga terorisme tak boleh dibiarkan di muka bumi.²

² Esai ini merupakan edisi singkat dari artikel-artikel untuk beberapa jurnal. Lihat, Dedy Tabrani, Penanganan Teror Bom Thamrin Ditinjau Berdasarkan Skep Kapolri Nomor: 172 Tahun 2014 Tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (PTKP) Bom, jurnal *Keamanan Nasional*; Vol II, No.2, 2016. Lihat juga, Herdi Sahrasad, Al Chaidar, and Dedy Tabrany, "Terrorism, Wahhabism and Islam (East)-West Dialogues: A Reflection from Indonesia", dimuat *Journal of Economic and Social Development, Balkan, Eastern Europe*, 6 (2), 60-75. Lihat

Kembali pada fenomena ISIS pasca Al-Qaeda, eksistensi ISIS itu ternyata telah memberikan harapan baru dan semangat baru kelompok radikal Islam di Indonesia. Salah satu aksi terorisme yang dilakukan oleh anggota ISIS di Indonesia adalah terror Bom Thamrin pada 14 Januari 2016 dengan pola dan modus berupa bom dan penembakan.

Polri sebagai *leading sector* penanganan terorisme, telah merumuskan beberapa peraturan mengenai penanganan terorisme, misalnya, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 172 Tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Bom (PTKP). Keputusan tersebut menjadi landasan kepolisian dalam penanganan kasus teror di lapangan. Untuk itu, penelitian ini akan mengungkap sejauh mana penanganan terror bom Thamrin ditinjau berdasarkan Skep Kapolri Nomor: 172 Tahun 2014 Tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Bom (PTKP).

Kemunculan dan perkembangan ISIS memiliki keterkaitan ketidakstabilan (instabilitas) politik dan keamanan di negara-negara Arab. Pasca perang dingin, salah satu wilayah yang cenderung tidak stabil adalah Dunia Arab atau Timur Tengah. Wilayah Timur Tengah pasca perang dingin menjadi salah satu pusat pergolakan politik dan kekerasan. Hal ini berawal dari permasalahan konflik Palestina-Israel, konfrontasi rezim otoritarisme dunia Arab dengan gerakan Islamis dan berbagai kelompok lainnya.

ISIS kini tidak hanya mengancam eksistensi Irak dan Suriah, tetapi juga di Indonesia. Sel jaringan ISIS di Kawasan

juga, TI Aisyah, Herdi Sahrasad, M. Ridwan, M. Asrori Mulky, Dedy Tabrani, and Al Chaidar, "Islamism, the West and Our Concern: A Social Reflection", jurnal *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, 26/8/ 2020.

Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura dikendalikan oleh Aman Abdurrahman dan Abu Ugar sebagai panglima meliter sel jaringan ISIS. Lebih dari itu, sebagaimana diungkap oleh Ustadz Sufyan Atsauri (mantan anggota Polres Depok) bahwa sel jaringan ISIS yang ada di Indonesia, antara lain: JAKI (Jamaah Anshrut Khilafah Indonesia) pimpinan Ustadz Aman Abdurrahman, Katibatul Iman pimpinan Abu Husna, FAKSI (Forum Aktifis Komunitas Syariat Islam) pimpinan Bahrum Naim, MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan Santoso, dan kelompok Bahrumisyah pecahan dari Ustadz Aman Abdurrahman.

Aksi teror jaringan ISIS di Indonesia terjadi pada peristiwa Bom Thamrin pada Kamis 14 Januari 2016. Sedikitnya delapan orang (empat pelaku penyerangan dan empat warga sipil) dilaporkan tewas Kelompok terorisme berbasis Islam di Indonesia belum akan surut untuk jangka waktu panjang. Dengan kata lain, nilai-nilai radikal dalam mencapai tujuan gagasan “Negara Islam” oleh sekelompok kecil muslim di Indonesia masih menjadi ancaman bangsa Indonesia.

Sasaran terror Bom Thamrin dilihat dari serangan pertama yang terjadi di dalam Starbuck Café memiliki sasaran tujuan secara random, sedangkan terror dengan pistol di jalanan menjadikan target polisi sebagai sasaran teror. Korban sipil bukan polisi tampak karena adanya “kecelakaan” akibat menghalangi tembakan ke arah polisi.

Penjelasan yang memungkinkan untuk diterima mengapa pelaku meledakkan bom terlebih dahulu di Starbuck Café sebelum melakukan penembakan di jalanan tidak lain adalah upaya memancing orang datang lebih banyak sebelum meledakkan bom lagi di saat keramaian. Hal

ini terbukti pelaku melempar shrapnel seukuran granat ke jalanan yang menasar ke mobil Karo Ops Polda Metro Jaya. Di samping itu, pelaku juga masih memiliki dua bom lagi yang belum sempat diledakkan karena keburu tertembak oleh polisi.

Peristiwa teror Bom Thamrin dikendalikan oleh Aman Abdurrahman alias Rochman alias Abu Sulaiman (Tokoh Ideologi terorisme di Indonesia dan pertama yang berba'iat ke ISIS).⁴ Aman Abdurrahman menjadi mentor pimpinan pelaku terror bom Thamrin, Afif. Afif alias Sunakim, pemimpin teror bom Thamrin merupakan pengikut Aman Abdurrahman dan aktif mengikuti pengajian bersama Aman Abdurrahman di Masjid Al-Fataa YAKPI di Kawasan Menteng, 58, Jakarta.⁵

Melalui Aman Abdurrahman, Afif mendapatkan doktrin radikal dalam memahami agama Islam. Selanjutnya, Afif bersama 3 (tiga) orang temannya mendapatkan transformasi nilai-nilai radikal dari Abu Sulaiman hingga melakukan aksi terror bom Thamrin yang dilakukan oleh 4 (empat) orang, antara lain: Dian Juni Kurniadi, Muhammad Ali, Afif atau Sunakin dan Ahmad Muhazan.

Pola kombinasi bom dan senjata api digunakan dalam modus serangan Bom Thamrin dengan target tidak hanya warga sipil tetapi juga polisi. Pola ini merupakan pertama dalam sejarah teror di Indonesia. Pola Kombinasi bom dan senjata ini terinspirasi oleh peristiwa teror Paris, Perancis pada 13 November 2015. Teror Bom Thamrin secara keseluruhan menggunakan bom rakitan/IED yang masuk kategori bom handak *low explosive* dengan bahan peledak potassium nitrat, sulfur, alumunium (KNO₃+S+Al) Bom dirakit dengan sistem penggunaan *switch on/off* langsung tanpa adanya rangkaian lainnya.

Perhatian Dunia

Aksi terorisme di Jalan MH Thamrin Jakarta itu memperoleh atensi masyarakat dunia. Sejalan dengan perhatian dunia internasional terhadap kejahatan terorisme upaya “perang” melawan terorisme, mendapatkan dukungan dunia internasional. Demikian pula kita di Indonesia, pemerintah telah dan sedang mengambil langkah-langkah dalam upaya penanganan gerakan terorisme yang menjadi ancaman serius keamanan dan perdamaian dunia di abad ke-21.

Indonesia dalam upaya melawan gerakan terorisme telah membuat beberapa peraturan dan Undang-Undang. Polri sebagai alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum mendapatkan amanah menjadi *leading sector* dalam penanganan terorisme. Karena itu, pemerintah dan masyarakat Indonesia berharap penuh Polri mampu menjalankan amanah tersebut dalam upaya “perang” melawan terorisme.

Sejalan dengan hal di atas, upaya penanganan terorisme harus bisa dilakukan secara optimal meliputi langkah-langkah pencegahan, penindakan hingga penanganan terorisme di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal ini harus didukung oleh satuan wilayah organisasi di lingkungan Polri, termasuk Polres Metro Jakarta Pusat secara optimal dalam rangka mendukung upaya “perang” melawan terorisme.

Kurang optimalnya penanganan terorisme oleh satuan wilayah Polri memberikan aksesibilitas upaya mengurangi kewenangan Polri sebagai *leading sector* dalam penanganan terorisme. Upaya ini sudah sangat nampak dalam rumusan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU).

Polri adalah *leading sector* dalam “perang” melawan terorisme. Hal ini sejalan dengan definisi terorisme sebagai

extra ordinary crime, yang menuntut pola penindakan dengan pendekatan *crime justice system*. Namun demikian, Polri harus berbenah dan melakukan langkah optimalisasi penanganan terorisme guna mengantisipasi ancaman teror dalam rangka terwujudnya keamanan dalam negeri tercinta ini. []

BAB IV

ISLAM, DEMOKRASI, KAPITALISME, DAN NEGARA: SEBUAH REFLEKSI

Our Founding Fathers are the most tolerant Muslims who have founded Republic of Indonesia and its constitution as a modern nation-state, not a secular state or a religious state. Therefore, it is time for the Muslim intelligentsia, civil society and civil Islam concentrate to strive and uphold the tolerant Islam, the Islamic civilization and Pancasila state. The tolerant Muslims must fight together with all the other components of the nation, by developing cooperation and mutual understanding as well as collective leadership in all lines, in order to realize good governance, social transformation and social emancipation so that this nation can get out of the multi-dimensional crisis. As far as, too much energy and resources are thrown away in vain for things that are not crucial and does not substantially in building the nation state and society, while more than 16 years of reform, it would bring our nation under the shadow of social destruction and weak state. In this case, civil Islam such as Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah and others should be strategic power and social base for state and nation building to cope with market fundamentalism and religious radicalism in Indonesia

Pendahuluan

Islam yang toleran sudah dibuktikan dan dikonkritkan oleh para Bapak Bangsa (*Founding Fathers*) dengan penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta dalam Konstitusi 1945 dan Pancasila, ideologi negara. Namun demikian, sebagian inteligensia Muslim Indonesia merasa kalah dan traumatis ketika mengengangkannya.

Dalam disertasi PhD-nya di Australian National University (ANU) Canberra beberapa tahun silam, Yudi Latif menjelaskan bahwa sebagian kaum intelegensia Islam merasa kalah secara traumatis karena tujuh kata Piagam Jakarta dicoret dari Pancasila.

Dalam disertasi Yudi Latif yang diterbitkan dengan judul “Inteligensia Muslim dan Kuasa” (2005), terungkap kekecewaan dan trauma para inteligensia Muslim itu, dengan bayangan aneka latar sosial, politik, ekonomi dan kultural yang mengitarinya.⁴ Sebagian arus Muslim itu kemudian mengambil aktivitas “Islam bawah tanah” dengan ilusi dan energi utopia bahwa sekiranya Negara Pancasila gagal dan runtuh, Negara Islam bisa menjadi alternatif untuk berbagi. Darul Islam dan Jamaah Islamiyah, sekedar ilustrasi, memilih arus alternative ini.

Mengejutkan bahwa kaum inteligensia Muslim ternyata masih melihat momen hilangnya tujuh kata Piagam Jakarta yang dicoret dari Pancasila itu sebagai momen yang traumatis. Menghadapi hal ini, ada kekhawatiran kalangan umat Kristiani dan Non-Muslim lainnya bahwa jangankan penyembuhan derita trauma itu hanya bisa terjadi jika suatu saat nanti kaum intelegensia/politisi Muslim menang secara heroik dan mutlak, serta menegakkan Piagam Jakarta dan syaria Islam di Indonesia.

⁴ Yudi Latif, ‘*Inteligensia Muslim dan Kuasa*’, (Bandung: Mizan, 2005).

Bukankah, kata Martin Lukito Sinaga, seorang inteligensia Kristen, pembungkaman dan pemarginalan atau *otherizing* akan mengendap dalam hati kaum inteligensia Muslim, jika diskursus di pentas publik oleh para intelegensia Muslim mendapat beban traumatis? Martin Lukito mengakui kekhawatiran kaum Kristiani bahwa dalam konteks hilangnya tujuh kata Piagam Jakarta itu, peran umat Kristen adalah the other yang menjadi momok, sama seperti (baca = mengulang) sikap badan zending Kristen di zaman kolonial dulu yang menganggap Islam sebagai momok yang menghalangi misi mereka.

Namun demikian, dalam perkembangan beberapa dasawarsa terakhir baik era Orde Baru maupun Orde Reformasi, kita melihat Islam yang toleran relative makin menguat seakan menjadi sisi lain dari meningkatnya radikalisme Islam oleh kelompok-kelompok salafi dan kaum garis keras lainnya. Gerakan sosial-keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah wajah Islam toleran di Indonesia yang paling nyata dengan penegasan NKRI, UUD45 dan Pancasila sudah final, sementara kelompok-kelompok Salafi radikal dan sempalan-sempalan fundamentalis Islam lebih memperlihatkan wajah intoleransi dan kekerasan dengan mengusung syariah dan ideologi Islamisme sebagai alternative terhadap ideologi Pancasila.⁵

Kini sejarah sedang menyaksikan menguatnya formalisme Islam di Tanah Air. Ada kelompok salafi (Salafisme) dan kalangan Islam politik (Islamisme) yang terus bergerak dari mesjid ke mesjid, dari harakah ke harakah, dari rumah ke rumah, dari daerah ke daerah, antara lain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), dan seterusnya.

⁵ Herdi Sahrasad and Al Chaidar, *Islamism and Fundamentalism*, University of Malikussaleh Press, 2013

6 Kelompok Salafi adalah kelompok yang mengusung ide dan pemikiran Muhammad bin 'Abd al-Wahhâb di kawasan Arab Saudi yang kemudian populer dengan sebutan Gerakan Wahabi. Di Indonesia, kelompok Salafi masuk melalui para alumni Timur Tengah, terutama yang bersekolah di universitas-universitas di Arab Saudi dan Kuwait. Penyebarannya di Indonesia terlihat di Jakarta, Cileungsi Bogor, Banten, Batam, Bekasi, Tasikmalaya, Nusa Tenggara Barat, Makasar, dan Solo.

Mereka berupaya memberlakukan peraturan daerah (perda) kesusilaan dan keagamaan di pelbagai kota, sedikitnya 25 kota kabupaten (daerah tingkat II) di Tanah Air. Di saat begitu banyak kelompok Islam makin frontal dan radikal, kehadiran perda-perda kesusilaan dan keagamaan itu menimbulkan kecemasan kaum kebangsaan. Seakan terjadi gerak pengepungan oleh kaum Islam puritan terhadap kaum kebangsaan yang bervisi pluralistis dan modernis sekuler. Kaum kebangsaan merasa kalangan Islam puritan melakukan pendekatan "desa mengepung kota" melalui perda-perda kesusilaan dan keagamaan.

Menurut persepsi Muntasir Alwy, seorang peneliti Islam bawah tanah lulusan Fisipol UGM, sesungguhnya dewasa ini diperlukan pemikiran tajam dan jernih untuk membongkar struktur kesadaran umat Islam dalam melihat masalah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan geo-ekonomi, geopolitik, budaya dan peradaban di mana pun umat hidup dan berada. Muntasir Alwy, seorang inteligensia Islam, dalam bukunya 7 melancarkan gugatan dan kritik

⁶ hmad Syafi'i Mufid (ed.), *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011)

⁷ Muhammad Muntasir Alwy dan Arif Fadilah, *Aplikasi Islam Dalam Wilayah Kuadran, Rumusan Dasar Teoretis, Praksis dan Revolusioner Adaptasi Mukmin terhadap Kondisi-Kondisi Negara* (Jakarta: Pilar Press, 2005).

terhadap para penguasa, ulama, politisi, aktivis, dan intelektual Islam.

Di saat pada tingkat nasional sempat menguat isu RUU Antipornografi dan Pornoaksi, pada tingkat lokal marak pemberlakuan peraturan daerah (perda) kesusilaan di pelbagai wilayah (sedikitnya 25 kota kabupaten/daerah tingkat II) di Tanah Air). Kesemua itu mencerminkan menguatnya politik berjubah agama yang mencerminkan sifat isolasionis agama itu sendiri, yang bisa mengarah menuju sifat konfrontasionis terhadap umat yang lain. Karenanya diperlukan koreksi kritis terhadap kaum penguasa Islam, ulama dan cendekiawan Islam yang giat mengusung "syariat Islam" agar tidak frontal dan brutal.

Meskipun para aktor Islam puritan menjadikan negara Madinah era Muhammad SAW sebagai eksemplar peradaban, inspirasi, nilai dan bandingan, hendaknya "substansi" Negara Madinah dengan Piagam Madinah-nya bukan sekedar dijadikan bacaan secara "literal dan skriptual" belaka. Substansi nilai-nilai dan pesan kontekstual dari Piagam Madinah, bukan pemahaman "literal dan skriptual", yang harus menjadi sumber nilai, inspirasi dan acuan ummat (masyarakat madani) dalam melihat kebesaran Islam era Rasullullah SAW di masa lampau. Dengan demikian Piagam Madinah itu tetap relevan dalam konteks kekinian, sebab dunia sudah berubah dibandingkan era Rasullullah.

Dengan kata lain, seyogianya pesan, makna dan nilai-nilai substansial Negara Madinah dan Piagam Madinah menjadi inspirasi, kerinduan dan rujukan umat Islam dalam berkiprah dan beribadah karena kepemimpinan, akhlak dan moralitas Rasullullah SAW dalam membangun peradaban zaman itu merupakan teladan yang paling tinggi di mata umat Islam dalam hubungannya dengan keduniawian dan kekuasaan.

Meminjam perspektif Muntasir Alwy, di negara Madinah, seluruh aktivitas seorang pribadi Muslim sepanjang diniatkan untuk Allah SWT akan bernilai ibadah. Makan, minum, belajar di darul ilmi, bekerja mencari rezeki, tidur dengan istri, atau aktivitas lainnya yang membumi, akan dinilai sebagai ibadah. Dan sebaliknya, meskipun di mata manusia terlihat sebagai ibadah mahdhah atau amal shaleh (shalat, zakat, puasa, haji, infak, sedekah, amal jariyah, jihad fie sabilillah), tetapi dilandasi niat bukan karena Allah SWT, maka nilainya adalah nifaq.

Di negara Madinah Rasullullah menegakkan aturan "dilarang mencuri" karena semua kebutuhan dasar manusia dijamin negara, "dilarang berzina" karena pintu pernikahan dibuka selebar-lebarnya, "dilarang membunuh" dengan semena-mena karena jiwa manusia sangat dilindungi negara. Etika-etika yang dinilai tabu sekali pun pada masyarakat lain, misalnya poligami, memiliki budak (laki-laki dan perempuan) bekas tawanan perang, menjadi lumrah di wilayah yang "bersih di mata Allah" ini. Itulah mengapa seluruh aktivitas hidup positif dinilai sebagai ibadah ghairu mahdhah (umum) di negara Madinah pada waktu itu.

Di negara Islam sekalipun berlaku suatu masyarakat yang terbuka dan bebas, di situ siap menerima siapa pun yang ingin menjadi warganya. Dengan hak-hak dan kewajibannya yang dijamin oleh negara, tanpa "polisi moral" di dalamnya.

Negara Bangsa Modern dan Islam Toleran

Para bapak bangsa, *Founding Fathers*, bersama para tokoh Muslim di era perjuangan kemerdekaan, sepekat membentuk Indonesia sebagai modern nation-state yang melindungi kebhinekaan, kemajemukan dan pluralisme. Musuh utama dari negara bangsa modern adalah fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama, yang

mengancam kelangsungan Indonesia sebagai negara bangsa dimana nilai-nilai gotong royong, toleransi dan empati kepada kaum lemah merupakan suatu kekuatan social bersama.

Tanpa ada “polisi moral” di dalamnya. Kini, dengan alasan apa sebuah negara atau pemerintahan daerah seperti di Aceh dan Tangerang, membentuk "polisi moral" dan memberlakukan perda kesusilaan, apalagi negara tersebut merupakan negara kebangsaan?

Citra negatif kawasan syariat Islam di Aceh, Tengerang atau Bulukumba, misalnya, yang memberlakukan "polisi moral" dan syariah Islam yang kontroversial, justru terbangun karena pemberangusan kebebasan dan hak-hak individu, di mana seluruh syariat Islam dipaksakan secara total dan membabi buta tanpa pandang bulu terhadap semua warga negara. Misalnya adanya operasi jilbab, shalat Jumat, operasi Ramadhan dan sebagainya di jalan-jalan yang tidak pernah dilakukan Rasullullah SAW dan Negara Madinahnya. Gambaran negara yang Islami tidaklah seperti itu, melainkan seperti Negara Madinah atau Cordova (Spanyol dengan tiga agama) di masa lampau yang maju peradabannya, toleran dan modern.⁸

Karena itu dialektika dan debat mengenai Islam dan negara merupakan suatu perjalanan dan proses panjang, yang seyogianya tidak dimakzulkan oleh formalisasi agama dan kepentingan sesaat oleh kalangan Islam, melainkan melihat kepada kepentingan bangsa secara keseluruhan dalam jangka panjang.

Kita harus menarik pelajaran pahit bahwa di era reformasi, kaum inteligensia Muslim juga sempat

⁸ Muhammad Muntasir Alwy dan Arif Fadilah, *Aplikasi Islam dalam Wilayah Kuadran, Rumusan Dasar Teoretis, Praksis dan Revolutioner Adaptasi Mukmin terhadap Kondisi-Kondisi Negara*, (Jakarta: Pilar Press, 2005).

memproduksi Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) beberapa tahun silam, serta peraturan daerah (perda) kesusilaan dan perda-perda syariah yang kontroversial, yang meruak dimana-mana. Meski RUU APP itu akhirnya bisa digagalkan, namun hal itu menandai bangkitnya revivalisme Islam politik dalam konotasi yang negatif.

Berbagai kelompok Islam garis keras, seperti Jamaah Islamiyah (JI) dan Majelis Mujahidin Indonesia Timur, misalnya, juga melakukan konsolidasi eksklusifnya meski sudah digilas oleh aparat kepolisian negara. Nampaknya, radikalisasi kaum "salafi radikal", diam-diam bertambah dan merajalela. Apalagi krisis ekonomi dan kesenjangan kaya-miskin menjadi bahan bakarnya.

Sungguh mencemaskan, demokrasi tanpa kepemimpinan luhur di segala lini, ternyata mereproduksi alienasi kerumunan "politik berjubah agama" dan "mobokrasi moral" yang menakutkan.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mencatat di seluruh Indonesia, sedikitnya ada 25 perda syariah dan kebijakan lain di tingkat lokal serta tujuh rancangan perda (raperda) yang diperjuangkan kalangan beragama guna mengatur masalah kesusilaan. Aturan soal kesusilaan itu pada umumnya mengarah ke penanganan pelacuran dan kemaksiatan, pengaturan tentang pakaian, dan peningkatan ketakwaan. Pangkal persoalannya adalah ketidakadilan, kesenjangan sosial-kultural dan diskrepansi antara harapan dan kenyataan, diskomunikasi sosial, disilusi, benturan nilai-nilai, dan kepentingan.

Realitas itu memunculkan dugaan, prasangka, pertanyaan dan gugatan perlawanan: Apakah kaum inteligensia Muslim yang kini memasuki ranah politik di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sedang dan telah menyiapkan "aksi pembalasan" atas kekalahan traumatis

akibat hilangnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang dicoret dari Pancasila tersebut, dengan menebarkan perda-perda syariah dan RUU APP yang controversial di masa reformasi ?

Benar bahwa tidak ada yang salah menggunakan demokrasi untuk memperjuangkan agama, namun kalau kepentingan sempit dan aspirasi primordial mengalahkan rasionalitas, obyektifitas dan civilitas, bisa dibayangkan bagaimana runyamnya ruang publik yang sudah dipenuhi kerumunan politik (political crowd) -istilah Michael Mafessoli, yang berbasis agama, suku dan politik aliran, namun tanpa visi-misi profetik, transformatif dan emansipatifnya.

Alih-alih memperjuangkan *clean and good governance*, kalangan Islam skriptural dan tekstual ini ternyata lebih suka membawa ayat agama tanpa sekaligus mengusung visi-misi transformatif, emansipatif dan profetiknya.

Agama telah dijadikan sandaran legitimasi fundamental untuk merealisasikan RUU APP yang gagal dan perda-perda syariah kesusilaan yang legal-formal, ketimbang dijadikan rujukan bagi transformasi dan emansipasi sosial yang lebih substansial, dalam semangat egaliterian dan keadaban.

Sungguh, di tangan mereka, agama telah kehilangan elan vital sebagai sumber nilai dan norma bagi visi-misi profetik, transformasi dan emansipasi sosial untuk memberdayakan masyarakat guna menghadapi kekuasaan yang korup, fundamentalisme pasar atau dominasi kekuatan modal.

Padahal masyarakat yang “bebas dan berdaya” dengan demokrasi deliberatifnya, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, merupakan perwujudan riil dari *good governance* itu sendiri.

Masa depan Islam toleran berada di tangan masyarakat “bebas dan berdaya” ini, yang selayaknya solid dan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Selain itu masyarakat semacam ini juga akan menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebaliknya, pada masyarakat yang masih belum berdaya di hadapan negara, masih banyak timbul masalah sosial di dalamnya seperti konflik, fragmentasi dan sektarianisme kelompok, sehingga akan sangat kecil kemungkinan *good governance* bisa ditegakkan. Sementara itu, mustahil *good governance* bisa dilakukan pemerintah tanpa partisipasi dan emansipasi masyarakat. Dalam hal ini, salah satu agenda untuk mewujudkan *good governance* pada masyarakat yang belum berdaya ini adalah memecahkan masalah sosial-ekonomi dan memperjuangkan hak-hak sipil, ekonomi dan sosial-kultural.

Masalah sosial yang cukup krusial dihadapi bangsa Indonesia akhir-akhir ini adalah kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, fundamentalisme pasar, tirani modal, oligarkisme dan keterbelakangan yang disertai kekerasan struktural luar biasa yang menghancurkan kemanusiaan dan telah sampai pada titik yang membahayakan kelanjutan kehidupan berbangsa bernegara. Masalah sosial itu acapkali dalam bentuk kemiskinan massal dan ketidakadilan, kekerasan komunal dan keterbuangan sosial (*social displacement and dislocation*) dengan segala variannya. Kasus-kasus seperti konflik sosial di Aceh, konflik horisontal di Ambon dan Poso sampai sentrifugalisme di Papua, adalah contoh mengerikan dari masalah sosial tersebut, yang harus dipecahkan oleh masyarakat madani (*civil society*) dan negara secepatnya.

Selain itu, masyarakat yang bebas dan berdaya serta berdemokrasi deliberatif, meminjam perspektif Jurgen Habermas, akan memungkinkan mereka untuk membantu

memberdayakan negara dan pemerintah dalam menegakkan kemaslahatan rakyat.

Soedjatmoko dan Nurcholish Madjid menggarisbawahi bahwa Para Bapak Bangsa (*Founding Fathers*) pada 17 Agustus 1945 dulu melahirkan Republik Indonesia dan konstitusinya sebagai modern nation-state (negara bangsa yang modern), bukan negara sekuler atau negara agama. Karena itu, sudah saatnya kalangan inteligensia Muslim, kaum terpelajar Islam dan masyarakat santeri (*civil Islam*) lebih mengkonsentrasikan diri untuk berjuang menegakkan masa depan Islam yang toleran, Islam peradaban.

Kaum Muslim yang toleran dan beradab harus berjuang bersama segenap komponen bangsa lainnya, dengan mengembangkan kepemimpinan luhur di segala lini, untuk mewujudkan *good governance*, melakukan transformasi dan emansipasi sosial agar bangsa ini bisa keluar dari krisis multi dimensi.

Sudah terlalu banyak energi dan sumber daya yang dibuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak krusial dan tidak substansial, sementara lebih dari dua windu reformasi, ternyata justru membawa bangsa ini dibawah bayang-bayang kehancuran sosial dan negara gagal.

Pada akhirnya, masa depan Islam toleran (Islam peradaban) di Indonesia berada di tangan kaum Muslim sendiri, bukan ditentukan "uluran tangan" Arab Saudi, Iran dan Timur Tengah, atau "uluran tangan" AS/Barat dan sekutunya. Masa depan Islam toleran di Indonesia berada di dalam kemandirian, kecerdasan, integritas dan kedigdayaan ummat Islam sendiri.

Dalam hal ini, ummat Islam di Tanah Air yang mayoritas, beserta para inteligensia, ulama, politisi dan pemimpinnya harus tetap bersikap adil dan bijak, mawas diri dan introspeksi, berjiwa besar dan senantiasa menyantuni pluralitas dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika yang sejati,

sekalipun menghadapi segala kompleksitas masalah dan kerumitan di dalamnya.

Islamisme

Perubahan rezim pasca Orde Baru Soeharto telah memotivasi para Islamis politik untuk membentuk negara syariah atau kawasan Islami dengan mengatakan bahwa hanya ada satu Islam yakni Islamisme dan dalam perang gagasan, mereka mencela kalangan yang bersikap kritis terhadap Islamisme itu sebagai "Islamophobia".

Di kalangan Islam, interpretasi mengenai Syariah dan nilai-nilai Islam sangatlah beraneka ragam. Spektrumnya sangat luas. Ambillah contoh pandangan Feisal Abdul Rauf, dari komunitas Islam Ground Zero New York, yang berpendapat bahwa Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan Konstitusi Amerika Serikat adalah perwujudan nilai-nilai Islam dan Syariah. Oleh karena itu, Abdul Rauf menegaskan, Amerika adalah "negara adidaya" yang sesuai dengan Syariah Islam. Namun begitu jelas, bahwa definisi Abdul Rauf tentang Syariah itu, adalah jauh berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh Taliban di Afghanistan. Itulah realitas tentang pemahaman Islam di kalangan Muslim yang seringkali beragam, bahkan berbeda dan bertentangan satu sama lain.

Dalam kaitan ini, sebagai seorang Muslim Arab yang telah tinggal di Barat selama beberapa dekade (pertama di Jerman dan sekarang di Amerika Serikat), Profesor Bassam Tibi membuat argumen penting yang membedakan Islam, agamanya, dengan ideologi politik Islamis: Islamisme.⁹

⁹ Bassam Tibi, *Islamism and Islam*, New Haven: Yale University Press, 2012. Bassam Tibi, guru besar asal Syria yang bermukim dan mengembangkan kariernya di beberapa universitas Jerman, juga sempat menjadi guru besar tamu di Cornell, Harvard dan Yale University. Kepada mantan Rektor UIN Jakarta

Baginya, Islamisme tidak cocok dengan demokrasi, antara lain karena di dalamnya terkandung penciptaan kembali jihadisme sebagai terorisme, penemuan kembali tradisi hukum shar'ia sebagai tatanan konstitusional, dan terdapat kebingungan para Islamis atas konsep keaslian dan kemurnian budaya.

Tibi memang berani mengambil risiko untuk dikoreksi, diprasangkai, distigmatisasi dan disalahkan oleh para Islamis atau akademisi pro-Islamis.

Tibi berasumsi bahwa semua Islamis secara esensial sama, sehingga ia tak melihat perbedaan antara al-Qaida dan Partai Keadilan & Kebebasan (AKP) Turki, sementara Turki adalah anggota integral NATO yang memerangi Al Qaeda di Afghanistan.

Karena Tibi menganggap semua Islamis pada dasarnya sama, maka ia tidak melihat ada perbedaan antara al - Qaeda dan Kebebasan Turki dan Partai Keadilan (AKP), yang ikut mengatur para anggota NATO saat melawan Al-Qaeda di Afghanistan. Juga ia tidak membedakan antara intelektual AKP dan Taliban, sesuatu yang bagi para akademisi dianggap terlalu sembrono dan naif. Jadi, bagi Tibi, apakah Islamis bertindak damai atau kekerasan tidak penting baginya. Malah sejauh ini, menurut Tibi, AKP sudah menunjukkan tendensi-tendensi otoriter dan membuka ruang bagi semangat Anti-Semitisme di Turki.

Namun harus diakui, Tibi menganalisis Islamisme dari perspektif Islam liberal. Dalam bukunya, Tibi berhasil dalam menunjukkan bahwa tradisi Islam mengandung benih yang bisa membentuk dasar humanistik Islam modern. Namun pemahaman humanistik masa lalu dan potensi masa depan

Azyumardi Azra, Tibi pernah menyatakan bahwa kehidupannya semacam Ibn Batutah, karena pernah mengajar dan memberi ceramah pada lebih dari 30 universitas di empat benua.

Islam telah dirusak secara rutin oleh kaum Islamis yang cukup berhasil memonopoli wacana Islam. Tibi menekankan perbedaan antara Islam sebagai agama dan Islamisme sebagai, apa yang disebutnya " religionized politics", politik yang mengalami peng-agama-an, politik yang direligikan.

Tibi bersandar berat pada teori Hannah Arendt, termasuk akademisi mutakhir seperti sejarawan Jeffery Herf untuk menunjukkan bahwa Islamisme dengan jelas berbagi warisan intelektual dengan gerakan totaliter Eropa abad terakhir. Tibi benar ketika menekankan bahwa Islamisme adalah bukan "kebangkitan" tapi penemuan masa lalu Islam. Bahkan, banyak istilah yang dipakai Islamis seperti "Negara Islam " atau " sistem Islam", sejatinya merupakan neologisme yang tidak ada dalam sumber-sumber Islam tradisional .

Menurut Tibi, pada abad kedua puluh, banyak Islamis meminjam konsep-konsep dari gerakan totaliter di Eropa dan kemudian meng-Islamisasikannya.

Tibi berpendapat bahwa Islam yang mendukung kekerasan dan mereka yang mencela itu pada dasarnya sama, dan menurutnya bahwa mereka "hanya berbeda pada cara untuk melakukan, tapi bukan tujuan itu sendiri. "

Meskipun memberikan wawasan berharga, bagaimana pun juga bagi sebagian akademisi dan peminat studi Islam, penggambaran Tibi tentang Islamisme bisa jadi bermasalah.

Seperti diakui Azyumardi Azra, sudah lama Tibi melihat, masyarakat dan peradaban Muslim mengalami kemunduran ketika pemikiran rasional tidak lagi mendapatkan tempat di tengah meningkatnya ortodoksi ulama. Perkembangan seperti ini tidak lagi memberikan akomodasi dan tempat bagi perubahan sosial-budaya di dalam masyarakat Muslim, sementara Barat terus mengalami kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil akhirnya adalah meningkatnya sikap defensif dan apologetik di

kalangan masyarakat Muslim, yang pada gilirannya memunculkan krisis umat Islam di masa modern.

Krisis yang masih belum juga teratasi, akhirnya memunculkan gerakan-gerakan yang dengan cara-cara radikal dan kekerasan berusaha membawa umat kembali kepada apa yang mereka sebut sebagai 'Islam otentik' (ashalah). Islamisme menempuh dua cara: kekerasan dan moderasi, namun dua-duanya bertujuan sama yakni membentuk Negara Islam atau Syariah.

Islamisme adalah gerakan politik yang membedakannya dengan Islam itu sendiri, sehingga menurut Tibi, masyarakat harus bersikap kritis dan jernih atas dua hal yang secara ontologis terkesan saling berhimpitan ini. Apapun bentuknya, Islamisme mudah tergelincir ke dalam radikalisme dan fundamentalisme Islam yang menimbulkan stigmatisasi atas Islam peradaban atau Islam *rahmatan lil alamin* itu sendiri.

Islamisme dan Radikalisme

Maraknya fenomena radikalisme dan terorisme, domestik maupun internasional, di era demokrasi global saat ini, menyisahkan sebuah pertanyaan dalam benak kita. Apakah Islam cenderung anti-demokrasi? Jika benar bahwa demokrasi electoral sudah berubah menjadi demokrasi kriminal atau transaksional, maka Islam hampir pasti cenderung menolak "demokrasi palsu (*fake democracy*)" semacam ini. Bentuk penolakan itu bisa beraneka ragam, dari yang moderat sampai yang paling keras.

Lalu, bagaimana radikalisme bisa berkembang dalam sebuah negara demokrasi di Indonesia? Apakah benar konsep demokrasi yang dibanggakan saat ini *compatible* (mampu bergerak dan bekerja dengan keserasian dan kesesuaian) dengan kebudayaan Islam atau tidak? Pertanyaan tersebut setidaknya menjadi pemicu untuk

merefleksikan kembali kualitas kehidupan keberagaman kita dalam perkembangan demokrasi Indonesia masa kini.¹⁰

Realitas kebangsaan kekinian menunjukkan bahwa kekerasan, politik uang, kemiskinan, dan korupsi makin mendominasi warna kehidupan politik Indonesia. Tragedi yang menimpa warga Ahmadiyah, Syiah, dan konflik SARA yang sering terjadi telah menodai harmoni kehidupan keberagaman. Kasus Tolikara Papua, Tanjung Balai Sumut dan lainnya merefleksikan kerasnya gesekan kepentingan sosial-ekonomi di lapisan menengah ke bawah.

Makin sulit dan tipisnya sumber daya ekonomi yang menjadi rebutan para kapitalis predator, penguasa dan masyarakat yang lemah, membuat ketegangan sosial dalam kehidupan berbangsa bernegara kita semakin nyata. Elite penguasa dan kapitalis predator makin tamak dalam menguras sumberdaya publik menjadi kepemilikan sektor privat, sementara kehidupan rakyat makin melarat. Bank Dunia mengumumkan lebih dari 110 juta orang Indonesia hanya hidup dengan pengeluaran 2 dolar AS/ hari dan itu berarti mereka sangatlah miskin. Sementara satu persen elite nasional menguasai 45 persen kekayaan (asset) nasional, suatu ketimpangan yang sangat tajam dan tak manusiawi. Bank Dunia memperingatkan pemerintahan Presiden Jokowi bahwa jika kesenjangan sosial-ekonomi tidak bisa diatasi, bom waktu bagi gejala sosial mudah terjadi.

Sejauh ini, kilas balik dari kekerasan yang pernah terjadi lebih kejam berlangsung dalam konflik sosial-ekonomi yang berhimpitan persoalan antaretnis dan antaragama, seperti Tanjung Balai, Tolikara, Pontianak, Sampit, Ambon, dan Poso. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, menguatnya kembali isu terorisme dan radikalisme agama yang ditandai dengan kehadiran gerakan ISIS yang terus merebak di

¹⁰ <http://islamnesia.com/2015/04/menguatnya-radikalisme-di-indonesia/>

beberapa wilayah Nusantara, menggejolaknya ancaman terorisme Kelompok Santoso, Ali Kalora di Poso, adanya pencekalan akibat penggunaan nama Muhammad dan Ali di bandara yang diidentikan dengan teroris, semakin menohok kuat dalam memperuncing ketidakstabilan kehidupan keberagamaan dan bangsa.

Para peneliti dan analis curiga, ada kebencian dan kesenjangan yang terpelihara dan bekerja melalui berbagai jejaring sosial bahkan melalui kebijakan negara. Indikasinya, tak hanya kelompok tertentu tapi juga pada dasarnya negara turut serta berpartisipasi untuk menyebarkan kebencian dan memperlebar kesenjangan tersebut. Kondisi-kondisi tersebut secara tidak langsung menjadi faktor menguatnya gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Sayangnya, sebagian dari kita pun, ikut mengambil bagian dalam memperkeruh kondisi itu. Keterlibatan itu pada beberapa hal bisa diamati dari tindakan kita secara tidak langsung dalam membangun propaganda yang berdampak bukan hanya pada sesama kelompok Islam, tapi juga telah merembes kepada kelompok di luar Islam yang merasa tak aman lagi, bahkan terhadap negara, yaitu adanya motivasi dan perjuangan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, Islamic State atau Islam Dom.

Merebaknya ekstremisme dan puritanisme serta eksklusifisme, sebagaimana yang telah terjadi di era reformasi lebih 15 tahun terakhir ini, sebenarnya tidak lepas dari berbagai sebab. Sebagaimana berbagai realitas kebangsaan hari ini. Khususnya dengan merebaknya diskursus gerakan radikalisme dan terorisme yang semakin menggila. Hal ini tentu memiliki akar permasalahan yang tak luput dari persoalan bangsa yang sedang melanda negeri ini. Penelusuran akar permasalahan tersebut setidaknya akan memberikan sedikit pemahaman atas motif dari semakin menguatnya gerakan-gerakan ekstrem tersebut akhir-akhir ini.

Radikalisme memiliki keterkaitan erat dengan terorisme, keduanya merupakan tindakan kekerasan atau ancaman bagi kehidupan keberagamaan. Tindak kejahatan tersebut sesungguhnya dilakukan oleh sekelompok minoritas orang yang menolak dan sekaligus tidak percaya lagi pada sistem dan proses demokrasi yang ada. Gerakan tersebut menginginkan adanya perubahan sosial dan politik secara drastis dengan kekerasan. Sedang agama yang dijadikan sebagai fondasi kemudian dipahami secara ekstrem. Namun, benarkah radikalisme dan terorisme merupakan watak bawaan dari bentuk keberagamaan masyarakat Indonesia?¹¹

Para akademisi yang menganalisis keterkaitan Islam dan demokrasi di Indonesia menilai, keberadaan Islam radikal bukanlah fenomena yang asli terlahir dari Indonesia. Mereka kental dengan pengaruh-pengaruh eksternal dari Timur Tengah. Keberadaan gagasan “Islamisme” yang mereka bawa pun tidak sepenuhnya mencerminkan keindonesiaan, sebagaimana gerakan radikal ISIS saat ini. Dalam kaitan ini, Dr Saeful Mujani (2004), misalnya, melihat bahwa ada interkoneksi antara pengaruh eksternal dari timur tengah yang telah membawa Pan-Islam, Muslim Persaudaraan, dan Kekhalifaan di Indonesia. Pengaruh-pengaruh tersebut terbangun melalui organisasi Islam kontemporer, seperti Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarut Tauhid, Majelis Mujahidin Indonesia dan banyak lainnya. Begitupun dengan Azyumardi Azra dan Ahmad Syafi'i Maarif, menyimpulkan bahwa gerakan transnasional Islam memiliki pengaruh besar bagi ide untuk organisasi gerakan Islam di Indonesia. Hal itu terbukti dengan adanya fakta bahwa usaha formalisasi shari'ah ke dalam konstitusi pasca-1998 semakin menguat. Hal ini didasari oleh beberapa hal. Pertama, munculnya ormas Islam pendukung formalisasi

¹¹ <http://islamnesia.com/2015/04/menguatnya-radikalisme-di-indonesia/>

sharī'ah, seperti HTI, FPI, Majelis Mujahidin Indonesia. Kedua, berdirinya partai Islam baru, PKS, PKB, PAN, PBB. Ketiga, adanya tuntutan pemberlakuan Piagam Jakarta dalam konstitusi. Keempat, munculnya gerakan penegakan sharī'ah Islam di daerah melalui Peraturan Daerah. Studi tersebut mendapatkan pembandingan dari melambatnya usaha-usaha formalisasi sharī'ah karena tidak didukung oleh kekuatan organisasi Islam mayoritas seperti NU dan Muhammadiyah.¹²

Jika ditelusuri lebih dalam, pada dasarnya ada dua sebab utama berkembangnya gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia; Pertama, warisan sejarah umat Islam yang konfliktual dengan rezim yang otoriter. Di era itu, ada modus-modus penindasan politik Islam yang terjadi pada beberapa bagian sejarah, khususnya Orde Baru. Misalkan, beberapa pemberontakan lahir di Sulawesi Selatan (Kahar Muzakkar), Kalimantan Selatan (Ibnu Hajar), Jawa Barat (Kartosuwiryo), dan Aceh (Daud Beureueh) yang masih terwariskan dan teraktifasi sampai pada generasi masa kini.

Kedua, tidak terciptanya keadilan sosial dan ketimpangan secara ekonomi. Dalam frame ini, radikalisme muncul karena akses kapitalisme yang menciptakan dan menjadikan kelompok-kelompok tersebut tak bisa memiliki akses pada sumber-sumber modal penghidupan. Secara umum, perkembangan radikalisme dinilai sebagai akibat langsung dari kemiskinan, ketidaksetaraan, dan marginalisasi dalam aspek ekonomi dan sosial. Kondisi itu menjadikan lebih mudah bagi orang miskin teradikalisasi.¹³

¹² Zudi Setiawan, "Dinamika Pergulatan Politik dan Pemikiran Formaliasi Syariah pada Era Reformasi Spektrum", *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 2 (Juni 2008).

¹³ <http://islamnesia.com/2015/04/menguatnya-radikalisme-di-indonesia/>

Harus dicatat bahwa munculnya gerakan radikalisme bukan hanya merupakan aspirasi ideologis yang berkuat pada romantisme sejarah untuk mengembalikan daulat khilafah, tetapi juga sebagai respons atas kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak warganya sehingga mengakibatkan kesenjangan. Ada tanggung jawab negara yang tak terpenuhi sehingga demokrasi saat ini dianggap gagal memahami pluralitas kehidupan keberagaman dan membawa cita-cita kesejahteraan. Namun, jika betul bahwa kesenjangan menjadi sebab, maka gerakan radikalisme yang terjadi bisa saja dipahami sebagai salah satu bentuk gerakan sosial baru.

Para peneliti dan akademisi meyakini, kesenjangan social, ketidakadilan, ketimpangan antargolongan dan makin sulitnya mencari sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja, memicu radikalisme dan terorisme di era reformasi. Sungguh tak masuk akal untuk tidak mengaitkan berbagai peristiwa-peristiwa itu dengan kehadiran demokrasi beserta permasalahan di dalamnya seperti ketidakadilan, korupsi dan ketimpangan.

Hampir pasti, peristiwa-peristiwa tersebut tidak bisa lepas dari berbagai kepentingan politik kekuasaan yang berlangsung pada skala global, nasional, dan lokal. Kemunculan gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme yang merebak diberbagai wilayah Indonesia menjadi salah satu bukti atas kerapuhan demokrasi. Demokrasi dalam aras ini, sekedar menjadi slogan pembenaran sekaligus ruang pendakwaan atas nama kebebasan. Ada semacam paradoks atau krisis yang tak bisa dipulihkan dalam problem keberagaman dan kebangsaan. Ada kesenjangan yang tak kunjung berdamai antara doktrin agama dan logika publik dalam pluralitas.

Islamisme Radikal vs Kapitalisme Global

Di Dunia Islam, termasuk Indonesia, modernisasi dan globalisasi berhadapan dengan radikalisasi para Muslim yang mengalami marginalisasi dan alienasi. Beberapa dekade terakhir kita menyaksikan globalisasi telah melanda dan melumat dunia Islam, termasuk Asia Tenggara. Dan sudah menjadi fakta bahwa globalisasi pada akhirnya hanya menguntungkan segelintir orang, dan menyengsarakan sejumlah besar penduduk planet Bumi ini. Dalam bukunya *One World, Ready or Not, The Manic Global Capitalism* (1998), William Greider melontarkan tesisnya bahwa motor di balik globalisasi adalah yang disebutnya "kapitalisme global."

Kaum kapitalis yang rakus dan tak pernah puas beramai-ramai menguras kekayaan dunia, masuk ke dalam jaringan kapitalisme global, dengan memanfaatkan teknologi komputer, mengabaikan semua tatanan kesantunan hidup bersama. Memang para kapitalis global itu telah memungkinkan penyebaran kenyamanan dan kemudahan, tetapi itu semua hanya untuk 10 persen dari penduduk bola dunia; sementara jurang antara si kaya dan si miskin (istilah baru: digital divide) menjadi kian menganga. Lantas, siapa kapitalis global itu? Mereka adalah para spekulasi uang yang jumlahnya tidak lebih dari 200.000 orang (yang terkenal di antaranya adalah George Soros), dan sekitar 53.000 perusahaan multinasional (multi-national corporations) yang mempekerjakan sekitar enam juta orang di seluruh dunia.

Harus ditambahkan di sini adalah institusi keuangan internasional, IMF (International Monetary Fund) dan World Bank. Lembaga keuangan internasional itu didukung oleh WTO (World Trade Organization) secara langsung atau tidak langsung ikut membantu para kapitalis global untuk membuka pasar di seluruh dunia yang sampai sekitar tahun 1970-an merupakan pasar yang tertutup. (I.Wibowo, 2002)

Dalam konteks ini, Edward Luttwak (Turbo Capitalism, 1999) mengatakan bahwa peranan negara dalam proses penjarahan global ini lebih mengarah pada geo-economics, kalau dulu pada geo-politics. Dalam aras geo-economics, negara-negara kini "berperang" dengan mengerahkan "pasukan" mereka yang terdiri dari para pelaku bisnis internasional dan juga birokrasi yang mereka miliki. Strategi yang dipakai juga mirip pada masa lampau: membentengi diri sambil menyerang lawan. Tentu saja negara-negara maju (AS, Jepang, Eropa Barat) rata-rata memenangi peperangan ini jika mereka berhadapan dengan negara yang belum maju.

Pada tingkat ekonomi, terjadilah pemaksaan pembukaan pasar-pasar di semua negara di seluruh dunia. Pada tingkat politik, terjadilah the death of democracy karena para politisi lebih suka menjamu para kapitalis mancanegara daripada konstituen mereka di dalam negeri. Pada tingkat ekologi, terjadilah perusakan lingkungan oleh perusahaan multinasional. Pada tingkat kebudayaan terjadilah *McDonaldization*, sebuah istilah tentang serbuan kebudayaan global (Amerika?) yang menekan kebudayaan lokal sampai ke sudut yang paling sempit. Ideologi yang dipakai untuk membenarkan semua itu disebut "neoliberalisme". Di tengah era neoliberalisme itu, tiba-tiba kita disentak oleh tragedy serangan pemboman WTC New York, 11 September yang meledakkan isu terorisme Islam, fundamentalisme Islam, Islamisme dan cap-cap buruk lainnya terhadap ummat Islam sehingga muncul kemudian bahasa politik "Islamisme versus kapitalisme (global)."

Islamisme dan Modernisme

Modernisme sekuler atau pembangunanisme era Orde Baru Soeharto (1966-1998) telah meninggalkan beban warisan utang US\$150 milyar dan beban BLBI konglomerat hitam sekitar Rp600 trilyun, yang amat membebani dan

menyakitkan hati rakyat, di mana ketidakadilan sosial meruak, kemiskinan meluas dan korupsi merajalela.

Realitas muram itu telah mengalienasikan sebagian besar kaum Muslim dari arus perkembangan modernisasi itu sendiri. Ketimpangan struktural, disparitas ekonomi dan dislokasi sosial-kultural di tingkat lokal, nasional, regional maupun global, telah mendorong kaum Muslim mencari kembali Islam dan melakukan “reinventing Islam” dalam batas-batas tertentu, dengan aneka ragam persepsi, interpretasi dan imajinasi mereka. Globalisme pada skala masif telah menimbulkan marginalisasi dan periferalisasi Islam, yang sejak jatuhnya Komunisme, dipersepsikan AS/Barat sebagai ancaman baru dan musuh bebuyutan dalam paradigma “Benturan Peradaban” ala Samuel Huntington. Umat Islam di Indonesia pun tak terelakkan dari pusaran arus global ini, dan terkena dampaknya.

Perbincangan atas situasi yang rentan dan rawan tersebut, ternyata berkesinambungan dengan Samuel Huntington yang menganggap kebudayaan non-Barat, terutama kebudayaan Islam, tidak kompatibel terhadap pengembangan kebebasan individu, demokrasi politik, negara hukum serta Hak-hak Asasi Manusia (HAM). Berbagai hal tadi, menurut Huntington, membedakannya dengan kebudayaan Barat yang unik dimana perbedaan peradaban menjadi faktor penghambat bagi demokrasi antara demokrasi Barat dan non-Barat, khususnya di Indonesia.

Jika ditelisik lebih jauh, ada semacam pergeseran dan penyebaran gagasan demokrasi sebagai akibat perbedaan karakteristik budaya dan masyarakatnya. Di Indonesia, komunalitas lebih kental dari pada masyarakat Eropa yang lebih individualis, sehingga komunitas atau kelompok memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengikat imajinasi seseorang.

Akibatnya, acapkali nilai-nilai toleransi, kedamaian, dan pengampunan menjadi milik masing-masing kelompok secara eksklusif. Konsekuensinya, kehidupan demokratis dalam bernegara tersandera oleh kepentingan kelompok. Kekhawatiran selanjutnya adalah munculnya pertentangan dan permusuhan dalam pola hubungan konflik yang tak berkesudahan, saling menuduh bahkan saling mengkafirkan. Puncak ekstremnya adalah munculnya fenomena kekerasan atas nama agama.

Dalam narasi yang lain, pola hubungan konfliktual yang tak jarang melibatkan kekerasan antar kelompok agama pada akhirnya terjebak pada politik angka dan watak misionaris dari agama-agama. Ada semacam persaingan dalam hal jumlah pengikut dan perebutan ruang dakwah di antara kelompok-kelompok agama. Ditengarai, mengerasnya konflik di antara agama-agama samawi, terutama yang melibatkan kekerasan, merupakan akibat logis dari habisnya ruang ekspansi (perluasan wilayah) masing-masing kelompok agama dalam memperbesar angka pengikut menyusul ditaklukkannya agama-agama suku yang pernah bersemai di nusantara.¹⁴

Oleh karena itu, salah satu respon negara atas fenomena radikalisme seperti itu bisa dilihat dari pemblokiran beberapa situs-situs Islam yang dilakukan oleh BNPT dan Keminfo beberapa tahun lalu. Pemblokiran terjadi sebagai akibat adanya muatan yang dinilai mempropaganda dan semakin masifnya perkembangan ajaran dan pengaruh radikalisme dan terorisme, khususnya gerakan ISIS di Indonesia.

Meskipun, disatu sisi pemblokiran tersebut menyisahkan sebuah permasalahan atas nama kebebasan (HAM) yang merupakan prinsip dasar demokrasi. Adanya

¹⁴ <http://islamnesia.com/2015/04/menguatnya-radikalisme-di-indonesia/>

keresahan sosial masyarakat dan ancaman keamanan terhadap negara kemudian menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan pemblokiran tersebut.

Respon kritis pun pelak semakin menguat dari berbagai kelompok sosial atas kejadian itu dengan menggandeng demokrasi sebagai fondasi argumentasinya. Pada titik ini, demokrasi berada pada kondisi kritisnya. Akhirnya, semua akan meninggalkan masalah yang berkepanjangan akibat perseteruan dan konflik dengan menggunakan berbagai dalil pembenaran dibalik tameng agama maupun demokrasi.

Ditengarai, dalil kebebasan dalam demokrasi telah menyediakan ruang ekspresi bagi menguatnya wacana gerakan radikalisme dan ancaman terorisme yang berakhir pada terjadinya kekerasan simbolik. Masifnya wacana itu telah mengobok-obok, memancing, dan mengeksploitasi hasrat dan perasaan massa, dengan manipulasi, provokasi yang berlangsung melalui berbagai media cetak dan virtual.

Dalam hal ini, perkembangan teknologi yang semakin canggih telah menjadi media untuk menyemai gagasan dan menyebarkan benih-benih radikalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Padahal banyak dari mereka yang belum melek pendidikan dan masuk dalam kategori ekonomi lemah. Mereka yang masuk dalam dua kategori tersebut rawan disusupi gerakan-gerakan radikal dengan iming-iming peningkatan kesejahteraan hidup.

Tak hanya itu, dengan perkembangan tersebut, kebanyakan orang sekarang menjadikan mesin pencari (*Google*, dll.) sebagai tempat bertanya dan mencari jawaban atas keresahan spritualnya. Terkait dengan itu, Ahmad Mustofa Bisri mengatakan, banyak orang yang ingin meniru Nabi secara salah kaprah, banyak orang atau kelompok Islam yang merasa sudah seperti nabi ketika memakai jubah, surban, dan berjenggot. Dengan kata lain, menyalahgunakan nama Tuhan untuk melakukan kerusakan.

Kondisi keberagaman yang akut seperti itu secara tidak langsung telah menggeser cara pandang setiap kelompok dalam melihat kelompok lainnya dalam dikotomi; benar dan salah, musuh dan kawan, kafir dan suci. Ada masalah yang ditimbulkan kemudian dalam memahami persoalan perbedaan dan adanya tendensi yang menggejolak untuk menggiring kelompok lain dalam kebenaran kelompok tertentu atas nama ketakwaan. Lagi-lagi, kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari gagalnya negara demokrasi dalam menciptakan kesejahteraan dan kerukunan.

Pada titik ini, pemurnian agama sebagai basis nilai yang menopang demokrasi dan politik (negara), sebagai struktur untuk mempertemukan kepentingan publik menjadi penting untuk direfleksikan penyelesaiannya di berbagai persoalan ketimpangan sosial dan diskriminasi ekonomi, serta problem pluralitas keberagaman, yang kesemuanya merupakan persoalan dasar dari semakin menguatnya gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Pemurnian akan mengajak para pemeluk agama menghormati nilai-nilai toleransi, kedamaian, pengampunan, dan komitmen pada janji. Mereka diajak untuk tidak hanya berhenti pada kehendak baik yang akan mudah kandas, tapi juga membangun institusi yang akan membantu menjamin stabilitas nilai-nilai tersebut. Ini berarti membutuhkan sistem politik yang mampu menopang pluralitas dan menyelesaikan konflik-konflik dengan cara damai, yaitu demokrasi yang berbasis pada nilai-nilai tersebut.

Mudah dimengerti, semakin menguatnya pengaruh gerakan radikalisme dan terorisme yang didukung oleh berbagai perkembangan teknologi yang semakin canggih terkait erat dengan situasi sosial yang masih menyisahkan kesenjangan, diskriminasi, dan marginalisasi yang berbuntut pada kekerasan. Namun demikian, penyelesaian dari persoalan-persoalan tersebut tidak bisa hanya semata-mata

disorot dalam asumsi keamanan sebagai ancaman yang perlu dibasmi karena mereka adalah masyarakat yang menjadi korban, atau asumsi agama sebagai bentuk perjuangan suatu kelompok atas nama jihad yang mengakibatkan tindakan kekerasan dan kebencian antar agama, tapi lebih pada sebab dasar dari kegagalan negara dalam menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan dan berkemanusiaan.

Dalam hal ini, Islamolog Oliver Roy¹⁵ dalam studinya mengingatkan bahwa strategi gerakan kelompok-kelompok neofundamentalisme Islam atau Islamisme radikal untuk melancarkan Islamisasi dari bawah dan kecenderungannya membentuk kelompok-kelompok kecil ultraortodoks, secara potensial menjadi basis bagi "reislamisasi" sekaligus radikalisasi politik Islam militan dewasa ini.

Dalam konteks ini, studi AE Priyono (2003) mengungkapkan mengenai terjadinya revitalisasi gerakan-gerakan radikal baru akibat keterlibatan kelompok-kelompok neofundamentalis atau Islam militan -istilah Samuel Huntington- dalam perang di Afghanistan dan Irak serta Timur Tengah umumnya, yang juga potensial melahirkan terbentuknya gerakan-gerakan terorisme di tingkat regional dan internasional yang lebih luas, yang berguna untuk menjelaskan latar belakang dan memetakan apa yang terjadi di lingkaran Islam radikal Indonesia dewasa ini.

Dalam hal ini, Sydney Jones mencatat adanya gambaran mengenai visi dua kelompok Islam di Indonesia, yakni Darul Islam, "Jaringan Ngruki" dan (Majelis Mujahidin Indonesia- MMI) yang secara kuat mencerminkan tema-tema politis dan ideologis neo-fundamentalisme Islam, atau radikalisasi Islam politik di Indonesia pasca Orde Baru.

¹⁵ Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, (Harvard University Press, 1994)

Perkembangan-perkembangan penting memang terjadi secara signifikan dalam gerakan Islam-politik di Indonesia setelah jatuhnya Orde Baru sampai era reformasi dewasa ini. Masa transisi menuju demokrasi setelah tumbangannya pemerintahan otoritarian Orba yang secara tradisional didukung oleh tentara, telah menyebabkan gerakan-gerakan Islam politik seolah-olah muncul kembali dari bawah tanah. Meskipun Presiden Soeharto di era Orba telah berusaha mengakomodasi kelompok-kelompok Islam yang lebih moderat dari kelas menengah Muslim melalui dibentuknya ICMI pada 1990-an, tetapi tampaknya strategi ini dimaksudkan lebih untuk kepentingan politiknya sendiri dalam upaya memperluas basis dukungannya untuk menghadapi oposisi dari kelompok-kelompok pro-demokrasi yang semakin menguat.

Strategi ini bukan hanya lebih memperkuat kecenderungan konservatisme dan oportunisme di kalangan kelas menengah Muslim, tetapi juga mengeksklusifkan mereka dari perjuangan pro-demokrasi yang lebih luas. Kendati politik "merangkul Islam" ini relatif cukup berhasil menjauhkan kelas menengah Muslim dari barisan oposisi Islam, khususnya faksi modernis yang moderat, sebagian besar aspirasi politik Muslim dari faksi-faksi yang lebih radikal, tetaplah tidak diakomodasi. Lebih dari itu, menguatnya apa yang disebut Schwarz sebagai "lobi-anti-ICMI" dari kalangan oposan Islam tradisional maupun fundamentalis, telah menyebabkan kesadaran politik Islam yang terus menguat sejak 1980an, khususnya dari kelas bawah. Meski tetap saja tersembunyi di bawah-tanah dan tidak muncul ke permukaan.¹⁶

¹⁶ AE Priyono, *Fenomena Terorisme Agama dan Kebangkitan Neofundamentalisme Islam di Indonesia pasca Orde Baru*, *Jurnal Demokrasi dan HAM* vol.3 no.1 Januari-April 2003, h.6-34. Lihat, Adam

Maka, tak terelakkan bahwa di era reformasi (1999-2007) ini, tiba-tiba lanskap politik memperlihatkan ledakan yang mengejutkan akibat munculnya ekspresi-ekspresi yang lebih radikal dari kekuatan-kekuatan Islam-politik yang menghendaki implementasi perda-perda syariah maupun Negara Islam.

Dalam suasana seperti itu muncul kembali desakan untuk memberlakukan Piagam Jakarta, penerapan Syariah secara lebih nyata, bahkan revitalisasi Darul Islam, negara-Islam yang diproklamasikan oleh Kartosuwirjo pada Agustus 1949. Mengenai hal ini, AE Priyono mencatat bahwa isu tentang dibentuknya pemerintahan kekhalifahan Islam Nusantara ini pertama kali muncul dalam tuduhan pemerintah Malaysia terhadap seorang aktivis Jamaah Islamiyah, Fikiruddin, alias Abu Jibril, asal Indonesia yang mem-bangun basis gerakannya di Malaysia. Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan aktivis Darul Islam yang pernah meng-ikuti rapat-rapat Rabithah Mujahidin di Malaysia, ada cukup kuat informasi tambahan bahwa gagasan kekhalifahan Asia Tenggara yang didukung pula oleh delegasi-delegasi dari Muangthai Selatan, Burma, dan Kamboja. Indonesia, Filipina Selatan, dan Malaysia. Bahkan utusan GAM (Aceh) pun hadir beberapa kali. Selain itu rapat-rapat Robithah Mujahidin - forum kepanitiaan yang memfasilitasi pembentukan kekhalifahan regional ini - seringkali dihadiri pula oleh delegasi-delegasi dari Afghanistan, Yordania, Aljazair, Kuwait, dan Arab Saudi.

Lebih dari itu, muncul pula gerakan-gerakan politik Islam militan yang melibatkan berbagai aktivis Islam dari gerakan-gerakan radikal dan fundamentalis di seluruh dunia yang berjuang untuk mendirikan apa yang disebut sebagai

Schwarz, *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*, Boulder, CO, and San Francisco: Westview Press, 1994

Daulah Islamiyah Nusantara yang mencakup empat wilayah negara-bangsa di Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, dan Moro (Filipina Selatan) Perkembangan-perkembangan semacam ini jelas menimbulkan kejutan yang luas, khususnya bagi *civil society*, para akademisi dan pengamat yang selama ini menganggap Islam di Indonesia berwatak moderat dan pluralis dan bahkan sering dicitrakan sebagai model yang berhasil dari simbiosis antara Islam dan negara-bangsa yang sekuler.

Para akademisi dan analis pun bertanya-tanya: Bagaimana mungkin dari masyarakat Muslim yang dikenal toleran, pluralis dan inklusif seperti Indonesia, muncul gerakan-gerakan fundamentalis-radikal yang berpotensi mengganggu stabilitas regional? Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa di tengah-tengah maraknya ekspresi-ekspresi politik Islam radikal itu, terjadi serangkaian peristiwa kekerasan dan teror bom yang di antaranya melibatkan jaringan-jaringan kelompok Islam di belakangnya.

Dari 41 kasus peledakan bom yang terjadi di Indonesia sejak Januari 1998 hingga Oktober 2002, yang sebagian besar identifikasi pelakunya hingga sekarang masih gelap dan tetap menimbulkan teka-teki, ada berbagai petunjuk bahwa sebagian di antaranya bisa diduga berkaitan dengan aktivitas-aktivitas teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memiliki jaringan dengan gerakan neo-fundamentalisme Islam baik di tingkat lokal maupun regional. Gerakan-gerakan militan Islam tertentu itu bisa diduga terlibat karena beberapa anggotanya yang ditangkap mengakui menjadi pelaku beberapa peristiwa teror, atau mereka membeberkan keterkaitan tokoh-tokoh tertentu di kalangan gerakan militan sebagai aktor-aktor penting yang mempunyai jaringan dengan operasi-operasi teroris; atau dengan cara yang lain lagi: berbagai dokumen intelijen berhasil membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai

akibat langsung dari kebijakan pro-kekerasan yang diadopsi oleh organisasi-organisasi Islam milian tertentu.

Pada titik ini, memang harus diakui masih terjadi polemik kontroversial yang sengit untuk membuktikan secara langsung hubungan antara ideologi dan strategi fundamentalisme Islam dengan kegiatan-kegiatan teror. Ini berkaitan dengan pengalaman di masa lalu di mana banyak kasus "terorisme Islam" ternyata merupakan hasil rekayasa politik, yang justru dirancang oleh dinas-dinas intelijen negara.¹⁷

Namun demikian, tetap harus dikatakan bahwa ada berbagai fakta yang bisa diberberkan tentang tema-tema politik dan ideologis dari gerakan-gerakan Islam fundamentalis yang menjustifikasi tindakan-tindakan pro-kekerasan, dan karena itu membuka peluang bagi timbulnya aksi-aksi teroris. Beberapa kelompok gerakan Islam fundamentalis pun, seperti diketahui, secara terang-terangan membangun sayap militer dalam bentuk laskar-laskar bersenjata. Misalnya, seperti diakui oleh jurubicara Darul Islam, Al Chaidar, dari 14 faksi yang terdapat di dalamnya tiga faksi di antaranya merupakan sayap militer organisasi tersebut, yakni Laskar Jundullah, Laskar Hizbullah, dan Laskar Fatahillah. Selain itu, menurut Al Chaidar pula, ada juga beberapa faksi yang mempunyai jaringan dengan organisasi Al Qaeda.

Dengan anggota yang diklaim bejumlah sekitar 18 juta orang, Darul Islam memang merupakan salah satu di antara kelompok-kelompok Islam fundamantalis yang secara tegas menyatakan berjuang untuk menegakkan kembali Negara Islam Indonesia (NII) sebagaimana diproklamasikan

¹⁷ Sydney Jones, *"Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of 'the Ngruki Network' in Indonesia*, Jakarta/Brussels: International Crisis Group, 8 Agustus 2002.

Kartosoewiryo tetapi yang kini disabot oleh pemerintah RI. Mereka menganggap perjuangan (jihad) itu harus dilakukan dengan cara kekerasan sejauh pemerintah RI tidak mau mengadakan perundingan dan sejauh TNI masih ikut campur tangan dalam penyelesaian konflik tersebut.

Selama kesepakatan tentang dua isu itu tidak tercapai, aktivis Darul Islam yang bergerak di bawah tanah atau di atas tanah melalui jalur organisasi massa dan kepartaian, tidak bisa menjamin bahwa tindakan-tindakan kekerasan berupa serangan terhadap sasaran-sasaran publik, termasuk gereja dan pusat perbelanjaan/mall, akan bisa dihentikan. Darul Islam juga berpandangan bahwa organisasinya memang berada di luar organisasi-organisasi Islam mainstream di Indonesia, bahkan berpendapat bahwa semua orang Indonesia yang tidak mau bergabung dengan Darul Islam, termasuk orang Islam yang menjadi warga negara Indonesia, adalah kafir.¹⁸

Dikhotomi Islam dan kafir oleh kalangan radikal Islam dan Muslim garis keras lainnya yang melatarbelakangi para ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, Paramadina, Persis dan kelompok Islam toleran lainnya untuk memerangi radikalisme agama dan terorisme dengan pendekatan multidisipliner dan komprehensif.

Dengan ekspektasi, radikalisme dan fundamentalisme Islam yang prokekerasan, bisa semaksimal mungkin dikikis, lantaran tak mungkin dilenyapkan habis.

Dan untuk itu kerja sama yang memadai antara negara, dunia usaha dan *civil society*, terutama *civil Islam* di Indonesia, merupakan suatu keniscayaan untuk membangun hari depan bersama. Ledakan bom-bom terorisme adalah

¹⁸ Interview with Al Chaidar, "Pancasila is the Source of the Problem", *Van Zorge Report on Indonesia*, 19 October 2001).

pengalaman pahit dan sejarah muram di Indonesia era reformasi, yang menunjukkan bahwa terorisme adalah musuh bersama masyarakat dan negara, yang membutuhkan langkah cerdas dan sikap tegas untuk mengatasinya.

Namun, radikalisme dan terorisme hanya bisa diatasi kalau negara mampu mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan kesetaraan serta hak-hak dasar rakyatnya secara memadai. Selama negara atau pemerintah gagal memenuhi hak-hak dasar rakyat, hak yang paling asasi itu, maka radikalisme dan terorisme menjadi sulit dibasmi, bahkan mungkin bisa tumbuh subur di negeri ini. *Wallahualam.* []

BAB IV

KEPOLISIAN:

DILEMA DALAM KONFLIK REMPANG DAN SOAL POLISI RW

Polisi adalah salah satu institusi negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugasnya, polisi sering kali menghadapi dilema kepolisian yang sulit. Di satu sisi, polisi harus menegakkan hukum dan mengikuti perintah pemerintah. Di sisi lain, polisi harus memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat yang menjadi objek pelayanannya

Salah satu contoh dilema kepolisian yang baru-baru ini menjadi sorotan adalah kasus konflik di Pulau Rempang. Di pulau kecil ini, terjadi konflik antara masyarakat lokal dengan investor asing yang ingin membangun proyek wisata. Masyarakat lokal menolak proyek tersebut karena merasa akan dirugikan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Investor asing, yang didukung oleh pemerintah pusat, mengklaim bahwa proyek tersebut akan meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah.

Polisi, yang ditugaskan untuk mengamankan lokasi proyek, mendapat tekanan dari kedua belah pihak. Dari pihak pemerintah, polisi diminta untuk menindak tegas para demonstran yang mengganggu jalannya proyek. Dari pihak masyarakat, polisi diminta untuk bersikap netral dan melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara. Polisi

pun terjebak dalam situasi yang membingungkan dan berbahaya.

Kasus Rempang bukanlah kasus yang terisolasi. Banyak kasus serupa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti kasus Tanjung Priok, Mesuji, Sidoarjo, dan lain-lain. Dalam kasus-kasus tersebut, polisi seringkali menjadi sasaran kritik dan kekerasan dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan tindakan mereka. Di sisi lain, polisi juga mendapat ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan proyek-proyek yang mereka amankan.

Bagaimana polisi bisa keluar dari dilema ini? Apakah polisi harus memihak kepada pemerintah atau kepada rakyat? Apakah polisi harus bersikap keras atau lunak? Apakah polisi harus menjadi penegak hukum atau penjaga perdamaian?

Tugas dan Fungsi Polisi

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu melihat lebih jauh tentang peran dan fungsi polisi dalam negara demokratis. Menurut Nelson (2001: 3), "police are the most visible and powerful representatives of the state". Polisi adalah wajah dan tangan negara yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, polisi harus menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, yaitu menghormati hak asasi manusia, mengedepankan dialog dan musyawarah, serta menghindari kekerasan dan diskriminasi.

Namun, nilai-nilai demokrasi tidak selalu sejalan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat otoriter dan represif. Lawrence (2022: 12) menulis bahwa "the politics of force is shaped by the political environment in which police operate". Polisi tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks politik yang kompleks dan

dinamis. Polisi harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat nasional maupun lokal. Polisi juga harus mempertimbangkan dampak-dampak dari tindakan mereka terhadap berbagai pemangku kepentingan.

Dalam situasi seperti ini, polisi membutuhkan kebijaksanaan dan profesionalisme yang tinggi. Polisi harus mampu menyeimbangkan antara loyalitas kepada negara dan empati kepada rakyat. Polisi harus mampu menentukan kapan harus menggunakan kekuatan dan kapan harus menggunakan persuasi. Polisi harus mampu membedakan antara pelanggar hukum dan korban ketidakadilan.

Miller (1998: 151) mengemukakan bahwa "*police brutality is not a simple phenomenon, but a complex and multifaceted one*". Polisi tidak selalu bersalah ketika terlibat dalam tindakan kekerasan. Polisi juga bisa menjadi korban dari tekanan politik, kurangnya sumber daya, rendahnya moral, dan buruknya komunikasi. Polisi juga bisa menjadi korban dari persepsi yang salah dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai musuh dan bukan sebagai sahabat.

Holmes dan Smith (2008: 4) mengatakan bahwa "*race and police brutality are intertwined in a vicious cycle*". Polisi tidak selalu adil ketika berhadapan dengan masyarakat yang berbeda suku, agama, ras, atau golongan. Polisi juga bisa menjadi pelaku dari diskriminasi, stereotip, dan prasangka. Polisi juga bisa menjadi pelaku dari penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan kolusi.

Polisi, sebagai manusia biasa, tentu memiliki kelemahan dan kesalahan. Namun, polisi, sebagai pelayan publik, harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dan integritasnya. Polisi harus bersedia untuk belajar dari pengalaman dan kritik. Polisi harus bersedia untuk berubah dan berbenah.

Dilema Kepolisian

Dalam kasus Rempang, polisi dihadapkan pada persoalan dilema kepolisian yakni situasi di mana anggota kepolisian atau lembaga penegak hukum menghadapi pilihan yang sulit antara menjalankan hukum yang ditetapkan pemerintah atau melindungi masyarakat. Oleh karena itu, agenda mewujudkan pemolisian yang demokratis dihadapkan pada banyak dilema kepolisian. Dilema kepolisian, singkatnya, adalah dilema yang dialami aparat polisi saat meningkatkan kapabilitas pemolisiannya. Pasalnya, di satu sisi ia perlu untuk meningkatkan posisi strategisnya dalam menghadapi dinamika ancaman keamanan di lapangan, namun di sisi lain ia akan dilihat sebagai potensi ancaman oleh masyarakat.

Oleh karena itu, harapan untuk melahirkan aktor-aktor kepolisian yang berwajah humanis dan berwatak demokratis adalah naif tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan soal dilema kepolisian. Dengan demikian, sejauh mana persoalan dilema kepolisian ini diantisipasi, dipertimbangkan, dan diperhitungkan dalam setiap tanggapan respon terkait dugaan kekerasan yang dilakukan aparat polisi. Dengan demikian, perlu adanya pertimbangan secara komprehensif dalam mencanangkan strategi mewujudkan pemolisian demokratis, dan bukan sekedar respon jangka pendek berbasis kepanikan semata melalui siaran pers, petisi, atau kecaman di media massa

Kasus bentrok antara polisi dan warga di Rempang memperlihatkan bahwa mengoperasionalisasi konsep-konsep dan nilai-nilai pemolisian yang demokratis ke dalam rujukan teknis bagi implementasi di lapangan bukanlah hal mudah; ia menuntut pemahaman menyeluruh dan kehati-hatian ekstra dalam menerjemahkan ke konteks ke-Indonesia-an.

Akhirnya, dilema kepolisian dalam konflik Rempang menjadi keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Namun, polisi di tengah harapan rakyat adalah sebuah cita-cita yang harus dicapai. Polisi harus menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah. Polisi harus menjadi mitra dan bukan lawan dari masyarakat.

Soal Polisi RW: Tak Terkait dengan Pemilu 2024?

Polisi RW adalah sebuah program yang digagas oleh Komisariss Jenderal Fadil Imran, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, untuk mengantisipasi kejahatan di masyarakat dengan cara mendekatkan polisi dengan warga di tingkat RW. Program ini sudah berjalan di Jakarta sejak Fadil Imran menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan mendapat apresiasi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Polisi RW diharapkan dapat mencegah dan menyelesaikan permasalahan Kamtibmas yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka dengan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat

Namun demikian, masih banyak pengamat yang terlalu politis mengaitkan ide Polisi RW dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mereka menganggap bahwa program ini merupakan upaya Fadil Imran untuk membangun popularitas dan elektabilitasnya sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden di Pilpres mendatang. Padahal, Fadil Imran sendiri telah membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa Polisi RW bukan karena mau Pemilu, tapi memang program yang akan diteruskan sebagai praktik polisi modern yang lebih mengutamakan pencegahan kejahatan daripada penegakan hukum.

Salah satu pengamat yang kritis terhadap Polisi RW adalah Asyari Usman, seorang jurnalis senior dan penulis buku. Dalam sebuah artikel yang dimuat di situs berita online, Asyari Usman menulis bahwa Polisi RW adalah

sebuah proyek politik Fadil Imran untuk mendulang suara di Pemilu 2024. Ia menilai bahwa program ini tidak efektif dan efisien dalam menangani kejahatan, karena polisi tidak bisa berada di semua tempat dan waktu. Ia juga menyoroti masalah anggaran dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini.

Sebaliknya, ada juga pengamat yang mendukung dan mengapresiasi Polisi RW sebagai implementasi dari Polmas atau kepolisian masyarakat. Salah satunya adalah I Wayan Gede Ardana, seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam tesisnya yang berjudul "Pembentukan polisi RW sebagai implementasi Polmas di Kecamatan Kebayoran lama" (2011), Ardana mengemukakan bahwa Polisi RW dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat. Ia juga mencontohkan beberapa kasus yang berhasil diselesaikan oleh Polisi RW di wilayah Kebayoran Lama.

Selain itu, ada juga beberapa penelitian yang membahas tentang implementasi dan dampak dari Polisi RW di berbagai daerah. Misalnya, Raden Muhammad Jauhari dalam tesisnya yang berjudul "Implementasi standar mutu pelayanan masyarakat oleh Polisi RW Polsek Kelapa Gading dalam rangka mewujudkan kamtibmas:

Studi penerapan Iso 9001-2008 standar mutu pelayanan di RW 012 Kel. Pegangsaan dua Kec Kelapa Gading" (2011), Imam Mustolih dalam jurnalnya yang berjudul "Program polisi mitra rukun warga dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polres Kota Malang" (2019), dan Adhibya Pramudito Hutama, Arthur Josias Simon Runturambi, dan Anang Iskandar dalam jurnal internasional mereka yang berjudul "The RW Police Program as an Implementation of Predictive Policing in the Legal Jurisdiction of the Jakarta Metropolitan Police Department

(Polda Metro Jaya)" (2023). Semua penelitian ini menunjukkan bahwa Polisi RW memiliki manfaat positif bagi Kamtibmas dan kesejahteraan masyarakat.

Polisi RW adalah sebuah program yang bertujuan untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan Kamtibmas di tingkat RW dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Program ini bukanlah sebuah proyek politik Fadil Imran untuk Pemilu 2024, melainkan sebuah inovasi kepolisian yang sesuai dengan arahan Kapolri. Program ini juga mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan peneliti yang telah melakukan studi tentang implementasi dan dampaknya.

Polisi RW adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tingkat lingkungan atau rukun warga (RW). Polisi RW bukanlah polisi komunitas (community policing) yang sama dengan "hand having" di Belanda dan di beberapa negara lainnya. Polisi RW adalah petugas kepolisian yang bertugas sebagai perantara (liaison officer) antara Polri dan masyarakat.

Polisi RW tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menekan dan mengontrol masyarakat ketika Pemilu 2024 dilaksanakan. Sebab, Polisi RW tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Kewenangan tersebut tetap berada di tangan penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum yang berwenang. Polisi RW hanya berperan sebagai pencegah dan penyelesaian masalah Kamtibmas yang berpotensi menimbulkan konflik atau kekerasan dalam pemilu.

Selain itu, Polisi RW juga tidak dapat mengontrol masyarakat secara sepihak. Polisi RW harus bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan lain-lain. Polisi RW harus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan

masyarakat, serta menghormati hak-hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Polisi RW harus bersikap profesional, netral, dan proporsional dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, bantahan bahwa Polisi RW adalah alat untuk menekan dan mengontrol masyarakat ketika Pemilu 2024 dilaksanakan adalah tidak berdasar. Polisi RW adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat. Polisi RW adalah mitra dan sahabat masyarakat, bukan musuh atau pengawas masyarakat. []

BAB V

EKONOMI-POLITIK JOKOWINOMICS DAN KEMUNDURAN DEMOKRASI

Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY-Jusuf Kalla, SBY-JK) sampai era Presiden Jokowi-Maruf Amin dewasa ini, para elite istana dan elite strategis di Jakarta tidak menyadari dan tidak peduli bahwa akibat menganut neoliberalisme sesuai resep IMF, Bank Dunia dan WTO, kini komodifikasi terhadap wilayah kehidupan sosial semakin meluas, seakan “semuanya untuk dijual”, “Indonesia is for sale”.

Karena itu, kini masyarakat, terutama ummat Islam, khawatir dan gelisah: Masihkah kita memiliki ‘stok’ kepemimpinan nasional yang kuat moral-akhlaknya, visioner, tangguh dan responsif atas kemunduran dan krisis multi dimensional yang diderita oleh rakyat dan bangsanya? Ataukah demokrasi prosedural (demokrasi wani piro, demokrasi transaksional) sudah benar-benar membuat para elite penguasa kita menjadi para pemimpin yang lembek, yang tidak memiliki etika, moralitas dan patriotisme untuk membela kepentingan bangsa, nation, dan memberdayakan rakyat banyak yang lemah?

Dalam kaitan ini, studi Prof. Vedi R. Hadiz dan Prof Richard Robison sudah memperingatkan bahwa demokrasi prosedural di Indonesia sejak jatuhnya Soeharto, pasca Reformasi 1998, hanya menguatkan kuasa kelompok plutokratik, oligarkis dan kelas elite tertentu yang diuntungkan oleh sistem demokrasi liberal dan ekonomi pasar liberal (The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia, Jurnal Indonesia No 96, Special Issue: Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics, October 2013: 35-57). Terjadi "kegagalan negara" pasca-Reformasi 1998 dalam menegakkan kedaulatan keluar dan ke dalam. Meminjam perspektif Prof Robert Rodberg, akademisi Harvard University, fenomena kegagalan negara (the failure of state) itu bisa dilihat dari belum terwujudnya kepemimpinan nasional yang efektif, kuat, decisive, berani, dan kreatif untuk membawa perubahan yang lebih baik. Sedangkan dalam konteks kedaulatan ke luar, negara kita tidak memiliki kemampuan untuk menjaga daulat kawasan/pulau-pulau perbatasan paling luar dan tidak cukup kapasitas untuk terlibat dalam pergaulan antarbangsa dalam posisi terhormat. Dalam kenyataannya, negara kita gagal menghadapi kekuatan pasar bebas yang merontokkan usaha domestik. Kegagalan menegakkan kedaulatan negara ke dalam ditandai pula dengan kegagalan mewujudkan hukum dan ketertiban, mewujudkan keadilan sosial, menjamin kesejahteraan masyarakat, dan menegakkan HAM secara simultan sehingga ipso facto gagal mengemban amanat konstitusi.

Tidak Berpihak ke Lapis Bawah

Dalam hal ini, secara faktual, Vedi Hadiz (2005) menyingkapkan bahwa:

Pertama, fakta memperlihatkan bahwa proses-proses ekonomi-politik yang terjadi umumnya tidak berada pada posisi yang berpihak kepada kelompok-kelompok lapis

bawah. Sebaliknya, kelompok-kelompok dominan yang awalnya diperkirakan akan mengalami pukulan telak sebagai akibat gerakan reformasi terbukti tetap memegang kendali atas jalannya kekuasaan ekonomi dan politik. Perbedaannya dengan era Orde Baru hanyalah terletak pada bentuk kekuasaan yang relatif lebih cair, terbuka, dan terdesentralisasi.

Kedua, dominasi kelompok-kelompok lama dalam proses-proses ekonomi-politik pasca-Soeharto di satu sisi serta lemahnya kelompok-kelompok masyarakat lapis bawah di sisi lain, menurut pengamatan Vedi Hadiz, merupakan sebuah warisan historis yang akar-akarnya dapat ditelusuri pada periode Orde Baru. Tidak diragukan lagi bahwa pengalaman disorganisasi dan deideologisasi sistematis terhadap berbagai kekuatan masyarakat sipil di bawah kediktatoran Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dasawarsa itu memiliki konsekuensi politik yang cukup serius. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila berbagai kelompok masyarakat sipil, terutama kalangan masyarakat lapis bawah, tidak terlalu siap dengan agenda-agenda transformatif ketika peluang mulai terbuka bersamaan dengan lengsernya Soeharto dari kekuasaan di tahun 1998.

Ketiga, sejauh ini gelombang reformasi ternyata juga tidak cukup memiliki kemampuan untuk menyapu bersih kelompok-kelompok dominan "eks" Orde Baru. Bahkan, kelompok-kelompok ini mampu menyesuaikan diri terhadap logika reformasi. Melalui kerangka kelembagaan baru di era reformasi ini yakni partai politik, pemilu, parlemen, dan desentralisasi pemerintahan kelompok-kelompok dominan dengan cepat melakukan penataan diri kembali dan tetap memiliki akses yang sangat kuat atas proses-proses ekonomi-politik di Indonesia.

Keempat, pada gilirannya, bentuk-bentuk perubahan kelembagaan politik pasca-Soeharto, yang tampaknya memberikan semacam isyarat yang menandai titik awal untuk mengantarkan Indonesia memasuki gerbang demokrasi yang lebih partisipatif, ternyata bergerak ke arah yang "lain". Hingga hari ini, lembaga-lembaga demokrasi hasil reformasi tetap kebal dari kepentingan mayoritas masyarakat lapis bawah sekalipun telah tersedia ruang artikulasi yang relatif lebih terbuka. (Ismail Hapsani, Reformasi Ekonomi-Politik, Milik Siapa?, 2005)

Kelima, kehadiran lembaga-lembaga demokrasi ternyata tidak serta-merta diiringi oleh munculnya praktik politik yang lebih beradab, melainkan telah ditandai oleh merajalelanya praktik politik uang, eksploitasi simbol-simbol identitas melalui jalur etnis dan agama, serta kekerasan dan premanisme.

Keenam, sementara itu, "perubahan" di bidang ekonomi pasca-Soeharto juga tidak disertai munculnya rule of law/penegakan hukum yang adil dan baik, tidak ada transparansi, dan akuntabilitas publik sebagaimana layaknya sistem ekonomi pasar bebas, melainkan justru menyuburkan praktik korupsi-kolusi-nepotisme (KKN) gaya baru.

Di tengah kesuraman dan pesimisme itu, maraknya Populisme Islam sebagai politik identitas dan keinginan kaum Muslim mencari pemimpin dari kalangan Muslim tidak lepas dari situasi sosial dan perekonomian yang tidak menguntungkan masyarakat luas tersebut.

Populisme Islam, kesuraman ekonomi, dan ketidakadilan social sampai hari ini saling bersinggungan dan saling bergesekan yang dengan mudah menjelma menjadi benih prasangka, stigmatisasi, dan potensial anarki. Selama lebih dari 50 tahun modernisasi dan pembangunan, Indonesia hanya mampu mencapai PDB/Kapita sebesar \$3600, sedangkan Singapura dapat mencapai \$51,400 (hampir

15 kali lipat dari kita), Korea Selatan \$25,500 (7 kali lipat jumlah kita), Taiwan \$ 22.500 (6,25 kali kita) dan bahkan Malaysia bisa mencapai \$11.000 (3 kali kita).

Pada tahun 2017, penulis mencatat bahwa Presiden Jokowi melampiaskan kekecewaan dan kemarahannya kepada para menteri perekonomian karena stagnasi ekonomi, defisit transaksi berjalan yang meningkat, pertumbuhan ekonomi yang hanya 5% dan lain sebagainya.

Artikulasi program Menteri Keuangan Sri Mulyani dan tim ekonomi ternyata hanya “verbalisme belaka”. Perekonomian stagnan, daya beli masyarakat merosot tajam dan korupsi masih merajalela serta harapan masyarakat terhadap kehidupan ekonomi yang lebih baik terbukti semakin kabur, malah kian sirna.

Bahwa Jokowi menantang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) agar pertumbuhan ekonomi 2017 bisa mencapai 5,3 hingga 5,5%. Namun Sri Mulyani mengelak dan hanya mampu mencapai 5,1 persen, padahal prediksi Bank Pembangunan Asia bisa tumbuh hingga 5,3 persen dan Bank Dunia memperkirakan bisa tumbuh 5,2 persen. Padahal, pertumbuhan hingga kuartal ini hanya 5,1%. Ketidakmampuan Sri Mulyani dipertanyakan dan disinggung oleh Jokowi, sementara langkah Sri Mulyani untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi sudah terbatas atau bahkan relative gagal. Bahasa tubuh dan karakter Sri Mulyani sendiri waktu itu masih belum yakin mencapai target 5,2 persen. Dan ternyata ekonomi hanya tumbuh eksklusif 5,1% yang tidak bisa dibanggakan oleh Jokowi yang target pertumbuhannya sesuai Nawacita (Sembilan Program) adalah 7%.

Dengan hanya tumbuh eksklusif sebesar 5% itu, maka warisan Jokowi kepada rakyat menjadi lemah, meski tidak punah, namun tidak ada yang bisa dibanggakan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi terkikis. Maka tak

heran jika semakin banyak masyarakat yang kecewa dengan kinerja Tim Perekonomian Kabinet dan akhirnya menysasar wajah Jokowi sendiri, yang celaknya berambisi memperpanjang kekuasaan menjadi tiga periode.

Dan dengan memunculkan Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024 melalui nepotisme dan pelanggaran berat atas etika yudisial di Mahkamah Konstitusi yang diketuai Anwar Usman, paman si Gibran, maka tak perlak lagi keluarga Presiden Jokowi menjadi sasaran segala kekecewaan, kekesalan dan keresahan hingga protes, demonstrasi mahasiswa dan keluh kesah masyarakat/konstituennya sendiri pun meletus.

Menurut hemat saya, Tim Ekonomi Jokowi tidak bisa begitu saja berargumen bahwa kondisi perekonomian dunia sedang lesu, tidak tumbuh sesuai harapan dan sebagainya, dengan argumen bahwa kondisi tersebut juga dihadapi oleh semua negara di dunia.

Tim Ekonomi Jokowi juga tidak bisa hanya menghibur diri dan berbicara terlalu besar bahwa pada tahun 2045 akan menjadi kekuatan ekonomi dunia ke-5 dengan pendapatan per kapita US\$ 30 ribu dan kelas menengah 82 persen, karena itu semua masih bisa dipertanyakan. Misalnya soal Produk Domestik Bruto (PDB atau Produk Domestik Bruto -PDB) cara menghitungnya juga mencakup jumlah produksi barang dan jasa perusahaan asing di Indonesia. Misalnya perusahaan pertambangan emas dan tembaga PT Freeport Indonesia, PT Newmont, perusahaan migas seperti PT Chevron Indonesia (dahulu Caltex), Total Indonesia, Arco, Vico dan sebagainya.

Perusahaan-perusahaan ini dan banyak lainnya, sebagian besar keuntungannya dibawa kembali ke negaranya dan hanya menyisakan uang pajak, royalti kecil di Indonesia. Sehingga besaran angka GDP/PDB bisa menyesatkan jika dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat

Indonesia. Angka-angka tersebut masih perlu dipelajari dan didekonstruksi lebih dalam lagi.

Begitu pula dengan angka PDB per kapita sebesar 30 ribu dollar AS, itu hanya total angka PDB dibagi jumlah penduduk. Hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diberitakan baru-baru ini bahwa kekayaan empat orang terkaya setara dengan kekayaan 100 juta orang miskin di Indonesia. Kalau kekayaan itu dijumlahkan lalu dibagi rata dengan 100 juta orang ditambah empat orang terkaya, itulah yang disebut pendapatan per kapita. Jadi, 100 juta orang di antaranya adalah orang miskin. Namun karena penghitungan pendapatan per kapita ditambah kekayaan empat orang kaya, maka pendapatan per kapita menjadi dua kali lipat. Meski 100 juta penduduknya tetap miskin, hanya dalam angka per kapita seolah-olah pendapatan mereka dua kali lipat dari kenyataan. Kemudian angka per kapita tersebut digunakan para menteri perekonomian seolah-olah pembangunan ekonomi Jokowiomics berhasil. (Ir.Abdulrachim Kresno, eks demonstran ITB dan mantan tahanan politik Orde Baru, 2017)

Soal kelas menengah yang jumlahnya disebut-sebut mencapai 82 persen juga patut dipertanyakan. Kalau ukuran Bank Dunia tempat Sri Mulyani bekerja sebelum menjadi Menteri Keuangan saat ini yang mengatakan pendapatan di atas 4 dolar AS/hari adalah kelas menengah, maka kuli di pasar, kuli di bandara, di stasiun Gambir, pengamen yang penghasilannya bisa mencapai Rp 75 ribu hingga 100 ribu per hari bisa dikatakan sebagai kelas menengah.

Sedangkan pegawai yang digaji sebesar 4 juta (upah minimum regional atau UMR), bisa masuk dalam golongan menengah ke atas. Padahal kita tahu persis kehidupan mereka sangat sulit, repot, bahkan untuk sekedar membeli makanan bergizi setiap hari saja mereka tidak bisa. Apalagi

harga sayur pun sudah mahal. Lagi-lagi mereka makan Indomie dan lagi-lagi mie instan, makanan yang relatif kurang baik bagi kesehatan.

Oleh karena itu kita harus menggunakan langkah-langkah yang dapat dilihat dalam waktu dekat. Selain PDB, harus dilihat Gini gap rasionya, trennya harus mendekati 0,4. Juga harus diperhatikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM atau human development index) yaitu indeks yang menunjukkan kemajuan pendidikan, kesehatan, angka harapan hidup dan lain-lain. Indeks di Indonesia ini kurang disukai oleh para ekonom pemerintah, termasuk Sri Mulyani karena Indonesia selalu tertinggal karena para menteri perekonomian tidak pernah mengambil kebijakan yang tepat untuk memajukan IPM. Padahal suatu negara bisa maju jika IPM-nya tinggi. Dan dalam hal ini, Indonesia hanya menempati peringkat 113 dunia dalam IPM-nya, jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) selalu berpendapat pertumbuhan kita nomor tiga setelah China dan India. Hal ini tidak benar karena Filipina pada tahun 2015 tumbuh 5,9 persen, tahun 2016 tumbuh 6,8 persen dan tahun 2017 diperkirakan tumbuh antara 6,5 - 7,5 persen, Vietnam tahun 2015 tumbuh 6,7 persen, tahun 2016 tumbuh 6,2 persen dan tahun 2017 diperkirakan tumbuh 6,7 persen. Sedangkan Indonesia pada tahun 2015 tumbuh 4,79 persen, tahun 2016 tumbuh 5,02 persen, dan tahun 2017 tumbuh 5,1 persen. Jauh di bawah Filipina dan Vietnam. Sampai tahun 2018, pertumbuhan ekonomi kita kalah dari Vietnam dan Filipina.

Mengecewakan

Secara obyektif, kondisi perekonomian yang melemah itu sangat mengecewakan rakyat dan ummat Islam sehingga mendorong kaum Muslim mencari jalan sendiri untuk

mencari pemimpin bangsa, dengan semangat Populisme Islam di dalamnya menyambut Pilpres 2024. Umat Islam secara sosio-kultural semakin mengelompok, sedangkan partai politik Islam di Indonesia masih sibuk dengan politik uang dan patronase hingga stagnan dan menjadi "liabilitas/beban" bagi ummatnya sendiri.

Kondisi ini dengan mudah mendorong ummat Islam untuk memanfaatkan politik identitas, Populisme Islam, dalam partisipasi demokrasi dan partisipasi bernegara, yang sebetulnya tidak bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan karakternya serta tidak baik bagi pembangunan demokrasi konstitusional di Indonesia. Kompleksitas masalah ini harus kita selesaikan bersama-sama untuk mencari solusi terbaik sebelum semuanya terlambat menjadi bola panas dan liar yang bisa membara membakar rumah tangga kebangsaan/kenegaraan kita.

Jangan lupa, jalan ke depan untuk menahan dan mencegah munculnya Populisme Islam, politisasi agama atau mobilisasi politik identitas, tidak mudah, meski relative masih terbuka, karena akumulasi kesenjangan dan ketidakadilan sudah parah. Soekarno dulu berjanji bahwa "tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka". Namun apa yang terjadi saat ini, hampir 78 tahun kemudian? Faktanya, "empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih banyak dari total gabungan 100 juta orang termiskin." (Sukidi, *Kompas*, 21/9/ 2023).

Dan bangsa kita, terutama ummat Islam, masih belum berani bersikap jujur atas fakta brutal Indonesia tersebut: mulai dari kesenjangan, pengangguran, kemiskinan, kelaparan, korupsi, kolusi, nepotisme, mafia peradilan, kebangkrutan moral, kerusakan lingkungan, hingga rendahnya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Semua itu menjadi masalah dan tantangan berat bagi *civil society* dan negara, untuk memecahkan dan mengatasinya.

Tidak ada jalan lain kecuali bahwa masyarakat sipil (*civil society*), pemerintah dan dunia usaha musti berani bangkit menegakkan negara hukum dan demokrasi yang substansial, demi daulat rakyat dan martabat bangsa sesuai spirit perjuangan dan cita-cita Proklamasi 1945. Untuk itu, momentum pemilu 2024 harus menjadi “momentum pembaharuan” bagi ummat Islam dan masyarakat sipil pada umumnya dalam upaya menata ulang fungsi/peran lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, *civil society* dan dunia usaha, melaksanakan Trias Politica secara baik dan benar, untuk mencegah kekuasaan rezim/negara agar tidak terus cenderung menyimpang atau bersifat absolut.

Jokowi, Reformasi Dikorupsi dan Kemunduran Demokrasi

Mengapa Reformasi dan Demokrasi kita mengalami kemunduran serius? Jamie S. Davidson, (*Indonesia: Twenty Years of Democracy*, Cambridge University Press, 2019) menjawab dengan menjelaskan bahwa Reformasi di Indonesia tersebut tidak didorong oleh kekuatan “revolusioner” yang sepenuhnya menumbangkan tatanan lama. Sehingga reformasi itu rentan dan rawan untuk dilemahkan, dan dibajak oleh oligarki kapital dan oligarki politik. Terbukti, kooptasi ketimbang eliminasi adalah metode yang digunakan para elite reformasi untuk "memalsukan" penerimaan atas perubahan dan konsensus yang bisa diterapkan.

Jamie S. Davidson mengingatkan bahwa sebuah proses reformasi yang mula-mula mengarah pada inovasi, kemudian mengalami stagnasi, disusul polarisasi, -bisa dilihat seperti cermin yang retak,

Prof. Jamie Davidson (guru besar di NUS, Singapore), yang dalam menyelesaikan Doktornya dibimbing/diawasi dengan penuh kasih sayang (under the loving watch) oleh mendiang Profesor Daniel S Lev di University of

Washington, Seattle, mencatat bahwa dewasa ini, di era Reformasi (Orde Reformasi), Indonesia “terancam” menjadi negara gagal dan disintegrasi bukan hanya karena gangguan ekonomi dan faktor perekonomian eksternal/global, namun karena kegagalan kepemimpinan nasional, kegagalan elite dan pemimpin partai politik dalam mewujudkan ideologi dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Kegagalan ideologi ini ditandai dengan banyaknya aliran anti-intelektualisme, ketimpangan dan ketidakadilan serta ketidaksetaraan yang semakin meluas dan meresahkan masyarakat, kemiskinan dan pengangguran yang membludak dan merusak. Kerusakan lingkungan yang parah, sementara kapitalisme neoliberal telah memperkuat struktur kesenjangan dan ketidakadilan, mengesampingkan Pancasila dan UUD 1945. Akibatnya, masyarakat yang gelisah dan cemas, generasi milenial dan generasi muda, semakin kehilangan kepercayaan terhadap elite politik, Partai Politik dan Pimpinan Nasional serta kabinet-kabinet rezim reformasi karena tidak ada keteladanan, kejujuran, disiplin, kompetensi dan keterbukaan dalam mengelola pemerintahan dan kenegaraan bangsa kita saat ini, yang ditandai dengan terpuruknya perekonomian dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa di era reformasi .

Penulis melihat, kegagalan rezim reformasi dalam membangun perekonomian yang adil dan makmur adalah kegagalan para politisi dalam mempraktikkan ideologi dan nilai-nilai kebajikan publik. Saat ini, demokrasi liberal Indonesia gagal mewujudkan keadilan sosial dan gagal mengatasi kesenjangan, dan meminjam perspektif Milan Svobik (*The Politics of Authoritarian Rule*, Cambridge, 2012), beberapa tahun terakhir ini, Indonesia nyaris mengalami “democracy breakdown” (kerusakan demokrasi yang serius) yang terus berlanjut, yaitu kemerosotan demokrasi, seperti seperti di berbagai negara dimana otoritarianisme kembali

muncul, sedangkan polarisasi politik sangat tajam dan mencuat di masyarakat. Situasi ini terjadi di Indonesia, ditandai dengan polarisasi sosial antara kubu Islam dan nasionalis/liberalis, antara kubu Ahokers dengan kubu 212 yang berseberangan, antara kubu politik identitas versus kubu penentangannya.

Belakangan ini banyak inteligensia, ulama dan cendekiawan di Indonesia yang menekankan bahwa liberalisasi kehidupan berbangsa pasca reformasi berjalan terlalu cepat. Padahal, 'kapitalisme radikal' dan liberalisasi mendominasi aliran Neoliberalisme dan Neokapitalisme yang mengancam eksistensi Indonesia dan bertentangan dengan eksistensi NKRI yang diproklamkan dan merdeka pada tahun 1945 dengan dasar ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Setelah empat kali amandemen UUD 1945 di bawah era Presiden Megawati Soekarnoputri, keadilan social dan kesejahteraan rakyat tak kunjung hadir secara nyata. Dalam hal ini, para akademisi dan inteligensia menilai, masyarakat mulai gelisah dan khawatir karena banyak aspek mendasar yang mengalami perubahan "ekstrim" seperti adanya MPR (Kongres) yang tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara, liberalisasi ekonomi yang sangat liberal, perubahan pasal 33 UUD 1945 yang memuat unsur masuknya kepentingan kapitalisme predator, hilangnya kata "Indonesia asli" dalam artian menjadi Presiden, otonomi daerah yang menyerupai federasi, dan hal-hal lain yang menimbulkan reaksi balik untuk kembali ke UUD 1945 yang asli dan pelbagai tanggapan kontroversi lainnya.

Begitu pula dengan praktik hegemoni penguasaan negara dan kekayaan alam Indonesia yang dilakukan segelintir elite yang berselingkuh dengan politik oligarkis yang sangat merugikan kehidupan masyarakat dan masa depan Indonesia. Persoalan kebangsaan seperti ini tidaklah bisa bebas dari kapitalisme neoliberal dalam ranah

keindonesiaan yang kompleks di satu sisi, dan dari tarikan radikalisme dan ekstremisme di sisi lain.

Munculnya para pengusung khalifah (Islamisme radikal) sebagai ideologi alternatif merupakan eksekusi dan dampak negatif dari bangkitnya Kapitalisme Neoliberal di Indonesia (Jamie S. Davidson, 2019)

Penting Dipahami

Penting untuk kita pahami bahwa kondisi suram masa kini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang merupakan bagian integral dari kehidupan berbangsa bernegara kita. Daniel S. Lev, Herbert Feith, Karl Jackson dan Don Emmerson mencatat bahwa setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, di tengah era Perang Dingin, Indonesia yang relatif terbelakang memulai eksperimen demokrasi liberal dengan pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Namun pada tahun 1959, akibat krisis ideologi, pemberontakan daerah, dan perpecahan elite, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan memberlakukan Demokrasi Terpimpin yang otoriter, yang berakhir pada tahun 1965. Berkaitan dengan hal tersebut, kajian mengenai 20 tahun pertama maupun yang terakhir demokrasi Indonesia, sering kali “diabaikan”.

Sebagai tercermin dalam 20 tahun pertama tahun 1945-65: pemerintahan terpilih datang dan pergi; Parlemen tidak stabil, banyak guncangan dan bertentangan dengan keyakinan ideologis yang ada di masyarakat, sehingga seringkali berujung pada konflik kekerasan.

Daniel Lev, Feith, Jackson dan Emmerson mencatat bahwa, selama 20 tahun pertama keberadaannya, Indonesia sebagian besar diatur dengan cara ini: Presiden Soekarno, secara bertahap memotong sayap demokrasi di negara tersebut, menjadikannya “Demokrasi Terpimpin” dan memungkinkan intervensi militer secara bertahap. Pemilu

terakhir yang benar-benar demokratis diadakan pada tahun 1955. Namun kemunduran akibat pemerintahan otoriter dan tidak demokratis berlanjut dengan cepat pada tahun 1965 setelah kudeta kepemimpinan militer terselubung yang memungkinkan seorang jenderal militer tak dikenal bernama Soeharto kemudian memimpin. Tiga puluh dua tahun kemudian, Soeharto digulingkan setelah terjadi krisis, berbagai kerusuhan dan protes yang kacau balau, yang kemudian memberi jalan bagi demokrasi selama 20 tahun ini.

Awalnya, menurut Jamie Davidson, masa inovasi mengiringi suksesi oleh Menteri teknologi era Soeharto yakni Prof BJ Habibie, yang dididik oleh Jerman, dan menjadi presiden reformis pertama negara itu. Jamie Davidson menunjuk pada desentralisasi luar biasa yang diprakarsai oleh Habibie, yang meskipun pada awalnya menimbulkan destabilisasi dan memicu ketakutan akan disintegrasi negara, pada akhirnya menciptakan basis politik dan ekonomi yang lebih luas dan stabil. Dalam beberapa hal, kontra-inovasi yang juga menandai periode ini - yang pada dasarnya merupakan penolakan terhadap reformasi. Semua kelakuan negative para elite Orbarian itu dilakukan oleh kepentingan politik dan ekonomi para elite yang bercokol dan sudah mengakar, yang sering dilihat sebagai kalangan penghambat/ penghalang terhadap perubahan. Namun hal ini juga membantu para elite politik pada periode otoriter Orde Baru itu sendiri, untuk beradaptasi pada demokratisasi dan pada akhirnya melakukan reformasi kelembagaan, bahkan akhirnya bisa membajak/ menyandera demokrasi itu sendiri.

Sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri (2002-2004), sebagaimana berulang kali disampaikan oleh para inteligensia, ulama dan cendekiawan kita, ada pandangan bahwa di Indonesia, demokrasi yang didambakan rakyat telah dibajak oleh kaum plutokrat dan oligarki yang mencengkram dan menguasai kekuasaan politik-ekonomi.

Kaum plutokrat, oligarki, dan kapitalis predator semakin menguat dengan kekuatan kapital, teknologi dan jaringannya untuk menguasai sumber daya dan seluruh instrumen demokrasi yang ada di tangannya, menundukkan kedaulatan rakyat dan menghilangkan suara rakyat yang mendambakan kebebasan, keadilan dan kesejahteraan umum. (Richard Robison dan Vedi R Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, 2004)

Rakyat sudah memilih di setiap pemilu, tapi setelah itu rakyat dilupakan, ditinggalkan. Akibat kondisi buruk tersebut, yang terjadi dengan apa yang disebut Jamie Davidson sebagai “stagnasi” meliputi periode pemilihan presiden langsung pertama di Indonesia pada era reformasi pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri pada tahun 2004 hingga 2014, serta era Presiden Joko Widodo 2014-2019.

Fenomena ekonomi-politik gelap dan suram itu disebut Davidson sebagai “stagnasi” meliputi periode pemilihan presiden langsung pertama di Indonesia pada era reformasi tahun 2004 hingga tahun 2014, juga era Presiden Joko Widodo 2014-2019. Pada periode ini politik identitas berwarna sosio-religius relative mencemaskan publik.

Oleh karena itu, masyarakat sipil (*civil society*) termasuk media massa (*Tempo, Kompas, Jakarta Post, Media Indonesia, Jawa Pos*, televisi dan media mainstream lainnya) yang peduli dan berkomitmen terhadap demokrasi yang berkualitas, harus berani lebih kritis, jujur, lebih tajam, berkelanjutan dan mendalam dibandingkan media sosial (Medsos). Dalam hal ini *civil society* harus berani melaksanakan kontrol sosial dengan agenda dan visi-misi antikorupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta menegakkan rule of law and melakukan semacam check and balances karena lembaga eksekutif-legislatif-yudikatif cenderung tak efektif, dan disfungsi.

Hal ini sangat signifikan agar negara dan bangsa kita tidak terjerumus ke dalam keterpurukan krisis ekonomi-politik seperti tahun 1997/1998, yang akan membuat bangsa ini bangkrut dan hampir hancur jatuh ke tubir jurang.

Indonesia telah memasuki lebih dari 20 tahun reformasi, dan peran media dan masyarakat sipil pada umumnya tetap penting, juga sangat penting untuk membangun partai politik dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kredibel/profesional, pemerintahan yang baik, berakhlak, bermoral etis dan beradab. Sehingga, ke depan, masyarakat dan negara kita niscaya mampu menjaga dan memperkuat kembali demokrasi dan negara hukum yang menjadi spirit dan cita-cita Proklamasi 1945 demi harkat-martabat kita sebagai negara bangsa yang modern (modern nation state) bernama Republik Indonesia, bukan kerajaan Indonesia. Semoga. []

BAB VII

AMERIKA SERIKAT DAN ISU KEBANGKITAN ASIA

Akhir-akhir ini, kebangkitan Asia, yang dimotori oleh India dan China, selain Jepang dan Korea Selatan serta Asia Tenggara, telah menjadi isu ekonomi global. Kedigdayaan negara-negara Barat yang selama ini identik dengan dominasi kekuasaan dan keputusan terhadap pergerakan dunia, diprediksi akan tergeser kekuatan Asia.

Krisis ekonomi akibat kredit macet sektor perumahan AS beberapa waktu lalu telah membawa dampak bagi pergerakan dan perkembangan ekonomi dunia. Labilnya nilai dollar di pasar bursa mempengaruhi nilai tukar uang, harga komoditas dan energi di level global. Berimbas juga secara tidak langsung pada kondisi internal tiap negara.

Kabar dari bank sentral AS yang ditunggu-tunggu di seluruh belahan dunia, seakan-akan menjadi penentu hidup matinya perekonomian dunia. Hal ini karena resesi di Amerika berpotensi menular ke seluruh negara di muka bumi.

Kejadian tersebut hanyalah salah satu contoh ketergantungan dunia pada negara adikuasa. Selain masalah kebijakan politik, keamanan negara dan perdamaian dunia di mana negara barat dan sekutunya berperan sangat kuat, bahkan dengan arogansinya mendominasi setiap keputusan.

Namun, sejak munculnya liberalisasi ekonomi dan kerjasama regional di Asia, beberapa negara mulai muncul dan memperlihatkan taringnya. Kiprah negara-negara Asia di dunia internasional mulai diperhitungkan seiring meningkatnya kualitas dan posisi tawar di sektor ekonomi.

Dalam daftar 100 perusahaan transnasional (TNCs) nonfinansial terbesar dunia dari sisi aset versi World Investment Report 2005, mulai bermunculan nama-nama seperti Hutchison Whampoa Limited (urutan 16) dari Hongkong, Singtel Ltd (66) dari Singapura, Petronas (72) dari Malaysia, dan Samsung (99) dari Korea Selatan. Sementara dalam daftar 50 TNCs finansial terbesar dunia, ada tiga wakil dari China, yakni Industrial & Commercial Bank of China (urutan 23), Bank of China (34), dan China Construction Bank (39).

Kawasan Asia merupakan kawasan dengan pertumbuhan kegiatan perdagangan yang paling dinamis, perdagangan intra-regional di kawasan ini mencapai hampir 90% dari total ekspor Asia pada 2002. Sedangkan sumbangan ekspor Asia terhadap dunia tahun 1975 baru mencapai 5,4%, tapi pada 2002 telah mencapai 19,8%. Selain itu sejak tahun 1990 Asia telah berhasil meningkatkan pendapatan 300 juta penduduknya di atas batas kemiskinan yaitu US\$ 2 per hari.

Beberapa waktu lalu Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Asia melihat pesatnya ekonomi di negara China dan India. Untuk tahun 2007, perkiraan pertumbuhan kolektif dinaikkan menjadi 8,3% dari yang semula 7,3%, sedangkan untuk tahun 2008, perkiraan pertumbuhan juga dinaikkan menjadi 8,2% dari yang semula 7,7%.

China dan India yang meliputi 55,3% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Asia, mencatat pertumbuhan tercepat dalam 13 dan 18 tahun terakhir, khususnya pada semester pertama 2007. Berdasarkan data itu, diyakini abad ke-21

adalah milik Asia, dimana pada tahun 2050 separuh lebih produk nasional bruto dunia akan dikuasai Asia.

Pesatnya ekonomi China dan India dapat dilihat dari data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD) yang menunjukkan pada tahun 2004 China adalah eksportir terbesar ketiga di dunia untuk barang (merchandise goods) dan kesembilan terbesar untuk jasa komersial, dengan pangsa 9% dan 2,8 % dari total ekspor dunia. Sementara India berada pada peringkat ke-20 eksportir merchandise goods (1,1%) dan peringkat ke-22 untuk jasa komersial (1,5%).

Volume ekspor China mencapai US\$ 325 miliar tahun 2002 dan tahun 2004 adalah US\$ 764 miliar. Manufaktur menyumbang 39% PDB China. Output manufaktur China tahun 2003 adalah ketiga terbesar setelah AS dan Jepang. Di sektor jasa, China yang terbesar kesembilan setelah AS, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Kanada, dan Spanyol.

China yang pada awalnya hanya dipandang sebagai pasar raksasa dan lokasi yang menarik untuk produksi padat karya sederhana telah berkembang menjadi basis produksi produk manufaktur dan kompetitor dalam berbagai industri berteknologi maju. Tahun 2004 China berhasil menarik investasi asing senilai US\$ 60,6 miliar dan sebanyak 500 perusahaan terbesar dunia melakukan investasi di sana.

Masuknya China dalam keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menjadi kekuatan yang semakin sulit ditandingi di pasar global. Pangsa ekspor pakaian dari China diperkirakan akan melonjak dari sekitar 17% dari total ekspor dunia saat ini menjadi 45% pada paruh kedua dekade ini.

Demikian juga di pasar elektronik AS, di mana pangsa China meningkat menjadi 21,8% (1999). Kontribusi China terhadap produksi personal computer dunia naik menjadi 21% (2000), total produksi hard disk dunia juga naik menjadi

6% (2000) dan untuk produksi keyboard naik menjadi 38% (2000).

Peningkatan itu makin tampak di mana China memasok 50% lebih produksi kamera dunia, 30% penyejuk udara (AC), 30% televisi, 25% mesin cuci, 20% lemari pendingin, dan lainnya.

Hal serupa terjadi pada India yang saat ini menjadi negara kedua tercepat pertumbuhannya selama 15 tahun terakhir dan kini masuk tahap kedua strategi pembangunan ekonomi dengan menggunakan teknologi informasi (IT) sebagai basisnya. Hampir seluruh pemain bisnis IT dunia sudah membuka usahanya di India, terutama di Bangalore. Tahun 2006, pendapatan dari IT India mencapai US\$ 36 miliar dollar AS.

Pada 2050 mendatang, PDB China diperkirakan 175% dari PDB Amerika, sementara PDB India sudah akan menyamai AS dan menjadikannya perekonomian terbesar ketiga dunia, mengalahkan Uni Eropa dan Jepang.

Pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan di Asia ditunjang besarnya populasi China dan India yang mencapai 2,5 miliar orang, atau 40% dari 6,5 miliar penduduk dunia menjadikan kawasan ini sebagai basis produksi sekaligus basis pasar yang berpotensi menciptakan area perdagangan eksklusif di belahan timur dunia.

China dan India dengan segala ekspansinya, berdasarkan parameter saat ini dan prediksi ke depan, adalah pemenang dalam pertarungan terbuka di era globalisasi. Tidak ada lagi sekat bagi pergerakan informasi, modal, barang, jasa, manusia, ideologi dan nasionalisme negara.

Arogansi barat bakal tenggelam dan kekuatan negara timur akan muncul sebagai pilar baru. China dengan "pabrik dunia"-nya dan India yang kini menjadi surga outsourcing IT dunia sebagai motornya.

Ekonom Goldman Sachs, Jim O'Neill yakin pesatnya pertumbuhan di China dan India akan berlanjut. Krisis ekonomi global yang terjadi saat ini sebenarnya tidak menimpa semua negara, karena krisis finansial ini hanya terjadi di Barat. Kita tidak boleh lupa bahwa sebagian besar dari 6 miliar penduduk dunia tidak terpengaruh krisis ini.

"Saya berada di India empat pekan lalu dan tak ada tanda-tanda India terpengaruh krisis finansial itu," ujar O'Neill yang memimpin riset ekonomi global di Goldman.

Meminjam perspektif O'Neill, ada empat negara yang mengalami peningkatan pertumbuhan di tengah volatilitas ekonomi dunia, yaitu Brasil, Rusia, India, dan China (BRIC). Istilah BRIC pertama kali dimunculkan tahun 2003 oleh bank investasi Goldman Sachs untuk menggambarkan pesatnya pertumbuhan ekonomi empat negara tersebut yang berpotensi menyaingi bahkan menjadi rival utama ekonomi Barat selama setengah abad ke depan. O'Neill menilai bahwa China, India, dan Rusia menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dibanding prediksi dalam penelitiannya.

Ekonomi Rusia, China, dan India tumbuh rata-rata 2% lebih besar daripada perkiraan kami. Ini sangat tinggi karena secara kolektif mereka menguasai 16% PDB global.

Atas dasar perkembangan itu, sabungan PDB keempat negara ini, diprediksi bisa mengalahkan kekuatan ekonomi negara G-7 yang terdiri dari Inggris, Prancis, Italia, Jerman, Jepang, AS, dan Kanada.

China-India dan Amerika

Tatkala merebak kabar bahwa China dan India menjelma jadi macan Asia yang baru, ada keyakinan para analis bahwa perkembangan ekonomi mereka membuat AS/Barat tersaingi dan membuat Jepang dan Korea Selatan seperti dipandang sebelah mata.

Namun, Betulkah China dan India itu bisa menumbangkan kedigdayaan AS/Barat pada 2050?

Kini, ada kecenderungan sejumlah akademisi melihat India dan China masih akan sulit menyaingi, apalagi mengungguli perekonomian negara Paman Sam.

Apa pasal? Kedua negara dengan penduduk terbesar di dunia itu masih menghadapi persoalan spesifik. Keduanya belum mampu meredam tingginya angka kemiskinan dan pertumbuhan industri yang masih terseok.

India, misalnya, hingga kini masih menghadapi kemiskinan yang merajalela. Kemiskinan menciptakan kesenjangan tajam pada masing-masing kelompok sosial masyarakat. Sementara perkembangan industri di India pun bisa dikatakan seret, terkait kesulitan bahan bakar energi seperti batubara, BBM dan gas yang dialaminya.

Jadi, India masih jauh dibandingkan Amerika, apalagi untuk mengejar Amerika. Anggaran pendidikan di India yang sangat kecil, jauh dibanding AS yang mencapai ribuan miliar dolar. Artinya human investment di India masih ketinggalan jauh dibandingkan AS. Tapi harus diakui, India punya kemauan kuat untuk mengejar ketertinggalannya.

Sedangkan China, saat ini memang sudah membangun kawasan pesisir. Namun, kawasan pedalaman China yang sangat luas, masih dalam kondisi miskin dan terbelakang. Ini berarti ada kesenjangan lebar antara warga kawasan pesisir China dan pedalamannya.

Sementara industrialisasi di China memang sudah berjalan pesat, berkat kucuran modal asing. Namun derasnya arus urbanisasi serta membengkaknya kebutuhan energi tidak mampu dipenuhi China, meskipun negara tirai bambu ini mengkonsumsi seluruh sumber daya energi dari Indonesia serta negara Asia lainnya, seperti migas, batubara dan lainnya.

Industrialisasi Cina masih butuh waktu lama. Banyak pihak tak yakin pada 2050 China akan bisa mengejar ekonomi AS. China kesulitan sumber daya energi untuk mengembangkan industrialisasinya.

Di sisi lain, dengan jumlah penduduk AS yang saat ini hanya mencapai 5% dari total penduduk dunia, AS mampu menguasai 25% ekonomi dunia. Hal ini menunjukkan tingginya produktivitas ekonomi negara Paman Sam tersebut. Sedangkan kebutuhan energi AS masih bisa dipenuhi dengan suplai minyak mentah, batubara dan gas dari Timur Tengah, Asia Tengah dan Tenggara serta dari sumber cadangan domestik. Industrialisasi AS sudah sedemikian maju, dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan jauh di atas China dan India.

Publikasi media internasional bahwa China dan India akan mengejar Amerika, menurut hemat penulis, masih amat jauh. Adapun kehebohan berita yang menggambarkan bangkitnya macan Asia, mungkin hanya ulah para pejabat dan intelektual India dan China yang memang pintar melobi media dan mengelola pemberitaan di media internasional. Sangat mungkin, hal itu semua karena kepintaran mereka. Apalagi para cerdas pandai China dan India kini banyak yang bekerja di Bank Dunia, IMF, dan lembaga internasional lainnya.

Agaknya, akan lebih adil dan *fair* jika India dan China dinilai sebagai kekuatan Asia yang berusaha menjadi kekuatan adidaya, namun masih jauh untuk bisa menyaingi Amerika. Pada akhirnya, isu kebangkitan Asia harus kita lihat sebagai daya dorong dan stimulan bagi masyarakat Asia untuk bergerak maju, kreatif dan produktif dalam persaingan global. Asia memang harus berusaha menjadi kekuatan dunia, agar tak terus dibawah bayang-bayang hegemoni Amerika.

Asia dan Faktor China

Kebijakan Amerika Serikat di Asia sangat diwarnai dengan faktor China. Rivalitas kedua negara ini terus menguat dan berdampak besar bagi negara-negara di kawasan.¹⁹

China meningkatkan kekuatan militernya di Asia, dengan menaikkan budget pertahanan tahun ini US\$160 miliar, sebuah angka yang luar biasa besar. Angka itu melonjak 12 persen dari anggaran tahun lalu.

Meski statemen para pemimpin Beijing menegaskan kebangkitan China tetap pro-perdamaian, namun meningkatnya anggaran militer menjadi ganjalan dan persoalan bagi AS dan sekutunya di kawasan Asia Pasifik.

The Economist edisi 7-13 April 2012 menyebut kebangkitan militer RRC itu sebagai "gigi baru naga merah" di Asia. Di kawasan Asia, RRC menghadapi konflik potensial dengan Vietnam dan Filipina di Laut China Selatan terkait Kepulauan Spratley, memburuknya hubungan dengan Jepang dan hubungan dengan Korea Selatan yang mendingin.

Juga kematian tak terduga pemimpin Korea Utara Kim Jong-il dan yang paling merusak dari semua itu adalah Arab Spring dan dampaknya yang mungkin menular ke China jika ekonominya merosot.

China membantu program nuklir Pakistan dan itu menimbulkan ketegangan dengan India, tetangga besarnya di Asia. Sementara program nuklir Korea Utara dan Iran menjadi kecemasan banyak pihak di AS maupun di Asia dan Timur Tengah, termasuk Israel dan Arab Saudi.

¹⁹ Herdi Sahrasad, "Mencermati Rivalitas AS-China di Asia", artikel, harian *Inilah Koran*, 14 April 2012.

“Semua itu membuat AS harus waspada dengan perkembangan di Asia yang membentang dari kawasan Arab sampai Timur Jauh di Asia Pasifik. Saya sendiri cemas,” kata akademisi dan mantan Dubes keliling AS Prof Robert Gallucci di Universitas California Berkeley awal pekan ini.

Akademisi Harvard Joseph Nye melihat, sejauh ini konsentrasi baru AS di kawasan Asia-Pasifik adalah mengekspos defisit China dalam hal soft power (kekuatan lunak dan persuasi), sebab Beijing lebih sering mengandalkan kekuatan keras (tekanan politik/militer) atas tetangganya di Asia.

Keuntungan China dalam kekuatan keras (ekonomi-politik dan militer), dipercaya Nye, telah menyebabkan kecemasan besar dan ketidakamanan para tetangga Beijing di Asia. Pada akhirnya negara-negara itu terpaksa mencari aliansi dengan Amerika Serikat dalam usaha untuk menyeimbangkan naiknya kekuatan keras China.

China diperkirakan akan menjadi pemimpin Asia ke depan berpeluang menggantikan peran AS yang mengalami kemunduran sebagai pemimpin regional di Asia Pasifik. Negara-negara Asia Timur tidak gembira dan tidak suka dengan kebangkitan China di luar negeri, menggantikan peran AS.

Korsel dan Jepang sudah bersikap semacam itu dan mengisyaratkan kecemasannya, sikap Vietnam, dan Indonesia serta Negara Asia Tenggara lainnya serupa meski tak sama.

Setidaknya, RRC sebagai pemimpin politik dan militer regional sudah membuat cemas dan khawatir negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur, bukan hanya karena kekuatan ekonomi China yang menakutkan, tapi juga pembangunan militernya. Dalam bersaing dengan AS, militer China dengan jelas meningkatkan kekuatannya di Asia.

Ada ketidakpercayaan yang merata di Asia Timur dan Tenggara atas RRC yang punya ambisi regional. Sehingga kawasan Asia ini menilai penting kehadiran militer AS sebagai penjaga stabilitas regional. Kasus Kepulauan Spratley tetap meyakinkan Asia Timur dan Tenggara tentang pentingnya payung keamanan dari AS. Jepang dan Korsel sudah meminta payung perlindungan AS menghadapi manuver militer RRC.

Dengan langkah RRC sebagai kekuatan besar di Asia, ada perasaan tidak nyaman dari Jepang dan Korsel serta negara-negara di Asia Tenggara. AS diharapkan mampu menjadi *counter balance force* atas naiknya penampilan militer China dan ekonomi Beijing di kawasan ini.

Bagaimana pun '*power game*' akan berkembang di Asia dan untuk itu, kehadiran AS sebagai *balance of power*, meminjam perspektif Hans Morgentau (sang teoritis realis dalam hubungan internasional), sangat dibutuhkan negara-negara di Asia untuk membatasi ruang gerak militer China

Presiden Obama Februari lalu menekankan bahwa AS menempatkan sebuah fokus baru atas wilayah tersebut. Obama sudah mengumumkan strategi militer baru yang akan fokus pada Asia. Perubahan kebijakan yang jelas menargetkan China.

AS sangat berkepentingan dengan Asia, terutama Selat Malaka. Selat Malaka selama ini tidak saja dikenal sebagai *Sea Lines of Trade* (SLOT) dan *Sea Lines of Communication* (SLOC), juga dipandang sebagai jalur strategis proyeksi Armada Laut negara-negara maritime besar dalam rangka *forward presence* dan *global engagement* ke seluruh dunia.

Kepadatan lalu-lintas alur pelayaran ini ditandai tingginya intensitas perdagangan global Selat Malaka, dan apabila terjadi interdiksi atas perairan ini, maka dampak negatif luar biasa yang akan dirasakan secara global adalah instabilitas perekonomian dunia.

Bisa dimengerti memang mengingat selama ini seluruh kegiatan ekspor dan impor internasional mengandalkan laut sebagai jalan raya/jalur perdagangan, sumber makanan, dan sumber mineral. Maka dari itu, bagi Amerika maupun Jepang dan China, sebagaimana yang juga diutarakan Mantan Menhan Juwono Sudarsono, Selat Malaka sebagai SLOT dan SLOC dewasa ini sudah dianggap sebagai ajang kepentingan setiap negara di dunia yang harus diamankan.

Betapa tidak. Selat yang melewati tiga negara itu (Indonesia-Malaysia-Singapore), sudah menjadi rahasia umum bahwa tanker-tanker China selalu melintasi Selat Malaka dalam perjalanan mereka membawa minyak dari Timur Tengah.

Karena itu dalam perspektif kepentingan China, selat ini harus aman dari segala gangguan yang bisa menghalanginya untuk mensuplai energi. Sebab itu masuk akal jika Juwono mengundang partisipasi dan inisiatif China dalam pengamanan Selat Malaka.

Xi Jinping dan Obama

Dalam pembicaraan antara Wapres Republik Rakyat China, Xi Jinping, dan Presiden Barack Obama (14/2/12) di Gedung Putih, Xi mungkin tidak merasa kalau ia berbicara dari posisi yang kuat dengan mengajukan kebijakan luar negeri yang mungkin tak disengaja, bersikap menantang.²⁰

Ini menjadi perhatian para akademisi dan analis internasional di AS bahwa kebijakan Beijing makin asertif dan percaya diri, suatu hal yang perlu dicermati lebih dalam oleh Gedung Putih.

²⁰ Herdi Sahrasad, "Mencermati Rivalitas AS-China di Asia", artikel, harian *Inilah Koran*, 14 April 2012.

China sebagai, sang naga merah, sedang naik daun di Asia, bahkan di dunia. Anggaran militer RRC terus meningkat. Pada 2000, anggaran militer China menghabiskan US\$90 miliar dan pada 2010, anggaran itu meningkat 30 miliar dolar AS menjadi US\$120 miliar dengan 2,3 juta tentara.

Angkatan daratnya merupakan kekuatan paling besar di dunia. Dan tahun ini anggaran militer Beijing mencapai US\$160 miliar, fantastis! Mungkin karena itu, gaya diplomasi Xi Jinping lebih percaya diri, dan rada unjuk gigi.

Xi Jinping, yang merupakan kandidat kuat pengganti Hu Jintao sebagai pemimpin tertinggi PKC (Partai Komunis China) dan rezim komunis China, melihat fokus baru AS terhadap China dan kawasan Asia-Pasifik sudah terlanjur rumit. Hal ini seiring dengan peristiwa-peristiwa pada 2011 di seluruh dunia sebagai akibat dari Arab Spring seperti masalah nuklir Iran dan Korut serta krisis finansial global.

Sementara itu, selain masalah China, berbagai kalangan juga mencemaskan pengembangan nuklir di Iran dan Korut karena berdampak pada stabilitas di kawasan Asia. "Saya juga khawatir kompleksitas isu nuklir dan masalah di Asia ini," kata Pof Robert Gallucci ketika memberi kuliah di Institute of International Studies, Universitas California Berkeley, awal pekan ini.

Presiden Obama sebelumnya menekankan Amerika Serikat adalah satu kekuatan di Asia-Pasifik. Bagaimanapun kawasan ini akan mempunyai peranan dalam penciptaan pekerjaan dan kesempatan bagi rakyat Amerika. AS juga menekankan bahwa setiap pengurangan dalam anggaran pertahanannya tidak akan dilakukan dengan merugikan bagian dunia itu.

Tapi China melihat merosotnya ekonomi AS merupakan peluang untuk memperbesar pengaruhnya di Asia. RRC bereaksi atas pengumuman di Canberra mengenai

penempatan pasukan Amerika di Australia, dengan menilai hal itu tidak wajar dan hendaknya dibicarakan dalam masyarakat internasional.

Obama menyatakan kehadiran pasukan Amerika akan memberi kesempatan baru untuk melatih sekutu-sekutu dan mitra-mitranya serta untuk menanggapi berbagai tantangan, termasuk krisis kemanusiaan maupun pertolongan bencana.

Obama secara diplomatis mengatakan Amerika Serikat menyambut baik kebangkitan RRC yang damai dan makmur dan akan mencari kesempatan lagi untuk bekerjasama dengan Beijing, termasuk komunikasi yang lebih besar antara militer satu sama lain guna meningkatkan saling pengertian.

Prof Joseph Nye menyarankan Partai Komunis China (PKC) untuk menarik kembali beberapa kebijakan luar negerinya yang agresif. Setelah krisis keuangan 2008, beberapa pemimpin China melakukan kesalahan dengan berpikir AS berada dalam kemunduran.

“Seperti yang saya tunjukkan dalam buku saya ‘The Future of Power’ itu tidak terjadi, tetapi hal itu mengarah pada kebijakan luar negeri China yang lebih tegas yang terbukti mahal dalam hubungan China dengan negara-negara tetangga dan AS,” ungkap Nye.

Para pemimpin China mulai menyadari hal ini ketika kunjungan Hu Jintao ke AS tahun lalu, dan kunjungan Xi yang meneruskan usaha untuk menyeimbangkan hubungan termasuk unsur-unsur kompetisi dan kerjasama di waktu yang sama.

Para akademisi dan diplomat AS melihat, Asia Pasifik merupakan wilayah yang luas, cukup luas untuk memungkinkan bersama China untuk saling mengisi. RRC ingin AS meninggalkan mentalitas permainan zero-sum, dan Beijing memperingatkan negara-negara Asia Pasifik untuk

tidak mengambil “salah satu-atau” sisi antara Amerika Serikat dan China.

Keberhasilan modernisasi ekonomi China memang mengejutkan masyarakat dunia. Namun menurut Dani Rodrik, profesor dari Harvard University's Kennedy School of Government, citra China sebagai raksasa dunia dengan kombinasi ekspor dan strategi diversifikasi ekonomi maupun inovasi institusi, bukanlah gambaran yang tanpa persoalan. Bahkan gambaran itu tidak semuanya indah.

China dan mitra dagangnya, terutama AS, terus saling bersitegang dan berkonflik panjang dalam tahun-tahun terakhir ini yang mencakup keamanan produk, manipulasi mata uang dan pembatasan akses pasar untuk berbagai jenis produk. Ketegangan dan konflik hubungan dagang AS dan China sudah berjalan cukup lama.

Surplus dagang China dengan AS yang berlebihan menciptakan ketimpangan global antara AS dan China. Surplus dagang China meningkat 11 persen dari GDP menyusul krisis finansial di AS dan Eropa pada 2007/2008.

Ketimpangan dan ketidakadilan ini, demikian Dani Rodrik, meningkatkan permintaan global bagi barang-barang China dengan harga yang lebih murah sehingga menimbulkan komplikasi bagi recovery ekonomi di seluruh dunia. Hal itu juga mengganggu sektor manufaktur di seluruh dunia, termasuk China sendiri. Tapi masalahnya bukan hanya semata ekonomi.

Secara historis, ketimpangan dagang itu juga menciptakan ‘lahan subur’ bagi proteksionisme. Jika surplus dagang China atas AS, tidak berkurang, maka AS akan membalas dengan membatasi impor dan ini mengundang reaksi balasan dari Beijing serta reaksi yang sama dari negeri lain.

Kelakuan China dengan kekuatan kerasnya (ekonomi dan militer) di Asia Timur dan Tenggara, dipercaya dua akademisi AS yakni Prof Robert Galucci dan Prof Joseph Nye, telah menyebabkan kecemasan dan ketidakamanan para tetangganya, memaksa mereka untuk mencari aliansi dengan Amerika Serikat dalam usaha untuk menyeimbangkan keadaan menyusul meningkatnya kekuatan keras China di Asia.

Pengaruh Kemunduran Ekonomi AS

Kemunduran ekonomi AS/Barat mempengaruhi Asia sepanjang tahun 2012, tetapi Asia masih tetap menjadi tokoh ekonomi besar dunia yang dipimpin oleh China, India dan Indonesia/ASEAN. Artinya, ekonomi Asia masih berada di barisan paling depan.²¹

Akhir-akhir ini, kebangkitan Asia, yang dimotori oleh India dan China, selain Jepang dan Korea Selatan serta Asia Tenggara, telah menjadi isu ekonomi global. Kedigdayaan negara-negara Barat yang selama ini identik dengan dominasi kekuasaan dan keputusan terhadap pergerakan dunia, diprediksi akan tergeser kekuatan Asia.²²

Krisis ekonomi akibat kredit macet sektor perumahan AS beberapa tahun lalu telah membawa dampak bagi pergerakan dan perkembangan ekonomi dunia. Labilnya nilai dollar di pasar bursa mempengaruhi nilai tukar uang,

²¹ Dalam persinggahan saya ke Hong Kong, April 2012, laporan Asian Development Bank bulan Januari 2012 itu masih menjadi barometer media dalam wawancara dengan para profesional (fund manager, diplomat dan analis) dan para investor terkait prospek investasi dan perekonomian Asia.

²² Laporan *Reuters*, 3/3/2009 dan *AP*, 2/3/2009. Lihat, Herdi Sahrasad dan Theresia Asteria, "Amerika dan Isu Kebangkitan Asia", *Kontan*, opini, edisi Maret 2000 dan diperbarui di *www.inilah.com*, 2/3/2009.

harga komoditas dan energi di level global. Berimbas juga secara tidak langsung pada kondisi internal tiap negara.

Kabar dari bank sentral AS yang ditunggu-tunggu di seluruh belahan dunia, seakan-akan menjadi penentu hidup matinya perekonomian dunia. Hal ini karena resesi di Amerika berpotensi menular ke seluruh negara di muka bumi.

Kejadian tersebut hanyalah salah satu contoh ketergantungan dunia pada negara adikuasa. Selain masalah kebijakan politik, keamanan negara dan perdamaian dunia di mana negara barat dan sekutunya berperan sangat kuat, bahkan dengan arogansinya mendominasi setiap keputusan.

Namun, sejak munculnya liberalisasi ekonomi dan kerjasama regional di Asia, beberapa negara mulai muncul dan memperlihatkan taringnya. Kiprah negara-negara Asia di dunia internasional mulai diperhitungkan seiring meningkatnya kualitas dan posisi tawar di sektor ekonomi.

Dalam daftar 100 perusahaan transnasional (TNCs) nonfinansial terbesar dunia dari sisi aset versi World Investment Report 2005, mulai bermunculan nama-nama seperti Hutchison Whampoa Limited (urutan 16) dari Hongkong, Singtel Ltd (66) dari Singapura, Petronas (72) dari Malaysia, dan Samsung (99) dari Korea Selatan. Sementara dalam daftar 50 TNCs finansial terbesar dunia, ada tiga wakil dari China, yakni Industrial & Commercial Bank of China (urutan 23), Bank of China (34), dan China Construction Bank (39).

Kawasan Asia merupakan kawasan dengan pertumbuhan kegiatan perdagangan yang paling dinamis, perdagangan intra-regional di kawasan ini mencapai hampir 90% dari total ekspor Asia pada 2002. Sedangkan sumbangan ekspor Asia terhadap dunia tahun 1975 baru mencapai 5,4%, tapi pada 2002 telah mencapai 19,8%. Selain itu sejak tahun

1990 Asia telah berhasil meningkatkan pendapatan 300 juta penduduknya di atas batas kemiskinan yaitu US\$ 2 per hari.

Beberapa tahun lalu Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Asia melihat pesatnya ekonomi di negara China dan India. Untuk tahun 2007, perkiraan pertumbuhan kolektif dinaikkan menjadi 8,3% dari yang semula 7,3%, sedangkan untuk tahun 2008, perkiraan pertumbuhan juga dinaikkan menjadi 8,2% dari yang semula 7,7%.

China dan India yang meliputi 55,3% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Asia, mencatat pertumbuhan tercepat dalam 13 dan 18 tahun terakhir, khususnya pada semester pertama 2007. Berdasarkan data itu, diyakini abad ke-21 adalah milik Asia, dimana pada tahun 2050 separuh lebih produk nasional bruto dunia akan dikuasai Asia.

Pesatnya ekonomi China dan India dapat dilihat dari data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD) yang menunjukkan pada tahun 2004 China adalah eksportir terbesar ketiga di dunia untuk barang (merchandise goods) dan kesembilan terbesar untuk jasa komersial, dengan pangsa 9% dan 2,8 % dari total ekspor dunia. Sementara India berada pada peringkat ke-20 eksportir merchandise goods (1,1%) dan peringkat ke-22 untuk jasa komersial (1,5%).

Volume ekspor China mencapai US\$ 325 miliar tahun 2002 dan tahun 2004 adalah US\$ 764 miliar. Manufaktur menyumbang 39% PDB China. Output manufaktur China tahun 2003 adalah ketiga terbesar setelah AS dan Jepang. Di sektor jasa, China yang terbesar kesembilan setelah AS, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Kanada, dan Spanyol.

China yang pada awalnya hanya dipandang sebagai pasar raksasa dan lokasi yang menarik untuk produksi padat karya sederhana telah berkembang menjadi basis produksi produk manufaktur dan kompetitor dalam berbagai industri berteknologi maju. Tahun 2004 China berhasil menarik

investasi asing senilai US\$ 60,6 miliar dan sebanyak 500 perusahaan terbesar dunia melakukan investasi di sana.

Masuknya China dalam keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menjadi kekuatan yang semakin sulit ditandingi di pasar global. Pangsa ekspor pakaian dari China diperkirakan akan melonjak dari sekitar 17% dari total ekspor dunia saat ini menjadi 45% pada paruh kedua dekade ini.

Demikian juga di pasar elektronik AS, di mana pangsa China meningkat menjadi 21,8% (1999). Kontribusi China terhadap produksi personal computer dunia naik menjadi 21% (2000), total produksi hard disk dunia juga naik menjadi 6% (2000) dan untuk produksi keyboard naik menjadi 38% (2000).

Peningkatan itu makin tampak di mana China memasok 50% lebih produksi kamera dunia, 30% penyejuk udara (AC), 30% televisi, 25% mesin cuci, 20% lemari pendingin, dan lainnya.

Hal serupa terjadi pada India yang saat ini menjadi negara kedua tercepat pertumbuhannya selama 15 tahun terakhir dan kini masuk tahap kedua strategi pembangunan ekonomi dengan menggunakan teknologi informasi (IT) sebagai basisnya. Hampir seluruh pemain bisnis IT dunia sudah membuka usahanya di India, terutama di Bangalore. Tahun 2006, pendapatan dari IT India mencapai US\$ 36 miliar dollar AS.

Pada 2050 mendatang, PDB China diperkirakan 175% dari PDB Amerika, sementara PDB India sudah akan menyamai AS dan menjadikannya perekonomian terbesar ketiga dunia, mengalahkan Uni Eropa dan Jepang.

Pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan di Asia ditunjang besarnya populasi China dan India yang mencapai 2,5 miliar orang, atau 40% dari 6,5 miliar penduduk dunia

menjadikan kawasan ini sebagai basis produksi sekaligus basis pasar yang berpotensi menciptakan area perdagangan eksklusif di belahan timur dunia.

China dan India dengan segala ekspansinya, berdasarkan parameter saat ini dan prediksi ke depan, adalah pemenang dalam pertarungan terbuka di era globalisasi. Tidak ada lagi sekat bagi pergerakan informasi, modal, barang, jasa, manusia, ideologi dan nasionalisme negara.

Arogansi barat bakal tenggelam dan kekuatan negara timur akan muncul sebagai pilar baru. China dengan “pabrik dunia”-nya dan India yang kini menjadi surga outsourcing IT dunia sebagai motornya.

Ekonom Goldman Sachs, Jim O’Neill yakin pesatnya pertumbuhan di China dan India akan berlanjut. Krisis ekonomi global yang terjadi saat ini sebenarnya tidak menimpa semua negara, karena krisis finansial ini hanya terjadi di Barat. Kita tidak boleh lupa bahwa sebagian besar dari 6 miliar penduduk dunia tidak terpengaruh krisis ini.

“Saya berada di India empat pekan lalu dan tak ada tanda-tanda India terpengaruh krisis finansial itu,” ujar O’Neill yang memimpin riset ekonomi global di Goldman.

Meminjam perspektif O’Neill, ada empat negara yang mengalami peningkatan pertumbuhan di tengah volatilitas ekonomi dunia, yaitu Brasil, Rusia, India, dan China (BRIC). Istilah BRIC pertama kali dimunculkan tahun 2003 oleh bank investasi Goldman Sachs untuk menggambarkan pesatnya pertumbuhan ekonomi empat negara tersebut yang berpotensi menyaingi bahkan menjadi rival utama ekonomi Barat selama setengah abad ke depan. O’Neill menilai bahwa China, India, dan Rusia menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dibanding prediksi dalam penelitiannya.

Ekonomi Rusia, China, dan India tumbuh rata-rata 2% lebih besar daripada perkiraan kami. Ini sangat tinggi karena secara kolektif mereka menguasai 16% PDB global.

Atas dasar perkembangan itu, sabungan PDB keempat negara ini, diprediksi bisa mengalahkan kekuatan ekonomi negara G-7 yang terdiri dari Inggris, Prancis, Italia, Jerman, Jepang, AS, dan Kanada.

China adalah salah satu kekuatan Asia bahkan dunia, sebagaimana diperlihatkan dalam dominasi di Olimpiade Beijing belum lama ini. China berhasil membangun desa dan diversifikasi pertanian dijalankan dengan amat mengagumkan. Dari keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dari hasil-hasil pertanian ke sektor modern (*forward linkage*), tercipta sebuah keterkaitan produksi (*production linkage*).

China-India dan Amerika

Tatkala merebak kabar bahwa China dan India menjelma jadi macan Asia yang baru, ada keyakinan para analis bahwa perkembangan ekonomi mereka membuat AS/Barat tersaingi dan membuat Jepang dan Korea Selatan seperti dipandang sebelah mata.

Namun, Betulkah China dan India itu bisa menumbangkan kedigdayaan AS/Barat pada 2050?

Kini, ada kecenderungan sejumlah akademisi melihat India dan China masih akan sulit menyaingi, apalagi mengungguli perekonomian negara Paman Sam.

Apa pasal? Kedua negara dengan penduduk terbesar di dunia itu masih menghadapi persoalan spesifik. Keduanya belum mampu meredam tingginya angka kemiskinan dan pertumbuhan industri yang masih terseok.

India, misalnya, hingga kini masih menghadapi kemiskinan yang merajalela. Kemiskinan menciptakan kesenjangan tajam pada masing-masing kelompok sosial masyarakat. Sementara perkembangan industri di India pun bisa dikatakan seret, terkait kesulitan bahan bakar energi seperti batubara, BBM dan gas yang dialaminya.

Jadi, India masih jauh dibandingkan Amerika, apalagi untuk mengejar Amerika. Anggaran pendidikan di India yang sangat kecil, jauh dibanding AS yang mencapai ribuan miliar dolar. Artinya *human investment* di India masih ketinggalan jauh dibandingkan AS. Tapi harus diakui, India punya kemauan kuat untuk mengejar ketertinggalannya.

Sedangkan China, saat ini memang sudah membangun kawasan pesisir. Namun, kawasan pedalaman China yang sangat luas, masih dalam kondisi miskin dan terbelakang. Ini berarti ada kesenjangan lebar antara warga kawasan pesisir China dan pedalamannya.

Sementara industrialisasi di China memang sudah berjalan pesat, berkat kucuran modal asing. Namun derasnya arus urbanisasi serta membengkaknya kebutuhan energi tidak mampu dipenuhi China, meskipun negara tirai bambu ini mengkonsumsi seluruh sumber daya energi dari Indonesia serta negara Asia lainnya, seperti migas, batubara dan lainnya.

Industrialisasi Cina masih butuh waktu lama. Banyak pihak tak yakin pada 2050 China akan bisa mengejar ekonomi AS. China kesulitan sumber daya energi untuk mengembangkan industrialisasinya.

Di sisi lain, dengan jumlah penduduk AS yang saat ini hanya mencapai 5% dari total penduduk dunia, AS mampu menguasai 25% ekonomi dunia. Hal ini menunjukkan tingginya produktivitas ekonomi negara Paman Sam tersebut. Sedangkan kebutuhan energi AS masih bisa dipenuhi dengan suplai minyak mentah, batubara dan gas

dari Timur Tengah, Asia Tengah dan Tenggara serta dari sumber cadangan domestik. Industrialisasi AS sudah sedemikian maju, dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan jauh di atas China dan India.

Publikasi media internasional bahwa China dan India akan mengejar Amerika, menurut hemat penulis, masih amat jauh. Adapun kehebohan berita yang menggambarkan bangkitnya macan Asia, mungkin hanya ulah para pejabat dan intelektual India dan China yang memang pintar melobi media dan mengelola pemberitaan di media internasional. Sangat mungkin, hal itu semua karena kepintaran mereka. Apalagi para cerdas pandai China dan India kini banyak yang bekerja di Bank Dunia, IMF, dan lembaga internasional lainnya.

Agaknya, akan lebih adil dan fair jika India dan China dinilai sebagai kekuatan Asia yang berusaha menjadi kekuatan adidaya, namun masih jauh untuk bisa menyaingi Amerika. Pada akhirnya, isu kebangkitan Asia harus kita lihat sebagai daya dorong dan stimulan bagi masyarakat Asia untuk bergerak maju, kreatif dan produktif dalam persaingan global. Asia memang harus berusaha menjadi kekuatan dunia, agar tak terus dibawah bayang-bayang hegemoni Amerika.

Berbagai Masalah

Dewasa ini, AS menghadapi berbagai masalah domestik dan luar negeri yang harus dipecahkan untuk membangkitkan kembali perekonomian dan kredibilitasnya sebagai negeri adikuasa. AS ingin mengurangi rasa sakit dari krisis ekonominya dewasa ini. Apa itu?

Menkeu AS Timothy Geithner mengakui bahwa negerinya menghadapi tantangan ekonomi yang keras di tengah meningkatnya harga minyak dunia dan isu domestik lainnya. Obama dan PM Inggris David Cameron telah

mendiskusikan pelepasan cadangan minyak strategis mereka untuk mengurangi laju kenaikan harga minyak dunia. Ini isyarat kuat bahwa kenaikan harga minyak global sudah mencemaskan AS, dan menimbulkan kontraksi ekonomi dalam negeri.

Kenaikan harga minyak dunia dan gejolak Arab Spring yang berantai di Dunia Arab, ditambah instabilitas Irak dan Afghanistan pasca-invasi AS sekian tahun lalu, yang tak kunjung usai juga, merupakan masalah luar negeri yang menjadi perhatian serius Gedung Putih dan sangat mengganggu.

Dalam kaitan ini, berbicara dalam forum the Economic Club of New York, Menkeu Geithner pekan ini mengakui, masyarakat AS membutuhkan bantuan pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan kenaikan harga BBM.

Tidak ada jalan mudah dan cepat untuk mengatasi masalah ini, namun AS sedang berusaha meraih kemajuan guna mengembagkan sumber energy tambahan dalam segala bentuk dan dari segala potensi.

Uni Eropa juga menghadapi persoalan yang sama dengan AS dan memerlukan langkah penghematan sumber daya. Di dalam negeri, AS juga harus mengatasi berbagai faktor domestik yang mengganggu seperti angka kemiskinan yang tinggi, pengangguran dan pasar perumahan yang relatif lesu.

Maka menjadi penting bagi para pengambil kebijakan di AS untuk mempercepat pertumbuhan dalam jangka pendek dan tidak bergeser secara prematur ke arah pengetatan fiskal. Geithner mengakui, AS akan menghadapi masa akhir pemotongan pajak dan pengurangan anggaran belanja dalam skala besar yang berjumlah sampai 5 persen dari produk domsitik kotor, GDP negeri itu akhir 2012.

Di Berkeley, para akademisi mencatat bahwa salah satu sumber petaka bagi AS adalah hubungan dagangnya dengan China yang amat timpang. China dan AS selaku mitra dagangnya, terus saling bersitegang dan berkonflik panjang dalam tahun-tahun terakhir ini yang mencakup keamanan produk, manipulasi mata uang dan pembatasan akses pasar untuk berbagai jenis produk.

Namun demikian, AS akan tetap fokus pada kawasan Asia Pasifik karena pertumbuhan ekonominya mengesankan, yang bisa mengkompensasi krisis ekonomi di Uni Eropa. "Asia Pasifik penting bagi AS, karena menjadi pasar yang mekar, suatu kombinasi konsumsi, inovasi, dan pertumbuhan," kata Rich Lyons, Dekan Sekolah Bisnis UC Berkeley.

Seolah lagu lama, para akademisi melihat impor AS dari China menjadi kambing hitam atas upah yang stagnan di Amerika. Sementara surplus dagang China dengan AS menyebabkan ekonom peraih Nobel Paul Krugman juga mengeluhkan betapa kebijakan merkantilis negeri China itu mengorbankan ekonomi Amerika dan menimbulkan PHK jutaan tenaga kerja di AS.

Selain itu, RRC juga dikecam melakukan pelanggaran HAM, mengeruk sumber daya alam dari Afrika dengan tata kelola yang buruk. Surplus dagang China dengan AS yang berlebihan menciptakan ketimpangan global antara AS dan China. Surplus dagang China meningkat 11 persen dari PDB menyusul krisis finansial di AS dan Eropa pada 2007.

Ketimpangan dan ketidakadilan ini, demikian Dani Rodrik, guru besar di Harvard University, meningkatkan permintaan global bagi barang-barang China dengan kost yang berkurang di tempat lain, menimbulkan komplikasi bagi recovery ekonomi di seluruh dunia. Hal itu juga mengganggu sektor manufaktur di seluruh dunia, termasuk

China sendiri. Tapi problemnya bukan hanya semata ekonomi.

Secara historis, ketimpangan dagang itu juga menciptakan 'lahan subur' bagi proteksionisme. Jika surplus dagang China atas AS, tidak berkurang, AS akan membalas dengan membatasi impor dari China, dan ini mengundang reaksi balasan dari Beijing dan reaksi yang sama dari negeri lain.

Menurut Rodrik, kemunduran dan pukulan balik politik AS atas globalisasi dan perdagangan China secara umum akan menjadi kenyataan. Ditambah sistem otoriter China ikut berpengaruh negative terhadap citra negara itu. Akhirnya, ketegangan China versus AS ini sulit dikelola dan dikendalikan. Sementara China terus meraih keuntungan ekonomi, AS/Barat justru terus merugi.

AS sudah mengingatkan China agar tidak melulu mementingkan pertumbuhannya di era globalisasi. AS dan sekutunya bisa saja membuat kebijakan yang menghantam China dengan cara membatasi ekspor produk China ke luar negeri, terutama ke AS dan Eropa serta kawasan lainnya. Agar AS tak terus merugi dan menderita sakit secara ekonomi. Obama nampaknya sedang berpikir keras untuk itu, agar rasa sakit akibat krisis ekonomi di AS dan Eropa bisa dikurangi secara berarti.

Surutnya Pamor AS, Naiknya China di Asia

Dalam sepuluh tahun ke depan, Amerika Serikat (AS) merencanakan pengurangan anggaran pertahanan dan keamanannya sekitar US\$500 milyar. Meski AS berusaha mempertahankan kapasitas dan kredibilitas militernya di Asia, RRC (China) tetap melihatnya sebagai kemunduran AS di Asia. Mengapa?

Pemerintahan Presiden Barack Obama sudah menegaskan untuk berkomitmen mempertahankan

kredibilitas militer AS di Asia-Pasifik, dan 2500 marinir AS sudah ditempatkan di Australia, sementara AS juga meningkatkan postur militernya di Filipina.

Namun Beijing menilai, dengan kemerosotan ekonomi AS, maka kekuatan militer Washington di Asia-Pasifik bakal terus mengalami penurunan secara relative, sehingga ada peluang bagi China untuk memperbesar pengaruh dan proyeksi kekuatan militernya di Asia.

Bahwa kebangkitan ekonomi China dan meningkatnya kekuatan militer Beijing yang sudah lama diperkuat dengan senjata nuklir, makin membuat RRC lebih asertif dan percaya diri.

Di Asia selatan, India dan Pakistan terus bersaing, begitu juga India dan China, dua kekuatan besar yang memperlihatkan rivalitas sengit di Asia.

Program nuklir Pakistan memperoleh dukungan dari China, sementara Pakistan juga merupakan sekutu AS dalam menjaga stabilitas dan memerangi terorisme di kawasan Asia Selatan, dimana Afghanistan masih menjadi masalah keamanan regional.

“Melihat dinamika di Asia-Pasifik, sungguh kehadiran AS di kawasan Asia Pasifik sangat penting dan krusial,” kata Prof Neil Joeck di Universitas California Berkeley pekan lalu.

Persoalan keamanan di Asia makin sensitive sebab ada kecenderungan kuat bahwa dalam waktu dekat, demikian Dr. Jia Xiudong dari China Institute of International Affairs, Taiwan akan menjadi sasaran berikut untuk ditekan Beijing agar mau reunifikasi, Setelah Hong Kong, giliran Taiwan menjadi target dalam waktu dekat bagi Beijing yang sudah lama mengincar Taiwan agar berada di bawah kendali kekuasaan RRC. “Beijing melihat AS bersikap ambigu dalam upaya mencegah Beijing untuk mengambil alih Taiwan, Ada

ambiguitas strategy AS dalam soal Taiwan,” ungkap Jia Xuidong.

Tak mengherankan jika RRC terus memperkuat militernya untuk mengambil alih Taiwan dalam orbit kekuasaan dan kedaulatannya.

Berdasar studi SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute, 2010), China merupakan negara Asia dengan anggaran militer terbesar US\$49,5 milyar pada 2006, kemudian pada 2008 menjadi angka itu naik menjadi 84,9 milyar dolar AS dan pada 2009 menjadi 100 milyar dolar AS. Anggaran militer RRC meningkat dua kali lipat dari tahun 2006 ke 2009, dengan angka persentase kenaikan secara konsisten mencapai 17 persen per tahun. Situasi ini sangat mencemaskan Korsel dan Jepang di Asia Timur. Sementara anggaran militer Jepang tidak mengalami kenaikan yang konsisten, yakni pada 2006 anggaran militer Jepang US\$43,7 milyar dan pada 2009 hanya 51 milyar dollar. Dan jelas RRC menjadi negeri urutan keempat di dunia dalam hal anggaran militer setelah AS, Inggris dan Perancis pada 2007.

Namun pada 2009, RRC merupakan negeri dengan anggaran militer terbesar kedua di dunia setelah AS. Dan angka itu sudah melampaui anggaran militer Jepang yang dihantui perasaan akan “bahaya militer China”

China sebagai sang naga merah, sedang naik daun di Asia, bahkan di dunia. Anggaran militer RRC terus meningkat. Pada 2000, anggaran militer China menghabiskan US\$90 miliar dan pada 2010, anggaran itu meningkat 30 miliar dolar AS menjadi US\$120 miliar dengan 2,3 juta tentara. Angkatan daratnya merupakan kekuatan paling besar di dunia. Dan tahun ini anggaran militer Beijing mencapai US\$160 miliar ! Kenaikan anggaran militer RRC telah mempengaruhi tata tertib regional Asia Timur dan berdampak pada keamanan Jepang, demikian laporan Japan Ministry of Defence.

Dan pada 2010, Jepang melaporkan bahwa RRC meningkatkan intensitas aktivitas militernya di perairan dekat Jepang dan Tokyo mengungkapkan keprihatinan atas kurangnya transparansi mengenai strategi pertahanan nasionalnya dan kurangnya transparansi aktivitas militer Beijing di kawasan Asia timur. Pada September 2010 terjadi ketegangan antara RRC dan Jepang atas Kep.Senkaku/Diaoyu yang menyingkapkan potensi konflik kedua negeri bertetangga ini. Pada September 2010 itu Tokyo menahan seorang kapten kapal RRC di ibukota Okinawa, Naha, dengan tuduhan kapten kapal Beijing itu melanggar kedaulatan hukum Jepang.

Namun Beijing menuntut pembebasannya, dengan cara menyerang balik yakni menangkap empat karyawan Fujita Corporation di Provinsi Hebei, China, dan malah dalam lawatan Perdana Menteri Wen Jibao ke New York, ia menegaskan akan mengambil langkah lebih lanjut terhadap Jepang jika Tokyo tidak membebaskan kapten kapal tersebut (BBC News,2010). Jepang akhirnya membebaskan kapten kapal RRC itu. Tindakan RRC itu menimbulkan dua dampak terhadap Jepang yakni: Pertama, Tindakan China itu membuat Tokyo mengemukakan Guidance Haluan Pertahanan Baru pada Desember 2010 sebagai respon atas meningkatnya anggaran militer RRC dan kiprahnya di kawasan.

Kedua, Jepang memutuskan untuk lebih erat bekerja sama dengan AS,dimana Jepang kemudian menegaskan bahwa merupakan hubungan bilateral dengan AS paling penting untuk menjamin keamanan Jepang, dan kehadiran militer AS di Jepang menjadi sangat diperlukan, dan Jepang harus mematuhi Perjanjian Keamanan AS-Jepang (*Mainichi Daily News*, 2011).

Di dekat Selat Taiwan, ternyata RRC mengembangkan armada laut yang diperkuat dengan kapal selam yang memiliki jarak tembak 2100 Km sehingga mampu

memberlakukan strategi “*anti-access area denial*”, suatu strategi penolakan dan penangkalan terhadap kehadiran militer AS, yang memaksa marinir/AL AS berada di luar kawasan Selat Taiwan dan Pasifik Barat jika terjadi aksi militer China atas taiwan.

RRC juga mencegah AL AS dari operasi dekat Taiwan dan akan mencegah dukungan kekuatan laut AS bagi Jepang jika terjadi benturan militer Jepang-China (Japan Times,2008) Jepang menghadapidilema dalam hubungannya dengan AS jika AS tidak mampu membela Jepang menghadapi kekuatan laut RRC yang terus meningkat.

Surutnya kehadiran militer AS di Asia seiring menurunnya ekonomi AS, telah membuka peluang dan ruang bagi RRC bermanuver dan bergerak lebih leluasa di Asia, seiring dengan menguatnya ekonomi China.

Bisnis Senjata di Asia Makin Marak

Menguatnya millter China menjadi perhatian serius para akademisi dan pengamat pertahanan-keamanan di AS. Apalagi, Asia telah menjadi importir terbesar senjata di dunia.

Situasi ini membuat Amerika Serikat (AS) mendukung berbagai negara di kawasan Asia Pasifik untuk menentang menguatnya pengaruh China. Situasi itu juga mendorong AS dan China untuk terus mengadakan pembicaraan serius tentang isu keamanan di wilayah Asia Pasifik.

Sebelumnya, pemerintah China mengkritik pemerintahan Obama yang berencana menyeimbangkan kekuatan militer di Asia. Washington membantah bahwa langkah itu dimaksudkan untuk membendung meningkatnya pengaruh China. Hal itu dipertegas dengan meningkatnya klaim sengketa teritorial di Laut China Selatan.

“Bagaimana pun AS cemas dan khawatir dengan kebangkitan militer China, selain isu nuklir Iran dan Korea Utara,” kata Robert Gallucci di Universitas California Berkeley.

Diplomasi AS-China terus tarik ulur untuk kepentingan masing-masing, dan oleh sebab itu, ASEAN dan negara-negara tetangga di Asia Timur harus bisa menjaga keseimbangan kekuatan dengan memainkan kartu China maupun AS agar stabilitas kawasan tetap terjaga.

Studi SIPRI menunjukkan wilayah Asia Pasifik menyumbang 44 persen impor senjata hasil produksi Eropa. Angka ini merupakan angka teratas dalam lima tahun terakhir.

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), melaporkan bahwa secara global volume perdagangan senjata pada periode 2007–2011 lebih tinggi 24% dibandingkan pada periode 2002–2006. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perdagangan senjata di Asia dan Oceania mencapai 44% dari perdagangan impor senjata di seluruh dunia. Angka itu tentu lebih tinggi dibandingkan dengan hanya 19% untuk wilayah Eropa, 17 untuk Timur Tengah, 11% untuk Amerika Selatan dan Utara, serta 9% untuk Afrika.

Tidak hanya China yang menaikkan anggaran militernya dengan 100 miliar dollar. Tapi juga Taiwan, Korsel, Filipina, Indonesia sampai Vietnam dan Singapura. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, naik pula anggaran militer mereka dengan ratusan juta dolar per tahun. Para pengamat sampai menyebut ada semacam lomba senjata di Asia.

India adalah importir senjata terbesar pada periode 2007–2011 dengan persentase impor mencapai 10% dari volume perdagangan internasional. Diikuti oleh Korea Selatan (Korsel) dengan 6%, China dan Pakistan (masing-

masing 5%), serta Singapura (4%). Impor senjata India, Korsel, China, Pakistan, dan Singapura mencapai 30% dari volume perdagangan internasional.

“Impor senjata India meningkat menjadi 38% pada periode 2002–2006 dibandingkan dengan 2007–2011,” demikian laporan SIPRI. Dan itu termasuk pengiriman pesawat udara pada periode 2007–2011 meliputi 120 Su-30MK dan 16 MiG-29K dari Rusia serta 20 Jaguar Ss dari Inggris.

Karena India menjadi importir senjata terbesar, tetangga yang juga musuh bebuyutannya, Pakistan menjadi pengimpor senjata terbesar ketiga.

Pakistan membeli pesawat tempur pada periode 2007–2011 yakni 50 JF-17 dari China dan 30 F-16. India dan Pakistan juga mengimpor tank dalam jumlah besar.

“Sebagian besar negara pengimpor senjata kini terus mengembangkan industri senjata mereka. Dengan demikian, itu memengaruhi penurunan pasokan senjata dari luar,” kata Pieter Wezeman, peneliti senior Program Impor Senjata SIPRI.

Pada 2006-2007 China merupakan pengimpor senjata terbesar dunia. Tapi tahun 2011 Beijing hanya menempati urutan keempat. Penurunan impor China dipengaruhi peningkatan industri senjata China yang massif.

Dengan penurunan peringkat China dalam impor, India merebut posisi itu pada 2011. SIPRI menyimpulkan, peningkatan posisi India itu karena faktor Pakistan. Sementara setelah tidak lagi menjadi pengimpor senjata terbesar, China kini terus membuat terobosan.

Di Asia, Beijing kini justru menjadi pengeksportir senjata terbesar keenam setelah Amerika Serikat (AS), Rusia, Jerman, Prancis, dan Inggris.

Negara-negara Asia Tenggara dan Cina kini lebih memilih kendaraan dan peralatan militer terbaru serba canggih. Yang mencolok adalah pembelian kapal selam. Malaysia baru saja membeli tiga kapal selam, Indonesia pesan tiga, Vietnam enam dan Muangthai mau beli empat dari Jerman. Negara-negara Asia tenggara membeli senjata karena faktor perasaan kurang aman. Vietnam dan Filipina misalnya cemas akan kebijakan maritim yang akan ditempuh Beijing. Di laut China Selatan ada enam pulau Vietnam.

Walhasil, perlombaan dan bisnis senjata di Asia makin meninggi, menguras sumberdaya untuk kesejahteraan rakyatnya, sementara pada waktu yang sama negara-negara di Asia Timur dan Tenggara terus mencermati kebijakan pertahanan China yang semakin menandingi pertahanan Amerika di Asia.

Dinamika China di Asia

China merupakan kekuatan regional yang sangat diperhitungkan di Asia. Konflik RRC dengan Jepang soal Pulau Senkaku, atau konfliknya dengan Vietnam dan Filipina terkait Kepulauan Spratley belakangan ini, tidaklah mengganggu gerak maju ekonomi China di Asia. Dengan kepatuhan Beijing pada doktrin politik "taoguang yanghui" yang artinya sembunyikan kemampuanmu dan tunggu saat yang tepat (Tan & Aeharya, *Asia-Pacific Security Cooperation: National Interests and Regional Order*, 2004), modernisasi China makin memperlihatkan kedigdayaannya.

Dalam hal ini, sekiranya kapitalisme Asia (Jepang, China, Korsel, dan Asia Tenggara) terus berkembang dalam sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan, hampir pasti prediksi pada akademisi mengenai Abad Pasifik merupakan suatu keniscayaan.

Setidaknya, dewasa ini, hal itu sudah terjadi dimana krisis ekonomi AS/Eropa, menemukan kapitalisme Asia

sebagai “kawasan harapan” bagi pemulihan ekonomi dunia yang dinamis, dan relatif selamat dari krisis.

Itulah sebabnya studi China, Jepang dan Asia di berbagai universitas dan lembaga di AS/Eropa Barat sangat pesat. Universitas Stanford, Universitas California Berkeley, LSE, Oxford, Cambridge, Universitas Washington, MIT dan Harvard, misalnya, membangun kerja sama dengan berbagai universitas di Beijing, seperti Universitas Beijing, Tsinghua dan sebagainya.

Kerjasama itu mencakup pertukaran mahasiswa, akademisi dan peneliti, termasuk membangun gedung perwakilan di kampus-kampus China terkemuka bagi para mahasiswa dan akademisi AS/Barat yang mempelajari China baik itu menyangkut China kuno sampai modernisasi China dewasa ini, dengan anggaran yang relatif besar. Kemunduran ekonomi AS tidak menjadi penghalang bagi Amerika/Barat untuk terus mempelajari China dalam segala aspeknya, apalagi minat mahasiswa AS untuk itu cukup besar.

Bagaimanapun China adalah fenomena dunia, pasar besar sekaligus produsen besar yang menyapu dunia dengan segala macam produknya. China sudah menjadi pabrik dunia. Para kapitalis China umumnya loyal kepada bangsa dan negaranya, termasuk para tapitan China di perantaraan yang hampir semuanya menanamkan modal di China.

Itulah "Kapitalisme Merah dan Nasionalisme " ala China dimana kesetiaan pada negeri leluhur, sangat kuat dan menjadi perhatian dunia, bahkan menjadi prasangka dan kecurigaan masyarakat dunia terhadap mereka.

Rong Yiren, sekedar ilustrasi, seorang pengusaha yang dijuluki “kapitalis merah” (red capitalist) sebelum fenomena orang kaya baru dan konglomerat merebak dan menjadi umum di Tiongkok seperti sekarang ini, adalah tipikal kapitalis merah yang berdedikasi untuk bangsanya.

Rong dilahirkan pada tanggal 1 Mei 1916 dan meninggal di usia 89 tahun pada tanggal 26 Oktober 2005. Dalam periode sejarah yang penuh intrik antara harus bertahan, survival dan menyesuaikan diri dengan komunisme Mao Zedong hingga Deng Xiaoping, dalam periode peralihan Tiongkok yang penuh dengan masalah dan tantangan, Rong memutuskan untuk tetap di Tiongkok di saat pengusaha kaya lainnya memilih kabur ke Hong Kong atau Taiwan menjauhi komunisme.

Rong disambut baik oleh Partai Komunis China (PKC) dan masuk jajaran atas pos pemerintah setelah mengalihkan aset kekayaan keluarganya kepada negara. Rong mengalami persekusi semasa Revolusi Kebudayaan Mao Zedong. Tapi ia tetap mengabdikan kepada kepentingan bangsanya.

Gerak Ekonomi China

Kini, wajah trio penggerak komunisme di China kadang masih ditampilkan di dinding rumah atau restoran China daratan: Mao Zedong, Lenin, dan Stalin. Tapi di Hong Kong, kawasan yang sudah menjadi bagian integral China, saya melihat wajah ketiga sosok komunisme itu tinggal sejarah yang meratapi masa silam yang kian menjauh, masa kini yang mungkin menggelisahkan hati, dan masa depan yang diwarnai ketidakpastian: ekonomi pasar yang menggelejar di tengah komunisme yang memudar.

Di kalangan muda China daratan sendiri, komunisme hanya sejarah, tidak untuk kehidupan nyata. Uang adalah ideologi masyarakat yang paling menonjol. Bukan komunisme. Dengan uang, orang China menjadi gemar belanja dan melakukan apa saja. Di Hong Kong, saya melihat bagaimana kaum muda China daratan bergaya, tak malu kalah sama kaum muda Hong Kong yang sejak lama sudah “kapitalis dan pragmatis”.

Deng Xiaoping membuka pintu reformasi China daratan 1979, dan kini dengan konsep satu China dua sistem, "kapitalisme merah" di Beijing sangat mungkin justru meniru model kapitalisme Hong Kong yang sudah lebih dahulu begitu maju dan progresif.

Itulah sebagian wajah "kapitalisme merah": suatu perpaduan ekonomi pasar dan perencanaan negara ala China yang mengusung mimpi kebesaran negeri tengah, "zhongguo", sebagai kekuatan dunia agar tak lagi dipermalukan oleh Barat yang pernah lama menjajah mereka.

Carl E. Walter dan Fraser J.T. Howie dalam karyanya "Red Capitalism", mencatat ada kritik tajam terhadap China dalam mengelola keuangannya yang begitu kental aroma politiknya. Bahwa banyak pejabat keuangan China dan pakar tahu bagaimana sistem mereka bekerja, bagaimana para penguasa China bergerak sebagai sebuah bisnis keluarga di masa lalu. Tapi sejak Zhu Rongji berkuasa, China melakukan reformasi keuangan yang cermat, hati-hati, transformatif dan konsisten.

Kini negeri komunis merah itu terbukti tangguh dalam menahan badai krisis keuangan yang bermula muncul dari Amerika dan Eropa mulai tiga tahun silam. China punya cara sendiri untuk bertahan dan bertumbuh. Ada banyak pendapat bahwa China bisa seperti sekarang, bukan karena komunisme, melainkan karena mereka punya etos kerja tinggi dan gemar menabung. Ajaran konfusianisme kerakyatan juga punya peran penting.

Para analis melihat, etos kerja yang tinggi itulah yang mudah digerakkan untuk menggenjot produksi. Hampir seluruh merek elektronik dan otomotif terkenal, kini telah diproduksi di China selain aneka merek China sendiri. Upah buruh murah memungkinkah China bisa memproduksi apa saja dengan harga jual di pasar jauh lebih murah. Indonesia

kini juga tengah terengah-engah digempur berbagai produk China.

China seperti ditulis Samuel Huntington dan Francis Fukuyama, yang menyoroti faktor budaya, culture matters, memang masuk kategori bangsa yang low trust society. Mereka bukan bangsa yang menganut etika Protestan seperti ditulis Max Weber yang punya peluang lebih makmur dibandingkan etika agama lain. China tak masuk kamus bangsa yang punya potensi berkembang dan makmur. Tapi, kini tesis itu tengah dijungkirkan jika melihat pertumbuhan China yang fantastis, dan Hong Kong menjadi salah satu pusat ekonomi kapitalisme merah yang mencorong di Asia.

Maka, tak mengherankan, seiring menguatnya ekonomi China, anggaran militer RRC juga terus ditingkatkan. Tahun 2000, anggaran militer China menghabiskan US\$90 miliar dan pada 2010, anggaran itu meningkat 30 miliar dolar AS menjadi US\$120 miliar (sekian kali lipat APBN kita tahun 2010), dengan jumlah pasukan AD 2,3 juta tentara. Angkatan Daratnya merupakan kekuatan AD paling besar di dunia.

Tahun ini budget pertahanan tahun ini mencapai US\$160 miliar, sebuah angka luar biasa besar, bandingkan dengan APBN Indonesia yang setahun sekitar Rp1.600-1.700 triliun. Angka itu melonjak 12 persen dari anggaran tahun lalu.

Keberhasilan modernisasi ekonomi China melalui Kapitalisme Merahnya, untuk sementara sudah mengejutkan masyarakat dunia dan membuat dunia iri padanya. Namun menurut Prof Dani Rodrik, citra China sebagai raksasa dunia dengan kombinasi ekspor dan strategi diversifikasi ekonomi maupun inovasi institusi, bukanlah gambaran yang tanpa persoalan di masa depan.

Bahkan gambaran itu tidak semuanya indah. China dan mitra dagangnya, terutama AS, akan terus saling bersitegang dan berkonflik panjang yang mencakup keamanan produk,

manipulasi mata uang dan pembatasan akses pasar untuk berbagai jenis produk.

Ketegangan dan konflik hubungan dagang AS dan China itu, boleh jadi, menjadi masalah bagi Kapitalisme Merah ala China, jika tak ditangani dengan baik oleh Beijing di masa depan. Sejarah sedang menunggu dan melihat apa yang akan terjadi di China di masa depan.

China dengan "Kapitalisme Merahnya" terus-menerus mengalami pertumbuhan ekonomi yang spektakular selama 25 tahun terakhir. Itu seakan-akan menggugat kebenaran tesis adanya hubungan erat antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kini dunia menyaksikan kontroversi Kapitalisme Merah di China: China yang otoriter, menolak demokrasi liberal, terus tumbuh ekonominya, meski para analis memprediksi, bukan berarti pertumbuhan RRC itu akan demikian selamanya.

Sampai sekarang ini, dampak pertumbuhan China makin terasa bagi negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Adanya "Ancaman China", suatu istilah yang sering digaungkan Barat, akhir-akhir ini bukanlah karena China yang hebat secara militer, melainkan justru secara ekonomi.

Dalam kaitan RRC dan Amerika Serikat, hubungan kedua negeri itu seakan cinta-benci, diwarnai ketegangan dan persaingan meski kedua negeri berpengaruh itu tetap membangun kerjasama. Akan halnya hubungan China dan ASEAN, makin jelas betapa kebangkitan ekonomi China bisa menyebabkan melambatnya ekonomi ASEAN karena kalah bersaing.

Kita melihat dimensi ekonomi-politik dalam hubungan antara China, Asia Timur dan ASEAN serta Indonesia dalam

beberapa dekade untuk sebagian dipengaruhi dinamika Kapitalisme Merah di China.

Program Repelita RRC

Meski ekonomi RRC mengalami perubahan fundamental yang memungkinkan kekuatan pasar beroperasi di China, yang kini disebut para analis/akademisi Barat sebagai Kapitalisme Merah (*Red Capitalism*), jalan pembangunan China masih dipengaruhi prioritas perencanaan ekonomi dalam rencana pembangunan lima tahunan, semacam Repelita.

Semua itu merupakan rencana kerja yang melibatkan para ekonom, akademisi, dan pemimpin PKC (Partai Komunis China) di semua level masyarakat, termasuk rancangan "Rencana Lima Tahun yang ke-12" dalam pembangunan China ke depan yang sudah ditetapkan dalam sidang Kongres Rakyat Nasional 14 Maret 2011. Kapitalisme Merah di negeri tirai bambu ini, terus menggeliat maju.

Target pembangunan energi dan lingkungan hidup sudah dipancarkan di mana RRC ingin lingkungan hidup dilestarikan dan menginginkan pula pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*) untuk mendukung sistem kesejahteraan sosial. Di sini target pertumbuhan ekonomi sekitar 7%, dan itu lebih rendah dari rata-rata 11% selama perencanaan Lima Tahun yang ke-11 sebelumnya.

China menghadapi isu disparitas tajam. Sejauh ini, disparitas di China menurut indeks Gini:0,46. Dan pertumbuhan ekonomi RRC yang cepat, mungkin paling pesat di masyarakat Asia, ditandai dengan ketimpangan paling tajam pula. Disparitas pendapatan (*income*) antar provinsi Timur dan Barat di China, kota dan desa, antargolongan sosial, kian tajam pula dan kian mengkhawatirkan. Ada beberapa ratus jutawan di China dan

271 milyarder di RRC menurut Humanities Research Institute .

Para pekerja mendapat upah 56.000 RMB per tahun, tapi para CEO bergaji 15-20 kali lipatnya. Survei terakhir mengungkapkan gaji sejumlah CEO di RRC 9 juta RMB per tahun dan terdapat 232 CEO meraih gaji lebih dari 1 juta RMB pada 2010. Dalam persepsi elite dan massa di RRC, ini jelas ketimpangan yang tajam .

Itulah sebabnya, Beijing berencana membuat sistem upah nasional yang bisa memangkas jurang pendapatan dan pemerintah ingin membuat regulasi untuk mengatur gaji masyarakat dan eksekutif di institusi-institusi keuangan dan BUMN. China ingin menyerap 9 juta pekerja baru per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan publik di pedesaan dan 8 juta buruh di pedesaan akan ditansfer ke perkotaan.

China juga memfokuskan diri pada konservasi energi dan pembangunan pro lingkungan (green development) dan tidak lagi memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan lingkungan. China menghadapi keterbatasan sumber daya energi di tingkat global, karena harus mengimpor batu bara, BBM, dan lain-lain dari pasar global dalam skala massal.

Kini ada dua soal krusial di RRC yakni pertama, industri di kota-kota China dan kedua, rumah tangga China yang sangat tergantung dan mengkonsumsi batu bara yang menjadi sumber emisi dan polusi lingkungan, sementara sumber daya air, BBM dan sebagainya tak digunakan secara efisien.

China menyatakan komitmennya pada Perjanjian Iklim Internasional yang baru, dan terikat untuk memakai energi nonfosil yang angkanya meningkat 11,4% serta mengurangi energi nonfosil pada GDP sebesar 16,6% sebelum 2015.

China akan meningkatkan energi angin, listrik bertenaga air, dan nuklir, melaksanakan green ecology dan green development yang berdampak penting dalam modernisasi China mendatang.

Pertanyaannya, apakah mungkin China melakukan orientasi baru ke strategi pembangunan yang pro green development itu? Selama ini ekonomi RRC berorientasi pada industri berat dan digerakkan oleh investasi di mana bercokol kepentingan elite PKC, pejabat negara dan para CEO di BUMN-BUMN yang biasa disebut sebagai 'segitiga besi' (iron triangle). Adakah ruang baru untuk perubahan kebijakan itu? Persoalan ini, bagi "Kapitalisme Merah" ala China, masih menghantui sampai lima tahun ke depan.

Carl E. Walter dan Fraser J.T. Howie dalam karyanya "Red Capitalism" (2011), mencatat ada kritik tajam terhadap China dalam mengelola keuangannya yang begitu kental aroma politiknya. Bahwa banyak pejabat keuangan China dan pakar tahu bagaimana sistem mereka bekerja, bagaimana para penguasa China bergerak sebagai sebuah bisnis keluarga di masa lalu.²³

Tapi sejak Zhu Rongji berkuasa, China melakukan reformasi keuangan yang cermat, hati-hati, transformatif dan konsisten.

Kini negeri komunis merah itu terbukti tangguh dalam menahan badai krisis keuangan yang bermula muncul dari Amerika dan Eropa mulai tiga tahun silam. China punya cara sendiri untuk bertahan dan bertumbuh. Ada banyak pendapat bahwa China bisa seperti sekarang, bukan karena komunisme, melainkan karena mereka punya etos kerja

²³ Carl E. Walter, Fraser J. T. Howie, *Red Capitalism: The Fragile Financial Foundation of China's Extraordinary Rise*, (John Wiley & Sons, 2011).

tinggi dan gemar menabung. Ajaran konfusianisme kerakyatan juga punya peran penting.

Para analis melihat, etos kerja yang tinggi itulah yang mudah digerakkan untuk menggenjot produksi. Hampir seluruh merek elektronik dan otomotif terkenal, kini telah diproduksi di China selain aneka merek China sendiri. Upah buruh murah memungkinkah China bisa memproduksi apa saja dengan harga jual di pasar jauh lebih murah. Indonesia kini juga tengah terengah-engah digempur berbagai produk China.

China seperti ditulis Samuel Huntington dan Francis Fukuyama, yang menyoroti faktor budaya, *culture matters*, memang masuk kategori bangsa yang *low trust society*. Mereka bukan bangsa yang menganut etika Protestan seperti ditulis Max Weber yang punya peluang lebih makmur dibandingkan etika agama lain. China tak masuk kamus bangsa yang punya potensi berkembang dan makmur. Tapi, kini tesis itu tengah dijungkirkan jika melihat pertumbuhan China yang fantastis, dan Hong Kong menjadi salah satu pusat ekonomi kapitalisme merah yang mencorong di Asia.

Maka, tak mengherankan, seiring menguatnya ekonomi China, anggaran militer RRC juga terus ditingkatkan. Tahun 2000, anggaran militer China menghabiskan US\$90 milyar dan pada 2010, anggaran itu meningkat 30 milyar dollar AS menjadi US\$120 milyar (sekian kali lipat APBN kita tahun 2010), dengan jumlah pasukan AD 2,3 juta tentara. Angkatan Daratnya merupakan kekuatan AD paling besar di dunia. Tahun ini budget pertahanan tahun ini mencapai US\$160 milyar, sebuah angka luar biasa besar, bandingkan dengan APBN Indonesia yang setahun sekitar Rp1600-1700trilyun. Angka itu melonjak 12 persen dari anggaran tahun lalu.

Keberhasilan modernisasi ekonomi China melalui Kapitalisme Merahnya, untuk sementara sudah mengejutkan

masyarakat dunia dan membuat dunia iri padanya. Namun menurut Prof Dani Rodrik, citra China sebagai raksasa dunia dengan kombinasi ekspor dan strategi diversifikasi ekonomi maupun inovasi institusi, bukanlah gambaran yang tanpa persoalan di masa depan.

Bahkan gambaran itu tidak semuanya indah. China dan mitra dagangnya, terutama AS, akan terus saling bersitegang dan berkonflik panjang yang mencakup keamanan produk, manipulasi mata uang dan pembatasan akses pasar untuk berbagai jenis produk. Ketegangan dan konflik hubungan dagang AS dan China itu, boleh jadi, menjadi masalah bagi Kapitalisme Merah ala China, jika tak ditangani dengan baik oleh Beijing di masa depan.

China dan Kepemimpinannya di Asia

Dalam hal ini, Dani Rodrik, guru besar Ekonomi-Politik Internasional di Harvard University, AS itu, bertanya dan mengeksplorasi: Adakah dan bagaimana kemungkinan China mengambil alih kepemimpinan ekonomi global dalam waktu yang tidak terlalu lama?

Keberhasilan modernisasi ekonomi China memang mengejutkan masyarakat dunia. Namun menurut seorang pakar, citra China sebagai raksasa dunia dengan kombinasi ekspor dan strategi diversifikasi ekonomi maupun inovasi institusi, bukanlah gambaran yang tanpa persoalan. Bahkan gambaran itu tidak semuanya indah.²⁴

Cina dan mitra dagangnya, terutama AS, terus saling bersitegang dan berkonflik panjang dalam tahun-tahun terakhir ini yang mencakup keamanan produk, manipulasi mata uang dan pembatasan akses pasar untuk berbagai jenis

²⁴ Dani Rodrik, *The Globalization Paradox, Democracy and The Future of the World Economy*, (W. W. Norton & Co, 2011), 346 pp.

produk. Ketegangan dan konflik hubungan dagang AS dan China sudah berjalan cukup lama.

Impor AS dari China menjadi kambing hitam atas upah yang stagnan di Amerika, sementara surplus dagang China dengan AS menyebabkan ekonom peraih Nobel yakni Paul Krugman mengeluhkan betapa kebijakan merkantilis negeri China itu mengorbankan ekonomi Amerika dan menimbulkan PHK jutaan tenaga kerja di AS. Selain itu, RRC juga dikecam melakukan pelanggaran HAM, mengeruk sumber daya alam dari Afrika dengan tata kelola yang buruk, di benua Afrika yang celakanya, tata kelola pemerintahannya jauh lebih buruk lagi.

Surplus dagang China dengan AS yang berlebihan menciptakan ketimpangan global antara AS dan China. Surplus dagang China meningkat 11 persen dari GDP menyusul krisis finansial di AS dan Eropa tahun 2007. Ketimpangan dan ketidakadilan ini, demikian Dani Rodrik, meningkatkan permintaan global bagi barang-barang China dengan kost yang berkurang di tempat lain, menimbulkan komplikasi bagi recovery ekonomi di seluruh dunia. Hal itu juga mengganggu sektor manufaktur di seluruh dunia, termasuk China sendiri. Tapi problemnya bukan hanya semata ekonomi.

Secara historis, ketimpangan dagang itu juga menciptakan "lahan subur" bagi proteksionisme. Jika surplus dagang China atas AS, tidak berkurang, maka AS akan membalas dengan membatasi impor dari China, dan ini mengundang reaksi balasan dari Beijing dan reaksi yang sama dari negeri lain.

Menurut Rodrik, kemunduran dan pukulan balik politik AS atas globalisasi dan perdagangan China secara umum akan jadi kenyataan. Apalagi sistem otoriter China juga membikin masalah moral di negara-negara demokrasi dimana nilai-nilai dan sistemnya berbeda. Akhirnya, ketegangan

China versus AS ini sulit dikelelola dan dikendalikan. Sementara China terus meraih keuntungan ekonomi, AS/Barat justru terus merugi.

China diperkirakan akan menjadi pemimpin Asia ke depan, dan RRC berpeluang menggantikan peran AS yang mengalami kemunduran sebagai pemimpin regional di Asia Pasifik. Negara-negara Asia Timur tidak gembira dan tidak suka dengan kebangkitan RRC di luar negeri, menggantikan peran AS. Korsel dan Jepang sudah bersikap semacam itu dan mengisyaratkan kecemasannya, sikap Vietnam, dan Indonesia serta Negara Asia Tenggara lainnya serupa meski tak sama.

Setidaknya, RRC sebagai pemimpin politik dan militer regional sudah mencemaskan dan mengkhawatirkan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur, bukan hanya karena kekuatan ekonomi China yang menakutkan, tapi juga pembangunan militernya. Daam bersaing dengan AS, militer China dengan jelas meningkatkan kekuatannya di Asia, dan dalam kenyataan militer China lebih tinggi dari AS dalam operasinya.

Ada ketidakpercayaan yang merata di Asia Timur dan Tenggara atas RRC yang punya ambisi regional. Sehingga kawasan Asia ini menilai penting kehadiran militer AS sebagai penjaga stabilitas regional. Kasus Kep. Spratley tetap meyakinkan Asia Timur dan Tenggara tentang pentingnya payung keamanan dari AS. Jepang dan Korsel sudah meminta payung perlindungan AS menghadapi manuver militer RRC.

Dengan langkah RRC sebagai kekuatan besar di Asia, ada perasaan tidak nyaman dari Jepang dan Korsel serta Negara-negara di Asia Tenggara, maka AS diharapkan mampu menjadi counter balance force atas naiknya

penampilan militer RRC dan ekonomi Beijing di kawasan ini.²⁵

Bagaimanapun "*power game*" akan berkembang di Asia dan untuk itu, kehadiran AS sebagai *balance of power* - meminjam perspektif Hans Morgentau (sang teoritis realis dalam hubungan internasional), sangat dibutuhkan negara-negara di Asia untuk membatasi ruang gerak militer China yang bergerak paralel dengan modernisasi ekonominya.

Negara-negara di kawasan Asia mencermati dan mengawasi apa yang dikerjakan AS dan China bagi pembangunan dan stabilitas kawasan itu di masa kini dan masa depan. []

²⁵ Gregory G.Holyk, "Paper Tiger? Chinese Soft Power in East Asia", *Political Science Quarterly*, Vol.126, Number 2, Summer, 2011.

BAB VI

PERGOLAKAN MESIR: DARI REVOLUSI KE TRANSISI DEMOKRASI

Revolusi tahun 2011 di Mesir dimulai dengan pawai, demonstrasi, dan perlawanan sipil pada tanggal 25 Januari. Para pengunjuk rasa terinspirasi oleh keberhasilan pemberontakan di Tunisia, di mana para demonstran berhasil menjatuhkan pemerintah. Massa turun ke jalan menuntut penggulingan Presiden Mesir Hosni Mubarak. Mereka mengeluhkan kemiskinan, pengangguran, korupsi dan pemerintahan otokratis presiden yang telah memerintah negara itu selama 30 tahun. Para pengunjuk rasa terdiri dari unsur-unsur Islam, liberal, anti-kapitalis, nasionalis, dan feminis. Keluhan para pengunjuk rasa di Mesir terfokus pada isu-isu hukum dan politik, termasuk kebrutalan polisi, undang-undang darurat, kurangnya pemilihan umum yang bebas dan kebebasan berbicara, korupsi, dan isu-isu ekonomi termasuk tingginya pengangguran, inflasi harga pangan dan rendahnya upah. Tuntutan utama para pengunjuk rasa adalah berakhirnya rezim Mubarak dan undang-undang darurat, kebebasan, keadilan, pemerintahan non-militer yang responsif dan suara dalam mengelola sumber daya Mesir. Pemogokan yang dilakukan oleh serikat buruh menambah tekanan terhadap pejabat pemerintah.

Neoliberalisme ekonomi, despotisme, kemiskinan dan ko-rupsi kronis serta kediktatoran dan kenaikan harga

pangan, merupakan faktor-faktor yang mencetuskan revolusi paling dramatis abad ini.²⁶

Mesir, Jordan, Maroko, Tunis melakukan privatisasi BUMN, mendorong masuk modal asing, memotong subsidi, anggaran belanja negara untuk publik, menimbulkan ketidakadilan, ketimpangan dan kehidupan rakyat miskin makin sulit, sementara kelas atas (*upper class*) menikmati buah neoliberalisme, dan kelompok paling siap adalah profesional dan kalangan dunia usaha. Neoliberalisme menguntungkan kelas atas dan kelas menengah yang masih tipis lapisannya, sementara mayoritas rakyat makin miskin dan sulit.

Para akademisi “Middle East Studies” untuk sebagian telah kehilangan kemampuan analisis atas efek destabilisasi dari kebijakan ekonomi neoliberal yang memiskinkan rakyat Dunia Arab.

Gregory Gause juga tak mengira militer yang selama ini melayani dengan setia elite istana, ternyata kemudian memilih memisahkan diri dan mendukung gerakan kebebasan anti rezim di kalangan pemuda. Menurutny, peran militer di Timur Tengah juga harus dikaji ulang mengingat profesionalisme dan institusionalisme militer sudah berubah.

Gregory Gause mendorong para pakar Timur Tengah harus studi ulang mengenai pentingnya identitas Arab dalam memahami masa depan politik Timteng. Jatuhnya Ben Ali dan Mubarak meyakinkan masyarakat Arab di negeri tetangganya bahwa mereka juga melakukan hal yang sama di negeri mereka .

²⁶ Lisa Anderson, “Demystifying Arab Spring”, Foreign Affairs (edisi Mei-Juni 2011) Tulisan ini merupakan revisi atas berbagai artikel penulis yang berbarisan di www.inilah.com dan www.rimanews.com sepanjang Januari-Desember 2011.

Wael Ghonim adalah tipikal elite yang memihak kaum miskin di Mesir/Arab. Wael Ghonim, eksekutif muda di Google Mesir, dengan berani mengambil resiko mempertaruhkan nyawa untuk mengorganisasi kaum muda dan masyarakat dengan seruan "We are all Khaled Said" di *Facebook* untuk mengenang seorang pemuda yakni Khaled Said, yang tewas digebuki polisi

Karena itulah Timur Tengah berubah. Gerakan revolusi menimbulkan perubahan rezim (*regim change*). Menyusul jatuhnya rezim Ben Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, serta penangkapan dan pembunuhan mantan pemimpin Libya, Moammar Khadafy, demonstrasi yang menggusur dan menggulingkan rezim opresif Ali Abdullah Saleh di Yaman serta demonstrasi mendesak mundur rezim Bashar Al-Assad di Suriah, mengindikasikan pergolakan di Dunia Arab terjadi oleh banyak sebab. Tidak ada sebab yang tunggal dalam Arab Spring.

Revolusi yang mengguncang dunia Arab dalam setahun terakhir itu berawal dari gerakan solidaritas rakyat Tunisia atas aksi bakar diri seorang penjual sayur-mayur bernama Muhammed Bouazizi.

Gerakan ini dimulai pada 18 Desember 2010 dan berhasil melengserkan rezim Ben Ali pada 14 Januari 2011. Dari Tunisia, revolusi dunia Arab kemudian menyebar ke negara Arab lain dan berjaya mendongkel pemerintahan otoriter di Mesir dan Libya. Bahkan, bara revolusi terus berkobar hingga sekarang di Yaman, dan Suriah Perubahan rezim hanyalah langkah pertama menuju penggantian dasar-dasar yang mendukung rezim sebelumnya. Berapa lama dan bagaimana radikalnya dasar-dasar ini diubah, adalah tergantung pada kekuatan dan kejelasan dari para pemimpin gerakan revolusioner, yang sering kali terdiri dari elemen berbeda yang menyatu untuk mencapai tujuan bersama mengubah *status quo*.

Ketika Presiden otoriter Tunisia Zine al Abidine Ben Ali lengser setelah hanya empat minggu protes damai telah memicu pemberontakan massal terhadap rekan Mesirnya, Mubarak, dunia terkejut. Harapan muncul di ibukota-ibukota Barat bahwa gelombang-gelombang tuntutan populer untuk demokrasi akan menyapu wilayah tersebut. Namun, sementara keuntungan-keuntungan dari konsolidasi Tunisia dan Mesir masih dibuat, gelombang demokrasi telah mencapai Suriah dan Yaman; sementara perang saudara di Libya akhirnya mampu mengakhiri rezim Moammar Khaday.

Apa yang menyebabkan keretakan radikal di sejarah wilayah ini adalah hilangnya rasa takut warga terhadap pasukan keamanan, yang tercapai dengan mengumpulkan sejumlah besar orang di berbagai daerah. Orang-orang yang Sholat Jumat di kawasan Arab itu terus didorong untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Tidak ada pemerintahan Arab yang berani melarang laki-laki Muslim untuk bersama-sama melakukan Sholat Jumat sesuai dengan Al-Quran.

Peristiwa bakar diri Muhammad Bouazizi, pengangguran lulusan ilmu komputer di kota Tunisia, Sidi Bouzid, terjadi pada Jumat, 17 Desember 2010, telah lebih banyak menarik perhatian daripada jika terjadi pada hari-hari biasa. Pada hari Jumat empat minggu kemudian, perkelahian antar demonstran, mengalir keluar dari masjid setelah Sholat mingguan, dan terjadi sangat banyak pertumpahan dari pasukan keamanan sehingga Ben Ali terpaksa melarikan diri.

Di Mesir kerumunan demonstran tumbuh secara esensial pada 25-28 Januari 2011, dengan para pemimpin oposisi menyatakan Jumat 28 Januari 2011 itu sebagai "Hari Kejatuhan" Mubarak, yang kemudian lengser seminggu kemudian.

Yang harus digarisbawahi, satu dekade setelah tragedi 9/11/2001, Arab Spring meletus, kaum muda di Tunisia dan Mesir meruntuhkan diktator yang ditakuti. Dan di Libya, revolusi rakyat dilakukan dengan bantuan kekuatan Barat. Dalam pembantaian di Suriah, kemarahan tidak diarahkan terhadap setan-setan asing, tetapi kemarahan rakyat melawan penguasa kejam yang telah merampok kesempatan untuk hidup layak bagi rakyat banyak.

Di luar konteks Arab Spring, sebagian orang-orang Arab secara politik sadar untuk menerima tanggung jawab atas apa yang telah terjadi pada 9/11/2001. Namun mereka juga meyakini dan tenggelam dalam konspirasi yang menduga kuat bahwa serangan WTC 9/11/2001 ini adalah karya Amerika sendiri, bahwa ribuan orang Yahudi tidak muncul di tempat kerja di Menara Kembar pada 9/11/2011, dan yang tewas justru orang Kristen dan Islam.

Dinamika Mesir

Kaum pekerja di Mesir merupakan salah satu kelompok pro-revolusi yang menjatuhkan Mubarak. Para pekerja bukanlah kelas menengah, mereka mencakup tenaga berkeahlian dan buruh yang tak berketrampilan. Berbicara tentang kelas buruh bukanlah hal tabu di Mesir. Gaji bulanan buruh tekstil Mesir secara tipikal, dan banyak pekerja hanya meraih 2 dolar per hari, dan mereka itu hidup di bawah garis kemiskinan.

Menurut World Bank, 44 persen rakyat Mesir hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga Revolusi Nil adalah revolusi oleh kaum miskin. Pendidikan bagi keluarga pekerja juga buruk karena sistem pendidikan/ sistem sekolah tidak berjalan baik, sehingga setiap orang mengangkat tutor untuk anak-anak mereka. Akibatnya banyak orang berhutang untuk menanggung kebutuhan pokok keluarga mereka. Sementara itu harga pangan terus meroket selama beberapa

bulan selama 2010-2011, menjadi problem ekonomiyang akut selama 20 tahun terakhir era Mubarak.⁵ Situasi ini menjadi bahan bakar Revolusi Nil yang digerakkan kaum muda, didukung kaum pekerja, para aktivis perempuan dan masyarakat sipil yang marah atas korupsi, kediktatoran dan penindasan.

Di Mesir, di mana revolusi kemudian menang, para aktivis pro-demokrasi sejak awal menyadari bahwa adalah naif untuk menerima komitmen bagi keadilan sosial, kebebasan sipil, dan demokrasi dari Dewan Militer yang dipimpin oleh Marsekal Mohammed Hussein Tantawi, menteri pertahanan Mubarak selama 20 tahun.

Ketika kaum muda berdemo dan bergolak, Deklarasi Dewan Militer Januari 2011 sepertinya diarahkan sebanyak mungkin untuk menenangkan dukungan Amerika Serikat, sumber bantuan tahunan dari \$ 2 miliar dan persenjataan canggih bagi Mesir. Para demonstran di Lapangan Tahrir Kairo jalan terus dengan ide revolusi. Hal ini makin membesar dengan isu rencana Hosni Mubarak untuk menurunkan kekuasaan pada anaknya, yang juga disikapi kritis oleh militer Mesir. Dewan Militer memiliki kepentingan untuk meles- tarikan sebanyak mungkin struktur politik-ekonomi era Mubarak. Di bawah pengawasan Presiden Anwar Sadat dan Mubarak, pihak militer memperoleh peternakan, pabrik, dan hotel-hotel. Perkiraan aset mereka bervariasi dari 10 sampai 30 persen dari perekonomian nasional.⁶

Selama demonstrasi revolusioner itu, para pemuda terus berhadapan dengan rezim Mubarak yang bertahan dan menghadapi Dewan Militer yang menolak tekanan untuk mengadili para pejabat sipil dan militer rezim Mubarak yang dituduh korupsi dan melakukan pembunuhan terhadap para demonstran damai yang terus mendesak Mubarak mundur.

Namun slogan dan pamlet yang telah dibawa kaum muda ke jalan-jalan di Kairo telah secara massif dan cepat menargetkan Dewan Militer untuk dilumpuhkan. Para demonstran diserang polisi berkuda dan ditembak oleh preman-preman pro-militer yang juga memegang pisau, pedang dan bom molotov. Militer berusaha menetapkan keputusan melarang demonstrasi. Pasukan bersenjata menembaki ke udara untuk membubarkan aksi duduk selama tiga minggu para demonstran damai. Namun aksi massa untuk revolusi jalan terus, meski Dewan Militer punya agenda licik dan mengadu domba satu kelompok politik dengan lainnya. Sehingga pada akhirnya Mubarak menyerah dan mundur setelah para jenderal mendukung gerakan revolusi pemuda yang berfokus pada kebebasan dan demokrasi serta keadilan.

Kalau kita periksa, protes di Mesir mulai pada tanggal 25 Januari 2011 dan berjalan selama 18 hari. Dimulai sekitar tengah malam pada 28 Januari 2011, pemerintah Mesir berusaha, agak berhasil, untuk menghilangkan akses internet bangsa, untuk menghambat kemampuan demonstran untuk berkoordinasi melalui media sosial. Kemudian pada hari itu, saat puluhan ribu demonstran memenuhi jalan-jalan kota besar Mesir, Presiden Mubarak membubarkan pemerintahannya, kemudian menunjuk kabinet baru. Mubarak juga menunjuk Wakil Presiden pertama dalam hampir 30 tahun.

Pada tanggal 10 Februari 2011, Mubarak menyerahkan se-mua kekuasaan presiden kepada Wakil Presiden Omar Suleiman, tetapi segera setelah itu mengumumkan bahwa ia akan tetap sebagai Presiden sampai akhir masa jabatannya. Namun, protes berlanjut terus pada hari berikutnya, dan Suleiman cepat mengumumkan bahwa Mubarak memilih mengundurkan diri dari kursi kepresidenan dan mentransfer kekuasaan kepada Angkatan Bersenjata Mesir. Militer segera membubarkan Parlemen Mesir, menunda Kons-titusi Mesir,

dan berjanji untuk mencabut “hukum darurat” yang telah berusia tiga puluh tahun. Dalam kaitan ini, A, Essam Sharaf, tokoh sipil, diangkat sebagai Perdana Menteri Mesir pada tanggal 4 Maret 2011 sampai adanya persetujuan luas dari kalangan orang Mesir yang melakukan protes di Alun-alun Tahrir. Protes terus berlangsung sampai akhir 2011. Bagaimanapun, dalam menanggapi Sharaf dan Dewan Agung Angkatan Bersenjata, merasakan kelesuan dalam melembagakan reformasi sehingga protes di Alun-alun Tahrir pun dilakukan kembali, bahkan setelah tiga putaran pemilu yang dimenangkan oleh Partai Kebebasan dan Keadilan (sayap Ikhwanul Muslimin) dan partai kaum Salafi bernama an-Nur. Tentu saja jalan terjal dan berduri memenuhi prosesi menuju perubahan di negeri piramida ini.⁷

Para pemuda, yang memprakarsai protes jalanan sekuler menyadari kesenjangan besar yang ada antara keberhasilan mereka dalam mengumpulkan massa dan mendirikan partai-partai politik, namun kandas dalam soal jaringan dan basis massa secara nasional untuk mengimbangi Ikhwanul Muslimin yang didirikan pada tahun 1928 oleh Hassan Al-Banna. Ikhwanul telah dan terus membangun dan mempertahankan akar yang mendalam di masyarakat, meskipun dalam jangka waktu lama mengalami tekanan.

Para pemimpin Ikhwanul telah memutuskan untuk memperebutkan kurang lebih 50 persen dari kursi parlemen saat pemilihan umum diadakan. Dan Ikhwanul terbukti menang.

Maka kini ujian dari sistem demokrasi yang dibangun kaum revolusioner Mesir adalah mendorong sikap tunduk militer kepada otoritas sipil yang terpilih. Para politisi dari semua lapisan menghadapi perjuangan panjang di depan untuk mencapai tujuan tersebut. Para pemuda revolusioner menebak bahwa menggulingkan para diktator adalah lebih mungkin dan menjadi bagian mudah dari sebuah

perjuangan panjang untuk menegakkan demokrasi substansial.

Ihwal Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin (IM) memimpin oposisi publik terhadap Partai Demokratik Nasional pimpinan Presiden Hosni Mubarak, yang telah berkuasa sejak 1981.

Sejak awal gerakan reformasi Kairo, Ikhwanul Muslimin telah menuntut Presiden Mesir Hosni Mubarak mengundurkan diri. IM meyakinkan puluhan ribu pengunjuk rasa di seluruh negeri Mesir turun ke jalan dalam pekan-pekan terakhir sebelum Mubarak tumbang.

Kelompok Ikhwanul Muslimin yang sebelumnya enggan menampakkan diri, mulai unjuk gigi dan mencari kolaborasi dengan tokoh oposisi Mohammed Elbaradei. "Seluruh elemen pemerintahan termasuk presiden, partai dan anggota parlemennya harus membubarkan diri," demikian pernyataan Ikhwanul Muslimin waktu itu.

Sejak protes dimulai 25 Januari 2011 di Mesir, tercatat ratus-an orang tewas. Umumnya korban tewas akibat bentrokan antara pengunjuk rasa dan pihak kepolisian. Aksi kekerasan sebelumnya juga sempat berlangsung di Suez, Alexandria dan kota-kota besar lainnya.

Pihak berwenang Mesir menutup internet dan layanan pon-sel di negara itu sejak pekan lalu dan memberlakukan jam malam di kota-kota besar. Para aktivis IM dari kalangan mahasiswa dan kelas menengah umumnya mahir menggunakan internet dan media elektronik lainnya.

IM sempat mengajukan kandidat Mohamed ElBaradei sebagai calon pengganti Mubarak. Mantan kepala International Atomic Energy Agency (IAEA) berusia 68 tahun ini kembali ke Mesir pada 2010 setelah perjalanan karirnya yang ber-hasil mengantarkannya meraih Hadiah

Nobel bidang perdamaian pada 2005. Sebagai seorang pengacara, ia memilih terjun ke dunia politik karena menganggap Mesir membutuhkan perubahan total. Pria ini juga dengan tegas meminta Presiden Hosni Mubarak turun untuk mengakhiri otoritas militer. El-Baradei memperoleh dukungan IM karena dianggap paling kredibel dan kapabel.

Ikhwanul Muslimin Mesir adalah organisasi Islam tertua dan terbesar di negara itu, yang didirikan oleh Hassan al-Banna pada 1920. Kelompok ini telah mempengaruhi gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia dengan model aktivisme dan intelektualisme politik yang dikombinasikan dengan kegiatan amal saleh Islam.

Gerakan ini awalnya ditujukan hanya untuk menyebarkan moral Islam dan kebajikan serta kesalehan, tetapi kemudian terlibat dalam politik, khususnya berjuang untuk menyingkirkan kontrol kolonial Inggris di Mesir dan membersihkan semua pengaruh Barat di negeri Fir'aun itu.

Ikhwanul Muslimin menyatakan bahwa mereka mendukung prinsip-prinsip demokratis.

Slogan mereka yang paling terkenal, digunakan di seluruh dunia, adalah: "Islam adalah solusi". Pada akhir 1940-an, kelompok ini diyakini memiliki sebanyak dua juta pengikut di Mesir. Dan pada periode yang sama ide-idenya telah menyebar di seluruh dunia Arab. Al-Banna juga menciptakan sayap paramiliter, *special apparatus*, yang bergabung dengan perang melawan pemerintahan Inggris.

Pemerintah Mesir membubarkan kelompok Ikhwan tersebut pada tahun 1948-an karena dianggap menyerang kepentingan Inggris dan Yahudi. Segera setelah itu, kelompok itu dituduh membunuh Perdana Menteri Mahmoud Al-Nuqrashi.

Kali ini IM yang tak dikehendaki AS/Barat itu, mampu mendesakkan perubahan di Mesir, yang menimbulkan

kecemasan dan ketakutan Israel maupun AS/Barat. Menlu AS Hillary Clinton terang-terangan menegaskan AS tak meng-hendaki IM dan Islam radikal lainnya berkuasa di Mesir.

Karena itu, dengan kecerdasan dan kecakapan politik, IM berusaha meyakinkan AS/Barat dan Israel bahwa jika kelak mereka berkuasa pasca Mubarak atau menang dalam pemi-lu mendatang, hal itu sah dan harus dihormati AS/Barat dan Israel sebagai konsekuensi logis dari demokrasi itu sendiri.

Bukankah menang kalah dalam demokrasi itu biasa saja? Ataukah memang AS/Barat dan Israel paranoid dan phobia terhadap Islam politik yang diusung Ikhwanul Muslimin? Mungkin proses perubahan di Mesir kelak menyediakan jawabannya.

Sumber Pergolakan

Sumber pergolakan di Mesir sejak era Mubarak adalah dinamika sosial, politik dan ekonomi yang terus berhimpitan sampai saat ini.

Menurut Tarek Osman, jelang pemilu Mesir secara khusus, ada lima arus yang akan menentukan wajah sosial-politik Mesir ke depan - sebuah struktur kelas berubah, penurunan legitimasi rezim, erosi lembaga, tidak adanya narasi nasional yang berarti dan pergeseran demografis yang dramatis - kesemua- nya mengalir melalui celah-celah masyarakat Mesir yang menyusun "panggung" bagi ledakan pasca pemilu.

Faktor pertama adalah transformasi dalam komposisi kelas menengah di negara itu. Kelompok sektor publik seperti buruh/karyawan, profesional, pejabat militer dan pemilik usaha kecil dan menengah bersatu pada 1950-an dan 1960-an.

Namun pada pertengahan 1970-AN, di bawah kebijakan pintu terbuka (*infitah*) Presiden Anwar Sadat, kelas menengah mengalami rekonfigurasi setelah sektor-sektor baru muncul, yakni para pedagang, pialang, karyawan perusahaan multinasional, dan adanya 3 juta orang - plus orang Mesir yang beremigrasi ke Teluk untuk mencari pekerjaan selama bonanza minyak 1970- an. Selain itu, penarikan bertahap dan konsisten oleh negara untuk tidak lagi menyediakan pendidikan, kesehatan, transportasi dan layanan penting lainnya secara memadai, telah melemahkan kelas menengah tradisional dan mendorong jatuh kelompok itu ke dalam strata sosial ekonomi rendah.

Reformasi keuangan tahun 1980 dan 1990 menekan lebih dalam kelas menengah lama yang lebih tua dan memperluas "patahan" antara berbagai subdivisi. Kemudian, terjadi pula pergeseran kebijakan ekonomi tahun 2000 yang sangat menyakitkan bagi kelompok yang sudah sulit dan terkepung itu

Neoliberalisme 1990-AN oleh negara secara bertahap, yang mendorong negara mengurangi peran dan fungsinya di bidang ekonomi (awalnya dengan cara mengambang mata uang pound Mesir, yang mengakibatkan inflasi, kemudian melalui program privatisasi yang dipercepat, termasuk swastanisasi aset strategis negara, dan akhirnya dengan memberikan pengambilan keputusan ekonomi kepada kekuatan kapitalis swasta terkemuka), makin membuat kelas menengah tradisional kian terkoyak. Ini semua membuat jurang dan kesenjangan dalam di kalangan kelas menengah Mesir, yang menimbulkan ketegangan sosial, serta membuat banyak segmen sosial teralienasi, dan kemarahan masyarakat, terutama kaum muda, makin meledak.

Faktor kedua adalah erosi bertahap atas legitimasi rezim. Nasser (berkuasa melalui kudeta 1952-1970), Sadat (1970-1981), dan Mubarak (1981 -2011), kesemuanya

berkuasa atas dasar persetujuan masyarakat atas kerangka kekuasaan menyusul kudeta 1952. Meski semua elite rezim memerintah Mesir berdasarkan persetujuan rakyat untuk berkuasa, dalam praktiknya tidak ada pemilu benar-benar adil dan transparan berlangsung di Mesir selama enam puluh tahun terakhir sebelum revolusi 25 Januari 2011.

Persetujuan rakyat terhadap rezim adalah skematis, dengan referensi tetap pada doktrin dan prinsip kunci revolusi/kudeta 1952 – dimana negara “berpihak pada kelas pekerja”. Namun kebijakan ekonomi rezim pertengahan 1970-AN melepaskan doktrin dan prinsip ini, bahkan para elite penguasa menyatukan kekuatan dan kekayaan pada tahun 2000-AN yang menyebabkan legitimasi mereka kering dan tergerus.

Toleransi masyarakat Mesir atas demokrasi (akibat tidak memiliki partisipasi nyata dalam kekuasaan atau dalam hal fungsi saling control dan imbang), dan toleransi mereka atas absolutisme (dari Nasser Sadat untuk Mubarak) memungkinkan kekuasaan tertinggi oleh militer yang dipimpin, dijamin, dan dipertahankan oleh rezim 1952. Namun hal ini mulai berubah pada tahun 2000 dengan kekuasaan kaum kapitalis baru: asumsi kontrol penuh atas strategi ekonomi negara dan prakteknya, telah menciptakan keseimbangan intra-rezim antara keamanan lembaga militer di satu sisi dan munculnya para pelaku ekonomi. Formasi yang terdistorsi ini, yang mana elemen baru memiliki kekuatan keuangan mereka untuk memperkuat posisi mereka sendiri, mewakili kelas menengah yang terdegradasi dan memburuk dalam suasana “kontrak sosial” yang sudah sangat tegang.

Faktor ketiga adalah melemahnya institusi-institusi rezim militer. Hal ini terutama terjadi pada lembaga presiden itu sendiri. Di bawah Nasser dan Sadat, lembaga kepresidenan tetap menjadi pusat urat saraf yang dinamis di pemerintahan, bahkan menjadi laboratorium ide (meskipun

bebe-rapa ide yang buruk), dan tentu saja menjadi tempat di mana daya aktif terkandung dan diungkapkan. Tapi pada tahun 2000-AN lembaga kepresidenan layu menjadi struktur administratif belaka di sekitar presiden.

Kemudian apa yang terjadi di Mesir adalah bahwa parlemen tidak demokratis, pemerintah, dan presiden menjadi representasi beragam kehendak presiden semata di mana badan eksekutif ini tidak atau, bukan lagi pilar bagi sistem politik yang fungsional. Peluruhan yang sama terjadap pada sebagian besar lembaga negara lainnya, dari departemen pemerintahan sampai sektor publik. Struktur kelembagaan rezim Mubarak telah mencapai titik terlemah sejak 1952.

Faktor keempat, memburuknya lembaga-lembaga negara itu kian berlipatganda, dan makin kronis selama lebih dari tiga dekade terakhir. Kegagalan neoliberalisme Mesir pada paruh pertama abad KE-20, dan jatuhnya nasionalisme Arab serta mimpi Nasser yang dikembangkan sejak tahun 1960, meninggalkan situasi bagi para penerus Nasser suntuk terus memfokuskan usaha mereka pada “pembangunan”: suatu gagasan yang kabur dari awal sebab hanya dipahami dalam terma ekonomi, di mana perencanaan lima tahun terus mengalami dilusi baik menyangkut target keuangan, tonggak perekonomian dan ukuran statistik, yang menampakkan tidak adanya ide-ide besar yang mendasar.

Faktor kelima, adalah demografi. Penduduk Mesir meningkat hampir dua kali lipat selama 1980-2010, dari sekitar 45 juta pada 1980 menjadi lebih dari 80 juta pada 2010. Lebih dari 45 juta di antaranya berusia di bawah 35 tahun, dan 40 persen di antara mereka tidak berpendidikan yang cukup, atau bahkan sebagian masih buta huruf.

Kaum muda Mesir mengalami deprivasi berlapis-lapis: secara ekonomi, psikologis (dalam arti bahwa mereka dengan sakit hati dipaksa menyaksikan meningkatnya

pengaruh elit ultra- kaya dalam lingkungan politik-ekonomi yang teramat korup), dan emosional (dalam arti bahwa mereka hidup di tengah kekosongan sosial-politik, ditandai dengan perasaan alienasi dan terbuang, suatu keterputusan antara rezim dan orang-orang muda, yang dipenuhi dengan atmosfer suasana lesu dan kegagalan).

Transisi dan Pahit Getirnya

Mesir sekarang dalam transisi limbung. Letusan Januari-Februari 2011 telah terlalu kuat untuk dikelola dalam struktur politik yang ada, dan tidak cukup kuat untuk memaksa penghapusan rezim seluruhnya.

Pada tahap selanjutnya, empat realitas muncul dari “gempa bumi” politik:

Pertama, telah menjadi ledakan politik daripada letusan ekonomi: tuntutan jutaan orang muda Mesir yang protes di Tahrir Square dan tempat lain di Mesir, tidak tentang sub-sidi atau gaji yang lebih tinggi, tetapi memotong ke jantung kerangka politik negara.

Kedua, fiksasi pada kebuntuan politik mengenai apakah Pre-siden Mubarak mengundurkan diri atau tidak pada akhir masa jabatannya bulan September 2011 lalu, menunjukkan kenyataan bahwa rezim Mesir bukan hanya presiden. Sekarang para kapitalis baru yang saling berperan dan berbagi kekuasaan dalam dekade terakhir telah keluar dan sedang dituntut pengadilan, namun kekuatan inti rezim - yakni golongan militer - telah memperoleh kembali kontrol semula.

Tokoh kunci muncul sebagai kapten politik di masa transisi ini, dihormati sebagai individu, beberapa bahkan mengko-mando kepemimpinan yang luas, sebagian karena mereka mampu memicu ketakutan kelas menengah akan timbulnya kekacauan lanjutan dan memicu kesadaran kelas

menengah ini bahwa tentara adalah satu-satunya kekuatan dalam Me-sir yang mampu menjamin stabilitas dan menjaga ketertiban. Dalam pengertian ini dapat dikatakan bahwa rezim sekarang yang dikendalikan dan dikuasai oleh militer, lebih kuat daripada rezim Mubarak PRA-25 Januari 2011.

Ketiga, Islam politik telah mencapai keuntungan strategis. Memang benar bahwa orang-orang muda yang menjadi katalis pemberontakan dan revolusi Nil, dengan memakai retorika nasionalis dan sekuler. Di sini, Ikhwanul Muslimin tidak menjadi kekuatan inisiatif dan tidak pula menjadi inspirasi demonstrasi serta tidak memimpin pasukan oposisi pada sepanjang tahap gerakan revolusi Tahrir Square, namun aktivis Ikhwanul jelas ambil bagian meski baru belakangan dan tidak menggunakan slogan Islam karena takut revolusi ini akan ditumpas militer dengan dukungan luas dari AS/Barat.

Tapi Ikhwan melakukan negosiasi dengan wakil presiden sebagai entitas yang harus diakui (secara politik, jika belum secara legal). Ikhwanul Muslimin juga melakukan dialog

terbuka dengan Mohamed El-Baradei, tokoh liberal yang paling penting sebagai lawan rezim. Dan yang terpenting, setelah Ikhwanul lebih dari enam puluh tahun intens (dan hampir kontinyu) berkonfrontasi dengan rezim sekuler, Ikhwan telah mengubah sikap itu dan malah bergabung dengan arus demokrasi sekuler.

Benar, Ikhwan telah berjanji tidak akan mencalonkan presiden dalam pemilihan presiden bulan September 2011, tetapi juga mengisyaratkan bahwa ia mungkin hanya meraih suara sepertiga kursi di parlemen. Hal ini mengkonfirmasi bahwa Ikhwanul yang selama delapan puluh dua tahun bermusuhan dengan pemerintah, telah memperoleh kepercayaan diri, dan bahwa banyak di antara generasi muda

Ikhwanul melihat kesempatan bersejarah untuk bergerak lebih dekat ke arah kekuasaan.

Keempat, gerakan liberal Mesir juga menjadi pemenang mes-ki mereka akan tetap terpecah-pecah, retak, dan tanpa pemimpin, seperti fakta gerakan mereka sebelum tanggal 25 Januari 2011. Partai-partai liberal di negara itu tersaruk dalam permainan situasi yang berubah dengan cepat. Momentum yang diciptakan tetap dipersonifikasikan pada munculnya Mohamed El- Baradei.

Sebagai struktur kelas menengah, tidak bisa disangkal bahwa gerakan liberal ini mampu mendorong pengelompokan politik sebagai kekuatan yang gagasan dan kehadirannya memandu pemberontakan dan revolusi pemuda di Kairo. Hal ini telah menciptakan modal politik yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk menciptakan pembaruan.

Bagaimanakah kelak realitas ini akan bermain dalam beberapa bulan mendatang? Secara politik, Mesir akan memasuki fase persaingan untuk saling berebut pengaruh dan dukungan antara para pemimpin baru dari peran militer, Islam politik yang diwakili oleh Ikhwanul Muslimin, dan kaum liberal Mesir. Semua ini akan menjadi pergulatan dan duel politik dalam jangka menengah.

Militer memiliki kekuatan pengendalian, disiplin, pegang kekuasaan dan menampilkan diri sebagai pelindung rakyat, penjamin stabilitas, dan menjadi pendiri rezim yang memerintah Mesir dari 1952. Sementara Ikhwanul, didukung oleh infrastruktur politik sosial-ekonom yang luas, ditopang oleh kekuatan yang diorganisasi secara luar biasa, dan terhubung ke kekuatan agama yang konservatif dari masyarakat Mesir sejak 1980-AN, akan berusaha hadir dalam warna baru - mereka merujuk pada contoh sukses dan menarik dari Partai AK pimpinan Erdogan di Turki.

Sedangkan kaum liberal, jika kredibel, maka akan memiliki kepemimpinan modern yang muncul dari dalam barisan mereka, juga bisa mendapatkan keuntungan dari kontes politik pasca Mubarak ini. Hal ini pada gilirannya akan tergantung pada kemampuan mereka untuk membangun momentum revolusi Nil, sebagian dengan cara menerapkan eksperimen liberal di Mesir sebagaimana yang dimulai pada paruh pertama abad KE-20, di mana banyak kelas menengah Mesir yang merasa dilibatkan dan ambil bagian.

Tapi ada juga kesempatan yang lebih besar, di mana jutaan orang di seluruh negara menjunjung peristiwa inspiratif dari Tahrir Square dan memiliki suara menentukan dalam drama politik ke depan. Air bah politik Mesir telah mandek untuk waktu yang lama. “Tanah coklat, abadi coklat” sedang ber-siap menghadapi banjir lebih lanjut dari energi politik rakyat Mesir dan ke mana semua itu akan membawa rakyat Mesir, tidak ada yang tahu. Tapi sesuatu telah berubah. Ini adalah saat yang tepat untuk menjadi seorang Mesir dalam arti sesungguhnya.

Kemunduran AS di Timur Tengah

Pasca Arab Spring, ada gejala bahwa pengaruh Amerika Serikat di bawah Presiden Barack Obama di Timur Tengah mengalami kemunduran serius seiring dengan kemerosotan ekonominya. Sementara kemenangan para Islamis dalam pemilu pasca Arab Spring di Timur Tengah (Mesir, Tunisia, Maroko, dan akan disusul Libya, Yaman dan seterusnya) telah mencemaskan Israel, sekutu utama Amerika Serikat di kawasan itu. 9

Memang, sebagaimana diungkapkan Profesor John Esposito dari Georgetown University, dalam lawatan ke Cairo Mesir beberapa tahun lalu, Presiden Obama berpidato simpatik terhadap Dunia Islam di mana ia menyerukan

kemitraan AS dan Islam berdasarkan prinsip saling menghormati. Bahkan Obama menyatakan AS akan memerangi steroeotype negative mengenai Islam dimanapun hal itu muncul. Obama juga menunjukkan empati atas perjuangan Palestina, empati atas status Yerusalem yang menjadi salah satu kota suci Islam (Kristen dan Yahudi), yang terus menjadi hambatan berat dalam negosiasi Israel-Palestina. Obama mampu menghapus kesan dan persepsi Dunia Muslim bahwa perang global AS melawan terorisme yang dilancarkan pendahulunya, George Bush, bukan merupakan perang melawan Islam dan Muslim. Di bawah Bush ada kesan kuat di kalangan Muslim di Timur Tengah bahwa kebijakan luar negeri era Bush sangat dipengaruhi fundamentalisme Kristen. Arah kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah, di mata Muslim menunjukkan arah yang lebih jelas di era Obama yakni mengutamakan dialog dan perdamaian, bukan perang dan kekerasan seperti halnya era Bush atas nama nasionalisme Amerika dan klaim kepentingan perdamaian dunia.

Para akademisi dan analis politik Amerika mengamati kiprah AS di Dunia Islam cenderung menurun. Para akademisi dan pengamat menilai, kebijakan Presiden Barack Obama di Timur Tengah makin lemah, bahkan kehadiran AS di kawasan itu dirasakan kian "surut dan mengambang", sementara pengaruh Iran dan Turki di Timur Tengah kian menguat. "Itu kenyataan politik yang terjadi, di mana Iran dan Turki kini bersaing dengan Arab Saudi untuk hadir dan berebut peran di kawasan pasca Arab Spring," kata Prof. Fouad Ajami, pakar Timur Tengah dari Johns Hopkins University yang kini mengajar di Stanford.

Dalam kaitan ini, menyusul jatuhnya Moammar Khadafy di Libya, sejumlah rudal anti serangan udara dan rudal anti-tank dilaporkan Mosad (agen Israel) jatuh ke tangan Hamas dan Muslim radikal di Palestina, dan ini menjadi kecemasan tersendiri bagi Israel, karena jarak

tembak rudal itu mampu menjangkau dengan mudah wilayah-wilayah Israel .

Sikap AS yang mengorbankan Hosni Mubarak di Mesir dan Ben Ali di Tunisia dalam Arab Spring, menjadi cermin para pemimpin Arab bahwa AS tidak segan-segan mengorbankan para sekutu dan loyalis paling setianya. Sehingga mereka menoleh perhatian kepada Iran dan Turki yang berambisi memper-kuat pengaruhnya di Timur Tengah pasca Arab Spring.

“Dunia Arab tak sepenuhnya percaya pada AS sebab berbagai pengalaman sejarah menimbulkan kenyataan seperti itu,” ungkap Profesor emeritus, Hamid Algar di Universitas California Berkeley.

“Pasca jatuhnya Khadafy, sejumlah rudal strategis Libya beralih ke tangan HAMAS dan Islamis radikal di Palestina, ditambah kemunduran AS di kawasan Timteng, membuat Israel cemas dan meningkatkan anggaran pertahanannya,” ungkap Profesor Efraim Inbar, seorang pengamat Timur Tengah.

Penarikan mundur AS dari Irak dan Afghanistan juga dilihat Dunia Arab sebagai kemunduran Washington untuk berta-han di kawasan itu, dan membuka peluang bagi Iran dan Turki serta Rusia dan China untuk meningkatkan kehadiran mereka di kawasan itu. Hal ini meningkatkan kekhawatiran Israel, negeri zionis yang terus berkonflik dengan Arab.

Israel sendiri sudah meningkatkan pertahanannya menyusul jatuhnya para diktator Arab sekutu AS dalam Arab Spring, karena khawatir para elite dan penguasa baru di Timur Tengah adalah para Islamis yang cenderung anti-Yahudi atau menentang Israel. Arab Spring sudah mengirimkan dering peringatan yang nyaring bagi Israel bahwa bulan madu AS dan sekutu Arabnya seperti Mesir, Yaman, Tunisia dan lainnya, sudah berlalu, dan ancaman

baru mengintai Israel di tengah melemahnya kehadiran AS di kawasan itu.

Salah satu masalah serius di mata AS dan Israel adalah Iran yang membangun kekuatan nuklir untuk tujuan damai. Israel termasuk yang khawatir atas nuklir Teheran ini. Namun Presiden AS Barack Obama, Maret (4/3/2012), mengatakan, "pembicaraan terlalu dini tentang perang" dengan Iran. Obama meminta kesabaran dalam mengakhiri pertikaian nuklir Iran karena, tekanan internasional yang berkelanjutan dapat berfungsi untuk menekan Iran.

Obama tak berani menekan Iran sendirian karena ekonomi AS merosot akibat "era gemar perang" periode Presiden George W. Bush dan skandal finansial Subprime Mortgage, Lehman Brothers dan seterusnya, yang menguras keuangan AS .

Mengenai Iran, Simon Peres merupakan salah satu elite Is-rael yang menyebut Iran sebagai "rezim yang jahat, kejam, dan korup secara moral" yang bertekad mengendalikan Timur Tengah. "Iran adalah pusat, sponsor, penyokong keuangan teror global. Iran merupakan sebuah bahaya bagi seluruh dunia," kata Peres.

Iran selama ini menegaskan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan energi sipil dan penelitian medis. Dalam hal ini, Intelijen AS yakin bahwa Iran saat ini tidak berniat untuk memproduksi senjata nuklir, meskipun negara itu mungkin sedang mengupayakan kapasitas untuk melakukan hal itu, dan Washington telah menekankan pentingnya sanksi yang membuat jera dan diplomasi. Namun Israel dilaporkan ingin bergerak lebih cepat dan tegas terhadap kegiatan nuklir Iran, dengan menggunakan serangan militer guna mencegah negara itu bahkan untuk mendapatkan kapasitas sebelum memutuskan akan memproduksi senjata nuklir. Agen Israel, Mosad, sudah membunuh beberapa ahli nuklir Iran dalam beberapa tahun ini.

Dalam hal ini, Obama sudah menyatakan, “Para pemimpin Iran harus tahu bahwa saya tidak punya kebijakan untuk memaksakan negosiasi secara damai (containment), saya punya kebijakan untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Dan seperti yang sudah pernah tegaskan, saya tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan militer jika itu perlu guna membela Amerika Serikat dan kepentingannya.”

Presiden AS Barack Obama menghadapi kesulitan dalam negeri dalam melaksanakan kebijakan ekonomi dan politiknya. Kebijakan Politik Presiden Obama yang sering bertentangan dengan kelompok elite yang mengontrol Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan dia tidak dapat menjalankan program dan janji-janji politiknya untuk memulihkan perekonomian AS yang mengalami krisis.

Obama juga terperangkap dengan kebijakan perang yang merupakan tanggung jawab Presiden sebelumnya yaitu Presiden Bush. Perang Afganistan, dan Irak membutuhkan biaya besar yang seharusnya dapat digunakan untuk memulihkan perekonomian Amerika Serikat.

Situasi ini membuat kebijakan Obama di Timur Tengah pasca Arab Spring masih diwarnai ketidakpastian.

Dilema AS di Timur Tengah Pasca Arab Spring

AS menghadapi dilema di Timur Tengah pasca Arab Spring. Sejak awal para demonstran yang menggerakkan Arab Spring bukanlah para Islamis, melainkan kaum muda yang prodemokrasi, liberal dan sekuler, namun ketika pemilu pasca Arab Spring digelar, ternyata yang menang mutlak justru kaum Islamis. Bagaimanakah AS harus menanggapi realitas politik ini?

Dilema itulah salah satu tema dalam perdebatan kaum akademis di AS mengenai implikasi Arab Spring dalam kebijakan luar negeri AS. Hampir tak bisa dielakkan bahwa

para aktivis pelopor demokrasi dan revolusi Arab Spring kalah telak di dalam pemilu Mesir, Maroko, Tunisia dan akan menyusul negeri Arab lainnya seperti Yaman dan Libya, di mana para Islamis seperti Ikhwanul Muslimin dan Salafi memiliki akar rumput sosial (grassroot) yang kuat.

Prof Bassam Tibi, guru besar tamu di Stanford University, AS, melihat AS di bawah Obama tampak gamang dan bi-ngung ketika harus menghadapi kenyataan bahwa Kaum Islamis yang memenangkan pemilu di Timur Tengah. Seper-ti diketahui, Ikhwanul Muslimin dan An-Nour (Salafi) menang dalam pemilu Mesir, Partai An-Nahda di Tunisia juga menang, demikian halnya kaum Islamis di Maroko. Kelom-pok nasional sekuler dan liberal demokrat sangat tersudut, kalah telak dalam pemilu itu. Tak mengherankan di hampir semua universitas dan lembaga studi bidang Internasional, Islam dan Keamanan, menggelar seminar, riset dan konferensi mengenai Arab Spring yang masih dicermati ke mana-kah arah sosial-politiknya ke depan, sebab Arab Spring telah mematahkan “pakem diplomasi” AS di Dunia Arab yang sudah berjalan beberapa generasi.

“AS harus bisa membangun hubungan dengan elemen-elemen *Civil Islam* (Muslim pluralis dan modern) di Timur Tengah secara lebih intensif dan kuat ketimbang dengan para Islamis yang punya agenda tersembunyi membangun Islamisme dan menegakkan Syariah. Dalam jangka panjang, AS/Barat juga harus bisa meyakinkan kaum Islamis agar tidak berkubang pada orientasi Islamisme yang menjebak mereka menjadi para Islamis radikal maupun moderat, sebab Islamisme itu bertentangan dengan demokrasi yang menghargai pluralisme, hak individu, sekulerisme dan HAM,” ungkap Prof Bassam Tibi, seorang Muslim dari Jerman.

Kesulitan ekonomi AS jelas membatasi ruang gerak Obama dalam menyikapi perkembangan Timur Tengah

dewasa ini. Ini serba dilematis dan menyusahkan AS sendiri yang ingin hadir di Timur Tengah dengan kesulitan ekonomi di dalam negeri yang membatasi ruang gerakannya kini.

Penarikan mundur AS dari Irak dan Afghanistan juga dilihat Dunia Arab sebagai kemunduran AS yang tak bisa dielakkan lagi akibat kemerosotan ekonominya.

Di luar kendali Obama, pada satu sisi, kebangkitan politik Timur-Tengah dengan Arab Spring memunculkan harapan baru bagi masyarakat Timur-Tengah untuk dapat menikmati potensi sosial, ekonomi dan budaya mereka.

Pada sisi lain, Arab Spring juga memberikan pengaruh yang signifikan pada pergeseran peta kekuatan politik dan pertahanan di kawasan Timur-Tengah.

Dalam kaitan ini, ketidakmampuan Amerika Serikat memberikan dukungan kepada Israel akibat dilumpuhkan oleh kebangkrutan ekonominya, jelas membuat Israel terisolasi di kawasan tersebut. Ingat bahwa Israel adalah AS dan AS adalah Israel, dua sisi dari satu keping mata uang yang sama. Mengingat demokrasi yang muncul dari Arab Spring boleh jadi akan menyalurkan kemarahan masyarakat Arab terhadap Israel selama puluhan tahun yang berhasil diredam oleh tiran-tiran mereka.

Kesimpulan

Para akademisi dan analis internasional mencermati lebih mendalam, bahwa efek dari kondisi ekonomi yang memburuk di Eropa dan Amerika Serikat boleh jadi memberikan pengaruh signifikan bukan hanya pada dimensi (sektor) ekonomi tetapi juga pada dimensi yang lebih luas, khususnya politik, keamanan, sosial dan budaya Timur Tengah dan Dunia Islam pada umumnya.

Kebangkrutan ekonomi yang menghantui Eropa dan AS tentu akan menyita perhatian pemimpin negara-negara maju

itu. Ada kekhawatiran perhatian dominan AS ke masalah ekonomi domestik membuat perhatian mereka pada percaturan politik, keamanan, sosial dan budaya menjadi minim. Hal ini, bagi Timur tengah, diperkirakan akan membuat kekosongan pengendalian atas arah perjalanan sektor non-ekonomi dunia.

Padahal di sektor ekonomi sendiri, kekosongan pengendalian arah ekonomi dunia juga dapat saja terjadi mengingat negara-negara maju juga cenderung lebih fokus perhatiannya pada kepentingan domestik ekonomi mereka. Tendensi ke arah itu sudah terlihat dari dinamika Uni Eropa (Euro-pean Union-EU) yang kerap gagal mengambil kesepakatan bersama untuk tindakan bersama atas kondisi krisis yang mengancam mereka. Sikap saling curiga dan perbedaan pendapat dari pertemuan EU diperkirakan merefleksikan sikap individualis masing-masing pemimpin Eropa yang cenderung memproteksi kepentingan ekonomi domestik mereka.

Dengan melihat kompleksitas masalah ini, relasi AS dan Timur Tengah masih mengalami tarik ulur, dalam arti yang sudah pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Seberapa besar bantuan AS ke Timur Tengah pasca Rab Spring, misalnya, seperti untuk Mesir, Tunisia dan sebagainya, dan apakah rezim baru Mesir dimana para Islamis berperan kuasa, bersedia menerimanya dengan syarat yang ditentukan Washington?

Masih mungkin terjadi tarik ulur dan tanda tanya. Itulah dampak perubahan di Timur Tengah, yang tidak mudah diraba dalam waktu dekat sebab politik tidak selalu bulat. []

BAB VII

RIVALITAS IRAN-SAUDI-TURKI DAN KEKHAWATIRAN IDEOLOGIS KAUM WAHABI INDONESIA TERHADAP KESEPAKATAN NUKLIR IRAN-AS

Kesepakatan Nuklir Iran telah dicapai di Wina, Austria, pada Juli 2015. Pertemuan tersebut merupakan hasil panjang diplomasi yang akhirnya dimenangkan oleh Iran setelah banyak ilmuwan nuklirnya terbunuh. Kesepakatan itu akan mengubah komposisi geo-politik dunia. Kekuatan dunia telah mencapai kesepakatan dengan Iran dalam mengurangi kegiatan nuklir negara itu dengan imbalan pencabutan sanksi atau embargo ekonomi internasional yang telah berlangsung tiga dekade. Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan dengan kesepakatan tersebut, semua senjata nuklir Iran telah diputus bagi Iran sehingga kekuatan nuklir Timur Tengah tetap dipegang secara militer oleh Israel.

Bagi Presiden Iran, Hassan Rouhani, hal ini membuka "bab baru" hubungan Iran dengan dunia, sebuah peluang yang telah lama ditunggu-tunggu wangsa Persia ini. Perundingan antara Iran dan enam kekuatan dunia (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, Rusia ditambah Jerman) dimulai pada tahun 2006. Negara-negara P5+1

menginginkan Iran mengurangi kegiatan nuklir yang merupakan isu krusial untuk memastikan negara tersebut tidak bisa membuat senjata nuklir.

Kekhawatiran ideologis (*ideological anxiety, restlessness and worry*) kaum Wahabi – yang akhir-akhirnya ini menguat setelah munculnya Al Qaeda dan ISIS sebagai wakil dari kedigdayaan Wahabi – adalah kekhawatiran kultural yang serius akan dunia Islam yang terpecah. Garber (1997) membuktikan bahwa kepentingan personal yang sangat ideologis pun akan menghasilkan kecemasan kultural yang akut. Pastilah kepentingan komunal Wahabi di Indonesia sangat besar atas menguatnya Iran secara politik dan kultural (Garber, 1977).

Lihatlah situasi dimana kekuatan Iran yang dibenci oleh kaum Wahabi di Indonesia selalu mengundang kecemasan kultural yang menyesak dada para pencari surga ini. Iran, yang menginginkan sanksi internasionalnya dicabut, selalu mengatakan kegiatan nuklirnya untuk tujuan damai. Kondisi ini tidak lantas membuat kaum agamawan Suni bersimpati dengan Iran yang nota-bene adalah negara pengusung ideologi Syiah. Pun, terdapat penolakan keras dari kelompok konservatif baik di Iran maupun Amerika Serikat. Kongres AS memiliki waktu selama 60 hari untuk mempertimbangkan kesepakatan itu, meskipun Obama mengatakan akan menveto usaha untuk menggagalkan.

Kaum Wahabi di Indonesia mengalami kegamangan dalam melihat perkembangan diplomasi Iran di dunia dan juga di Indonesia.

Pada tataran dunia, perundingan nuklir Iran dengan kelompok P5+1, yaitu lima negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina) ditambah Jerman serta Komisaris Tinggi Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa akhirnya menemukan titik

final setelah 22 bulan berjalan. Pada tataran nasional, kalangan Sunni pada umumnya terhenyak dengan kemajuan pembukaan isolasi Barat terhadap Iran. Kesepakatan mengenai program nuklir Iran dicapai di Wina, Austria, (14/7/2015) untuk mengatasi kecurigaan Barat terhadap program yang dinyatakan Iran bertujuan damai tersebut, dan dengan demikian sanksi terhadap Iran dicabut, tetapi memertahankan embargo senjata dan larangan teknologi rudal balistik.

Kecurigaan Barat dan kecurigaan Sunni selama ini menemukan titik temu yang kuat, namun setelah kesepakatan ini, jalan cerita akan sedikit berbelok. Ideologi Syiah semakin merajalela, segera setelah organisasi Islam terbesar Indonesia, Nahdlatul Ulama juga dipegang kembali oleh tokoh-tokoh yang disinyalir mendukung poros Iran dan menolak dominasi poros Arab Saudi yang berpenduduk penganut Sunni. Kesepakatan ini ditetapkan dengan komitmen yang mengindahkan "garis merah" yang telah ditentukan Iran. Mengenai poin-poin yang menguntungkan Iran dalam kesepakatan itu, sebagai sebuah perkembangan yang mengkhawatirkan, secara geopolitik dan ideologis.

Implikasi yang sangat mencekam kaum Wahabi adalah terpilihnya Haedar Nashir dalam Muktamar Muhammadiyah 2015 lalu yang dipandang tak menaruh rasa kasihan dan pembelaan pada ekstrimisme. Ekstrimisme yang selama tiga dekade lalu disematkan kepada Iran yang distigmatisasi sebagai musuh Barat, akan mengubah peta ideologi tidak hanya di Timur Tengah. Negara-negara besar mengakui program nuklir tujuan damai Iran serta menghargai hak nuklir bangsa Iran dalam kerangka undang-undang dan konvensi internasional. Iran telah mengalami ketidakadilan yang diberlakukan Barat selama ini, laiknya sebuah tekanan yang kemudian mengubah perilaku dan orientasi ideologisnya. Penelitian Echebarria Echabe & Fernández Guede (2006) menunjukkan pengaruh terorisme

pada perilaku dan orientasi ideologis seseorang atau kelompok organisasi secara signifikan (Echabe dan Guede, 2006).

Kebijakan politik internasional Iran mungkin akan berubah dengan kesepakatan nuklir ini. Program nuklir Iran yang semula dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia diluruskan menjadi obyek kerjasama Iran dengan komunitas internasional sesuai standar global. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) mengakui Iran sebagai negara berkekuatan nuklir tujuan damai, termasuk di bidang daur ulang bahan bakar nuklir dan pengayaan uranium. Telah terjadi perubahan fundamental dalam pola interaksi DK PBB dengan Iran setelah keluarnya resolusi DK PBB di bawah Pasal 25 Piagam PBB, sembari mengingat pasal 41 dan terutama lagi pasal-pasal berkenaan dengan pencabutan sanksi sebelumnya terhadap Iran. Semua fasilitas nuklir Iran tetap beroperasi, dan tak ada satupun yang dihentikan ataupun dibekukan sebagaimana yang diinginkan sebelumnya oleh pihak lawan runding Iran. Pengayaan uranium Iran tetap dilanjutkan, dan demikian keinginan untuk menghentikan pengayaan uranium tidak terpenuhi.

Dunia keilmuan dan penelitian teknologi akan menjadikan Iran sebagai daya tarik baru bagi kalangan Muslim, selain eksotisme feminisnya. Fasilitas infrastruktur nuklir Iran tetap dipertahankan, dan tidak ada satupun sentrifugal yang disingkirkan. Aktivitas penelitian dan pengembangan semua sentrifugal utama dan mutakhir tetap dilanjutkan. Instalasi nuklir untuk produksi air berat tetap dipertahankan dan terus dikembangkan serta ditambah dengan perlengkapan, teknologi, ujicoba dan instalasi terkini melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki teknologi mutakhir di bidang ini. Iran sebagai salah satu produsen bahan bakar nuklir, terutama uranium yang diperkaya dan air berat, akan mengakses pasar internasional.

Dengan demikian maka sanksi dan pembatasan terhadap ekspor dan impor bahan bakar nuklir yang sebagian di antaranya sudah berjalan selama 35 tahun menjadi tidak berpengaruh.

Iran dan semua perangkat ideologisnya akan mengalami liberalisasi. Semua embargo ekonomi, finansial, perbankan, migas, petrokimia, perdagangan, suplai dan transportasi yang diterapkan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai sanksi atas program nuklir Iran akhirnya dicabut sekaligus. Tuntutan penghentian program rudal Iran, khususnya balistik, dikendurkan menjadi pembatasan terhadap kebijakan Iran berkenaan dengan rudal-rudal yang dapat membawa hulu ledak nuklir. Embargo senjata terhadap Iran dicabut dan diganti dengan beberapa ketentuan pembatasan. Iran diperkenankan mengimpor ataupun mengekspor sebagian produk persenjataan. Sanksi berkenaan dengan bahan berfungsi ganda dicabut, dan dengan demikian kebutuhan Iran di bidang ini akan dipenuhi melalui komisi bersama Iran dan P5+1. Mahasiswa Iran tidak lagi dikenai sanksi akademik di bidang-bidang sains yang berhubungan dengan energi nuklir.

Liberalisasi teknikal juga sama masifnya dengan liberalisasi ekonomi dan militer yang diberikan Barat. Iran bisa mengganti ideologi senjata dengan pembukaan isolasi. Embargo pesawat sipil yang sudah berjalan tiga dekade dicabut, dan dengan demikian Iran juga dapat mengakses suku cadang untuk upgrade hingga memenuhi standar keamanan. Pencairan aset keuangan Iran di luar negeri sebesar milyar dolar Amerika Serikat yang telah dibekukan dan diblokir selama beberapa tahun terakhir akibat sanksi. Bank Central Iran, perusahaan pelayaran, perusahaan minyak nasional, perusahaan transportasi minyak dan perusahaan-perusahaan lain yang bernaung di bawahnya, maskapai penerbangan Iran, dan banyak lembaga dan instansi perbankan (sekitar 800 orang dan perusahaan)

dinyatakan keluar dari daftar sanksi. Banyak kalangan Wahabi di Indonesia tak paham dengan semua 'berkah' yang didapatkan Iran dan semakin sulit untuk mengandalkan teori konspirasi sebagai penjelasan tunggal atas kemajuan diplomasi nuklir ini.

Apa yang telah diberikan Barat kepada Iran adalah suatu yang di luar perkiraan negara-negara Arab di Timur Tengah. Iran mendapat peluang lebih besar untuk berkontribusi di pasar dan sektor-sektor perdagangan, teknologi, keuangan dan energi. Pembatasan kerjasama ekonomi Iran di semua bidang, termasuk investasi di sektor industri migas dan petromikia, dicabut. Indonesia lantasi semringah dengan hasil kesepakatan nuklir Iran di Wina ini. Peluang terbukanya kerjasama luas semua pihak dengan Iran di level internasional di sektor energi nuklir tujuan damai serta pembangunan pembangkit listrik, reaktor untuk riset dan penyediaan teknologi nuklir terkini.

Implikasi politik dari perjanjian itu mencakup aturan mengenai pengawasan lokasi fasilitas nuklir di Iran sehingga pengawas PBB dapat meninjau lokasi militer, namun Iran bisa saja menentang pemberian akses. Sebagai gantinya, PBB mengatakan embargo senjata dan sanksi rudal hanya akan berlaku dalam lima sampai delapan tahun lagi. Namun, apabila Iran melanggar perjanjian, penjatuhan sanksi akan diberlakukan dalam 65 hari. Resolusi PBB ini akan mendukung kesepakatan yang secara otomatis akan memutuskan satu mekanisme agar seluruh sanksi Dewan Keamanan bisa secara otomatis berlaku kembali jika Iran melanggar kesepakatan itu.

Kesepakatan Wina ini mengatur bahwa enam negara adidaya, Iran dan Uni Eropa akan membentuk satu komisi bersama untuk menangani pengaduan jika ada pelanggaran. Jika negara yang mengadu itu tidak puas dengan keputusan komisi, negara tersebut bisa membawa keluhannya ke

Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB kemudian harus mengambil suara untuk resolusi untuk tetap memberlakukan embargo dan sanksi terhadap Iran.

Ketegangan Politik Saudi dan Iran

Rivalitas Sunni dan Syiah di Timur Tengah bisa dibaca dari kuatnya persaingan Iran dan Arab Saudi dalam mengembangkan mazhab masing-masing. Saudi berusaha membangun jaringan Sunni di negara-negara Timur Tengah dengan sekte Wahabisme. Sementara Iran menggalang dan mengembangkan jaringan Syiah di Timur Tengah dengan menanamkan semangat revolusi Islam Iran. Kompetisi ideologis ini menjurus ke arah benturan perang fisik dan psikis yang cukup menelan korban jiwa. Para ahli Timur Tengah sering menyebut rivalitas agama dan politik Iran-Saudi itu sebagai Perang Dingin baru di Timur Tengah (Grumet, 2015). Para pengikut Syiah yang tinggal di Arab Saudi, seperti Nimr al Nimr, mencoba mengguncang dominasi Wahabi Saudi dari dalam. Tidak heran jika pemerintah kerajaan Arab Saudi menjatuhkan hukuman mati dan mengeksekusi pengikut Syiah itu akhir Desember 2015 (<https://www.merdeka.com>).

Tahun 2015, usai mengeksekusi mati 47 narapidana termasuk ulama terkenal Syiah, Syekh Nimr Baqir al-Nimr, Arab Saudi terus menuai protes dan kecaman. Republik Islam Iran jadi salah satu negara paling keras mengecam Saudi, sebab mayoritas warganya adalah penganut sekte Syiah. (<https://news.idntimes.com>)

Sebagai dampak masalah eksekusi ini, warga Iran kemudian menggelar protes massal, yang berujung pada pembakaran kedutaan Saudi di Ibu Kota Teheran. Hal ini kemudian memicu putusannya hubungan diplomatik kedua negara. Penganut Syiah yang bergolak tak cuma Iran, namun

juga warga Syiah di Bahrain, Yaman, dan Irak juga berdemonstrasi di Saudi yang menganut mazhab Sunni.

Arab Saudi memutuskan hubungan dengan Iran di tengah pertikaian hukuman mati terhadap ulama Syiah terkemuka Arab Saudi, Sheikh Nimr al-Nimr. Kedua kekuatan berada pada posisi yang berseberangan dalam sejumlah konflik kawasan. Iran memperingatkan Arab Saudi akan menghadapi "pembalasan Ilahi" terkait eksekusi, dan Kedutaan Besar Saudi di Teheran diserang pengunjuk rasa yang marah.

Sejak Revolusi Islam Iran pimpinan Ayatollah Khomeini tahun 1979, Arab Saudi dan Iran menjalin hubungan diplomatik yang rumit, dilandasi saling curiga, persaingan, serta permusuhan. Pemicunya tak sekadar perbedaan mazhab Islam. Secara geopolitik, Iran dan Saudi juga bersaing untuk memengaruhi negara-negara tetangganya dan juga terdapat kecurigaan tentang pengaruh Iran terhadap kelompok minoritas Syiah di Arab Saudi, di samping masyarakat Syiah di Bahrain, Irak, Suriah dan Lebanon. Program nuklir Iran dan kemungkinan bahwa negara itu pada suatu hari akan memiliki senjata nuklir, juga membuat khawatir Arab Saudi.

Bermula dari 1979, saat itu penguasa Arab Saudi terperanjat menyaksikan Raja Shah Mohammed Reza Pahlevi digulingkan ulama Syiah pimpinan Ayatollah Khomeini. Karena 'kecewa dan khawatir serta ngambek' dengan Republik Islam Iran, Saudi kemudian mendukung Irak dalam perang Iran-Irak pada 1980-1988. Warga Iran protes, sebab Saudi membolehkan Irak menggunakan senjata kimia. Hubungan diplomatik kedua negara ini terus memburuk dan hampir mencapai puncaknya pada 1987. Kala itu, 275 orang Iran tewas dalam bentrokan di Tanah Suci, Mekah dari total korban 402 jamaah. Rivalitas politik Iran dan Saudi ini bertahan lama karena masing-masing memiliki kekuatan

sepadan, berlarut-larut dan terkunci ke dalam konflik yang bakal berlangsung hingga masa depan (Goertz dan Diehl, 1993).

Tegangan Islam politik antara Saudi dan Iran umumnya dilihat masyarakat dunia sebagai ketegangan kaum Muslim Sunni dan Syiah. Ada yang berpendapat bahwa seandainya Nabi Muhammad sebelum wafat tahun 632 menentukan penggantinya, mungkin semua ketegangan politik itu tidak terjadi. Tetapi karena penerus Rasulullah SAW tidak ada, kelompok Islam yang masih muda itu terpecah-belah sekitar 30 tahun setelah Muhammad SAW wafat. Sebagian besar menggabungkan diri dalam kelompok yang disebut Sunni. Kelompok kedua terdiri dari pendukung Ali bin Abi Talib, saudara sepupu dan menantu Mohammad. Kelompok itu disebut "Shi'at Ali", atau pengikut Ali, yang berkembang menjadi Islam Syiah.

Tahun 632 di Negara Madinah yang jadi masalah terutama soal politik perorangan. Sengketa berpangkal pada pertanyaan, bagaimana cara tepat menentukan pengganti Muhammad. Pakar Islam Lutz Berger dari Universitas Kiel, Jerman menambahkan, "Awalnya adalah konflik politik mengenai pengganti dan kepentingan kelompok. Konflik politik itu kemudian dijadikan masalah agama". (<http://www.dw.com>).

Mengenai pertikaian akan penerus Muhammad yang sah, awalnya disetujui melalui suara mayoritas adanya empat khalifah. Tahun 660, dinasti Umayyah mengambil alih kekuasaan. Dalam pemilihan khalifah, bagi mayoritas pemeluk agama Islam yang penting adalah, mereka berasal dari suku Quraish, seperti halnya Muhammad. Sedangkan pendukung Ali berpendapat, pengganti harus berasal dari keluarga Muhammad. Itu dilandasi argumentasi, Tuhanlah yang menentukan Ali sebagai pengganti, dan Muhammad telah menetapkannya secara tertulis sebelum meninggal.

Menurut keyakinan Syiah, Kelompok Sunni kemudian menghapus aturan tersebut dari al-Quran. Dengan demikian, timbul tuduhan pemalsuan al-Quran oleh kelompok Sunni.

Menurut Dr. Lutz Berger, Ali tidak bersedia menerima, jika dirinya tidak menjadi penerus Muhammad. Akhirnya tahun 656 ia dipilih menjadi khalifah keempat dan terakhir. Kekuasaannya hanya berlangsung lima tahun. Ali kemudian jadi korban pembunuhan. Di daerah pusat kekuasaan Islam yang baru terbentuk, yaitu Damaskus, dinasti Umayyah kemudian berkuasa. Sedangkan pendukung Ali menguasai provinsi-provinsi di sekitarnya, yang sekarang menjadi wilayah Irak. Tahun 680 putra termuda Ali, Hussein dipilih menjadi khalifah untuk menandingi khalifah-khalifah lainnya. Tapi di tahun yang sama ia dibunuh atas perintah keluarga Umayyah, kemudian dimakamkan di Karbala, yang sekarang termasuk Irak. Pembunuhan itu menjadi tonggak perpecahan antara Sunni dan Syiah. Peristiwa itu juga menjadi landasan tradisi martir yang menjadi ciri khas Syiah.

Dalam kaitan ini, sejarah mengisahkan bahwa dalam Perang Shiffi, antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Mu'awiyah bin Abi Sufyan sebagai hasil dari pertikaian politik pasca kematian Khalifah Usman bin Affan. Sebagaimana di dalam sejarah, ketika Ali terpilih menjadi khalifah, ia mendapatkan tantangan dari beberapa pemuka sahabat yang ingin menjadi khalifah, di antaranya ialah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Gubernur Damaskus waktu itu. Mu'awiyah tidak mengakui Ali sebagai khalifah, sebagaimana juga Talhah dan Zubair. Mereka menuntut kepada Ali, agar menghukum pembunuh Khalifah Usman bin Affan, bahkan mereka menuduh Ali bin Abi Thalib turut terlibat dalam pembunuhan itu. Salah seorang pemuka pemberontak dari Mesir yang datang ke Madinah, dan kemudian membunuh Usman bin Affan, adalah Muhammad Ibn Abi Bakr, anak angkat dari Ali bin Abi Thalib. Selain itu, Ali tidak mengambil tindakan keras terhadap pemberontak,

bahkan Muhammad Ibn Abi Bakr ditunjuk dan diangkat menjadi Gubernur Mesir. Pertikaian politik tersebut mencapai puncaknya dalam perang besar antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Mu'awiyah bin Abi Sufyan di Shiffi (Hitti, 1974: 181-183, dan Rijal, 2010: 7).

Pasukan Ali dapat mendesak dan memukul mundur tentara Mu'awiyah, sehingga pasukan Mu'awiyah, Amir ibn al-Ash yang terkenal sebagai orang yang licik, meminta berdamai dengan mengangkat al-Qur'an ke atas. Seorang sahabat dari kelompok Ali yang bernama Qurra' mendesak Ali supaya menerima tawaran itu. Dengan permintaan itu, dicarilah kerangka perdamaian dengan mengadakan arbitrase (tahkim) di antara kedua belah pihak. Sebagai perantara, diangkat dua orang: Amir bin al-Ash dari pihak Mu'awiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali. Sejarah mencatat, bahwa dalam perjanjian damai itu, kedua belah pihak menandatangani kesepakatan untuk tidak menjatuhkan kedua pemuka sahabat yang bertentangan itu. Tetapi, karena kelicikan Amir bin al-Ash, arbitrase tersebut menguntungkan pihak Mu'awiyah, karena ia mengumumkan hanya menyetujui pemakzulan Ali bin Abi Thalib yang diumumkan lebih dulu oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan menolak menjatuhkan Mu'awiyah. Akibatnya, kedudukan Mu'awiyah naik menjadi Khalifah yang tidak resmi alias tidak sah. Dalam perkembangan kemudian, dengan tipu muslihat dan kelicikan oleh para musuh Khalifah Ali, akhirnya, sebagaimana terbukti dalam sejarah, Khalifah Ali bin Abi Thalib berhasil dibunuh. Ali bin Abi Thalib dibunuh ketika sedang Shalat Subuh di masjid. Dua sampai tiga hari sang khalifah ini masih bisa bertahan hidup sebelum akhirnya wafat (Hitti, 1974: 181-183, dan Rijal, 2010: 7). Gugur dan syahidnya Khalifah Ali telah menjadi memori sosial-keagamaan yang membangkitkan spiritualitas kaum Syiah untuk melawan apa yang mereka persepsikan sebagai kezaliman dan kebatilan.

Berdasarkan data terbaru, ada sekitar 1,6 milyar persebaran penduduk Muslim di berbagai belahan dunia, ada sekitar 85- 90% di antaranya menganut Islam Sunni. Jumlah penganut Syiah tidak diketahui dengan pasti, karena di banyak negara tidak ada sensus yang mencatat agama warganya. Selain itu, kaum Syiah yang tinggal di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya non Syiah, tidak selalu mengungkapkan keyakinan mereka. Hingga sekarang, kaum Syiah adalah kelompok minoritas, yang anggotanya diperkirakan sekitar 10-15% dari total 1,6 milyar warga Muslim di dunia.

Ilustrasi di atas sekadar menunjukkan betapa sensitif dan rentannya konflik Sunni-Syiah jika tidak dikelola dan diselesaikan dengan cara-cara etis, damai dan beradab. Dalam kenyataannya, konflik Sunni-Syiah memang tidak lepas dari dimensi agama, ideologi dan ekonomi-politik. Sejak tahun 2005, Arab Saudi telah berhasil mengirim bantuan US\$ 30 juta ke Lebanon, Irak dan Bahrain, dalam upaya membuat jaringan Sunni yang luas dibawah kontrol dan komando organisasi intelijen Arab Saudi (<http://www.kompasiana.com>).

Pada 2011, dengan terjadinya gejolak di pemerintahan Syria, Arab Saudi secara diam-diam lebih deras mendukung oposisi Syria dalam memerangi pemerintahan Syiah— Bashar al-Assad, Tapi hingga tahun 2014 tampaknya perkembangan situasinya makin lama makin tidak membawa keuntungan bagi Arab Saudi (US News and World Report, 2015).

Demikian juga di Libanon, gerakan politik di bawah pimpinan Sunni tidak mampu menekan kekuatan milisi Syiah - Hizbullah. Dengan keputusan AS (Amerika Serikat) keluar dari Timteng dan gelagat membaiknya hubungannya dengan Iran telah memaksa Arab Saudi naik ketengah gelanggang panggung dari pada berada di belakang layar.

Malah Saudi berniat membuat “perubahan besar” dalam hubungan dengan Amerika sebagai bentuk protes atas sikap AS atas Suriah dan mendekatnya AS ke Iran. (<http://www.dw.com>).

Meskipun Presiden Amerika Serikat Barack Obama berikrar melindungi sekutu-sekutunya di Teluk Arab dengan kekuatan militer jika diperlukan di tengah ketegangan dengan Iran, Saudi masih khawatir bahwa AS tidak total membela Riyadh menghadapi Teheran. Hubungan AS dan sekutu-sekutunya di Teluk Arab sudah menegang setelah Obama menyepakati perundingan nuklir dengan Iran (<http://www.bbc.com>).

Sejauh ini, di era kepemimpinan Obama telah berusaha untuk menempatkan tanggung jawab keamanan Timteng pada para pemimpin di kawasan itu, terutama untuk sekutunya seperti Arab Saudi yang telah digelontorkan dana miliaran dollar mesin militer oleh Amerika. Namun pada saat yang sama pemerintahan Obama juga menarik pasukan AS dari *hotspot* Timteng yang berbahaya itu. Akibatnya, negara-negara Arab di Teluk kurang percaya terhadap kebijakan AS di Timteng. Para analis mempertanyakan: Jika di Timteng antara Syiah dan Sunni, antara orang Arab dan orang Persia tidak bersatu, sedang Syiah dan Persia memiliki senjata nuklir, mana mungkin orang-orang Arab bisa menerima hal itu? (<http://www.albayyinat.net/jwb5ta>, dan <http://www.dw.com>).

Konflik Saudi dan Iran itu telah membuat Barat menggeneralisir bahwa konflik Sunni-Syiah di Timur Tengah akan terus berkejolak. Tapi benarkah sumbernya soal Sunni-Syiah, bukan konflik sumber daya, geopolitik dan perebutan pasar senjata? Kompleksitas masalah itu rupanya saling berhimpitan dalam kasus pertikaian di Timur Tengah.

Arab bukanlah sekutu abadi AS dan Iran bukanlah musuh abadi Amerika. Realitanya adalah persaingan kepentingan abadi antara AS, Saudi, dan Iran untuk bergerak mengamankan kepentingan masing-masing. Pada kenyataannya, sebenarnya Arab Saudi telah marah kepada AS untuk waktu yang lama. Apalagi pada 2011, AS secara aktif mendorong gelombang gerakan revolusi “Arab Spring” ke Arab Saudi. Meskipun mantan Raja Abdullah dari Arab Saudi dengan cepat dapat menstabilkan keadaan. Tapi Arab Saudi masih ingat bahwa AS berada di balik gerakan tersebut.

Pada tahun yang sama, Arab Saudi mengirim pasukan untuk menekan perlawanan anti-pemerintahan Bahrain, dan saat itu AS mengkritik Arab Saudi atas tindakan tersebut, juga tidak mendukung negara tersebut. Demikian juga pada tahun 2011, saat terjadi krisis Syria, dan angkatan bersenjata Arab dan oposisi Syria berusaha menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad, tetapi pada akhirnya Obama justru berkompromi dalam masalah senjata kimia Syria, sehingga membuat Arab Saudi tertekan dan marah. Namun Arab Saudi tak bisa berbuat banyak kepada Amerika, payung militernya di Timur Tengah.

Dewasa ini, AS secara aktif mempromosikan normalisasi hubungannya dengan Iran dan itu mendorong Teheran lebih leluasa dalam melaksanakan kebijakan Timur Tengahnya. Arab Saudi berpopulasi sekitar 24 juta, 85% faksi Sunni, dan 15% Syiah. Iran berpopulasi 85 juta dan 91% adalah berfaksi Syiah dan 7,8% Sunni. Di luar Saudi dan Iran ada Turki yang berkepentingan memainkan peran di Timur Tengah. Tapi apa yang menjadi dasar dari konflik di Timteng? Memang banyak konflik yang mendasarinya, tapi para analis Barat umumnya menjustifikasi bahwa yang paling utama dan yang sangat memiliki koneksitas serta yang paling berakar, adalah konflik antara Syiah dan Sunni.

Justifikasi itu diperkuat dengan peran Iran dalam pertikaian internal di Irak pasca Saddam Hussein, menguatnya Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina karena dukungan Teheran. Justifikasi itu juga merujuk pada pernyataan Mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak yang menyampaikan di acara TV pada tahun 2006, bahwa: "Banyak pengikut Syiah Mesir yang lebih setia kepada Iran daripada pada negara mereka (Mesir)". (<http://www.albayyinah.net/jwb5ta>, dan <http://www.dw.com>).

Harus diakui, konflik antara Arab Saudi dan Iran bukan hanya kontestasi antar faksi agama, tapi juga kontestasi kekuasaan. Kedua negara ini coba menggunakan negara-negara yang relatif lemah di wilayah ini untuk memperlus pengaruh mereka. Tapi dengan timbulnya kekacauan dalam pemerintahan Yaman dan munculnya milisi Houthi, Arab Saudi berada di pihak yang dirugikan di medan kunci ini. Di Syria, Lebanon dan Irak, pengaruh Iran terus berkembang, bahkan membuat Arab Saudi menjadi lebih buruk.

Pertanyaannya: Lalu, dari siapa Arab Saudi akan mendapatkan dukungan yang lebih kuat lagi? Arab Saudi adalah negara terbesar dan terkaya di jazirah Arab. Tapi teknologi dan industrinya tidak pesat layaknya Mesir. Militernya memiliki peralatan yang terbaik, tapi sejauh ini strategi perangnya belum teruji. Militer Arab Saudi belum pernah mengalami tes dalam skala besar (<http://www.kompasiana.com/>).

Tapi Arab Saudi ragu bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi di Timteng. Mesir, misalnya, memiliki kekuatan politik yang kuat dan relatif stabil, meskipun bukan negara kaya. Dalam konteks ini Arab Saudi bisa membantu Kairo sebagai sekutunya di Timur Tengah. Namun Kairo saat ini bukanlah kekuatan militer

yang memadai untuk menghadapi aksi Iran di kawasan Timur Tengah.

Dalam hal ini, Saudi mampu memberi Mesir lebih dari US\$ 10 milyar, sedang negara lain hanya memberi ratusan juta dollar atau mungkin hanya satu atau dua milyar dollar saja dan itu juga disesuaikan dengan kondisi yang ada. Lain lagi dengan Arab Saudi ketika memberikan Mesir US\$ 10 milyar tanpa syarat.

Meski sudah merosot ekonominya, Arab Saudi merupakan kekuatan ekonomi teratas di Timteng. Namun sebagai kekuatan politik dan sosial, Mesir masih nomor satu jika dibandingkan dengan Arab Saudi. Selama gelombang revolusi Arab Spring, Iran berusaha memengaruhi kaum Syiah untuk bersikap mendukung perubahan rezim-rezim di Timur Tengah. Di Mesir, negara yang berpengaruh di kawasan Arab itu, pemilu yang demokratis dimenangkan kelompok Ikhwanul Muslimin dan Mohammad Morsi terpilih jadi presiden. Kekuasaan Morsi mengkhawatirkan Saudi dan AS/Barat. Lalu, diam-diam Arab Saudi membantu penggulingan Morsi yang Sunni di Mesir.

Sebenarnya, sebelum Jenderal Al-Sisi menjadi Presiden Mesir, mantan Raja Abdullah dari Arab Saudi sudah menyatakan dukungan kuat untuknya. Pada 2013, setelah menjadi Menhan Mesir, Al-Sisi yang memimpin militer, kemudian bergerak menggulingkan Presiden Mohamed Morsi, Pada tahun 2013 itu, ketika Al-Sisi memimpin militer dalam kudeta menggulingkan pemerintahan Morsi, Arab Saudi di belakang layar memberi dukungan besar kepadanya (<http://www.kompasiana.com>).

Para akademisi dan analis memandang Al-Sisi mampu memper- tahankan kepemimpinannya dan Mesir akan tetap stabil, sebagian besar berkat peran utama yang dimainkan Arab Saudi di belakang layar. Raja Arab Saudi menjadi kepala negara asing pertama yang mengucapkan selamat

kepada Al- Sisi dan militer Mesir. Arab Saudi menggalang negara-negara Teluk UAE dan Kuwait untuk memberi Mesir bantuan ekonomi melebihi US\$ 12 milyar untuk melewati krisis ekonomi pada saat itu.

Sebagaimana diketahui, pada saat itu ekonomi Mesir dalam kesulitan dan negara itu semestinya sudah dalam keadaan bangkrut. Cadangan nasional Mesir telah menurun menjadi kurang dari US\$ 15 milyar ketika Sisi menjabat. Jika dipikir kembali penduduk Mesir 90 juta dengan cadangan kurang dari US\$ 15 milyar dapat dibayangkan seperti apa kondisi Mesir saat itu. Jelas Mesir sudah dalam kondisi bangkrut.

Setelah Mesir berada dalam orbit politik Saudi, pemerintah Riyadh melakukan intervensi militer ke Yaman dimana kaum Syiah berhasil merebut kekuasaan dari tangan Sunni. Masyarakat Arab Saudi tidak hanya mendukung perang baru Arab Saudi di Yaman, tetapi juga peran barunya di Timteng sebagai “Polisi”, untuk mengisi kekosongan yang disebabkan ditinggalkan oleh keengganan Amerika Serikat untuk campur tangan dalam wilayah ini lagi. Yaman menjadi batu ujian Arab Saudi untuk menguji kepemimpinan dan kemampuan militernya di Timur Tengah. Saudi berharap Mesir, Yordania dan negara Teluk lainnya membantu memperkuat Saudi sebagai polisi di Timur Tengah.

Mesir diminta Saudi bergabung tanpa pamrih, tetapi Arab Saudi sangat kecewa dengan Mesir atas seluruh operasi militernya. Sebab Mesir hanya mengirim beberapa kapal patroli Bab-el-Mandeb sebagai simbolis, dan Arab Saudi percaya tindakan Mesir tidak untuk menyerang Yaman untuk membantu Arab Saudi, sebab itu hanya lebih merupakan tindakan untuk melindungi Terusan Suez yang menguntungkan Mesir. Arab Saudi sangat kecewa terhadap sikap Mesir tersebut. (<http://www.albayyinat.net/jwb5ta>, dan html <http://www.dw.com>).

Selain itu, Arab Saudi dalam tingkat tertentu juga kecewa terhadap Pakistan, karena Arab Saudi terutama minta mereka memobilisasi pasukan. Namun Pakistan merasa hal tersebut bukan krisis besar dalam negeri Arab Saudi sendiri, melainkan di negara lain, sehingga Pakistan dengan sopan menolak. Sikap yang sama juga ditunjukkan negara-negara lain seperti Yordani dan mitra lain di Teluk, yang dikatakan memobilisasi militer nyatanya hanya untuk "pertunjukan" saja. Walhasil, aliansi Arab Saudi ini jika diukur kapasitas tempurnya sebenarnya masih sangat terbatas (Time, 2015). Sementara Iran (dan Turki) jauh lebih digdaya dalam bidang kemiliteran dan intelektualisme. Iran dan Turki memerangi ISIS yang beraliran Wahabi, dan Saudi khawatir bila ISIS tersudut, pengaruh Syiah di Irak makin kuat, sementara Turki juga berusaha memperluas pengaruhnya di Timur Tengah, seraya mengurangi peran Saudi dan Persia sekaligus. Segitiga ketegangan Saudi-Iran-Turki sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari rivalitas ketiga kekuasaan regional itu. Dengan konflik Suriah, Libya dan Yaman, situasi dunia Arab semakin hari cenderung semakin tak menentu. Yaman, Irak, Syria dan Libya situasinya memburuk, sementara ISIS masih merajalela dan mampu membangun jaringan di AS dan Eropa serta Asia, meski posisinya di Irak dan Suriah kian tersudut..

Menghadapi berbagai tantangan ini, Arab Saudi terlihat seperti putus asa dengan melihat AS dan Iran membuka dialog dan mencapai kesepakatan awal kerangka kerjasama. Arab Saudi pernah menggunakan minyak sebagai alat untuk menghukum Iran, namun hal ini juga menimbulkan kerusakan dan kerugian besar bagi Arab Saudi sendiri. Arab Saudi harus membayar harga yang makin lama makin mahal dan berat menghadapi Iran yang kini sudah bebas dari sanksi ekonomi PBB.

Jika Arab Saudi dan Iran bisa lebih dekat satu sama lain, kemungkinan besar sangat bermanfaat bagi stabilitas Timteng.

Para analis Timteng melihat konflik dan persaingan ini disebabkan melemahnya negara-negara besar di Timteng. Bukan dikarenakan vakum kekuatan AS/Barat setelah Presiden Barack Obama menarik kekuatan militer dari Irak dan Afghanistan, tapi lebih disebabkan oleh munculnya faktor yang tak terkendali yang disebabkan melemahnya kemampuan negara-negara Arab itu untuk menghadapi tantangan di kawasan. Selain itu, dengan adanya konfrontasi geo-strategis antara Arab Saudi dan Iran, konflik agama dan ideologis cenderung meruncing. Kaum Sunni di negara-negara seperti Syria dan Irak memerlukan pasukan militer untuk melindungi kepentingan sekte mereka sendiri. Sedangkan kelompok Syiah pun demikian. Tarik-menarik kepentingan dan persaingan dalam rangka menancapkan kuku kekuasaan antara kaum Sunni dan Syiah kian merumitkan masalah di Timur Tengah.

Para analis melihat, munculnya pemerintahan yang kuat di negara-negara seperti Irak, Syria, Yaman dan Mesir, memungkinkan konflik agama diperlemah, dipangkas dan bisa membawa situasi di Timteng ke arah stabilitas. Dalam kaitan ini, Arab Saudi sebagai “pemimpin” Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) di satu sisi harus bertanggung jawab atas keamanan dan kepentingan negara-negara Teluk. Dan di sisi lain sebagai kekuatan ekonomi terkuat di Timteng dan sebagai kekuatan utama yang paling berpengaruh di wilayah tersebut. Arab Saudi harus bersikap tegas untuk bisa memengaruhi arah masa depan Timteng ke arah stabilitas dan perdamaian.

Bagaimanapun kacaunya wilayah Timur Tengah, situasi tersebut hanya dapat dikendalikan dan diredam kalau Arab Saudi dan Iran bisa mencapai kesepakatan dengan jalur diplomasi, bukan perang. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) bisa berkontribusi dengan cara menjembatani komunikasi kedua negara tersebut agar stabilitas dan

kedamaian regional dapat terwujud. Jika saja Persia dan Arab para pemimpinya mampu berdialog dengan baik niscaya kata damai dapat disepakati. Konflik Sunni-Syiah sendiri bukanlah konflik yang diletupkan oleh Saudi dan Iran, melainkan oleh pihak ketiga yang tidak menghendaki stabilitas dan perdamaian terwujud di Timur Tengah. Saudi dan Iran tentunya sadar dan paham bahwa selama era Perang Dingin, Timur Tengah menjadi ajang bisnis senjata, pertarungan geopolitik dan perebutan sumberdaya minyak dan gas yang tiada tara. Sehingga sekiranya Saudi dan Iran tidak mencapai kesepakatan damai, hampir pasti instabilitas dan konflik di Timur Tengah terus membara, dan persoalan lain seperti krisis kemanusiaan di Palestina, fenomena ISIS, dan pergolakan di Lybia, Yaman dan Suriah belum jelas akhirnya.

Berangkat dari paparan di atas, bisa dimengerti bahwa implikasi politik dari persaingan sengit Iran dan Saudi di Timur Tengah adalah ketegangan dan pembelahan yang makin tajam antara kaum Sunni dan Syiah di dunia Islam. Pertarungan politik berhimpitan dengan isu agama, dan geostrategis, yang menyeret Timur Tengah masuk ke dalam konflik berlarut antara Saudi dan Iran entah sampai kapan.

Implikasi Ideologis

Kesepakatan program nuklir yang disetujui oleh Iran dan enam negara adidaya ini membuat Arab Saudi khawatir pengaruh Iran akan semakin menguat di kawasan Timur Tengah. Bagi Arab, kesepakatan ini akan mengubah orientasi ideologis mereka dan juga sikap politik serta sikap kultural mereka terhadap Barat dan China. Implikasi ideologis akan tetap terasa, tanpa disadari. Tidak ada satu pun organisasi atau masyarakat atau bahkan bangsa yang terbebas atau netral secara ideologis. Ideologi menggerakkan vibrasinya pada berbagai situasi, mulai dari Revolusi Amerika (Baylin, 1992), ke organisasi yang non-ideologis sekalipun

(Czarniawska-Joerges, 1988), dari diagnosa medis (Gartner, Harmatz, Hohmann, Larson, & Gartner, 1990), atau ketika kita mengonsumsi suatu produk (Treise, Weigold, Conna, & Garrison, 1994), hingga ke soal-soal anggaran (Wilensky, 1974).

Hampir semua kegiatan manusia memiliki aspek ideologis, baik itu berbentuk motif maupun kecemasan dan ketakutan. Dalam aspek mitologi misalnya, ketakutan masyarakat Nusantara terhadap hantu kuntilanak atau sundel-bolong juga bisa dilihat dari aspek orientasi ideologi, pun demikian halnya dengan hantu-hantu vampir atau zombie di masyarakat Barat. Bagi masyarakat Nusantara vampir bukanlah sosok yang menyeramkan, terutama vampir perempuan. Zombie terlihat lucu karena relatif lamban. Mungkin dalam pandangan masyarakat barat kuntilanak tak ubahnya makhluk eksotis dan menggemaskan.

Kecemasan atas kesepakatan nuklir Iran mungkin terasa di beberapa negara jazirah Arab. Namun dalam persepsi ideologis umat Islam Sunni di Indonesia, kesepakatan nuklir Iran ini dilihat secara berbeda. Apa yang dipersepsikan sebagai hantu yang menakutkan di Arab mungkin berbeda dengan hantu eksotis di Indonesia. Kesepakatan Iran secara ideologis diprediksi akan menjadikan Timur Tengah menjadi "kawasan yang lebih berbahaya" jika kesepakatan tersebut terlalu menguntungkan bagi Iran. Saudi dan negara-negara sekutunya di kawasan Teluk khawatir bahwa kesepakatan yang akan berujung pencabutan sanksi ekonomi Iran akan berakibat pada meningkatnya dukungan Iran terhadap negara-negara rival Saudi di Timur Tengah. Analisis tambahan menunjukkan bahwa jalur ideologis yang menghubungkan kecemasan, persepsi berbahaya di dunia memiliki dampak kuat pada keseluruhan diri penempatan kiri-kanan dari jalur yang menghubungkan tindakan menghindari, dan munculnya persepsi kompetitif di tengah

belantara ketidakpastian. Kalangan Sunni dan kalangan Wahabi, pada khususnya, merasakan hantu Iran yang menggemaskan bisa mengarah ke tindakan serious offence.

Kesepakatan Nuklir Iran ini menimbulkan kecemasan tersendiri bagi Wahabi yang semakin hari kecenderungan ditekan oleh pihak Barat dan oleh kalangan Muslim tradisional semakin menguat. Narasi yang acap kali dibangun, Wahabi sebagai kaum ekstrimis dan pelaku tindakan yang berlebih-lebihan. Teori Greenberg, Solomon, & Pyszczynski (1997) menganggap otoritarianisme dan konservatisme sebagai sumber ideologi bagi munculnya motif kolektif (untuk merobek pandangan pengaturan sosial sebagai stabil, adil dan dapat diprediksi) dan motif pribadi (untuk mengatasi kecemasan eksistensial). Otoritarianisme dan konservatisme Wahabi akan semakin dipermalukan dengan kesepakatan nuklir Iran di Wina ini.

Saudi, yang mayoritas penduduknya merupakan Muslim Sunni, dan Iran yang mayoritas Syiah telah lama menjadi rival di kawasan Timur Tengah. Konflik di Yaman, menjadi ajang pertempuran antara Saudi yang mendukung Presiden Yaman dan pemberontak Syiah Houthi yang didukung oleh Iran. Pengaruh ideologis dari kesepakatan nuklir ini selanjutnya akan menyumbang bagi membesarnya konflik. Motivasi bagi munculnya ideological rigidity dan konflik sosial bahkan bisa muncul dalam dunia manajemen yang sempit (Peterson & Flanders, 2002), apatah lagi dalam dunia politik dan keagamaan (Jost, Napier, Thorisdottir, Gosling, Palfai, & Ostafin, 2007).

Konflik Syiah Houthi di Yaman akan semakin melebar dan membesar dan semakin membuat Saudi terjepit. Sebagai tetangga Iran dalam empat dekade terakhir, kaum Wahabi di Arab belajar bahwa kebaikan (terhadap Iran) hanya akan membuat mereka menanggung konsekuensinya. Politik tanpa belas kasihan akan terjadi terhadap kaum Syiah

dimana pun sebagai akibat dari konstelasi politik yang tidak sepadan yang diberikan oleh Barat melalui kesepakatan nuklir bagi Iran di Wina ini. Situasi menyesakkan ini tentu akan mengakibatkan kaum Wahabi pun tidak tinggal diam dan akan bereaksi secara ekstrim dengan memainkan kekerasan keagamaan di Indonesia

Ancaman dan ketersudutan akan mengakibatkan bangkitnya motivasi reaktif yang berlebihan (Nash, McGregor, & Prentice, 2011). Para pejabat dan masyarakat Iran mengaku mendukung kesepakatan ini, meski menyatakan bahwa Iran tidak dapat dipercaya untuk menepati kesepakatan tersebut. Selain konflik di Yaman, Riyadh juga menganggap Iran mendukung Presiden Suriah, Bashar al-Assad dan Hizbullah di Libanon. Saudi menilai, hal ini merupakan bukti bahwa Iran ingin memperlebar kekuasaannya ke negara sekutu Syiah di Timur Tengah. Di Indonesia, ketersudutan ini memang belum terasa sekarang, namun beberapa tahun kedepan akan ada reaksi ekstrim apabila pemerintah menjalin hubungan politik dan dagang yang semakin mesra dengan Iran.

Selama ini kaum Wahabi sangat asertif dalam menolak ideologi Syiah di berbagai kawasan, termasuk di Indonesia. Abu Jibriel (2015), misalnya, sangat aktif menyerang Syiah dengan mengklaim bahwa mereka bukan Islam dan menyebarkan politik eksklusif yang serius terhadap Syiah, yang tak pernah ditunjukkan sebelumnya oleh kaum Sunni manapun di Nusantara. Kesepakatan nuklir telah menuai kritikan dari wartawan, ulama dan pakar di Saudi, utamanya karena sekutu utama Riyadh, Washington kini berbagi dukungan dengan rival mereka di Tehran. Iran membuat kekacauan di dunia Arab dan hal ini akan terus terjadi setelah kesepakatan nuklir. Negara Sunni di kawasan teluk mungkin akan mengurangi kepercayaan mereka terhadap Amerika dan mengubah fokus mereka ke Rusia yang ke-lihatannya mulai memberikan tempat bagi tumbuhnya politik Islam di

bagian timur Eropa. Namun tidak demikian halnya di Indonesia. Mereka bisa saja membenci Syiah, namun suka dengan sisi feminim Iran yang sangat eksotik.

Kalangan Wahabi Indonesia pun saat ini sedang menghadapi perpecahan internal yang tak ter- perikan dengan munculnya fenomena ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang telah menguras darah dan keringat serta finansial mereka dalam menghadapi perang sesama Wahabi yang melelahkan ini. Komitmen ideologi memang senantiasa dipertaruhkan di antara risiko dan faktor yang melindungi suatu kaum (Laor, Wolmer, Alon, Siev, Samuel, & Toren, 2006), maka ada kemungkinan reaksi ekstrim akan terjadi terhadap kalangan Syiah di beberapa kawasan yang konfliktual dan bermusuhan, *hostile*, khususnya di Indonesia. Negeri ini memiliki reputasi buruk dalam hal perlindungan terhadap kaum Syiah dengan munculnya berbagai kasus intoleransi dan bentrokan berdarah yang menyedihkan dimana banyak anak-anak dan orang tak berdaya terlempar ke tempat-tempat penampungan transitio yang tak manusiawi dan tak bisa pulang ke rumahnya selama bertahun-tahun.

Kesepakatan nuklir Iran ini akan muncul dalam bentuk-bentuk kultural yang dominan selain kontestasi ideologis di Indonesia. Jika kemenangan ideologis Iran terjadi di Indonesia, maka kalangan Sunni yang mayoritas akan mempersepsikan hal ini sebagai imperialisme kultural. Imperialisme kultural dan kecemasan masyarakat akan mengakibatkan munculnya perubahan hukum dan ideologi (*ideological realignment*) secara signifikan (Peller, 1997).

Penulis memprediksikan bahwa kemungkinan adanya reformasi ideology di tubuh kaum Wahabi di Indonesia dalam menyesuaikan dirinya dengan modernitas. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan tersembur dari Iran secara masif dengan terbukanya isolasi Iran ini. Kaum Wahabi yang

saat ini mengalami kekalahan yang akut dan tak pernah menang dalam setiap upaya perebutan kekuasaan akan berpikir ulang dan menyesuaikan gairah kekuasaannya dengan perhitungan ideologis dalam manajemen pergerakan mereka. Ideological realignment ini akan menuntut kaum Wahabi untuk me- nurunkan tensi ekstrimismenya atau akan terancam hilangnya pendukung tradisionalnya dari kalangan Sunni di Nusantara yang beragama dan kosmopolit ini.

Iran dan Turki

Kesepakatan nuklir Iran ini dipandang oleh kaum Wahabi merupakan cara Amerika dan Barat untuk menghapus citra positif Turki yang diyakini akan membangkitkan the glory of the past khilafah. Bagi kaum Wahabi di Indonesia, citra Arab Saudi bersifat kurang baik dibanding Turki, meski mereka membela Saudi dalam hal pemberontakan Syiah Hauthi di Yaman. Sebagaimana terlihat melalui media Arrahmah.com yang mengutip artikel penulis Yordan, Ihsan Al Faqih, 26 Desember lalu pada media Achahed.

Produk Domestik Nasional Turki di tahun 2013 mencapai 100M dolar Amerika, menyamai pendapatan gabungan 3 negara dengan ekonomi terkuat di Timur Tengah; Arab Saudi, Uni Emirat arab, Iran, dan ditambah dengan Yordan, Suriah dan Lebanon. Posisi Turki dengan ketokohan Recep Tayyip Erdogan telah berhasil membawa negerinya melakukan lompatan ekonomi yang besar, dari ranking 111 dunia ke peringkat 16, dengan rata-rata peningkatan 10 % pertahun, yang berarti masuknya Turki kedalam 20 negara besar terkuat (G-20) di dunia. Tahun 2023 merupakan tahun pembangunan Negara Turki Modern yang sudah dicanangkan oleh Erdogan, yang ditargetkan adalah Turki menjadi kekuatan politik dan ekonomi nomer 1 di dunia! Airport Internasional Istanbul adalah bandara

terbesar di Eropa yang menampung 1260 pesawat setiap harinya, ditambah Bandara Shabiha yang menampung 630 pesawat setiap hari. Turkish Airline, yang sering ditumpangi oleh para mujahidin ketika akan ke Afghanistan atau ke Suriah, meraih peringkat maskapai penerbangan terbaik di dunia dalam 3 tahun berturut-turut. Kegagalan kudeta militer di Turki pada pertengahan Juli 2016 lalu membuktikan kuatnya kepercayaan rakyat kepada Erdogan serta kuatnya kewibawaan, dan pengaruh Erdogan pada masyarakat Turki yang sudah memilih jalan demokrasi. Dalam kurun 10 tahun, Turki telah menanam 770 juta pohon Harjia dan berbuah. Untuk pertama kali Turki di masa modern ini memproduksi sendiri Tank baja, pesawat terbang dan pesawat tempur tanpa awak, serta satelit militer modern pertama yang multi fungsi.

Pada aspek saintis, Erdogan dalam 10 tahun pemerintahannya telah mendirikan 125 universitas baru, 189 sekolah baru, 510 rumah sakit baru dan 169.000 kelas baru yang modern, sehingga rasio siswa perkelas tidak lebih dari 21 orang. Ketika krisis ekonomi menimpa Eropa dan Amerika, universitas-universitas Eropa dan Amerika menaikkan uang kuliah. Sedangkan Erdogan membebaskan seluruh biaya kuliah dan sekolah bagi rakyatnya dan menjadi tanggungan negara. Dalam 10 tahun terakhir, pendapatan perkapita penduduk Turki yang dahulunya hanya 3500 dolar pertahun, meningkat pada tahun 2013 menjadi 11.000 dollar pertahun, lebih tinggi dari perkapita penduduk Prancis. Erdogan juga menaikkan nilai tukar mata uang Turki 30 kali lipat. Hal ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan Iran. Di Turki, negara sedang meng-upayakan dengan sungguh-sungguh membiayai 300.000 ilmuwan melakukan penelitian ilmiah untuk menuju tahun 2023.

Posisi Turki secara geopolitik juga menjadi harapan besar bagi kaum Wahabi di Indonesia. Di antara keberhasilan politik terbesar Turki adalah keberhasilan Erdogan

mendamaikan dua bagian Cyprus yang bertikai. Ia juga melakukan pembahasan damai dengan partai Buruh Kurdistan untuk menghentikan pertumpahan darah, dan meminta maaf kepada Armenia, sehingga menyelesaikan permasalahan yang sudah menggantung sejak 6 dasawarsa. Di negara Turki, gaji dan upah meningkat mencapai 300%. Dan gaji pegawai baru meningkat, dari 340 lira Turki menjadi 957 lira. Selain itu, jumlah pencari kerja menurun dari 38% menjadi 2%. Di Turki, anggaran pendidikan dan kesehatan, mengungguli anggaran pertahanan, dan gaji guru sebesar gaji dokter. Hal inilah yang membuat kunjungan Presiden Turki, Erdogan, disambut histeris oleh kalangan Wahabi di Indonesia dan mereka mencemooh Jokowi yang tidak bersedia menerimanya untuk shalat jumat bersama di Masjid Istiqlal Jakarta awal Agustus 2015.

Jika dibandingkan dengan Iran yang memiliki banyak ilmuwan nuklir, maka di Turki telah dibangun 35 ribu laboratorium IT dan database modern yang melatih pemuda militan Turki. Erdogan menutupi defisit anggaran yang mencapai 47 milyar dolar. Sebelumnya cicilan terakhir hutang Turkiye IMF adalah 300 juta dolar pada Juli lalu. Bahkan Turki meminjami IMF yang jelek namanya itu sebesar 5 milyar dolar. Disamping itu Erdogan juga menambah cadangan devisa negara sebesar 100 milyar dolar. Jika sepuluh tahun lalu, ekspor Turki hanya 23 milyar dolar. Sekarang meningkat menjadi 153 milyar dolar, mencapai 190 negara. Yang paling banyak adalah mobil, yang kedua peralatan elektronik. Setiap 3 perangkat elektronik di Eropa, satunya adalah produk Turki.

Dalam hal lingkungan hidup yang *sustainable*, Pemerintah Erdogan mengawali pengolahan sampah menjadi pembangkit tenaga listrik, yang digunakan oleh sepertiga penduduk Turki. Dan energi listrik sudah dinikmati 98% penduduk Turki. Erdogan pernah duduk

berhadapan dengan seorang anak perempuan yang usianya masih 12 tahun, tampil dalam siaran langsung televisi, berdebat dan berdiskusi tentang pembangunan Turki masa depan. Beliau hormati kecerdasan dan semangat anak tersebut. Sekaligus beliau didik anak-anak Turki keteladanandalam berdebat dan berdiskusi serta membaca masa depan. Erdogan adalah teman Israel, begitu menurut kaum sekuler Arab. Erdogan mem- berikan tamparan keras kepada Israel, dan dia memaksa Israel meminta maaf karena kasus kapal Marmara yang ditembak Israel, 2010 silam. Turki juga berikan syarat pencabutan embargo Gaza untuk menerima permintaan maaf tersebut. Erdogan berikan kritikan tajam terhadap orang-orang yang bertepuk tangan terhadap pidato Simon Perez dalam pertemuan Ekonomi dunia, dan beliau berkata sebelum keluar ruangan dan pulang ke Turki: "Memalukan kalian bertepuk tangan terhadap pidato ini, padahal Israel telah membantai ribuan anak dan wanita di Gaza."

Pada era dunia yang semakin demokratis, kaum Wahabi melihat Erdogan dengan penuh harapan. Erdogan menyemprot para demonstiran penentanginya dengan air. Tidak menembak mereka dengan pesawat tempur, atau rudal atau bom-bom molotov. Erdogan menolak anak gadisnya membuka hijab saat sekolah. Maka beliau kirim anaknya sekolah di Eropa agar tetap berhijab, sebelum hijab dibolehkan di kampus-kampus Turki. Kebangkitan Turki yang demikian dahsyat ini membuat harapan akan bangkitnya khilafah menjadi sesuatu yang niscaya bagi kaum Wahabi Jihadi di Indonesia. Wahabi jihadi adalah kaum yang berbeda dengan Wahabi Shururi atau Wahabi Takfiri. Bagi kaum Wahabi Jihadi, khilafah Abubakar Ibrahim Al-Baghdadi (ISIS) bukanlah khilafah yang sebenarnya. Itu adalah khilafah palsu, dan Turki akan bangkit (kembali) menjadi khilafah yang sebenarnya.

Dalam diplomasi dunia, Erdogan satu-satunya kepala negara bersama istrinya mengunjungi Burma dan bertemu dengan kaum Muslimin di sana dari ka-wasan Myanmar yang dapat bencana. Keberanian Turki ini telah memuaskan rasa terzhalimi yang dialami Muslim Rohingya. Erdogan menghidupkan kembali pengajaran Al Quran dan Hadits di sekolah-sekolah negeri, setelah hilang selama hampir 90 tahun, dihilangkan pemerintah sekuler. Erdogan menetapkan kebebasan berhijab di kampus- kampus Turki dan di parlemen. Erdoganlah pemimpin Muslim yang membuat lampu di jembatan gantung terbesar di dunia di pantai laut hitam dengan penerangan yang sangat besar bertuliskan " Bismillahirrahmanirrahim.." Padahal, salah satu negara Arab membuat pohon natal terbesar di dunia dengan menelan dana mencapai 40 juta dolar. Rasa respek kaum Wahabi jihadi di Indonesia terhadap Arab musnah sudah.

Bagi kaum Wahabi jihadi di Indonesia, Turki adalah harapan baru di ufuk kebangkitan modern Islam. Erdogan mengembalikan pembelajaran bahasa Ustmaniyah yang berhuruf Arab di sekolah- sekolah negeri. Erdogan melepas pawai 10 ribu anak-anak Muslim yang berumur 7 tahun di jalan-jalan Istambul, dengan penuh bangga anak-anak tersebut akan memulai kewajiban shalat berjamaah dan menghafal al-Quran. Barangkali keadaan seperti inilah yang dirindukan oleh Wahabi Jihadi di Indonesia.

Penutup

Perjanjian Iran-AS mengenai tenaga nuklir telah membuat titik balik dalam hubungan Iran-Barat, di mana semua senjata nuklir Iran harus diputus dan dibekukan sehingga hanya Israel yang mempunyai tenaga nuklir di Timur Tengah. Teheran selalu mengatakan kegiatan nuklirnya adalah untuk tujuan damai. Saat ini sanksi internasional terhadap Iran telah dicabut, dan Iran semakin

kuat dalam meningkatkan posturnya di kancah internasional.

Perjanjian ini telah menimbulkan kegelisahan ideologis di kalangan Wahabi yang berimplikasi bahwa Wahabi tidak senang dan tidak suka dengan menguatnya Iran secara politik dan budaya di dunia global. Kepentingan ideologis Wahabi akan terkikis sampai batas tertentu dengan adanya perjanjian yang akan memecah belah dunia Islam secara serius akibat persaingan Sunni-Syiah. Namun kebangkitan Turki yang bersaing dengan Iran dan Saudi di kancah politik Timur Tengah, justru membuka mata Wahabi di Indonesia bahwa mungkin Turki adalah harapan masa depan. []

BAB IX

REVOLUSI MESIR: BERKACA PADA INDONESIA?

Military Mesir kini di tangan penguasa militer yang akan mengantarkannya kepada kehidupan lebih demokratis. Pada saat yang sama, dilaporkan berbagai media bahwa satu dari lima orang Mesir hidup di bawah garis kemiskinan dan inflasi yang mencapai 12% telah memerosotkan nilai pendapatan rakyat secara drastis dan mengakibatkan tidak terjangkaunya biaya pendidikan, kebutuhan pokok, dan kesehatan. Bagaimana kondisi sosial-ekonomi Mesir ke depan? Bagaimana masa depan politik dan ekonomi Mesir setelah Mubarak? Akankah reformasi Mesir seperti Indonesia? Artikel ini mencoba mengulas secara tajam berbagai pertanyaan tersebut.

Dekade terakhir, rezim otokratis Mesir sedang melemah oleh krisis ekonomi, oposisi politik, dan tekanan globalisasi. Para analis lantas bertanya-tanya ke arah mana Mesir akan pergi setelah presiden negara itu, Hosni Mubarak, tumbang?

Mesir kini di tangan penguasa militer yang akan mengantarkannya kepada kehidupan lebih demokratis. Namun Bagaimana kondisi sosial-ekonomi Mesir ke depan? Akankah reformasi Mesir bernasib seperti Indonesia?

Mantan pengunjung rasa Gihan Muhammad mengatakan rakyat khawatir tentang ekonomi. Kini Mesir melangkah maju, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Perlu waktu cukup lama untuk memperbaiki kerugian ekonomi dan kerusakan sosial-politik yang dialami negara.

Demonstrasi telah usai, tetapi perlu waktu cukup lama untuk memperbaiki kerugian ekonomi di Mesir. Militer telah membubarkan parlemen dan membekukan konstitusi. Mereka akan memerintah selama enam bulan, sampai pemilu digelar.

Media melaporkan bahwa satu dari lima orang Mesir hidup di bawah garis kemiskinan, sementara itu, inflasi yang mencapai 12% telah memerosotkan nilai pendapatan rakyat secara drastis, di tengah makin tidak terjangkau biaya pendidikan, kebutuhan pokok, dan kesehatan.

Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana masa depan politik dan ekonomi Mesir setelah Mubarak? Dengan diserahkan kekuasaan transisi kepada pihak militer, tidak diragukan bahwa militer akan terus menempati kedudukan yang sentral dalam perpolitikan Mesir.

Kita melihat, sistem politik yang baru tidak akan mengubah keseluruhan fundamen sosial-ekonomi yang selama ini mendudukkan militer dalam posisi yang sangat diuntungkan.

Lalu, setelah pesta kejatuhan Mubarak berlalu, akan terwujudkah mimpi-mimpi yang menghiasi benak para demonstran tentang sebuah 'Mesir Baru'? Ketika kebebasan politik tidak lagi dirasakan sebagai barang mewah kelak, akankah keadilan dan pemerataan kemakmuran dapat diwujudkan di semua lini masyarakat Mesir?

Pengalaman di Indonesia pasca-Soeharto, ternyata kehidupan rakyat tetap terpuruk, korupsi tetap menggila dan kemiskinan meluas. Sebagian kalangan, khususnya rakyat jelata, yang makin tidak tertarik untuk berdiskusi tentang demokrasi, kini bahkan dengan tanpa ragu menilai bahwa zaman Soeharto lebih enak dibandingkan 'zaman reformasi'.

Ukuran mereka sederhana sekali, mencari pekerjaan tidak susah, harga pangan dan biaya pendidikan terjangkau, dan kerukunan antarwarga masyarakat lebih terjaga,

Kini rakyat Mesir bertaruh dan berlaga kembali untuk mewujudkan keadilan social dan kesejahteraan umum. Di Indonesia, kenangan menjatuhkan Soeharto mungkin masih menyisakan romantisme bagi para Aktivistis '98 yang kini mulai banyak menduduki posisi penting di legislatif maupun di pusat kekuasaan eksekutif.

Namun, bagi para aktivis yang berada di luar 'pagar kekuasaan', apalagi yang setiap hari merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat bawah secara langsung, kenangan itu mungkin menjadi sedikit pahit ketika melihat fakta tentang 'Indonesia Baru' yang penuh warna.

Termasuk warna kebohongan yang lebih menonjol ketimbang warna kejujuran dan keadilan. Barangkali hal ini juga akan terjadi Mesir sebagai tragedy dan sekaligus komedi politik duniawi

Dari sebuah layar televisi, kita di Indonesia melihat perkembangan baru demonstrasi besar-besaran di negeri Mesir. Setelah dikepung demonstran selama 18 hari, sang diktator Hosni Mubarak akhirnya 'lengser keprabon'. Orang nomor satu Mesir ini mundur pada Jumat, (11/2/2011) sekitar pukul 18.00 waktu Kairo.

Puluhan ribu bahkan jutaan rakyat negeri seribu menara tumpah ruah di jalanan. Mereka menyambut dengan suka cita tumbanganya penguasa yang sudah 30 tahun menganggangi negeri Cleoptra. Pendek kata, mereka menyambut datangnya hari baru bernama demokrasi.

Memang proses demokratisasi cukup berat. Tak semudah membalik telapak tangan. Rakyat Mesir saja dalam waktu 18 hari melakukan demonstrasi sudah menelan 200 lebih nyawa anak manusia. Mereka menjadi martir dalam

proses itu. Namun perjuangan belum selesai. Parameter demokrasi bukan hanya ditandai dengan mundurnya seorang diktator.

Demokratisasi adalah jalan atau proses perubahan dari rezim non demokratis menjadi demokratis. Secara umum demokratis mencakup beberapa proses atau tahapan rumit tetapi saling berkaitan dari liberalisasi, transisi, instalasi, dan konsolidasi.

Liberalisasi adalah proses pengaktifan hak-hak politik yang melindungi individu dan kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. Sedangkan transisi bisa diartikan sebagai titik awal atau selang waktu antara rezim otoritarian dengan rezim demokratis. Titik itulah yang relatif rawan. Pasalnya, transisi tidak mesti berakhir dengan demokrasi. Tapi bisa sebaliknya, transisi justru bisa menciptakan otoritarian baru. Hal itu biasanya ditandainya dengan naiknya kembali kekuatan lama tapi menggunakan 'baju' baru.

Agar kondisi itu tidak terjadi, maka suatu keharusan dalam masa transisi tersebut, ada penghancuran terhadap sisa-sisa kekuatan lama. Memang, biasanya ada perombakan dalam sistem politik (parlemen, kepartaian, hubungan pusat dan daerah, dan lain-lain) tetapi semua itu masih menjadikan sisa-sisa kekuatan lama sebagai aktor utamanya. Jika kekuatan lama itu masih bercokol, transisi demokrasi telah mengalami pembajakan. Hal itu secara otomatis bermuara pada demokrasi mati suri. Sekali lagi, titik inilah yang harus diwaspadai.

Untuk itu, negeri Mesir tidak ada salahnya berkaca pada Indonesia. Wacana transisi demokrasi di Indonesia mulai santer bergulir pasca reformasi 1998. Perjuangan rakyat dan

mahasiswa sanggup membuka ruang demokrasi dengan menjatuhkan kediktatoran Orde Baru.

Hanya saja, transisi demokrasi di Indoneisa berjalan seperti siput. Mengapa? Pertama, tidak ada penghancuran terhadap sisa-sisa kekuatan lama. Selain itu juga masih kuatnya cengkeraman militer di bidang politik. Padahal kekuatan tentara merupakan institusi yang sangat anti demokrasi. Pertanyaannya: Biskaah demokrasi Mesir tidak terkubur lagi di padang pasir. *Vox Populi Vox Dei?*²⁷

Penegakan hukum di Indonesia sebaiknya belajar dari Mesir yang mampu menghadirkan Husni Mubarak dalam sidang pengadilan. Meski mantan presiden Mesir itu sedang sakit. Artinya di sana tidak ada yang kebal hukum, termasuk mantan Kepala Negara seperti Mubarak. Mubarak dibawa ke pengadilan dengan kasur-kasurnya. Didakwa berlapis-lapis, membunuh 840 demonstran. Ancamannya hukuman mati atau seumur hidup. Di bidang ekonomi, pasca revolusi rakyat Mesir sudah menolak bantuan IMF. Penolakan tersebut sangat mengejutkan lantaran kaum muda revolusioner yang menggulingkan Mubarak kebanyakan lulusan dari universitas luar negeri di Eropa dan AS.

Pasca revolusi memang ada keterlibatan asing. Dua bulan lalu IMF menyodorkan pinjaman tetapi ditolak. Mereka bilang 'Kami sudah 30 tahun menjadi boneka Barat, tidak mau lagi menjadi boneka Barat'. Yang menolak adalah lulusan Amerika.²⁸

²⁷ Yusuf Wibisono, Mesir Perlu Berkaca pada Reformasi Indonesia. beritajatim.com, Sabtu, 12 Februari 2011 diakses pukul 02:43:37 WIB

²⁸ Pandangan Suhaeri Misrawi, dan pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad disampaikan dalam diskusi '*Pengadilan Hosni Mubarak, Pelajaran Bagi Indonesia*' di Rumah Perubahan, Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2011).

Revolusi Mesir belajar dari kegagalan reformasi 1998 di Indonesia. Saat itu, Soeharto jatuh namun bebas dari pengadilan. Mesir belajar dari Reformasi 1998 yang dianggap gagal. Tidak ada rule of law, dalam hal penegakan hukum. Yang ada kontinuitas kekuasaan. Soeharto sudah mundur tetapi anak-anaknya masih ada, partainya masih ada. Mereka (Mesir) percaya, hukum akan melampaui politik. Mesir terus belajar dari Indonesia tentang reformasi demokrasi pascaterjadinya revolusi Mesir beberapa waktu yang lalu. Mesir melihat ada kesamaan proses demokrasi di Indonesia dengan Mesir yakni antara Islam, demokrasi, modernisasi serta pembangunan.²⁹

Indonesia memiliki kelebihan antara lain dalam menghadapi keragaman umat beragama. Mesir menggali pengalaman dari negara-negara yang memiliki pengalaman serupa, selain Indonesia dia juga belajar dari Spanyol dan Brazil, serta Afrika Selatan. Dari belajar dari negara lain tersebut, Mesir akan melihat mana yang lebih relevan dan tidak mengulang kesalahan yang terjadi dalam reformasi demokrasi di negara lain. Menurut Fachir, mereka juga melihat antusiasme masyarakat Indonesia tentang demokrasi. Mesir memosisikan diri dengan revolusi Mesir, sedangkan Indonesia melalui reformasi demokrasi. Perbedaan tersebut baru disadari oleh Mesir, apalagi saat ini negara tersebut mempersiapkan Pemilu pada September mendatang. “Apakah partai politik Mesir dan rakyatnya sudah siap?

Mesir pasca Mubarak menunjukkan bahwa baik kaum nasionalis sekuler maupun golongan Islamis (Ikhwanul Muslimin) nampaknya mencoba mencari jalan tengah yang

²⁹ Pandangan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Mesir, AM Fachir di sela-sela seminar dengan tema Gerakan Rakyat untuk Perubahan Perkembangan Politik Domestik Mesir, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (15/6).

dapat menghasilkan bentuk unik Islam, liberalisme dan, mungkin, demokrasi.

Dalam prediksi akademisnya mengenai Mesir pasca Mubarak, Bruce Rutherford melihat pertarungan politik dan ideologi yang membentuk Mesir akan terus berlangsung. Ia juga menelaah prospek bagi demokrasi di seluruh wilayah negeri Firaun itu dan ia berpendapat bahwa kaum sekuler dan Islamis bakal berkonvergensi sekitar agenda reformasi yang mendukung unsur-unsur kunci dari liberalisme, termasuk pengaturan atas kekuasaan negara, aturan hukum, dan perlindungan hak-hak sipil dan politik. Akankah Mesir memilih demokrasi? Dan apa yang bisa Amerika Serikat/Barat lakukan untuk melihat demokrasi bersemi di negeri itu? Dalam memprediksi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Rutherford menunjukkan bahwa kaum reformis Mesir enggan untuk memperluas peran publik dalam politik. Hal ini menunjukkan bahwa, sementara liberalisme cenderung mengarah pada kemajuan di masa depan, demokrasi mungkin sekali berjalan lambat dan tidak merata di Mesir.³⁰

Tidak ada sebab yang tunggal yang menyebabkan kemungkinan demokrasi berjalan lambat di Mesir, sehingga betapa pentingnya dukungan masyarakat internasional bagi rakyat Mesir dalam melangkah ke depan pasca Mubarak. Lantas, akankah Mesir merangkul liberalisme Barat dan demokrasi? Ataukah Mesir dan negara Arab lainnya akan menganut Teokrasi Islam mirip dengan Iran pasca jatuhnya Mubarak?³¹

³⁰ Bruce K. Rutherford, *Egypt after Mubarak: Liberalism, Islam, and Democracy in the Arab World*, Princeton University Press, 2008.

³¹ Mengenai perdebatan dan persaingan Demokrasi Barat dan Teokrasi Iran di Timur Tengah, lihat artikel Herdi Sahrasad, "Pergolakan Timur Tengah: Teokrasi Iran vs Demokrasi Liberal Barat", opini, harian *Jawa Pos*, 16 February

Tulisan ini mencoba meraba tegangan antara masyarakat sipil (rakyat) dan militer dalam revolusi Mesir yang akhirnya berhasil menumbangkan otokrasi Mubarak seraya mencoba menjawab pertanyaan di atas.

Setelah Presiden Hosni Mubarak jatuh, militer Mesir menghadapi tantangan serius bagaimana mereka menstranformasikan diri menjadi organisasi militer yang profesional dan efektif untuk menjaga stabilitas, dan ketertiban pemerintahan ke depan di tengah dinamika Timur Tengah yang penuh tegangan, konflik dan kekerasan. Meminjam perspektif Steven Cook, posisi militer Mesir berada dalam posisi canggung dan situasi yang sulit di tengah transisi demokrasi pasca Mubarak: *The Egyptian high command now finds itself in an awkward position...How the military—an organization devoted to stability, order, and the status quo—responds to these challenges will be decisive in shaping Egypt's future trajectory.* ³²

Sebagaimana kita ketahui, Mesir terkena efek domino dari jatuhnya Presiden Tunisia, Zine al-Abidine Ben Ali. Sebenarnya, Majalah Foreign Policy dalam laporannya (26/1/11) telah membahas kondisi lima negara Arab yang diperkirakan akan menghadapi gelombang protes masif pasca tumbangya rezim diktator Tunisia pimpinan Zine Al-Abidine Ben Ali. Mesir, Aljazair, Libya, dan Jordania merupakan lima negara yang dinilai sangat rentan terhadap protes rakyatnya dan terancam runtuh. Dan ternyata bahwa Mesirlah yang guncang pertama akibat gejolak Tunisia. Foreign Policy menganalisa kondisi sosial-ekonomi dan

2011. Herdi Sahrasad melakukan perjalanan ke Mesir, Israel, Palestina, Yordania dan Irak tahun 1990-an sebagai jurnalis harian *Media Indonesia*, menyusul pecahnya Perang Telu akibat serangan Irak ke Kuwait.

³² Steven A.Cook, "Egyptian Military's Moment of Truth", dipublikasikan situs *Council on Foreign Relations*, diakses pada www.cfr.org, February 14, 2011, pukul.22.00.

politik menggiring Mesir menuju jurang sama yang dihadapi rezim Ben Ali di Tunisia.³³

Kekuasaan Mubarak Terlalu Lama

Selama tiga dekade rezim Hosni Mubarak berkuasa di Mesir, dimana seluruh undang-undang terkait kondisi darurat negara ini memberikan keleluasaan kepada Mubarak untuk mengotak-atik pelaksanaan pemilu secara arbitrer.

Secara perlahan tapi pasti, rezim Mubarak terus merosot. Firaun berusia 82 tahun itu menghadapi berbagai masalah kesehatan. Di sisi lain, persaingan antara Gamal Mubarak, putra Presiden Mesir, dan Omar Sulaiman, Ketua Dinas Rahasia Mesir, juga semakin menguat.

Akan tetapi kondisi beberapa tahun terakhir ini sangat tidak menguntungkan bagi rezim berkuasa. Masalah keadilan sosial, pengangguran, dan kenaikan harga komoditi, lagi-lagi menjadi pemicu gelombang unjuk rasa di Mesir. Terinspirasi dari aksi bunuh diri yang di Tunisia yang memantik revolusi, Mesir bergolak.

Sesungguhnya, ketidakpuasan dan kekecewaan sudah lama melanda rakyat Mesir, terutama pada permulaan abad

³³ Gema revolusi Tunisia yang berhasil menggulingkan rezim Zine al-Abidine Ben Ali itu, ternyata sangat mempengaruhi konstalasi politik negara-negara di kawasan Arab, termasuk Mesir. Revolusi Tunisia dipicu oleh seorang mahasiswa di Tunisia yang membakar diri dan menyulut gelombang protes yang akhirnya menjatuhkan pemerintah. Mohammed Bouazizi. Mahasiswa itu, membakar diri di Kota Sidi Bouzid di Tunisia pertengahan Desember 2010 setelah polisi mencegahnya menjual sayur-sayuran tanpa izin. Dia meninggal awal Januari 2011. Tindakannya itu menjadi awal dari aksi protes kekerasan selama berminggu-minggu di segenap pelosok Tunisia terkait masalah pengangguran, korupsi dan harga makanan yang melambung. Aksi protes yang berkepanjangan ini berakhir dengan pengunduran diri dan jatuhnya Presiden Zine al-Abidine Ben Ali yang berkuasa dengan kekerasan.

21 ini. Mesir adalah negeri berpenduduk sekitar 83 juta orang dengan lahan subur di sepanjang Sungai Nil yang menjanjikan, khususnya sepanjang aliran sungai yang sering dilanda banjir karena buruknya tata kelola air di negeri itu.

Dengan jatuhnya Mubarak, Mesir masih menyisakan sederet pertanyaan. Bagaimana prospek ekonomi Mesir ke depan? Bagaimana prospek demokrasi?

Mesir, dengan Bendungan Aswan yang dibangun pada tahun 1950-an oleh Rusia, yang memberi air untuk lahan pertanian yang luas, memiliki masa depan pertanian yang prospektif. Sampai tahun 1990-an, negara ini masih swasembada gandum dan beras, malah bahan pangan pokok diekspor untuk negara-negara Timur Tengah. Bahkan Indonesia pernah mengimpor beras dan gandum dari Mesir pada tahun 1980-an.

Mesir juga memiliki sumber daya minyak walaupun tidak sebanyak Arab Saudi atau Kuwait. Produksi tertinggi dicapai pada 1996 dengan volume 900.000 barrel per hari. Sejalan dengan naiknya harga minyak setelah tahun 1970-an, hasil minyak tersebut dipakai untuk menyubsidi harga pangan untuk rakyat yang cukup besar. Akibatnya, rakyat juga tidak terdorong untuk meningkatkan produksi pangan sehingga produksi pangan terus menurun dan sekarang Mesir sangat bergantung pada impor gandum dari Amerika dan Australia serta beras dari Thailand dan Vietnam.

Di lain pihak, produksi minyak yang mencapai puncaknya pada tahun 2006 menurun sampai 600.000 barrel per hari pada tahun lalu. Jumlah ini tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dalam negeri Mesir sehingga subsidi bahan bakar minyak pun meningkat dengan tajam. Pendapatan per kapita Mesir hampir sama dengan Indonesia, yaitu 3.000 dollar Amerika Serikat (AS) per tahun. Pada tahun 2010 inflasi Mesir mencapai 13,4 persen dan berakibat terhadap menurunnya kemampuan keuangan negara untuk

reformasi ekonomi dan pada saat yang bersamaan, yaitu harga pangan dunia yang naik bersamaan dengan produksi minyak yang menurun dengan harga tinggi. Akibatnya, Mesir menghadapi subsidi double untuk pangan dan minyak yang tinggi dengan akibat lebih lanjut defisit sebesar 8 persen dari produk domestik bruto.³⁴

Dewasa ini, menyusul tumbangya Mubarak, Mesir terus menghadapi masalah pangan sebab 40 persen kebutuhan pangan diimpor, dan Kairo sangat rentan pada gejolak harga pangan dunia.

Krisis politik Mesir telah menjungkalkan perekonomian negeri itu ke jurang terdalam. Yasser Khalil, analis Timur Tengah berhujah, warga Mesir sudah muak dengan berbagai masalah yang selalu mereka hadapi selama beberapa dasawarsa: korupsi kronis dan suap yang melumpuhkan sistem hukum dan upaya penegakannya; jurang kaya-miskin yang akut, kemiskinan yang diderita lebih 30 persen penduduknya; tingkat pengangguran 10 persen yang hampir konstan; dan sistem pendidikan yang buruk hingga yang berdampak pada tingkat buta huruf sampai 27 persen.

Di bawah kebijakan ekonomi liberal yang diterapkan Mubarak, ekonomi Mesir mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di bidang real estat. Akan tetapi, seperti juga di Indonesia, buah pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati golongan tertentu di Mesir, yakni orang-

³⁴ M Jusuf Kalla, *Mesir: Pangan, Minyak, Revolusi* (opini, Kompas, 4 Februari, 2011) Sepekan setelah Mubarak mundur, Mesir berencana menjual surat berharga senilai US\$1,1 miliar atau 6,5 miliar pound Mesir setelah pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak. Departemen Keuangan akan menawarkan 3 miliar pounds dari 91 hari tagihan dan 3,5 miliar pounds Mesir dengan catatan 266 hari. Pemerintah meningkatkan 3,5 miliar pound Mesir dari penjualan tagihan 182 hari pada 10 Februari, membayar hasil tertinggi dalam lebih dari dua tahun. Bursa saham pun ditutup sejak akhir perdagangan pada 27 Januari. Pembukaan bursa saham kembali ditunda hingga 16 Februari. (*Bloomberg*, Minggu 13/2/11).

orang di lingkaran dalam Mubarak dan NDP (Partai Demokrasi Nasional). Kelompok-kelompok oposisi mengatakan, kartel bisnis NDP menggunakan kekuasaan mereka untuk memonopoli kemakmuran negara, sementara sebagian besar rakyat masih hidup miskin. Laporan mengungkapkan, sekitar 40 persen dari total 83 juta rakyat Mesir hidup dengan penghasilan di bawah 2 dollar AS (Rp 17.800) per hari.

Revolusi Rakyat

Sebelum revolusi rakyat yang dimulai 25 Januari, masyarakat Mesir, sebagaimana bagian integral Dunia Arab mengalami frustrasi sosial dan kesenjangan generasi (gap generation) yang tajam. Sekitar 40 persen kaum mudanya menganggur atau bekerja paruh waktu karena generasi tua yang terus berkuasa. Hosni Mubarak dan konco-konconya, sekedar ilustrasi, sudah 30 tahun lebih berkuasa, yang membuat kaum muda Mesir disilusi, frustrasi dan kecewa.

Menyusul revolusi rakyat 25 Januari sampai pertengahan Februari 2011, Mesir menghadapi krisis politik berbarengan krisis ekonomi yang menelan biaya sekitar US\$30 milyar per hari. Ekonomi Mesir lumpuh akibat sikap kepala batu Mubarak yang angkuh. Mesir mengalami gejolak sosial-politik yang mengakhiri kekuasaan Presiden Hosni Mubarak.

Masyarakat kawasan Timur Tengah maupun dunia internasional menyaksikan gejolak social-politik di Mesir itu, dimana ratusan orang tewas dan sekitar 2000 orang luka-luka akibat bentrokan antara kaum demonstran dan polisi yang didukung loyalis rezim Mubarak. Meski jumlah korban tidak sebesar jumlah korban pada revolusi Iran 1979 yang mencapai satu juta jiwa, atau revolusi Prancis 1789 yang mencapai enam ratus lima puluh ribu jiwa, gejolak Mesir bisa disebut sebagai proses revolusi itu sendiri. Bahkan para

analisis dan akademisi kemudian menyebut gejolak ini sebagai “Revolusi Mesir”, suatu revolusi yang relatif damai, populer dan sekuler yang menumbangkan otokrasi dan membuka peluang bagi demokrasi, dan tidak ada jaminan bahwa revolusi Mesir akan berubah untuk yang terbaik, satu-satunya hal yang pasti bahwa otokrasi telah menyebabkan kemunduran dan kemerosotan dan penjamin terbaik bagi stabilitas ke depan adalah demokrasi, seperti yang ditulis *The Economist* di bawah ini:

*Revolutions do not have to be like those in France in 1789, Russia in 1917 or Iran in 1979. The protests sweeping the Middle East have more in common with the popular colour revolutions that changed the world map in the late 20th century: peaceful, popular and secular... There is no guarantee that Egypt's revolution will turn out for the best. The only certainty is that autocracy leads to upheaval, and the best guarantor of stability is democracy.*³⁵

Terlepas dari tepat atau tidaknya istilah revolusi ini digunakan, jika dilihat dari makna generik revolusi itu sendiri, seperti yang pernah dikemukakan Theda Skocpol seorang sosiolog Amerika dalam bukunya “States and Social Revolution: A Comparative Analysis of France, Rusia, and China”, revolusi merupakan perubahan yang cepat dan mendasar dari masyarakat dan struktur kelas dalam sebuah negara. Jika makna generik ini kita tarik, maka bukan tanpa alasan gejolak yang terjadi di Mesir tersebut bisa disebut sebagai sebuah proses revolusi. Apalagi, eses dari revolusi itu sendiri perubahan dengan kekerasan yang melibatkan korban nyawa. Korban nyawa dalam “Revolusi Mesir” sendiri telah mencapai ratusan orang tewas dan lebih 2000 orang luka-luka. Angka itu memang jauh lebih kecil

³⁵ Majalah *The Economist*, edisi 3 Februari 2011.

dibandingkan Revolusi Islam di Iran dimana ribuan orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka. Revolusi Mesir ini berhasil menyita perhatian masyarakat dunia. Bukan hanya para demonstran, banyak negara luar yang mengecam pemerintahan Husein Mubarak, mendesaknya mundur.³⁶

Pandangan Skocpol ini parallel dengan Tilly yang menekankan bahwa, revolusi dan kekerasan cenderung secara langsung dari pusat proses politik, dan karena itu, sebetulnya kekerasan politik adalah akibat dari persaingan perebutan kekuasaan. Bagi Tilly, revolusi adalah kasus khusus dimana kelompok-kelompok berebut kekuasaan tertinggi dan para penentang berhasil menggantikan penguasa.

Secara teoritis, demikian Tilly, beberapa penyebab situasi revolusioner adalah: Kecenderungan pengalihan sumber daya dari beberapa kelompok masyarakat kepada kelompok lain; Kedua, perkembangbiakan ideologi revolusioner dan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat; ketiga, munculnya kelompok penentang revolusioner dalam memperebutkan kedaulatan. Keberhasilan tergantung

³⁶ Theda Skocpol, *States and Social Revolution: A Comparative Analysis of France, Russia, and China* (New York: Cambridge University Press, 1999). Theda Skocpol mendefinisikan Revolusi Sosial sebagai perubahan yang cepat dan mendasar dari masyarakat dan struktur kelas sebuah negara; dan revolusi tersebut dibarengi terjadinya pemberontakan kelas dari bawah. Bagi Skocpol, Revolusi Sosial berbeda dengan Pemberontakan. Pemberontakan bisa saja berhasil dan mengikutsertakan kelas bawah, tetapi tidak menimbulkan perubahan struktural. Dibedakan juga dengan Revolusi Politik yang mengubah struktur Negara tetapi tidak struktur sosial dan tidak perlu dengan perjuangan kelas. Sedangkan perubahan lain misalnya industrialisasi, memang merubah struktur sosial masyarakat tetapi tidak melalui sebuah pergolakan politik. Dengan demikian, Skocpol tiba pada keunikan dan definisinya sendiri tentang Revolusi Sosial yang dicirikan oleh: perubahan struktur sosial maupun struktur politik secara mendasar dan berlangsung secara bersamaan dan saling memperkuat. Perubahan ini, menurut Skocpol, berlangsung melalui konflik sosial-politik yang kuat dan dalamnya perjuangan kelas memainkan peranan yang sangat penting.

besarnya kekuatan dari koalisi para kelompok penentang yang revolusioner.³⁷

Sumber utama gejolak Mesir berawal dari resistensi rakyat terhadap rezim Mubarak yang telah berkuasa selama tiga puluh tahun. Ironisnya, Mubarak justru menolak untuk mundur, dan dengan yakinnya melemparkan wacana bahwa kemundurannya akan mengakibatkan situasi menjadi lebih parah lagi. Sambil menyebut-nyebut Ikhwanul Muslimin sebagai otak di balik gejolak Mesir, Mubarak menekankan bahwa kemundurannya akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang telah dikecam di Mesir selama ini. Namun rakyat Mesir tidak percaya kepada kata-kata Mubarak dan terus berdemonstrasi melakukan pergantian rezim, menumbangkan Mubarak melalui jalan revolusi rakyat, *people power*.

Mesir relatif lekat dengan pergantian rezim melalui revolusi. Mesir modern dimulai dengan pemerintahan Muhammad 'Ali (1805-1848). Inggris menduduki Mesir pada 1882. Sejak itu, Mesir kehilangan kemerdekaannya. Selanjutnya, antara 1914-1922 Mesir menjadi Protektorat Inggris dan baru merdeka pada tanggal 28 Pebruari 1922 dan mengambil bentuk Monarki Konstitusional di bawah Faruq. Pada tanggal 23 Juli 1952 terjadi Revolusi yang dipimpin oleh Muhammad Najib. Mesir kemudian menjadi Republik pada 18 Juni 1953 dengan Najib sebagai Presiden dan Perdana Menteri. Selanjutnya Gamal Abdul Nasser menyingkirkan Najib pada 1954 dan terpilih sebagai Presiden pada 1958. Nasser meninggal pada 1970 dan digantikan oleh wakilnya

³⁷ Charles Tilly., *From Mobilization to Revolution* (Reading Mass: Addison Wesley, 1978) hlm. 9. Dalam hal kejatuhan Mubarak, prediksi Prof. Fouad Ajami, pakar Timur Tengah dan akademisi di Johns Hopkins School of Advanced International Studies, bahwa Mesir tidak memiliki tradisi membunuh para firauannya (*The Wall Street Journal*, 31/1/11) terbukti sudah kebenarannya. Kaum revolusioner terbukti tidak membunuh Mubarak, dan lebih mendesakkan pentingnya pengadilan atas Mubarak dan kroni-kroninya.

Anwar al-Sadat. Namun Presiden Sadat terbunuh pada 6 Oktober 1981 dan selanjutnya digantikan oleh wakilnya Hosni Mubarak. Sejak saat itu Mubarak memimpin Mesir sendirian. Setelah 30 tahun memerintah, di tengah desakan mundur dari jutaan warga Mesir, Mubarak menunjuk Sulaeman sebagai Wakil Presiden, namun upayanya ditolak rakyat Mesir dan gagal. Gerakan revolusi rakyat mengakhiri Mubarak dengan gegap gempita.³⁸

Revolusi di Mesir berlangsung luar biasa, namun bukan revolusi Islam oleh Ikhwanul Muslimin, melainkan oleh gerakan intelektual, mahasiswa dan rakyat yang muak terhadap korupsi, kebohongan dan ketidakadilan.³⁹

Gerakan yang dimotori kaum muda dan intelektual di kawasan Timur Tengah itu lahir karena KKN, ketidakadilan dan kemiskinan yang luar biasa. Kondisi ini diperparah dengan naiknya harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam akibat kenaikan harga pangan dunia. Karena bukan revolusi ideologis yang berwatak Revolusi Islam, yang

³⁸ Sabar Sitanggang MS, Demokratisasi ala Mesir: Membaca Ulang Ibnu Khaldun, diakses pada www.rimanews.com, Senin, 21 Feb 2011 06:28 WIB, Sitanggang mahasiswa PhD di program pasca sarjana Universitas Indonesia.

³⁹ Steven A. Cook, pakar Timur Tengah di Council on Foreign Relations, USA dan Ketua program pasca-sarjana Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia Prof Dr Zainuddin Djafar, sependapat bahwa revolusi di Mesir, Tunisia dan lainnya bukan revolusi ideologi seperti di Iran. Cook dan Djafar menilai, Mesir merupakan contoh terbaik dari berbagai pengaruh kompleks Islam pada perkembangan sosial politik. Sejak beberapa dasawarsa, Islam merupakan bagian dari arena politik, yang dipergunakan baik oleh pemerintah maupun oposisi. Namun dalam revolusi Mesir kali ini, rakyat Mesir tidak menggemakan Revolusi Islam melainkan seruan revolusi populer dan sekuler. . Mengenai pandangan Steven A Cook, bisa dibaca pada esainya " *The U.S.-Egyptian Breakup* " dipublikasikan situs Council on Foreign Relations, USA, diakses www.cfr.org 23/2/11 pukul.22.30.Pandangan Dr Zainuddin Djafar, disampaikan pada Okezone, diakses www.okezone.com, 23/2/11 pukul 20.00.

sempat menjadi kekhawatiran Barat dan banyak orang, maka perubahan di Mesir tidak seradikal di Iran sehingga Presiden Hosni Mubarak masih bisa berkelit dan *'buying time'*, menunda kejatuhannya melalui transisi politik, meski korban berjatuhan.

Militer dan Kekuasaan di Mesir

Pakar militer Salim Said mencatat, tentara Mesir memasuki dan menjadi pemain politik menentukan sejak 1951 tatkala mereka menggulingkan Raja Faruk. Perwira pertama yang jadi penguasa Mesir adalah Jenderal Naguib. Namun, dalam waktu singkat Naguib dimakzulkan Gamal Abdel Nasser, kolonel yang sebenarnya memimpin penggulingan dan pengusiran Raja Faruk. Nasser bisa bertahan di kursi kepresidenan karena ia didukung dan menguasai tentara. Anwar Sadat yang kemudian menggantikan Nasser juga didukung dan menguasai tentara. Hal yang sama merupakan pengalaman Mubarak. Ketika berkuasa, langkah pertama yang Mubarak mereka lakukan adalah menjadikan tentara sebagai penguasa (ruler) yang tidak memerintah (governing). Tentara disiahi tangsi tempat mereka bermukim dengan segala fasilitas dan kemudahan dari pemerintah yang didukung.⁴⁰

Untuk menjaga langgengnya kekuasaan sembari membungkam lawan-lawan politiknya, Mubarak menciptakan jaringan aparat keamanan yang terdiri dari polisi rahasia serta intelijen (muhabarat) yang mengawasi semua kegiatan masyarakat, terutama mereka yang dicurigai bisa menjadi ancaman bagi kekuasaan. Tentara tidak jadi sasaran demonstrasi karena yang dimusuhi para demonstran adalah polisi, polisi rahasia, dan muhabarat. Ketiganya adalah alat

⁴⁰ Salim Said, "Demokratisasi Mesir di Tangan Militer Mungkinkah?", Opini, *Kompas*, 18/2/2011).

penindas rakyat yang digunakan Mubarak .Tentara menghindari dari kegiatan pengamanan rezim Mubarak. Inilah yang menjelaskan mengapa mereka selalu mampu tampil bersih, bahkan simpatik, di mata para pengunjung rasa yang menyerang dan "menggulingkan" Mubarak. ⁴¹

Sejak revolusi rakyat di Mesir yang mulai bergerak 25 Januari sampai pertengahan Februari 2011, dunia mencermati posisi, sikap dan kebijakan militer Mesir, sampai dimana dan hendak kemana kekuatan bersenjata negeri Firaun itu mengarahkan visi-misinya.

Di Mesir pada era Nasser sampai Mubarak, militer memiliki peran yang luas di berbagai perusahaan komersial, besar dan kecil, sebagaimana Steven Cook mencatat bahwa hubungan antara militer dan presiden amatlah erat, serta menguasai lebih dari 30 persen ekonomi dan hasil industri Mesir.⁴² Padahal, sebagaimana dicatat Kristina Mani, keterlibatan militer (Mesir) dalam ekonomi nasional membuat militer kurang akuntabel dan kurang bertanggung jawab kepada masyarakat. ⁴³

Tatkala gejolak revolusi rakyat Mesir bergelora mendesak Mubarak mundur, para analis politik Timur Tengah merasa jengah melihat kelakuan militer yang seperti Sphinx itu. Berbagai pertanyaan analis pun dilontarkan: Apakah militer terlibat dalam kebrutalan polisi? Apakah bijaksana dalam menghadapi situasi yang bergolak? Apakah terjadi perpecahan di level atas struktur komandonya? Atau apakah hanya menanti waktu (untuk bertindak)?

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Steven Cook, *Ruling but not Governing: the Military and Political Development in Egypt, Algeria, Turkey.* (Baltimore: John Hopkins University Press, 2007).

⁴³ Kristina Mani, "Militaries in Business," (*Armed Forces and Society* 33, no. 4, July 2007).

“Banyaknya pertanyaan berarti ada banyak hal yang bermain dalam sistem dan militer,” kata seorang diplomat Barat di Kairo. ⁴⁴

Ketika demonstrasi terus berlangsung di Lapangan Tahrir, Kairo, terdapat analisis mengenai tiga skenario yang kemungkinan diambil militer Mesir. Pertama, militer mengambil alih kekuasaan langsung yang sekarang secara *de facto* sudah berada di tangan mereka.

Kedua, militer meminta Mubarak mundur untuk membuka jalan ke arah demokrasi di Mesir dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan transisi sipil, seperti yang terjadi di Tunisia saat ini.

Ketiga, militer mempertahankan rezim Mubarak dengan transaksi politik tertentu seperti Mubarak harus membuka keran demokrasi dan memenuhi tuntutan rakyat, seperti reformasi sosial dan ekonomi untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Mubarak juga diminta tidak mencalonkan lagi dalam pemilu presiden di Mesir pada September tahun ini. Mubarak juga diminta tidak mewariskan kekuasaan kepada putranya, Gamal Mubarak.

Kalau kita periksa, dalam aksi revolusi Mesir, militer berhasil mengamankan tempat-tempat strategis di Mesir, dan ternyata mengambil sikap politik kedua yakni menekan agar Mubarak mundur. Kendali kekuasaan kemudian diambil alih oleh Dewan Tertinggi Militer. Dengan mundurnya Mubarak, perubahan di Mesir sudah tidak bisa dihindari lagi. Semua analisis yang memberi komentar di televisi Mesir sangat sepakat, reformasi politik dan ekonomi harus segera dilakukan.

Bahkan, ada yang meminta digelar pemilu baru yang bebas dan transparan di Mesir. Masyarakat internasional

⁴⁴ Laporan kantor berita *AFP*, 4/2/2011.

pun, seperti Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, mengatakan, Mesir segera melakukan reformasi politik dan ekonomi. Itulah realita baru yang dihadapi Dewan Tertinggi Militer pada transisi demokrasi saat ini.

Peran militer memang menentukan dalam kasus kejatuhan Mubarak. Keterlibatan militer sangat dominan dalam pemerintahan Mesir, dimana sejak era Nasser sampai Mubarak, 33 persen anggota kabinet berasal dari militer, sementara jabatan-jabatan sipil dan instansi penting lainnya yang dianggap strategis juga diduduki kalangan berlatar belakang militer. Pengadilan militer telah secara “keji” menjebloskan 1033 orang sipil ke penjara antara 1992 dan 2000, dimana 92 persen di antaranya dihukum mati. Sementara 12.000 sampai 15 ribu orang dijebloskan ke penjara oleh pengadilan militer pada 2004, dan militer benar-benar menjadi pelindung rezim diktator, melayani dan memproteksi elite yang berkuasa secara membabi buta. Rezim Mubarak menjadi sangat kuat, mengalahkan masyarakatnya.⁴⁵

Selama berkuasa, mengira pilar-pilar penopang rezimnya masih cukup kokoh, Mubarak pun terlena dalam posisinya. Mubarak dan militer membiarkan ketidakadilan, penyiksaan warga, pemberangusan pers, dan demokrasi abal-abal berjalan seperti biasa. Dan dalam menghadapi demonstran yang mencapai ratusan ribu orang sejak 25 Januari lalu, misalnya, militer secara de facto dikerahkan Mubarak mengontrol Mesir. Tank dan kendaraan lapis baja militer dalam jumlah besar bertengger di sekitar gedung-gedung strategis, seperti gedung televisi dan radio, Gedung Kementerian Luar Negeri, Museum Nasional, gedung parlemen, serta alun-alun Tahrir dan Ramses. Tank dan

⁴⁵ Jason Brownlee, *Authoritarianism in the Age of Democratization*, (Cambridge University Press; first edition, July 23, 2007).

kendaraan lapis baja militer juga ditempatkan di tempat-tempat strategis di kota Alexandria dan Suez.

Kehadiran militer secara mencolok di jalan-jalan kota Kairo, Suez, dan Alexandria itu memenuhi permintaan Presiden Hosni Mubarak agar militer ikut turun tangan bekerja sama dengan aparat keamanan dalam menghadapi para pengunjuk rasa. Peran militer itu semakin kuat setelah Presiden Mubarak mengumumkan jam malam dari pukul 18.00 hingga pukul 07.00 di seantero negeri Mesir. Sejak 25 Januari dan hari-hari selanjutnya, generasi muda Mesir, yang sebagian besar baru lahir setelah Mubarak berkuasa dan dibukakan matanya oleh teknologi telekomunikasi, memutuskan, waktunya sudah tiba bagi sang diktator untuk pergi, menyusul rekan-rekannya dari belahan dunia lain. Kaum demonstran justru mengerubuti militer dengan tank-tank dan pansernya, menghadapi pengepungan kaum reformis sipil yang sudah muak terhadap rezim militer ini.

Namun sejarah pun berulang: pengalaman Mubarak, sosok presiden tipe militer tua yang bersikap kepala batu itu, akhirnya tumbang. Fenomena Mubarak bagi militer Mesir menunjukkan secara telanjang, bagaimana jenderal gaek itu masuk gelanggang politik Mesir sebagai pahlawan dalam konstelasi politik global era Perang Dingin di Timur Tengah, lalu keluar dari ranah politik Mesir di era pasca Perang Dingin sebagai pecundang yang digulingkan "*people power*".

Yang harus digarisbawahi, militer Mesir kini bisa bercermin kembali bahwa pada masa kekuasaan otoriter Mubarak, organisasi militer benar-benar merupakan alat kekuasaan yang mati dimana Mubarak dan militer memerintah dengan tangan besi tetapi menikmati dukungan penuh negara-negara kampiun demokrasi dan penegak HAM dari AS/Barat. Mubarak memberangus partai-partai politik dan mengurangi perwakilan independen di parlemen, dan sebaliknya memperkuat cengkeraman militer ke dalam

kehidupan politik meski dilakukan secara ‘berpura-pura’ dari belakang layar, *behind the scene*.⁴⁶

Di bawah Hosni Mubarak, militer Mesir mendukung pemerintahan otoriter. Namun dalam aksi revolusi Mesir di Lapangan Tahrir, militer menegaskan tidak akan menembak demonstran, suatu langkah klasik dari tipe “militer sebagai institusi”. Sebaliknya, keputusan, sikap dan posisi militer yang membiarkan kaum loyalis Mubarak merangsek maju ke Lapangan Tahrir dan bersikap brutal dengan mengendarai kuda atau onta, melabrak, menembak dan melindas para demonstran hingga ratusan pendemo tewas, merefleksikan manuver klasik “militer sebagai alat pemerintah”, “militer sebagai alat kekuasaan”.

Pada poin ini, demonstran Mesir melihat ada peluang bahwa militer bisa didesak kaum sipil reformis untuk mengawal dan melindungi kaum demonstran serta mengawal transisi demokrasi yang dikehendaki masyarakat sipil. Implementasi dari peran dan langkah “militer sebagai institusi” tergantung pada kemampuan Angkatan Darat Mesir dalam melakukan pemisahan diri dari rezim otoriter. Tentu saja keberhasilan reformis sipil dalam menyingkirkan rezim otoriter akan membangkitkan apresiasi dan posisi tawar kaum sipil dalam mendesak kepentingan mereka agar militer mengawal transisi demokrasi.

Adalah lebih baik bahwa kaum reformis di Lapangan Tahrir yang terdiri dari berbagai spektrum relatif luas: mahasiswa, Gerakan Pemuda 6 April, partai liberal, kelompok tradisional, Ikhwanul Muslimin yang Islamis, aktivis Facebook, kaum cendekiawan, pengacara, wartawan, pengusaha, dan kelas menengah lainnya, membangun sistem parlementer yang terdiri dari koalisi multi partai, ketimbang

⁴⁶ Maye Kassem, “Egyptian Politics: the Dynamics of Authoritarian Rule”, (Lynne Rienner Publishers, February 2004).

membiarkan Mesir kembali ke sistem presidensialisme yang mengalami personalisasi seperti Mubarak. Sistem parlementer akan mengakomodasikan banyak kekuatan pro perubahan untuk berhimpun sehingga mempersulit dikte dan kendali Amerika Serikat atau kepentingan asing lainnya untuk “mendominasi dan menghegemoni” istana presiden seperti kasus Mubarak. Bagi kaum pluralis dan nasionalis di Mesir, sistem parlementer jelas lebih kuat dan kenyal menghadapi “dominasi dan hegemoni AS” atau “kekuatan asing lainnya” ketimbang sistem presidensialisme tunggal seperti Mubarak yang otoriter, inkompeten dan korup.⁴⁷

Sudah tentu pasca jatuhnya Mubarak, militer Mesir tak bisa lagi mengandalkan alasan bahwa pihaknya harus dominan dan menguasai Mesir karena harus menghadapi radikalisme Islam seperti Ikhwanul Muslimin, atau gerakan Islamis radikal lainnya yang mengancam stabilitas negara. Alasan seperti sudah tidak rasional sebab Ikhwanul Muslimin dan Islam radikal lainnya sudah menegaskan mereka akan berpartisipasi dalam transisi demokrasi dan menghendaki pemilu yang demokratis dan kredibel untuk menyongsong Mesir masa depan. Sejauh ini, sosok yang akan memimpin Mesir pasca-Mubarak masih belum jelas dan belum juga menjadi perbincangan publik.

Ada beberapa tokoh yang muncul ke permukaan, seperti Mohamed ElBaradei, Amr Mousa, Omar Suleiman, Ayman Nour, dan Shami Hafez Ana. Namun semua sosok itu masih harus diuji dalam pemilu ke depan, siapa yang dikehendaki rakyat Mesir untuk memimpin agar negeri itu bangkit kembali secara ekonomi dan melangkah menuju demokrasi.

⁴⁷ Alfred Stephan dan Juan J. Linz, *Does Egypt Need A Pharaoh?*, the Jakarta Post, 10/2/11.

Militer dan Transisi Demokrasi

Para analis umumnya sependapat bahwa, menyusul jatuhnya Presiden Hosni Mubarak, peran militer Mesir akan tetap menentukan dalam perkembangan stabilitas politik dan perubahan di Mesir ke depan. Berbagai kalangan mencoba mereka-reka bagaimana dinamika militer dalam demokrasi di Mesir ke depan pasca tumbangannya Mubarak. Sepanjang sejarah Mesir pasca kolonial, militer menjadi tulang punggung yang setia dari sebuah rezim di Mesir dan militer meraih respek dari warga Mesir karena netralitas tradisionalnya selama masa perlawanan rakyat dan peranan utamanya dalam perang Arab-Israel.

Untuk sebagian, kunci arah sikap militer Mesir ke depan untuk sebagian boleh jadi berada di tangan Washington dan bantuan militer senilai 1,3 miliar dollar AS-nya yang diberikan ke Mesir setiap tahun. Jumlah bantuan itu membuat Mesir sebagai penerima bantuan luar negeri AS terbesar kedua setelah Israel. Bantuan itu telah “membentuk suatu hubungan yang kuat” antara AS dan militer Mesir. Bahkan Barat menggambarkan bantuan militer itu sebagai “sebuah investasi yang akan terbayarkan dalam jangka panjang”.

Di tengah peta politik di negeri Cleopatra yang terpecah dalam faksi-faksi itu, kekuatan militer menjadi penentu bagi stabilitas Mesir.

Pasca jatuhnya Mubarak, untuk menempatkan militer di bawah otoritas sipil, tidaklah mudah. Sejauh ini, sebagaimana kesaksian Zuhairi Misrawi yang melawat Ke Mesir ketika revolusi berlangsung, sudah mulai muncul di kalangan oposisi agar pemerintahan transisi tidak secara serta-merta diserahkan kepada militer. Diperlukan “terobosan konstitusional” agar pemerintahan transisi merupakan pemerintahan kolektif yang terdiri dari berbagai

unsur. Adapun militer hanya salah satu unsur dalam pemerintahan kolektif tersebut.⁴⁸

Kajian Steven A Cook mencatat, militer merupakan kekuatan politik penting pelindung rezim yang berkuasa di Mesir, Aljazair dan Turki, tiga negeri kaum Muslim tersebut. Dalam kasus Mesir era Presiden Hosni Mubarak, Steven Cook menyingkapkan bagaimana rezim otoriter Mesir menyandera demokrasi, membajak politik multi partai, membajak pemilu dan mengekang kebebasan pers sebagai strategi untuk mempertahankan durabilitas sistem otoriter tersebut.⁴⁹

Ironis bahwa menyusul jatuhnya Mubarak, ternyata militer kembali berkuasa di Mesir, padahal tidak berjuang dan berdarah-darah seperti demonstran sipil yang berkorban sangat besar.

Menteri Pertahanan Mohamed Hussein Tantawi merupakan Ketua Dewan Militer Mesir yang mengambilalih pemerintahan setelah pengunduran diri sang diktator Hosni Mubarak. Dewan Tertinggi Militer Mesir, yang telah dilimpahi kekuasaan oleh pemerintah Hosni Mubarak, menyatakan tidak berencana memegang kekuasaan untuk waktu yang lama setelah mundurnya Husni Mubarak. Kemungkinan, kekuasaan itu akan dilimpahkan ke rakyat. Benarkah?

Agaknya, menyadari bahwa gejolak rakyat amat besar, Dewan Tertinggi Militer menegaskan bahwa pihaknya bukanlah sebuah alternatif pemegang kekuasaan yang dapat menyenangkan hati rakyat Mesir. (New Kerala, 12/2/2011).

⁴⁸ Kesaksian Zuhairi Misrawi disampaikan kepada *Metro TV, Kompas.com dan harian Kompas* pertengahan Februari 2011.

⁴⁹ Steven A Cook, *Ruling but Not Governing, the Military and Political Development in Egypt, Algeria, and Turkey* (Johns Hopkins University. Press, 2007).

Namun Dewan Tertinggi Militer Mesir itu mengeluarkan sejumlah pernyataan menyangkut langkah dalam mengatur Mesir dalam waktu dekat.

Mohamed Hussein Tantawi lahir pada 31 Oktober 1935 dan bergabung dengan angkatan bersenjata pada tahun 1965. Tantawi yang berpangkat jenderal besar dan telah berkiprah di pemerintahan Mesir sebagai menteri pertahanan sejak tahun 1991 ini adalah panglima angkatan bersenjata sejak 1995.⁵⁰

Tantawi juga menjabat dalam tiga kali perang melawan Israel, mulai tahun 1956 dalam krisis Terusan Suez dan perang Timur Tengah pada tahun 1967 dan 1973.

Mengambil alih kekuasaan dari Presiden Hosni Mubarak pada Jumat lalu, Dewan Tertinggi Militer langsung membubarkan kabinet pimpinan Perdana Menteri Ahmed Shafiq, yang ditunjuk Presiden Mubarak dua pekan lalu setelah pengunduran diri kabinet pimpinan PM Ahmed Nazif pada 28 Januari. Selain pembubaran kabinet, Dewan Tertinggi Militer juga membekukan parlemen.

Mundurnya Presiden Mesir, Hosni Mubarak, menambah panjang daftar presiden Mesir yang tak pernah menyelesaikan masa waktu pemerintahannya. Susanna Kim, dalam laporannya di ABC News menyebutkan, Mubarak (dan kroninya) amat kaya, sebagian besar kekayaan Mubarak, yang totalnya saat ini 40-70 miliar dollar AS (Rp 357 triliun-Rp 625 triliun) diperoleh dari beberapa kontrak militer yang ia buat selama menjabat sebagai perwira tinggi di AU Mesir. (ABCNews, 2/2/11). Ironisnya, kejatuhannya oleh gerakan *civil society* justru membuat Mesir modern jatuh ke tangan militer dan kembali diperintah oleh militer.

⁵⁰ Reuters, 1/2/2011.

Dari berbagai literatur dan media, terungkap masuknya militer di panggung pemerintahan Mesir terjadi di 1952, yang dikenal sebagai Revolusi 1952. Pada 22-26 Juli 1952 militer melakukan kudeta terhadap Raja Mesir, Farouk. Aksi militer ini dipicu situasi ekonomi di Mesir yang tak kunjung membaik dan kalah perang dengan Israel pada 1948. Uni Sovyet dan Amerika Serikat ada di belakang aksi militer ini.

Letjen Muhammad Naguib menjadi Perdana Menteri Mesir sekaligus presiden. Salah satu bawahan Naguib adalah seorang perwira kharismatik bernama Gamal Abdul Nasser. Di masa 1950-an ini, para perwira militer mendeklarasikan Mesir sebagai negara republik, bukan lagi kerajaan. Namun dua tahun setelah menjadi wakil, Nasser bermanuver dan menjadi Perdana Menteri Mesir. Krisis politik kembali terjadi di Mesir, dan membuat Presiden sekaligus atasan Nasser, Muhammad Naguib tergeser dari pemerintahan dan menjadi tahanan rumah.

Nasser resmi menjadi Presiden Mesir. Sebagai wakilnya, ia menunjuk beberapa orang, termasuk rekan dekatnya Anwar Sadat. Pada 1970, Nasser terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Pemerintah langsung menaikkan Anwar Sadat sebagai pengganti Nasser, tanpa pemilu. Di tangan Sadat, secara perlahan, seorang perwira yang heroik bernama Hosni Mubarak, mendekat ke pusat kekuasaan Mesir. Pada 6 Oktober 1981, Anwar Sadat tewas dibunuh. Mengulang kasus Nasser, maka Hosni Mubarak langsung naik dari jabatan wakil presiden menjadi presiden.

Dalam kasus revolusi anti-Mubarak, militer Mesir kembali berperan. Dewan Tertinggi Militer Mesir, Kamis (10/2/11) telah bertemu dan memutuskan 'melindungi negara'. Sidang Dewan Tertinggi Militer dipimpin Menteri Pertahanan Hussein Tantawi.

Sehari sebelum Mubarak munduk, militer menggelar sidang tanpa kehadiran Mubarak sebagai panglima tertinggi.

Hal ini dinilai sebagai pertanda Mubarak mulai kehilangan kekuasaannya. Benar saja, Mubarak keesokan harinya mundur.

Kini pertanyaan muncul di benak rakyat Mesir, bagaimana nasib demokrasi di negara itu? Artinya, pasca-Mubarak, bukan berarti persoalan selesai, demikian pula dari sisi demokrasi.

Masa Depan Masyarakat Sipil

Pertanyaannya selanjutnya: menyusul ledakan revolusi Mesir yang akhirnya menggusur Mubarak, mengapa kekuasaan jatuh ke tangan militer, bukan ke tangan *civil society*? Maukah militer Mesir menempuh demokrasi?

Nampaknya, rakyat Mesir masih menaruh kepercayaan kepada militer untuk mengendalikan dan mengkonsolidasikan situasi sosial-ekonomi dan politik dalam negeri. Seperti diungkapkan Steven A Cook di atas, militer merupakan kekuatan politik penting pelindung rezim yang berkuasa dan negara di Mesir.

Militer juga ingin menarik simpati rakyat sehingga Dewan Tertinggi Militer berjanji akan mengadakan pemilu yang adil dan demokratis di Mesir. Namun, benarkah? Di sini, peran Amerika Serikat untuk mendorong militer Mesir ke arah transisi demokrasi sangatlah krusial karena bantuan militer AS kepada Mesir amatlah besar, sebagaimana bantuan ekonominya.

Dalam hal ini, Presiden AS Barack Obama sudah mengisyaratkan pentingnya demokrasi di Mesir, dengan menyatakan bahwa terlalu banyak rakyat Mesir yang tidak yakin pemerintahnya serius dalam melakukan transisi demokrasi.

Obama menekankan, pemerintah Mesir (militer) harus mendahulukan kredibilitas dan tindakan nyata menuju

demokrasi sebenarnya. Mereka bahkan belum mengambil kesempatan untuk melakukannya.

Militer Mesir menyadari bahwa perubahan iklim politik di Mesir dalam hari-hari ini berubah begitu cepat. Namun rakyat Mesir masih gamang, bagaimana pemerintahan baru mendatang bisa cepat memulihkan perekonomian dan stabilitas?

Tuntutan massa rakyat itu agar Mubarak mundur, sudah terpenuhi, namun nampaknya prospek demokrasi di Mesir belum jelas. Musim semi demokrasi di Mesir masih misteri karena militer begitu krusial dan menonjol perannya, sementara *civil society* masih fragmentatif !

Seperti halnya Indonesia, *people power* di Mesir berhasil menurunkan presiden yang telah berkuasa puluhan tahun. Di mata pemerintah AS, Indonesia pun dinilai contoh terbaik untuk transisi di Mesir. Namun tampaknya Mesir tidak mau mencontoh reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 saat rezim Soeharto tumbang.

Meski demikian, hemat penulis, untuk menunjang keberlanjutan perubahan di Mesir, ada beberapa hal krusial yang harus ditekankan agar rakyat Mesir bisa mewujudkan peran demokratisnya ke depan, seraya mengurangi dominasi militer di Mesir. Hal-hal krusial itu adalah: Dengan jatuhnya Mubarak, transisi demokrasi di Mesir menghadapi dua masalah sekaligus yang harus diselesaikan: Pertama, masalah ekonomi. Kedua masalah politik dan hukum. Pemerintah transisi Mesir harus cepat mengkonsolidasikan perekonomian nasional agar kebutuhan pokok dan kesejahteraan rakyat cepat dipulihkan. Kedua, untuk membangun pemerintahan yang kredibel dan demokratis, maka Dewan Tertinggi Militer Mesir yang berkuasa, harus mau berdialog dan bermusyawarah dengan kaum reformis dan revolusioner sipil, termasuk dengan Ikhwanul Muslimin yang dianggap radikal, dalam upaya mencapai titik temu dan

kesepakatan mengenai bagaimana membangun masa depan Mesir yang lebih baik.

Barangkali, ada relevansinya pandangan Thomas Carothers, Wakil Presiden untuk Studi di Carnegie Endowment for International Peace, yang merujuk pengalaman Indonesia sebagai skenario yang lebih mungkin untuk Mesir dibanding skenario Iran. Apalagi revolusi Mesir jelas bukan "Revolusi Islam" melainkan revolusi nasional yang demokratis. Meski jalan Mesir ke arah itu mungkin masih sulit. Tetapi ada kesamaan antara Mesir dan Indonesia yakni tradisi yang relatif sekuler, militer yang kuat yang (sejauh ini) menolak untuk menindas pengunjuk rasa, dan pemberontakan yang dipimpin oleh campuran dari mahasiswa, kaum muda dan masyarakat sipil.

Bagi rakyat Mesir, sangat penting untuk mengamandemen sejumlah pasal dalam Konstitusi Mesir, yakni Pasal 76, 77, 88, 93, dan 189, sebab-pasal-pasal itu hanya mengokohkan otoriterisme. Agar proses pergantian kekuasaan berlangsung demokratis, damai, teratur dan terukur, semua pasal itu perlu diamandemen. Pasal-pasal itu harus diamandemen sebab membuka peluang bagi penguasa melakukan pengangkatan presiden seumur hidup, juga karena menetapkan 'persyaratan sangat berat' bagi munculnya kandidat oposisi untuk pencalonan presiden; juga untuk menghapus hukum darurat yang memberdayakan dinas keamanan untuk menahan tanpa adanya dakwaan kepada mereka yang dianggap mengancam negara; juga untuk mengembalikan pengawasan peradilan pemilu, termasuk keberadaan hakim di setiap TPS, dan memastikan bahwa mesin negara (seperti televisi) berada di tangan orang netral.

Amandemen konstitusi merupakan terobosan penting agar pemulihan kebebasan politik, kebebasan berserikat-berpendapat dan kebebasan pers di Mesir akan memberdayakan kekuatan politik lebih moderat untuk

muncul, seperti di Indonesia, dengan militer membantu untuk memberikan stabilitas selama transisi sehingga reformasi di Mesir bisa berjalan simultan dan berkelanjutan

Dalam pergolakan Mesir dewasa ini, yang menjadi isu sensitif di Mesir, sebagaimana di negara-negara Muslim adalah kekhawatiran hadirnya kelompok-kelompok Islam radikal di pentas politik. Di Mesir, kelompok Ikhwanul Muslimin termasuk yang dikhawatirkan banyak orang.

Tetapi, sebagaimana diartikulasikan para analis politik, yang perlu digarisbawahi bahwa dalam kasus Mesir bisa saja terjadi seperti di Turki dan Indonesia, dimana yang mengemuka justru fenomena Muslim demokrat di mana kekuatan politik Muslim mampu memainkan peran penting dalam demokrasi. Hal ini pun bisa terjadi di Mesir tatkala instrumen-instrumen demokrasi telah tertanam kokoh, dimana keterbukaan politik mekanisme “checks and balances” terpateri, sehingga proses deradikalisasi Islam politik, misalnya, bisa terjadi dengan sendirinya. Tentu saja, dalam konteks transisi politik di Mesir, sikap dan kebijakan yang tidak diskriminatif dalam pengelolaan politik pasca-Mubarak menjadi persyaratan yang signifikan.

Oleh sebab itu, otoritas sipil Mesir di masa sekarang dan mendatang harus bersatu, mendesakkan demokrasi yang kontekstual dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat Mesir pada umumnya.

Mengenai relasi sipil-militer di Mesir ini, meminjam perspektif Samuel Huntington, maka *civil society* Mesir harus tegas mengatakan bahwa militer harus berada dalam kontrol sipil. Huntington mengingatkan kaum sipil bahwa ada empat syarat yang harus dipenuhi militer. Pertama, militer harus memiliki profesional yang tinggi berdasarkan kompetensinya. Kedua, berkoordinasi dengan politisi sipil untuk merumuskan keputusan-keputusan militer maupun kebijakan internasional. Ketiga, adanya pengakuan akan

kepemimpinan militer sebagai sebuah kekuatan yang mandiri dan independen. Syarat ini kemudian lazim didengar dengan militer harus menjadi kekuatan independen/netral, bukan kekuatan politik tertentu. Keempat, mengurangi intervensi politik militer kepada kekuatan sipil maupun intervensi politik kepada kekuatan militer.

Apabila mengacu kepada teori Huntington tentang konsep hubungan sipil-militer yang diistilahkan sebagai "objective civilian control" itu, maka hubungan militer dan sipil digambarkan sebagai berikut: tercapainya tingkat profesionalisme militer yang handal namun juga mengetahui batasan kemampuan profesional yang dimilikinya, tunduknya militer pada pimpinan sipil sebagai pembuat keputusan khususnya dalam kebijakan luar negeri dan militer (pertahanan), mengakui dan menerima kepemimpinan (sipil) dalam bidang kemampuan profesionalnya, namun dalam hal ini militer juga mempunyai otonomi, oleh karenanya, campur tangan militer menjadi minimal dalam politik namun juga militer tidak dicampuri oleh politik.

Untuk itu, kaum pembaharu dan reformis Mesir bisa memberi ruang yang cukup bagi militer untuk menjalankan pertimbangan-pertimbangan profesional, yang menjadi bidang mereka dalam batas-batas parameter kebijakan yang ditetapkan oleh sipil. Oleh karena itu, politisi sipil Mesir yang ingin memelihara pengakuan militer atas supremasi sipil harus melibatkan partisipasi substansi militer dalam membahas anggaran, strategi pertahanan dan pembahasan yang berkaitan dengan isu-isu militer lainnya. Namun, pelibatan pihak militer ini sama sekali tidak mengurangi kewenangan sipil untuk menentukan kebijakannya.

Para pembaharu Mesir harus waspada bahwa militer Mesir era Mubarak memiliki sifat yang represif dengan

sistem komando dan hierarki yang kuat. Ke depan, rakyat Mesir harus berjuang agar Mesir menjadi negara yang demokratis, dimana militer adalah alat negara yang profesional sesuai dengan bidangnya, namun dibatasi keterlibatannya dalam bidang politik. Rakyat Mesir harus memastikan bahwa politik militer adalah politik negara. Militer adalah lembaga yang sangat eksklusif, berorientasi pada korps dan aristokrasi yang berlandaskan kedisiplinan, kepatuhan dan ketaatan pada hierarki dan struktur komando.

Minimalisasi intervensi militer berarti mengurangi hal prerogatif militer dan membatasi misi profesionalnya yang ketat, dimana perhatian utamanya adalah pertahanan negara. Bagi para reformis Mesir, bisa jadi meminimalisasi intervensi militer dan peran tentara sering menciptakan situasi dilematis. Satu sisi, supremasi sipil mengharuskan pengurangan sejumlah kewenangan militer, sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan intervensi militer. Disisi lain, agar tercipta stabilitas politik, maka konflik sipil-militer di Mesir harus ditekan sekecil mungkin, mengingat mengurangi hak prerogatif militer hampir selalu melahirkan konflik.

Jika kaum politisi sipil di Mesir lemah dan tidak efektif, akan mengundang intervensi militer. Sebaliknya, jika institusi politik kuat dan elite sipil di Mesir bersatu, maka akan membantu pengurangan hak-hak prerogatif militer.

Bagi kaum revolusioner dan reformis Mesir, harus disadari bahwa jika militer Mesir diberi hak politik praksis, maka yang akan terjadi adalah kekacauan, karena militer akan terbagi menjadi berbagai kelompok partisan sesuai kehendak nilai dan kepentingan dan ideologinya. Hal demikian dapat membahayakan bagi peraturan dan kesatuan bangsa Mesir sendiri, apalagi militer dibekali ketrampilan represif dan disandangi senjata yang mematikan.

Oleh karena itu dalam era demokrasi di Mesir ke depan, sebagai sebuah negara yang berada dalam transisi demokrasi, para pemimpin, elite reformis dan masyarakat sipil di Mesir harus mampu menjamin militer tidak cenderung berkiprah dalam politik praksis yang bersifat eksekutif. Tentu saja ketegangan antara masyarakat sipil dan militer itu akan terjadi, dan berbagai guncangan dalam arus perubahan yang transisional itu hampir pasti tak terelakkan.

Dalam kaitan perubahan di Mesir ini, perspektif Alfred Stepan dalam *Rethinking Military Politics: Brazil and The Southern Cone* (1988) menarik dicermati oleh para reformis/pembaharu Mesir, bahwa menurutnya, ekspansi peran militer atau kudeta militer merupakan proses yang dikendalikan secara politik; dan untuk itu, dengan cara yang sama, upaya meraih supremasi sipil juga harus dilakukan secara politik.***

BAB X

PREDIKSI SOAL KEPUNAHAN NEGARA ISRAEL

Salah satu pertanyaan yang menarik dalam sejarah kemanusiaan adalah kapan dan bagaimana suatu negara atau peradaban bisa punah. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi kelangsungan hidup suatu negara, seperti lingkungan, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Namun, ada satu faktor yang mungkin kurang mendapat perhatian, yaitu sifat kemanusiaan itu sendiri. Apakah manusia cenderung bersikap kooperatif atau kompetitif, altruistik atau egois, damai atau kejam? Apakah ada sifat kemanusiaan yang universal atau relatif tergantung pada konteks? Apakah sifat kemanusiaan bisa berubah seiring dengan perkembangan sejarah?

Buku *The survival of the friendliest* (2020) karya Brian Hare dan Vanessa Woods mengajukan hipotesis bahwa kunci dari kesuksesan evolusi manusia adalah kemampuan untuk bersahabat. Mereka berpendapat bahwa manusia adalah spesies yang paling bersahabat di antara semua mamalia, dan bahwa kerjasama dan empati adalah sumber dari inovasi dan kecerdasan manusia. Mereka juga menunjukkan bahwa sejarah manusia bukanlah cerita tentang kekerasan dan perang yang tak terelakkan, melainkan tentang kemungkinan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Melihat gerakan boikot produk Israel dari persepektif teori "*survival of the friendliest*" (yang bisa selamat adalah yang paling bersahabat) dapat memberikan wawasan baru tentang dinamika hubungan internasional. Teori ini menyatakan bahwa kelompok-kelompok sosial yang mampu berkolaborasi, berbagi, dan bersimpati dengan kelompok lain akan memiliki keunggulan adaptif daripada kelompok yang bersaing, mengeksploitasi, dan bermusuhan. Dengan demikian, sebuah negara atau peradaban dapat bertahan dan tidak punah jika ia mampu menjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan negara-negara lain, bukan dengan mengisolasi diri atau mengancam keamanan dunia.

Gerakan boikot produk Israel merupakan salah satu bentuk protes terhadap kebijakan-kebijakan Israel yang dianggap melanggar hak asasi manusia, terutama terhadap rakyat Palestina. Gerakan ini bertujuan untuk menekan Israel agar mengubah sikapnya yang dianggap arogan, represif, dan ekspansionis. Dari persepektif teori "*Survival of the friendliest*", gerakan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk memaksa Israel agar lebih bersahabat dan kooperatif dengan negara-negara lain, khususnya dengan tetangganya yang mayoritas Muslim. Jika Israel terus-menerus menolak untuk berdialog dan berdamai, ia akan semakin terisolasi dan kehilangan dukungan dari dunia internasional. Hal ini dapat membahayakan kelangsungan hidup negara tersebut di masa depan.

Namun, buku ini bukanlah satu-satunya yang menawarkan pandangan optimis tentang sifat kemanusiaan. Beberapa buku lain yang membahas topik ini seperti buku *The Dawn of Everything: A New History of Humanity* (2021) karya David Graeber dan David Wengrow, yang menantang narasi konvensional tentang asal-usul peradaban dan menunjukkan bahwa manusia memiliki sejarah yang beragam dan kreatif dalam membentuk masyarakat mereka.

Juga buku *How to Change the Course of Human History* (2018) karya David Graeber dan David Wengrow, yang merupakan artikel pendek yang merangkum gagasan utama dari buku *The Dawn of Everything*.

Buku *The Better Angels of Our Nature: The Decline of Violence in History and Its Causes* (2011) karya Steven Pinker, yang menggunakan data empiris untuk membuktikan bahwa tingkat kekerasan di dunia telah menurun secara dramatis sejak zaman prasejarah hingga saat ini. Juga buku *The Ascent of Man* (1973) karya Jacob Bronowski, yang merupakan buku dan seri televisi yang menggambarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil dari bakat manusia untuk berpikir rasional dan kritis.

Titik kulminasi tentang sejarah masa depan umat manusia dapat kita baca pada buku *Humankind: A Hopeful History* (2020) karya Rutger Bregman, yang mengkritik pandangan pesimis tentang manusia sebagai makhluk rakus dan agresif, dan mengajukan bukti-bukti bahwa manusia sebenarnya memiliki potensi untuk bersikap baik, murah hati, dan saling membantu. Buku ini merupakan ekstensi dari buku *Utopia for Realists: How We Can Build the Ideal World* (2017) karya Rutger Bregman, yang mengusulkan beberapa ide radikal untuk mereformasi sistem sosial dan ekonomi, seperti pendapatan dasar universal, minggu kerja 15 jam, dan perbatasan terbuka.

Buku *Conscious Evolution: Awakening the Power of Our Social Potential* (2015) karya Barbara Marx Hubbard, yang menggagas konsep evolusi sadar sebagai proses di mana manusia secara aktif dan kolektif menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan planet ini. Instinc untuk mencintai sesama manusia meski berbeda bangsa, negara, bahasa, ras dan budaya bisa ditengok di buku *The Compassionate Instinct: The Science of Human Goodness* (2010), sebuah antologi artikel yang disunting oleh

Dacher Keltner, Jason Marsh, dan Jeremy Adam Smith, yang memaparkan hasil penelitian terkini dari berbagai bidang ilmu tentang bagaimana manusia memiliki naluri untuk berempati, bekerja sama, dan peduli terhadap orang lain.

Buku *Big History and the Future of Humanity* (2015) karya Fred Spier, yang merupakan salah satu buku tentang big history, yaitu cabang ilmu yang mencoba menjelaskan sejarah alam semesta dari ledakan besar hingga masa kini dengan menggunakan perspektif interdisipliner. Buku ini bahkan hadir secara menggemparkan melebihi dari buku *Sapiens: A Brief History of Humankind* (2014) karya Yuval N. Harari, yang merupakan buku populer yang menceritakan sejarah manusia dari zaman batu hingga zaman modern, dengan menyoroti peran penting dari imajinasi, agama, uang, dan sains dalam membentuk masyarakat manusia.

Buku-buku di atas memberikan gambaran yang berbeda-beda tentang sifat kemanusiaan dan sejarahnya. Namun, mereka juga memiliki kesamaan, yaitu bahwa mereka mengakui bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih dan mengubah nasib mereka sendiri. Dengan demikian, tidak ada yang bisa memprediksi kapan punahnya suatu negara dalam sejarah kemanusiaan di masa depan, karena itu tergantung pada pilihan dan tindakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sejarah bukanlah takdir, melainkan tantangan.

Salah satu topik yang menarik dalam studi sejarah kemanusiaan adalah bagaimana faktor-faktor seperti kerjasama, persaingan, konflik, dan kekerasan mempengaruhi kelangsungan hidup dan perkembangan berbagai kelompok manusia. Buku baru karya Graeber dan Wengrow (2021) berjudul *The Dawn of Everything: A New History of Humanity* menantang pandangan konvensional bahwa sejarah manusia adalah sejarah peradaban yang linear dan progresif, yang didorong oleh pertumbuhan populasi,

peningkatan kompleksitas sosial, dan dominasi kekuasaan politik. Mereka mengajukan argumen bahwa sejarah manusia adalah sejarah eksperimen sosial yang beragam dan kreatif, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekologis, ekonomi, budaya, dan psikologis. Mereka juga menyoroti peran penting dari kerjasama, solidaritas, dan kebaikan dalam membentuk masyarakat manusia.

Salah satu konsep kunci yang digunakan oleh Graeber dan Wengrow untuk menjelaskan dinamika sejarah kemanusiaan adalah "*the survival of the friendliest*" (2021: 15). Konsep ini mengacu pada gagasan bahwa manusia bukan hanya makhluk yang kompetitif dan agresif, tetapi juga makhluk yang kooperatif dan altruistik. Konsep ini didasarkan pada penelitian biologi evolusi, antropologi, psikologi, dan ilmu sosial lainnya, yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kapasitas bawaan untuk berempati, berbagi, membantu, dan bekerja sama dengan sesama manusia dan makhluk hidup lainnya (Tattersall 1999; Smith 2019; Fromm 2023). Konsep ini juga menantang pandangan Hobbesian bahwa manusia secara alami jahat, egois, dan haus kekuasaan, yang membutuhkan negara atau otoritas tertinggi untuk menjaga ketertiban dan perdamaian (Schwartz 1987; Heilbroner 1991; Glover 2012).

Graeber dan Wengrow menggunakan konsep "*the survival of the friendliest*" untuk mengkritik narasi sejarah yang menyajikan negara sebagai bentuk organisasi sosial tertinggi dan paling rasional, yang mampu memberikan stabilitas, keamanan, kemakmuran, dan kemajuan bagi masyarakatnya. Mereka menunjukkan bahwa negara seringkali merupakan sumber ketidakadilan, penindasan, eksploitasi, dan kekerasan, yang mengorbankan kebebasan, keragaman, dan kesejahteraan banyak orang demi kepentingan segelintir elit (Graeber dan Wengrow 2021; 2018). Mereka juga menunjukkan bahwa ada banyak contoh sejarah di mana masyarakat tanpa negara atau dengan bentuk negara yang

lemah atau fleksibel dapat hidup dengan damai, harmonis, egaliter, dan sejahtera, dengan mengandalkan mekanisme sosial seperti kesepakatan bersama, musyawarah, konsensus, solidaritas, reciprocitas, dan gotong royong (Graeber dan Wengrow 2021; Braudel 1992a; 1992b).

Dengan demikian, Graeber dan Wengrow menawarkan pandangan sejarah kemanusiaan yang lebih optimis dan inspiratif daripada pandangan sejarah yang fatalistik dan pesimis. Mereka mengajak kita untuk belajar dari masa lalu tentang kemungkinan-kemungkinan sosial yang berbeda dan lebih baik daripada status quo saat ini. Mereka juga mengajak kita untuk membayangkan masa depan yang lebih adil, demokratis, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia dan planet ini. Mereka berpendapat bahwa kunci untuk mencapai masa depan tersebut adalah dengan mengembangkan sikap "*the survival of the friendliest*" di antara kita semua.

Teori "*the survival of the friendliest*" adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa sebuah negara atau peradaban dapat bertahan dan tidak punah jika mereka mampu menjalin hubungan yang baik dengan negara atau peradaban lain. Menurut teori ini, kerjasama, diplomasi, toleransi, dan saling menghormati adalah kunci untuk mempertahankan eksistensi dan kemakmuran. Sebaliknya, konflik, permusuhan, isolasi, dan diskriminasi – sebagaimana dipertontonkan oleh negara Israel secara kasat mata kepada warga dunia – akan mengancam kelangsungan hidup dan menyebabkan kepunahan. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah dan ilmiah yang menunjukkan bahwa negara atau peradaban yang bersahabat dengan tetangga dan mitra mereka cenderung lebih stabil, sejahtera, dan berpengaruh daripada yang bermusuhan atau menutup diri.

Teori "*the survival of the friendliest*" pertama kali diperkenalkan oleh David Moodie. David Moodie (2000)

membahas tentang bagaimana faktor-faktor sosial dan emosional dapat mempengaruhi kinerja investasi. David Moodie berpendapat bahwa investor yang memiliki hubungan baik dengan manajer dana, rekan kerja, dan klien akan lebih mampu mengatasi stres, mengambil risiko, dan beradaptasi dengan perubahan pasar. David Moodie juga menunjukkan beberapa contoh dari sejarah dan penelitian psikologi yang mendukung gagasan ini. Teori Moodie ini menarik karena memberikan perspektif baru tentang pentingnya keterampilan interpersonal dalam dunia keuangan. Moodie juga memberi manfaat bagi para pembaca yang ingin meningkatkan kualitas hubungan mereka dengan para pemangku kepentingan dalam industri investasi.

Teori ini membahas tentang bagaimana kerjasama dan kepercayaan dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan di sektor pensiun. David Moodie, adalah seorang konsultan manajemen yang berpengalaman dalam bidang pensiun dan investasi. Ia mengutip beberapa studi yang menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki budaya kolaboratif dan inklusif cenderung lebih inovatif, produktif, dan tahan krisis daripada organisasi yang bersaing dan eksklusif. Ia juga memberikan beberapa contoh nyata dari dana pensiun yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip kerjasama dan kepercayaan dalam pengelolaan aset, pelayanan anggota, dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Ia menyarankan agar para pemimpin dana pensiun membangun visi bersama, menghargai keragaman, dan mendorong komunikasi terbuka untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah dan harmonis.

Secara antropologis, teori ini kemudian dikembangkan untuk melihat sejarah kemanusiaan secara lebih luas. Buku *The Dawn of Everything: A New History of Humanity* karya David Graeber dan David Wengrow merupakan sebuah karya sejarah yang menantang pandangan konvensional tentang asal-usul peradaban manusia. Buku ini terdiri dari

sepuluh bab yang membahas berbagai topik mulai dari kehidupan pemburu-pengumpul, revolusi pertanian, pembentukan negara, agama, hingga masa depan.

Bab 1: *The Human Adventure*. Bab ini mengajukan pertanyaan tentang apa yang membuat manusia unik dan bagaimana kita dapat memahami sejarah manusia secara lebih luas dan inklusif. Penulis mengkritik pendekatan evolusionis yang menganggap bahwa manusia mengalami perkembangan linear dari keadaan primitif ke modern. Graeber dan Wengrow juga menawarkan kerangka alternatif yang disebut "sejarah potensial" yang menekankan pada kemungkinan-kemungkinan yang ada di setiap periode sejarah dan bagaimana pilihan-pilihan manusia membentuk arah sejarah (Graeber dan Wengrow, 2021, hlm. 3-32).

Bab 2: *The Myth of the Stupid Savage*. Bab ini menelusuri asal-usul mitos tentang pemburu-pengumpul sebagai orang-orang yang hidup dalam kondisi miskin, bodoh, dan kejam. Graeber dan Wengrow menunjukkan bahwa mitos ini berasal dari prasangka Barat yang dipengaruhi oleh agama, kolonialisme, dan kapitalisme. Graeber dan Wengrow juga mengungkapkan bukti-bukti arkeologis dan antropologis yang menunjukkan bahwa pemburu-pengumpul memiliki kehidupan yang kaya, kompleks, dan bervariasi. Penulis berpendapat bahwa pemburu-pengumpul bukanlah tahap awal dari sejarah manusia, melainkan salah satu bentuk organisasi sosial yang mungkin di antara banyak pilihan lain (Graeber dan Wengrow, 2021, hlm. 33-70).

Bab 3: *The First Cosmopolitans*. Bab ini membahas tentang bagaimana manusia pertama kali menyebar ke seluruh dunia dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan dan budaya yang berbeda. Graeber dan Wengrow menantang anggapan bahwa manusia awal adalah orang-orang yang terisolasi dan xenofobik. Graeber dan Wengrow menunjukkan bahwa manusia awal memiliki kemampuan

untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan berinovasi dalam menghadapi tantangan-tantangan baru. Graeber dan Wengrow juga menyoroti peran penting seni, ritual, dan imajinasi dalam membentuk identitas dan hubungan sosial manusia awal (Graeber dan Wengrow, 2021, hlm. 71-108).

Bab 4: *The Origins of Inequality*. Bab ini mengkaji tentang bagaimana ketimpangan sosial muncul dalam sejarah manusia dan bagaimana manusia bereaksi terhadapnya. Graeber dan Wengrow mengkritik teori-teori yang mengaitkan ketimpangan dengan faktor-faktor seperti ekologi, teknologi, atau biologi. Graeber dan Wengrow menegaskan bahwa ketimpangan adalah hasil dari pilihan-pilihan politik dan moral yang dibuat oleh manusia dalam konteks tertentu. Graeber dan Wengrow juga mengeksplorasi berbagai bentuk resistensi dan alternatif yang dilakukan oleh manusia untuk melawan atau menghindari ketimpangan (Graeber dan Wengrow, 2021, hlm. 109-146). Di sini ditunjukkan betapa politik yang kotor selalu menghasilkan output peradaban yang kacau. Penjajahan Israel terhadap Palestini adalah sebetulnya dosa politik kotor yang dihasilkan oleh Inggris.

Bab 5: *The Rise and Fall of the Urban Revolution*. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana kota-kota pertama kali muncul dalam sejarah manusia dan bagaimana mereka berkembang menjadi pusat-pusat peradaban. Graeber dan Wengrow menolak pandangan yang menganggap bahwa kota-kota adalah produk dari revolusi pertanian atau negara. Graeber dan Wengrow menunjukkan bahwa kota-kota adalah hasil dari proses-proses sosial yang kompleks dan dinamis yang melibatkan kerjasama, konflik, pertukaran, inovasi, dan transformasi. Graeber dan Wengrow juga menyoroti keragaman dan fleksibilitas bentuk-bentuk kota dan peradaban yang ada dalam sejarah (Graeber dan Wengrow, 2021, hlm. 147-184).

Bab 6: *The Specter of the State*. Bab ini membahas tentang bagaimana negara-negara pertama kali terbentuk dalam sejarah manusia dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan manusia. Graeber dan Wengrow mengkritik pandangan yang menganggap bahwa negara adalah hasil dari kebutuhan untuk mengatur masyarakat yang kompleks atau untuk menyelesaikan konflik. Penulis menunjukkan bahwa negara adalah hasil dari ambisi-ambisi elit yang ingin menguasai sumber daya dan orang-orang. Graeber dan Wengrow juga menunjukkan bahwa negara bukanlah entitas yang monolitik atau permanen, melainkan sesuatu yang rapuh, sementara, dan dapat ditantang atau diubah oleh manusia (Graeber dan Wengrow, 2021, hlm. 185-222). Dengan menggunakan perspektif Graeber dan Wengrow ini kita dapat memprediksi kapan negara Israel akan punah dan hilang dari muka bumi ini karena ketidakmampuannya untuk menjadi negara yang bersahabat dengan bayi, anak-anak dan perempuan serta semua manusia.

Bab 7: *The Gods That Failed*. Bab ini mengkaji tentang bagaimana agama-agama pertama kali muncul dalam sejarah manusia dan bagaimana mereka berhubungan dengan negara dan peradaban. Graeber dan Wengrow mengkritik pandangan yang menganggap bahwa agama adalah produk dari ketakutan atau kebodohan manusia. Graeber dan Wengrow menunjukkan bahwa agama adalah produk dari imajinasi dan kreativitas manusia yang mencerminkan pengalaman dan aspirasi mereka. Graeber dan Wengrow juga menunjukkan bahwa agama bukanlah sesuatu yang tetap atau dogmatis, melainkan sesuatu yang berubah-ubah dan pluralis. Graeber dan Wengrow juga mengeksplorasi berbagai bentuk agama yang radikal, egaliter, dan revolusioner yang ada dalam sejarah (Graeber dan Wengrow, 2021, hlm. 223-260). Agama Yahudi dapat dilihat dari perspektif ini.

Bab 8: *The Age of Revolutions*. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana revolusi-revolusi politik, ekonomi, dan sosial terjadi dalam sejarah manusia dan bagaimana mereka membentuk dunia modern. Graeber dan Wengrow mengkritik pandangan yang menganggap bahwa revolusi adalah produk dari kemajuan atau rasionalitas manusia. Graeber dan Wengrow menunjukkan bahwa revolusi adalah produk dari ketidakpuasan atau kemarahan manusia terhadap ketidakadilan atau penindasan. Graeber dan Wengrow juga menunjukkan bahwa revolusi bukanlah sesuatu yang linear atau deterministik, melainkan sesuatu yang kontingen dan paradoksikal. Graeber dan Wengrow juga menyoroti berbagai potensi dan bahaya yang terkandung dalam revolusi (Graeber dan Wengrow, 2021, hlm. 261-298).

Bab 9: *The Anthropocene Dilemma*. Bab ini membahas tentang bagaimana manusia mempengaruhi lingkungan planet bumi dan bagaimana mereka menghadapi tantangan-tantangan ekologis di masa kini dan masa depan. Graeber dan Wengrow mengkritik pandangan yang menganggap bahwa manusia adalah penyebab utama dari krisis lingkungan atau bahwa manusia harus bersikap rendah hati atau bertobat terhadap alam. Graeber dan Wengrow menunjukkan bahwa manusia memiliki hubungan yang kompleks dan beragam dengan alam yang mencakup kerusakan, perawatan, kerjasama, dan transformasi. Graeber dan Wengrow juga menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan solusi-solusi baru dan berkelanjutan untuk masalah-masalah lingkungan (Graeber dan Wengrow, 2021, hlm. 299-336).

Bab 10: *The Future of Everything*. Bab ini merangkum poin-poin utama dari buku ini dan menawarkan pandangan-pandangan tentang masa depan manusia. Graeber dan Wengrow mengkritik pandangan yang menganggap bahwa masa depan sudah ditentukan oleh sejarah atau oleh

teknologi. Graeber dan Wengrow menunjukkan bahwa masa depan adalah hasil dari pilihan-pilihan manusia yang dibuat di masa kini dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada di masa lalu. Graeber dan Wengrow juga menunjukkan bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang tunggal atau homogen, melainkan sesuatu yang pluralis dan heterogen. Graeber dan Wengrow juga mengajak semua antropolog untuk berpartisipasi dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi manusia.

Ajakan Graeber dan Wengrow perlu diejawantahkan dalam bentuk yang lebih konkrit: boikot diplomatik terhadap negara Israel. Salah satu isu yang sering menimbulkan kontroversi di dunia adalah sikap negara-negara terhadap Israel. Israel adalah negara yang didirikan pada tahun 1948 sebagai tanah air bagi bangsa Yahudi, tetapi juga diklaim oleh bangsa Palestina yang telah tinggal di sana sejak lama. Konflik antara Israel dan Palestina, serta negara-negara Arab lainnya, telah berlangsung selama puluhan tahun dan menyebabkan banyak korban jiwa dan penderitaan.

Negara-negara di dunia memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap Israel. Ada yang mendukung Israel, ada yang menentang Israel, dan ada juga yang bersikap netral atau tidak mengakui keberadaan Israel sama sekali. Berikut adalah tabel yang menunjukkan negara-negara yang mendukung Israel dan yang tidak mendukung Israel:

Negara yang Mendukung Israel	Negara yang Tidak Mendukung Israel
Amerika Serikat	Venezuela
Inggris	Korea Utara
Perancis	Kuba
Australia	Bhutan
Norwegia	Niger
Jerman	Mali
	Malaysia
	Iran
	Indonesia

	Brunei Darussalam
	Bangladesh
	Afghanistan
	Yaman
	Tunisia
	Suriah
	Sudan
	Somalia
	Arab Saudi
	Qatar
	Oman
	Maroko
	Libya
	Lebanon
	Kuwait
	Irak
	Djibouti
	Komoro
	Bahrain
	Aljazair
	Pakistan

Tabel ini tidak mencakup semua negara di dunia, tetapi hanya sebagian yang sering disebut-sebut dalam berita terkait isu Israel. Sikap negara-negara ini juga bisa berubah seiring dengan perkembangan situasi politik dan hubungan internasional. Artikel ini hanya bersifat analisis dan tidak bermaksud untuk memihak atau menghakimi pilihan negara-negara tersebut jika mereka masih berkawan dengan negara bedebah Israel.

Untuk memprediksi kepunahan atau kehancuran negara Israel sebenarnya sangat sederhana: faktor dukungan negara sponsor, yaitu Amerika Serikat. Setiap wilayah yang ditinggalkan oleh AS akan merdeka dan berdiri sendiri, seperti Vietnam (1957) dan Afghanistan (2021). Secara

antropologis, Linda Geddes (2014) pernah membahas tentang bagaimana sifat ramah dan kooperatif dapat memberikan keuntungan evolusioner bagi manusia dan hewan lain. Linda Geddes mengutip beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kerjasama dan altruisme dapat meningkatkan peluang bertahan hidup dan bereproduksi, serta mempengaruhi struktur otak dan genetika. Linda Geddes juga mengeksplorasi bagaimana sifat-sifat ini dapat dipelajari dan ditiru oleh mesin, seperti robot dan kecerdasan buatan, untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan manusia.

Israel adalah negara afektif yang dipimpin oleh manusia-manusia yang tidak memiliki *good-will* untuk bekerja sama, berbagi, dan menciptakan perubahan positif. Buku *Humankind: A Hopeful History* karya Rutger Bregman adalah sebuah karya yang menantang pandangan pesimis tentang manusia. Bregman berargumen bahwa manusia pada dasarnya baik dan memiliki potensi untuk bekerja sama, berbagi, dan menciptakan perubahan positif. Buku ini berisi banyak contoh sejarah dan penelitian ilmiah yang mendukung pandangan optimis Bregman. Salah satu konsep kunci yang dibahas dalam buku ini adalah *self-fulfilling prophecy*, yaitu fenomena di mana harapan atau keyakinan seseorang tentang sesuatu atau seseorang dapat mempengaruhi perilaku dan hasilnya.

Bregman menunjukkan bagaimana *self-fulfilling prophecy* dapat berfungsi sebagai alat untuk membangun kepercayaan, solidaritas, dan kemajuan sosial, atau sebaliknya, sebagai senjata untuk menimbulkan ketakutan, konflik, dan penindasan. Bregman menulis, "Kita bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dengan mengubah cara kita melihat orang lain. Kita bisa memilih untuk melihat kebaikan di dalam diri mereka, dan dengan demikian menginspirasi mereka untuk menunjukkan kebaikan itu" (Bregman, 2020, hlm. 10). Buku ini adalah

sebuah ajakan untuk mengubah paradigma kita tentang manusia dan mendorong kita untuk berani bermimpi tentang masa depan yang lebih cerah.

Buku *Humankind: A Hopeful History* karya Rutger Bregman adalah sebuah buku yang menawarkan perspektif baru tentang sejarah manusia, yang menantang pandangan umum bahwa manusia pada dasarnya jahat, egois, dan agresif. Bregman berargumen bahwa manusia sebenarnya memiliki naluri baik, kerjasama, dan altruisme yang telah berkembang sejak awal *homo sapiens*. Para elit pemimpin negara-negara pendukung Israel sesungguhnya tidaklah jahat, egois dan agresif; masih ada secuil naluri baik, kerjasama dan altruisme. Buku ini dibagi menjadi lima bagian, prolog, dan epilog, yang masing-masing membahas topik-topik seperti:

The Real Lord of the Flies: Bagian ini menceritakan kisah nyata dari enam anak laki-laki yang terdampar di sebuah pulau terpencil selama 15 bulan pada tahun 1965, dan bagaimana mereka berhasil bertahan hidup dengan saling membantu dan bekerja sama, berbeda dengan novel fiksi *Lord of the Flies* karya William Golding yang menggambarkan kekejaman dan kekacauan anak-anak yang terisolasi dari peradaban.

The State of Nature: Bagian ini menelusuri asal-usul manusia dan bagaimana mereka berevolusi menjadi Homo Sapiens yang unik dan berbeda dari spesies lainnya. Bregman menunjukkan bahwa manusia memiliki sifat-sifat seperti kemampuan berbahasa, kerjasama sosial, dan empati yang membuat mereka lebih mirip dengan anjing (*homo puppy*) daripada dengan serigala (*homo homini lupus*).

After Auschwitz: Bagian ini menguji eksperimen-eksperimen psikologi yang terkenal seperti Milgram, Zimbardo, dan Asch, yang diklaim membuktikan bahwa manusia mudah dipengaruhi oleh otoritas, situasi, dan

mayoritas untuk melakukan hal-hal jahat. Bregman mengkritik metodologi, interpretasi, dan generalisasi dari eksperimen-eksperimen tersebut, dan menawarkan bukti-bukti alternatif yang menunjukkan bahwa manusia sebenarnya memiliki kemauan dan moralitas yang kuat untuk melawan kejahatan. Dari perspektif ini, melawan kejahatan dan kebiadaban Israel terhadap bayi-bayi, anak-anak dan perempuan Palestina masih bisa diharapkan dari negara-negara sponsor apartheid Israel, seperti: AS, Inggris, Perancis, Jerman, dll.

Why Good People Turn Bad: Bagian ini menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia menjadi buruk, seperti kurangnya empati, kekuasaan, kesalahan pencerahan, dan motivasi ekstrinsik. Bregman mengusulkan solusi-solusi untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, seperti meningkatkan empati, mendistribusikan kekuasaan, mengakui kompleksitas manusia, dan memberikan motivasi intrinsik. Kita bisa memahami mengapa bangsa Yahudi yang menjadi korban Holocaust tiba-tiba menjadi brutal dan biadab dan membom semua rumah sakit, gereja dan masjid dan juga sekolah tanpa tedeng aling-aling.

The Other Cheek: Bagian ini memberikan contoh-contoh nyata dari orang-orang yang memilih untuk mengampuni, berdamai, dan bekerja sama dengan musuh-musuh mereka, bahkan dalam situasi-situasi yang penuh kebencian, ketidakadilan, dan kekerasan. Bregman menunjukkan bahwa sikap-sikap seperti itu bukanlah tanda-tanda kelemahan atau naivitas, melainkan tanda-tanda kekuatan dan harapan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Bagian ini semakin memperkuat prediksi bahwa negara Israel akan punah karena kebiadaban dan kekejamannya sendiri sebagaimana lumpuhnya Jengis Khan dalam catatan sejarah.

Bregman (2020) mendefinisikan *self-fulfilling prophecy* sebagai "fenomena di mana ekspektasi kita tentang orang lain mempengaruhi perilaku mereka" (Bregman, 2020: 17). Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan tentang orang lain dapat mempengaruhi bagaimana mereka bertindak. Makna dari *self-fulfilling prophecy* adalah bahwa kita dapat membentuk kenyataan sosial kita sendiri dengan cara kita memandang orang lain. Jika kita percaya bahwa orang lain baik, maka kita akan bersikap ramah dan kooperatif kepada mereka, dan mereka pun akan merespon dengan cara yang sama.

Sebaliknya, jika kita percaya bahwa orang lain jahat, maka kita akan bersikap curiga dan bermusuhan kepada mereka, dan mereka pun akan merespon dengan cara yang sama. *Self-fulfilling prophecy* dapat memiliki dampak positif atau negatif tergantung pada ekspektasi kita. Oleh karena itu, Bregman (2020) menyarankan kita untuk "mengasumsikan hal-hal baik tentang orang lain" (Bregman, 2020: 18), karena dengan begitu kita dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan produktif.

Hanya orang-orang yang baik saja yang akan bertahan di muka bumi ini. *The survival of the friendliest* adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa manusia modern berhasil berevolusi dan bertahan hidup karena memiliki sifat ramah dan kooperatif yang tidak dimiliki oleh spesies manusia lainnya. Teori ini didasarkan pada hipotesis bahwa manusia mengalami proses domestikasi diri, yaitu seleksi alam yang mengurangi agresivitas dan meningkatkan kemampuan sosial dan kognitif. Teori ini dikemukakan oleh antropolog Brian Hare dan penulis Vanessa Woods dalam buku mereka yang berjudul *Survival of the Friendliest: Understanding Our Origins and Rediscovering Our Common Humanity* (2020).

Menurut Hare dan Woods, manusia modern memiliki keunggulan atas spesies manusia lainnya, seperti

Neanderthal, karena mampu berkolaborasi, berkomunikasi, dan berempati dengan sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. Mereka menyebut sifat ini sebagai *friendliness*, yang berbeda dengan *kindness*. *Friendliness* adalah kemampuan untuk menarik perhatian, membangun hubungan, dan memanfaatkan informasi dari orang lain, sedangkan *kindness* adalah kemampuan untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Kedua sifat ini saling melengkapi, tetapi *friendliness* lebih penting untuk *survival*, dan ini tidak dimiliki oleh satu elit politisi pun di negara Israel.

Hare dan Woods juga menjelaskan bagaimana proses domestikasi diri terjadi pada manusia. Mereka mengacu pada sindrom domestikasi, yaitu perubahan fisiologis, morfologis, perilaku, dan kognitif yang terjadi pada hewan yang didomestikasi oleh manusia. Perubahan ini meliputi penurunan ukuran otak dan gigi, perubahan bentuk tengkorak dan telinga, peningkatan hormon serotonin dan oksitosin, perpanjangan masa kanak-kanak, dan peningkatan kemampuan komunikasi kooperatif. Hare dan Woods berpendapat bahwa sindrom domestikasi juga terjadi pada manusia akibat seleksi alam terhadap individu yang lebih ramah dan kurang agresif. Alam akan menyeleksi orang-orang yang ramah dan berbudi baik saja yang akan mampu bertahan dan tidak punah dalam kekacauan dan perang. Tentara-tentara IDF yang penuh dengan angkara murka satu per satu akan menemui kematian perdata dan kematian dalam perang melawan gerilyawan mujahidin Palestina yang lebih gesit, die-hard dan cerdas.

Hare dan Woods juga membahas dampak positif dan negatif dari sifat ramah manusia. Di satu sisi, sifat ini memungkinkan manusia untuk menciptakan budaya, teknologi, seni, bahasa, dan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Di sisi lain, sifat ini juga membuat manusia rentan terhadap manipulasi, prasangka, diskriminasi, dan

kekerasan terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Hare dan Woods menyarankan agar manusia menggunakan *friendliness* sebagai alat untuk memperluas lingkaran sosial mereka dan mengatasi perpecahan yang ada di dunia.

Salah satu langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina adalah melakukan boikot diplomatik terhadap negara-negara yang melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional. Diplomat harus berani mengambil sikap tegas dan tidak hanya mengikuti protokol yang biasa saja. Diplomat bukanlah pejabat administrasi atau birokrasi yang hanya mencatat data dan angka. Diplomat harus menjadi agen perubahan yang bisa mempengaruhi kebijakan dan sikap negara-negara lain. Diplomat harus menggunakan kekuatan diplomasi untuk mendorong perdamaian dan kesejahteraan dunia.

Sidang Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, tentang kasus dugaan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza telah berlangsung selama dua hari, dari 11 hingga 12 Januari 2024. Sidang ini merupakan tindak lanjut dari gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan pada bulan Desember 2023, dengan mengklaim bahwa Israel telah melanggar Konvensi Genosida 1948 dengan melakukan serangan militer yang menewaskan lebih dari 22.000 warga sipil Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Afrika Selatan meminta ICJ untuk mengambil tindakan darurat yang memerintahkan Israel untuk menghentikan operasi militernya di Gaza dan menghormati hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional. Afrika Selatan juga mendapat dukungan dari sekitar 200 profesor dan pakar hukum internasional, serta beberapa negara seperti Kolombia dan Brasil, yang menyatakan solidaritas mereka dengan rakyat Palestina.

Israel, di sisi lain, membantah tuduhan genosida dan menyebut gugatan Afrika Selatan sebagai pencemaran nama baik yang tidak masuk akal. Israel mengklaim bahwa operasi militernya di Gaza adalah tindakan pertahanan diri terhadap serangan roket yang dilancarkan oleh Hamas, kelompok militan Islam yang menguasai Gaza. Israel juga menuduh Hamas menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia dan menyebarkan propaganda palsu untuk mempengaruhi opini publik internasional.

Sidang ICJ di Den Haag ini dianggap sebagai salah satu upaya terakhir untuk mencari keadilan bagi rakyat Palestina di Gaza, yang telah menderita akibat blokade dan konflik berkepanjangan. Hasil sidang ini akan menentukan apakah Israel bersalah atau tidak atas tuduhan genosida, dan apakah akan ada sanksi atau kompensasi yang harus dibayar oleh Israel kepada Palestina. Namun, proses hukum ini diperkirakan akan berlangsung lama dan rumit, mengingat kompleksitas dan sensitivitas masalah ini.

Israel telah melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina, termasuk pembunuhan, pengusiran, penjajahan, dan penindasan. Tindakan-tindakan ini bertentangan dengan hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu adanya gerakan boikot diplomatik terhadap Israel dari negara-negara di dunia. Gerakan ini bertujuan untuk menekan Israel agar menghentikan kebijakan-kebijakan represifnya dan mengakui hak-hak rakyat Palestina. Gerakan boikot diplomatik juga dapat mengirimkan pesan bahwa dunia tidak akan tinggal diam menyaksikan kekejaman Israel. Gerakan ini dapat dilakukan dengan cara memutuskan hubungan diplomatik, menghentikan bantuan ekonomi dan militer, serta mengisolasi Israel dari organisasi-organisasi internasional.

Orang-orang Palestina, dalam istilah Pramoedya Ananta Toer (1985), melawan keganasan militer Israel “dengan tulang dan daging dari tubuh mereka sendiri”. Manusia-manusia dan elit zionis di Israel tidak memiliki *natural human goods*. Berdasarkan buku *To Flourish or Destruct: A Personalist Theory of Human Goods, Motivations, Failure, and Evil* karya Christian Smith (2019) merupakan karya filsafat yang mengkaji tentang motivasi-motivasi yang mendasari tindakan manusia. Smith berpendapat bahwa tindakan manusia didorong oleh motivasi untuk mewujudkan apa yang ia sebut sebagai *natural human goods*, yaitu tujuan-tujuan yang secara alamiah baik bagi semua manusia. Smith juga menelusuri cara-cara di mana manusia dapat gagal mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, yang dapat mengakibatkan berbagai tingkatan kejahatan (*evil*). Buku ini berdasarkan pada kerangka *critical realist personalism*, yang menempatkan gagasan tentang personhood di pusat upaya kita untuk memahami bagaimana kita dapat membentuk kehidupan dan masyarakat manusia yang baik (Smith, 2019).

Bab 1: *Critical Realist Personalism – Some Basics*. Bab ini menjelaskan dasar-dasar dari kerangka teoretis yang digunakan oleh Smith, yaitu *critical realist personalism*, yang merupakan gabungan dari *critical realism* dan *personalism*. *Critical realism* adalah pandangan filsafat yang mengakui adanya realitas objektif yang independen dari persepsi manusia, tetapi juga mengakui bahwa pengetahuan manusia tentang realitas tersebut bersifat terbatas dan tidak sempurna. *Personalism* adalah pandangan filsafat yang menekankan nilai, martabat, dan kebebasan dari setiap individu sebagai pribadi (*person*), bukan sebagai objek atau fungsi dari sistem sosial. Smith menggabungkan kedua pandangan ini untuk mengembangkan teori tentang motivasi manusia yang menghormati kompleksitas dan keunikan dari setiap pribadi (Smith, 2019). Motif ini sudah tidak lagi

tumbuh di dalam tubuh biologis dan tubuh ideologis para aktivis partai zionis di Israel.

Bab 2: *Rethinking Motivations for Action*. Bab ini membahas tentang konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan motivasi manusia, seperti *action*, *agency*, *reasons*, *interests*, dan *goods*. Smith mengkritik beberapa teori motivasi yang populer dalam ilmu sosial, seperti *rational choice theory*, *social situationism*, dan *cultural voluntarism*. Smith berpendapat bahwa teori-teori tersebut tidak cukup menjelaskan motivasi manusia secara memadai, karena mereka cenderung mengabaikan atau menyederhanakan aspek-aspek penting seperti *personal identity*, *moral values*, dan *natural human goods*. Smith mengusulkan untuk menggunakan konsep *natural human goods* sebagai dasar untuk memahami motivasi manusia, yaitu tujuan-tujuan yang secara alamiah baik bagi semua manusia, seperti kebenaran, keindahan, keadilan, persahabatan, dan sebagainya (Smith, 2019). Yang ada di dalam motivasi manusia zionis adalah brutalisme, kebiadaban, kekejaman, keburukan, ketidakadilan, persekongkolan jahat. Dalam konsepsi orang-orang Aceh, motif ini disebut sebagai *motivasi kepalehan*.

Bab 3: *Against Social Situationism*. Bab ini merupakan kritik terhadap pandangan *social situationism*, yaitu pandangan yang menekankan pengaruh situasi sosial terhadap perilaku manusia. Smith mengakui bahwa situasi sosial memang memiliki pengaruh, tetapi ia menolak pandangan bahwa situasi sosial dapat menentukan atau membatasi perilaku manusia secara keseluruhan. Smith berpendapat bahwa pandangan *social situationism* tidak cukup memperhitungkan faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi perilaku manusia, seperti *personal identity*, *moral values*, dan *natural human goods*. Smith juga menunjukkan beberapa contoh empiris dan historis yang membuktikan bahwa manusia dapat bertindak melawan situasi sosial yang menekan atau merugikan mereka, dengan

berdasarkan pada motivasi-motivasi yang lebih tinggi atau lebih dalam (Smith, 2019). Para tentara IDF (Israel Defense Force) hanya percaya pada retorika elit partai Likud tentang situasi sosial dan berusaha menghapus personal identity, moral values, dan *natural human goods* yang ada dalam diri mereka secara antropologis.

Bab 4: *Human Nature and Motivations in Classical Theory*. Bab ini merupakan tinjauan terhadap beberapa teori klasik tentang sifat dan motivasi manusia dalam ilmu sosial, seperti teori-teori dari Marx, Weber, Durkheim, Freud, Mead, Parsons, dan lain-lain. Smith menilai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori, serta menunjukkan bagaimana teori-teori tersebut dapat diperkaya atau dikoreksi dengan menggunakan kerangka *critical realist personalism*. Smith juga mengkritik beberapa pandangan yang menyangkal atau meragukan adanya sifat manusia yang universal atau esensial, seperti *postmodernism*, *social constructionism*, dan *evolutionary psychology*. Smith berpendapat bahwa pandangan-pandangan tersebut tidak cukup memperhitungkan bukti-bukti empiris dan rasional yang mendukung adanya sifat manusia yang universal atau esensial, yang meliputi *natural human goods* (Smith, 2019). Para petugas partai dan kaum militeris konvensional di Israel mencurigai setiap personel yang masih menyimpan *natural human goods* dalam sikap dan perilaku mereka selama di kesatuan.

Bab 5: *On Basic Human Goods, Interests, and Motivations*. Bab ini merupakan pembahasan lebih lanjut tentang konsep *natural human goods*, yang merupakan inti dari teori motivasi Smith. Smith menjelaskan apa yang dimaksud dengan *natural human goods*, bagaimana mereka dapat diketahui, dan bagaimana mereka dapat dibedakan dari *instrumental goods* atau *subjective preferences*. Smith juga menjelaskan hubungan antara *natural human goods* dengan *interests* dan *motivations*, serta bagaimana mereka dapat diprioritaskan atau

diintegrasikan dalam tindakan manusia. Smith mengajukan beberapa kriteria untuk menentukan apakah suatu tujuan adalah *natural human goods* atau tidak, seperti *universalizability*, *incommensurability*, *nonsubstitutability*, dan *self-evidence*. Smith juga memberikan beberapa contoh dari *natural human goods*, seperti kebenaran, keindahan, keadilan, persahabatan, dan sebagainya (Smith, 2019).

Bab 6: *Toward a Theory of Flourishing*. Bab ini merupakan aplikasi dari teori motivasi Smith untuk menjelaskan bagaimana manusia dapat mencapai kehidupan yang baik atau berkembang (*flourishing*). Dari konteks masa depan Palestina yang plural dan multikultural – yang ditunjukkan oleh prajurit Brigade Al Qassam dan mujahidin Al Quds yang memperlakukan tawanan perang secara baik dan sopan sesuai dengan Konvensi Jenewa – kita dapat mengerti ketika Smith berpendapat bahwa kehidupan yang baik atau berkembang adalah kehidupan yang sesuai dengan sifat manusia sebagai pribadi, yaitu kehidupan yang menghormati dan mewujudkan *natural human goods*. Smith juga berpendapat bahwa kehidupan yang baik atau berkembang tidak hanya tergantung pada pilihan individu, tetapi juga pada kondisi sosial dan struktural yang mendukung atau menghalangi pencapaian *natural human goods*. Smith mengusulkan beberapa prinsip untuk membentuk masyarakat yang baik atau berkembang, yaitu masyarakat yang menghormati dan mempromosikan *personal dignity*, *personal freedom*, *personal responsibility*, dan *personal solidarity* (Smith, 2019).

Bab 7: *Understanding Failure, Destruction, and Evil*. Bab ini merupakan pembahasan tentang fenomena-fenomena negatif yang mengancam atau merusak kehidupan yang baik atau berkembang, yaitu fenomena-fenomena seperti *failure*, *destruction*, dan *evil*. Smith berpendapat bahwa fenomena-fenomena tersebut dapat dipahami sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara tindakan manusia dengan sifat

manusia sebagai pribadi, yaitu ketidaksesuaian antara tindakan manusia dengan *natural human goods*. Smith juga berpendapat bahwa fenomena-fenomena tersebut dapat bervariasi dalam tingkat dan intensitasnya, tergantung pada faktor-faktor seperti *intentionality*, *agency*, *responsibility*, dan *harmfulness*. Smith mengajukan beberapa kategori untuk mengklasifikasikan fenomena-fenomena tersebut, seperti *moral evil*, *natural evil*, *structural evil*, dan sebagainya (Smith, 2019).

Smith menekankan kembali poin-poin utama dari teorinya, yaitu bahwa motivasi manusia didasarkan pada pencapaian *natural human goods*, yang merupakan tujuan-tujuan yang secara alamiah baik bagi semua manusia. Smith juga menekankan kembali pentingnya menggunakan kerangka *critical realist personalism* untuk memahami sifat dan motivasi manusia secara lebih akurat dan mendalam. Smith juga menyampaikan beberapa implikasi dan aplikasi dari teorinya untuk bidang-bidang seperti etika, politik, hukum, pendidikan, agama, dan lain-lain.

Dari perspektif antropologis, kepunahan negara Israel dapat diprediksikan dalam beberapa tahun lagi. Beberapa antropolog dan sejarawan memprediksi Israel akan punah tahun 2025 atau paling lambat 2030 tergantung kemajuan dari gerakan boikot produk Israeil, boikot diplomasi terhadap Israel, dukungan senjata dan amunisi dari negara-negara anti Israel dan sekutunya, serta resiliensi para pejuang Palestina (Hamass).

Indonesia memiliki sikap yang ambigu dalam isu konflik Israel dan Palestina. Di satu sisi, Indonesia mendukung hak-hak rakyat Palestina yang tertindas oleh kebijakan Israel. Di sisi lain, Indonesia juga mengakui hak Israel untuk eksis sebagai negara berdaulat. Sikap ini tercermin dalam dukungan Indonesia terhadap opsi "*two states solution*" (solusi dua negara), yaitu pembentukan dua

negara merdeka, Israel dan Palestina, yang hidup berdampingan secara damai. Namun, opsi ini dianggap tidak realistis oleh banyak pihak, karena menyangkut masalah perbatasan, pengungsi, Yerusalem, dan lain-lain. Selain itu, opsi ini juga tidak memuaskan aspirasi sebagian besar rakyat Palestina yang menginginkan kemerdekaan penuh dan pembebasan dari penjajahan Israel. Oleh karena itu, sikap Indonesia yang ambigu ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang komitmen dan konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina yang dulu telah mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia tahun 1945. []

BIBLIOGRAFI

- Ahluwalia. "Kemunduran AS di Timur Tengah". *Inilah.Com*. 19 Maret 2011.
- Bailyn, B. (1992). *The Ideological Origins of the American Revolution*. Harvard University Press.
- Bregman, Rutger. (2020). *Humankind: A Hopeful History*. Bloomsbury Publishing.
- Bregman, Rutger. (2017). *Utopia for Realists: How We Can Build The Ideal World*. Hachette UK.
- Bronowski, Jacob. (2011). *The Ascent of Man*. Random House.
- Czarniawska-Joerges, B. (1988). *Ideological Control in Non-Ideological Organizations*. Praeger Publishers.
- Hiro, Dilip. (2012). "The Essential Middle East: A Comprehensive Guide," *Yale Global*. (12/3/2012).
- Hiro, Dilip. (2010). *After the Empire: The Birth of a Multipolar World*. (Yale Center for Study of Globalization, Yale University).
- Echabe, A. Echebarria. & Fernández Guede, E. (2006). "Effects of Terrorism on Attitudes and Ideological Orientation". *European Journal of Social Psychology*.
- Garber, M. B. (1997). *Vested Interests: Cross-Dressing and Cultural Anxiety*. Psychology Press.
- Gartner, J., Harmatz, M., Hohmann, A., Larson, D., & Gartner, A. F. (1990). "The Effect of Patient and Clinician Ideology on Clinical Judgment: A Study of Ideological Countertransference". *Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training*. 27(1).

- Geddes, Linda. (2014). "Survival of the Friendliest". *New Scientist*. Vol. 224. 2998.
- Graeber, David, and David Wengrow. (2018). "How to Change the Course of Human History." Eurozine. Retrieved from <https://www.eurozine.com/change-course-human-history>.
- Graeber, David, and David Wengrow. (2021). *The Dawn of Everything: A New History of Humanity*. Penguin UK.
- Harari, Yuval N. (2014). *Sapiens: A Brief History of Humankind*. Random House.
- Hare, B. (2017). "Survival of the Friendliest: Homo Sapiens Evolved via Selection for Prosociality". *Annual Review of Psychology*. Vol. 68.
- Hare, B., & Woods, V. (2020). "Survival of the Friendliest: Understanding Our Origins and Rediscovering Our Common Humanity". *Random House Trade Paperbacks*.
- Hubbard, Barbara Marx. (2015). *Conscious Evolution: Awakening the Power of Our Social Potential*. New World Library.
- Jibriiel AR, Abu Muhammad.(2015). *Fakta Syiah Bukan Islam*. Jakarta: Arrahmah Publishing.
- Beinin, Joel. (2011). "A Historical Perspective on the Popular Uprising in Egypt", paper, *School of Humanities*, Stanford University, 3 Maret 2011.
- Beinin, Joel. (2011). "Where Does Democracy Come From? Popular Uprising and Parliamentary Elections in Egypt", paper conference, *Henry M Jackson School of International Studies*, University of Washington, 5 Maret 2011.
- Jost, J. T., Napier, J. L., Thorisdottir, H., Gosling, S. D., Palfai, T. P., & Ostafin, B. (2007). "Are Needs to Manage

- Uncertainty and Threat Associated with Political Conservatism or Ideological Extremity?". *Personality and Social Psychology Bulletin*. 33(7).
- Keltner, Dacher, Jason Marsh, and Jeremy Adam Smith, eds. (2010). *The Compassionate Instinct: The Science of Human Goodness*. WW Norton & Company.
- Laor, N., Wolmer, L., Alon, M., Siev, J., Samuel, E., & Toren, Lisa Anderson. (2011). "Demystifying Arab Spring", *Foreign Affairs*, edisi Mei-Juni 2011.
- Moodie, David. (2000). "Survival of the Friendliest." *Superfunds*. Vol. 241.
- Nash, K., McGregor, I., & Prentice, M. (2011). "Threat and Defense as Goal Regulation: From Implicit Goal Conflict to Anxious Uncertainty, Reactive Approach Motivation, and Ideological Extremism". *Journal of Personality and Social Psychology*, 101(6), 1291.
- P. (2006). "Risk and Protective Factors Mediating Psychological Symptoms and Ideological Commitment of Adolescents Facing Continuous Terrorism". *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 194(4).
- Parry-Giles, Trevor. (1994). "Ideological anxiety and the censored text: Real lives – at the edge of the union 1." *Critical Studies in Media Communication* 11.1 (1994): 54-72.
- Peller, G. (1997). Cultural imperialism, white anxiety, and the ideological realignment of Brown. *Race, Law, and Culture: Reflections on Brown Vs. Board of Education*, 190-220.
- Peterson, J. B., & Flanders, J. L. (2002). Complexity management theory: Motivation for ideological rigidity and social conflict. *Cortex*, 38(3).

- Pinker, Steven. (2011). *The Better Angels of Our Nature: The Decline of Violence in History and Its Causes*. Penguin UK.
- Punamäki, Raija Leena. (1996). "Can Ideological Commitment Protect Children's Psychosocial Well Being in Situations of Political Violence?". *Child Development* 67.1.
- Reilly, Robert. (2010). *The Closing of the Muslim Mind*.
- Alhadar, Smith. (2012). "Arab Spring dan Implikasinya di Dunia", makalah, disampaikan dalam *Seminar Reformasi Politik Timur Tengah dan Masa Depan Umat Islam*, diselenggarakan oleh Universitas Islam Asy-Syafiiyah (15 Februari 2012).
- Smith, Christian. (2019). *To Flourish or Destruct: A Personalist Theory of Human Goods, Motivations, Failure, and Evil*. University of Chicago Press.
- Spier, Fred. (2015). *Big History and the Future of Humanity*. John Wiley & Sons.
- Sunstein, C. R. (2020). "The Triumph of the Friendly: A Review of Brian Hare and Vanessa Woods, *Survival of The Friendliest*: Penguin Random House, New York". *Behavioural Public Policy*, Vol. 4, (No.2).
- Osman, Tarek. (2011). "Egypt: After Revolt, Transition", *Opendemocracy*, 9 February 2011.
- Osman, Tarek. (2010). *Egypt on the Brink: From Nasser to Mubarak*. (Yale University Press).
- Treise, D., Weigold, M. F., Conna, J., & Garrison, H. (1994). "Ethics in Advertising: Ideological Correlates of Consumer Perceptions". *Journal of Advertising*, 23(3).
- Turke, P. W. (2021). "Brian Hare and Vanessa Woods *Survival of the Friendliest*: Understanding Our Origins and Rediscovering Our Common Humanity New York: Random House 2020." Pp. 304 ISBN: 9780399590665

\$28 (hardcover). *Politics and the Life Sciences*, Vol. 40, (No. 1).

Weber, C., & Federico, C. M. (2007). "Interpersonal Attachment and Patterns of Ideological Belief". *Political Psychology*, 28(4).

Wilensky, H.L. (1974). "The Welfare State and Equality: Structural and Ideological". *Roots of Public Expenditures*. (Vol. 140). Univ of California Press.

Internet

<https://www.merdeka.com/dunia/begini-kronologi-alasan-iran-arab-saudi-selalu-tidak-akur>. Html

<https://news.idntimes.com/world/rizal/15-rentetan-pertikaian-antara-arab-saudi-dan-iran-sepanjang-sejarah-1>

<http://www.dw.com/id/sunni-dan-syiah-bersaing-sejak-dulu/a-16189563>.

http://www.kompasiana.com/makenyok/apa-latar-belakang-konflik-islam-sunni-vs-syiah-di-timur-tengah-2_559c693d169373ae05ef062a

Pada 2 April 2015, website "US News and World Report" mempublikasikan sebuah artikel berjudul "The Obama Doctrine/": "Biarlah Timteng berperang untuk perangnya sendiri" (Let the Middle East Fight Its Own Wars).

<http://www.dw.com/id/arab-saudi-ancam-jauhi-amerika/a-17178087>

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150515_dunia_saudi_as

<http://www.albayyinat.net/jwb5ta.html>

<http://www.dw.com/id/syiah-sunni-kebencian-mengakar-di-arab-saudi/a-18492316>. <http://www.kompasiana>.

com/makenyok/apa-latar-belakang-konflik-islam-
sunni-vs-syiah-di-timur-tengah-
2_559c693d169373ae05ef062a

<http://www.albayyinat.net/jwb5ta.html>

[http://www.dw.com/id/syiah-sunni-kebencian-mengakar-
di-arab-saudi/a-18492316](http://www.dw.com/id/syiah-sunni-kebencian-mengakar-di-arab-saudi/a-18492316).

[http://www.kompasiana.com/makenyok/apa-latar-
belakang-konflik-islam-sunni-vs-syiah-di-timur-
tengah-4_559c693d169373ae05](http://www.kompasiana.com/makenyok/apa-latar-belakang-konflik-islam-sunni-vs-syiah-di-timur-tengah-4_559c693d169373ae05).

BIODATA PENULIS



Dr Dedy Tabrani MSI adalah seorang perwira Bhayangkara dan scholar lulusan Program Pascasarjana Ilmu Kepolisian-Sekolah Kajian Strategis dan Global, Universitas Indonesia dan meraih Doktor (PhD) di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK-Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) Jakarta. Sebagai peneliti terorisme, perwira anti-teror dan akademisi. Kombes polisi ini pernah menjadi pembelajar/peneliti tamu di Belgia, RSIS Nanyang Technological University, NTU Singapura dan National University of Malaysia, dan Bangkok serta Australia. Dia menulis artikel di media massa dan jurnal internasional.



Herdi Sahrasad, akademisi dan intelektual di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina, dan peneliti senior Pusat Kajian Strategis Universitas Indonesia (CSS-UI, sampai 2019). Kini dia juga research associate di LP3ES Jakarta dan aktivis/peneliti di INDEMO (Indonesian Democracy Monitor pimpinan dr. Hariman Siregar). Artikel, esai dan sajaknya dipublikasikan media massa dan jurnal internasional. Dia pernah menjadi visiting Fellow/research scholar di Indiana University, USA (1989), Monash University Australia (1992), Cornell University Ithaca (1994), University of Washington Seattle dan University of California, Berkeley USA (2012), Universitas Leiden dan Marburg Jerman 2018.



Al Chaidar, akademisi dan intelektual di Fakultas Antropologi Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh. Dia adalah seorang penulis esai/penulis di surat kabar, media online dan jurnal internasional. dia sebelumnya pernah menjadi visiting Fellow di Marburg University Jerman, University of Utrecht dan KITLV Leiden, Belanda, ISEAS Singapura, RSIS NTU Singapura dan Kobe dan Tokyo University, Jepang.